

SEJARAH ISLAM MODERN

Agama dalam Negosiasi Historis Sejak Abad XIX

SEJARAH ISLAM MODERN

Agama dalam Negosiasi Historis
Sejak Abad XIX

Prof. Dr. Hasan Asari, MA



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

SEJARAH ISLAM MODERN
Agama dalam Negosiasi Historis Sejak Abad XIX

Penulis: Prof. Dr. Hasan Asari, MA

Copyright © 2019, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution
Perancang sampul: Aulia@rt

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)

Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224

Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756

E-mail: perdanapublishing@gmail.com

Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: Juni 2019

ISBN 978-623-7160-32-8

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis

In loving memory of

My Mother, Asniah Hasibuan (d. 1997)

&

My Father, Rukun Nasution (d. 1998)

TRANSLITERASI

Dalam buku ini digunakan transliterasi sebagai berikut:

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dh	ن = n
ح = <u>h</u>	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = `	ء = ´
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	<i>mad</i> = ^

KATA PENGANTAR



Puja dan puji sepenuhnya milik Allah swt.; karena izin dan perkenannya buku ini selesai ditulis; berkat bimbingan dan petunjuknya karya ini menemukan bentuknya yang sekarang. Salawat dan salam untuk Baginda Rasulullah Muhammad saw., aktor yang sukses mengorkestrakan perubahan tiada tara dalam belantara sejarah kemanusiaan. Ia tidak hanya menjadi aktor sejarah yang sangat penting; sejarah yang diukirnya menjadi fondasi bagi berabad-abad sejarah umat Islam.

Gagasan menulis buku ini berawal dari kehormatan yang diberikan kepada saya oleh Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Ilmu Sosial UIN SU Medan, untuk mengampu mata kuliah ‘Sejarah Islam Modern’, pada Semester Gasal 2018/2019. Oleh Ibu Yusra Dewi Siregar dan Ibu Titin Solihah Sumanti, Ketua dan Sekretaris Program Studi, saya diberitahu bahwa mata kuliah tersebut belum ada buku dasarnya. Hal itu kemudian terbukti ketika saya mempelajari silabus yang dikirimkan. Daftar referensi menampilkan sejumlah buku, namun belum ada yang secara spesifik ditulis berdasarkan silabus tersebut. Beberapa dari buku yang direkomendasikan malah tidak terlalu sesuai isinya dengan silabus. Maka, sejak awal mengampu mata kuliah tersebut, saya mengumpulkan referensi yang relevan dengan silabus; lalu memulai penulisan buku ini pada sekitar medio Oktober 2018.

Sebagai sebuah buku dasar, kandungan buku ini secara garis besar mengikuti silabus. Namun di sana-sini terjadi penyesuaian urutan, dan juga beberapa penambahan kecil, guna mengakomodir struktur buku. Harapan saya buku ini dapat membantu proses pembelajaran mata kuliah Sejarah Islam Modern. Harapan berikutnya adalah bahwa buku ini dapat pula dikembangkan di masa-masa mendatang. Lebih-lebih sejarah Islam modern pada dasarnya memang belumlah selesai. Segala sesuatunya masih

dalam kondisi berkembang dari waktu ke waktu; dan semua itu pada dasarnya perlu diakomodir dalam buku ini.

Sedikit catatan metodologis terasa perlu. Buku ini tidak terlalu menekankan pada penjelasan peristiwa demi peristiwa sejarah, sebagaimana lumrah dalam pendekatan *chronicles* atau *annals*. Buku ini lebih memberi penekanan pada perspektif dan struktur besar sejarah. Dengan demikian, target utamanya pun lebih pada membangun kesadaran akan struktur historis Islam zaman modern ketimbang memberi pengetahuan terperinci mengenai setiap kejadian. Sebab, hal terakhir ini rasanya tidak mungkin dicapai dalam satu semester pembelajaran. Maka buku ini lebih menekankan pada pengenalan topik-topik besar Sejarah Islam Modern. Dari situ seorang peminat dapat melanjutkan kajian yang lebih fokus, terspesialisasi, dan lebih terperinci. Buku ini menggunakan sistem penanggalan Masehi, karena mengikuti kelaziman semata. Untuk istilah-istilah Arab, digunakan sistem transliterasi sebagaimana dalam daftar yang dilampirkan.

Beberapa individu memberi kontribusi penting dalam penulisan buku ini. Ibu Yusra dan Ibu Titin yang disebut di atas, jelas telah berperan sebagai aktor yang memberi peluang saya mengajarkan mata kuliah Sejarah Islam Modern dan kemudian melahirkan gagasan menulis buku ini. Beberapa kolega dan mahasiswa saya telah menyediakan diri menjadi teman diskusi dalam memperkaya beberapa bagian dari buku ini. Anakku, M. Rifqy Irsyad telah membantu memperbaiki kualitas teknis buku ini. Istriku yang tercinta, Fujiati Hutagalung, dengan caranya sendiri berkontribusi menyediakan iklim khas yang membuat menulis buku ini menjadi jauh lebih nikmat. Kepada semua yang—dengan satu atau lain cara—telah membantu realisasi buku ini, ucapan terima kasih direkamkan dengan segala senang hati. Jika terselesaikannya buku ini melibatkan begitu banyak pihak dan individu, perbaikannya ke masa depan sangat mengharapkan partisipasi dalam bentuk tegur sapa dan kritik membangun dari para pembaca.

Akhirnya, buku ini dihantarkan ke hadapan para peminat kajian sejarah Islam. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Amin.

Medan, Juni 2019.
Wa-mâ tawfîqû illâ billâh

Hasan Asari

DAFTAR ISI

Transliterasi	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix

BAB I

SEJARAH ISLAM: Klasik, Pertengahan, dan Modern	1
A. Sejarah Islam Periode Klasik.....	1
B. Sejarah Islam Periode Pertengahan	9
C. Sejarah Islam Sejak Abad ke-19: Modern, Modernitas, dan Modernisasi	13

BAB II

DUNIA ISLAM DAN PENJAJAHAN BARAT.....	17
A. Imperialisme dan Kolonialisme	17
B. Penjajahan Barat atas Dunia Islam.....	20
C. Akibat Penjajahan	23
D. Kemerdekaan Bangsa-bangsa Muslim dari Penjajahan.....	25

BAB III

MAYORITAS MUSLIM	31
A. Negara-Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim: Kecenderungan Demografis	31
B. Mayoritas Muslim: Timur Tengah dan Afrika Utara	39
C. Mayoritas Muslim: Asia Selatan dan Tenggara	64

BAB IV

MINORITAS MUSLIM	89
A. Terbentuknya Minoritas Muslim.....	89

B. Negara-negara Berpenduduk Minoritas Muslim: Kecenderungan Demografis	92
C. Minoritas Muslim di Berbagai Negara	98
D. Minoritas Muslim di Barat: Tantangan dan Peluang	106

BAB V

KEBANGKITAN KEMBALI ISLAM: Modernisasi dan Revitalisasi	113
A. Faktor Kebangkitan Kembali Islam	114
B. Kebangkitan Kembali Islam: Pola dan Bidang Prioritas	120
C. Tema-Tema Pokok Kebangkitan Kembali Islam	126

BAB VI

ISLAM DAN ISU-ISU GEOPOLITIK KONTEMPORER	148
A. Palestina: Menanti Akhir Kolonialisme	148
B. Kashmir: Bara Konflik di Lembah Cantik	155
C. The Arab Spring: Musim Semi Berakhir Pedih	156
D. Rohingya: Menggelandang di Kampung Sendiri	161
E. Islamofobia: Ujian Daya Negosiasi Historis	162

EPILOG

ISLAM MODERN: <i>An Era in the Making</i>	167
--	-----

BIBLIOGRAFI	171
--------------------------	-----

INDEKS	177
---------------------	-----



BAB I

SEJARAH ISLAM: Klasik, Pertengahan, dan Modern

Bagian ini menjelaskan kerangka besar sejarah Islam dari periode klasik, periode pertengahan, hingga periode modern. Tujuan utamanya adalah untuk meletakkan Sejarah Islam Modern dalam konteks periodisasi Sejarah Islam secara umum. Reviu akan memfokuskan perhatian pada aspek-aspek keagamaan, sosial-politik, dan intelektual. Bagian ini juga menjelaskan secara garis besar semangat dan anasir-anasir dasar modernisasi dan modernitas.¹

A. Sejarah Islam Periode Klasik

Sejarah Islam periode klasik membentang enam setengah abad, yakni dari tahun 600 hingga tahun 1258 dalam penanggalan Masehi. Dalam rentang waktu ini, wahyu Islam diterima oleh Nabi Muhammad saw. dan kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan masyarakat dan peradaban Islam ke abad-abad berikutnya. Dalam periode klasik ini umat Islam berhasil membangun satu sistem politik yang sangat maju dan kuat. Begitu pula,

¹ Periodisasi di sini mengikuti pandangan Gustav von Grunebaum yang membagi sejarah peradaban Islam menjadi periode klasik 600-1258, periode pertengahan 1258-1800, dan masa modern, sejak 1800. Lihat trio karya Grunebaum: *Classical Islam: A History 600-1258*, terjemahan Katherine Watson (London: George Allen & Unwin, 1970); *Medieval Islam: A Study in Cultural Orientation* (Chicago: The University of Chicago Press, 1966); dan *Modern Islam: The Search for Cultural Identity* (Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1983).

umat Islam berhasil membangun satu aktivitas keilmuan yang mengagumkan, dan terbaik di zamannya. Dengan sistem politik yang mapan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, umat menjadi penguasa ekonomi dunia.

Perkembangan Keagamaan

Sejarah Islam bermula dengan peristiwa turunnya wahyu Alquran dari Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. pada 611 Masehi. Ayat-ayat Alquran turun secara berangsur dalam waktu lebih dari dua dekade: sebagiannya di Makkah yang lainnya di Madinah. Praktis, Nabi Muhammad saw. tidak pernah berhenti menerima wahyu dari Allah swt. selama karirnya: mulai dari berusia 40 tahun hingga wafatnya di usia 63 tahun. Muhammad saw. berusaha sangat keras memperkenalkan Islam kepada penduduk kota Makkah dan mengajak mereka mengimani agama baru tersebut. Satu dekade permulaan dakwahnya merupakan tahun-tahun yang sangat sulit; sedemikian sulit sehingga memaksanya untuk hijrah ke utara menuju kota Madinah (semula bernama Yatsrib).

Hijrah ke Madinah ini (622) menjadi titik balik bagi usaha dakwah Nabi Muhammad saw. Madinah ternyata lebih terbuka menyambut dakwahnya; dan sejak itu episode keberhasilan agama Islam dimulai. Beberapa tahun setelah di Madinah, mayoritas masyarakat sekitarnya telah menerima Islam dan meninggalkan agama keberhalaan mereka yang lama. Pada tahun 629 Makkah, kota yang tadinya memusuhi dan mengusirnya berhasil dia taklukkan; dan penduduknya menyatakan keislaman mereka. Maka ketika Nabi Muhammad saw. wafat pada 632 dapat dikatakan bahwa hampir seluruh jazirah Arabia telah memeluk agama Islam.

Islamisasi yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad saw. dilanjutkan oleh para sahabat dan pengikutnya. Di penghujung hidupnya, sudah ada rencana perluasan pengaruh Islam ke Syria di utara. Hal ini kemudian dilaksanakan secara antusias di masa kepemimpinan Abû Bakr al-Shiddîq (632-634) dan 'Umar ibn al-Khaththâb (634-644). Pada masa 'Umar pengaruh Islam meluas ke arah barat—yakni Yordania dan Palestina—dan kemudian berlanjut ke Mesir. Di bawah kepemimpinan 'Utsmân ibn 'Affân (644-656) pengaruh Islam mengarah ke timur mencakup wilayah Persia, bahkan mencapai perbatasan Afghanistan dan Cina.

Arus perluasan pengaruh agama Islam mengalami perlambatan pada masa kepemimpinan 'Alî ibn Abî Thâlib (656-661) yang memang tidak

terlalu stabil. Demikian juga semasa kekuasaan Dinasti Umayyah (661-750) yang harus menghabiskan energi untuk konsolidasi dan stabilisasi kekuasaannya. Akan tetapi, perluasan pengaruh agama Islam dan kepegangannya kembali mengalami akselerasi yang sangat tinggi pada masa kekuasaan Dinasti Abbasiyyah (750-1258). Dinasti Abbasiyyah memang hanya solid pada sekitar setengah dari masa kekuasaannya. Akan tetapi perluasan pengaruh Islam sama sekali tidak diperlambat oleh kurang solidnya Abbasiyyah, sejak pertengahan abad ke-10. Dinasti-dinasti yang lebih kecil—yang secara normatif mengakui supremasi Abbasiyyah di bidang agama—melakukan tugas perluasan Islam secara baik ke seluruh penjuru alam. Dalam kenyataannya, dinasti-dinasti kecil tersebut meluaskan pengaruh Islam ke sudut-sudut dunia yang hampir mustahil dijangkau secara langsung dari Baghdad.² Tidak ada statistik yang memadai tentang jumlah umat Islam pada masa puncak kejayaan ini. Namun demikian, diketahui bahwa pada tahun 629, dalam peristiwa Fath Makkah, jumlah pasukan umat Islam mencapai 10.000 orang. Lalu diketahui juga bahwa pada tahun 631 Nabi Muhammad saw. melaksanakan haji dari Madinah menuju Makkah dengan jumlah rombongan sebesar lebih dari 100.000 orang.

Dari sudut ajaran, Islam berakar pada wahyu Alquran yang kemudian dioperasionalkan dalam Hadis Nabi Muhammad saw. Alquran sendiri mulai dituliskan sejak awal turunnya, yakni ketika Nabi Muhammad saw. masih hidup. Akan tetapi kodifikasi dan pembakuannya barulah selesai dilaksanakan pada masa kepemimpinan ‘Utsmân ibn ‘Affân. Itu sebabnya Alquran yang populer di kalangan umat Islam hingga saat ini disebut sebagai Mushhaf ‘Utsmân. Adapun Hadis Nabawi baru mengalami proses autentifikasi dan sistematisasi pada abad ke-9 di tangan para peneliti semacam Imam Muhammad ibn Ismâ‘îl al-Bukhârî (w. 870) dan Imam Abû al-Husayn Muslim al-Hajjâj (w. 875), meskipun upaya-upaya awal sudah ada sebelum mereka. Intinya, sejak masa yang paling awal, agama Islam telah mempunyai sumber dasar yang terstandarisasi, yakni Alquran dan Hadis Nabawi.

Betapapun juga, persentuhan Islam dengan berbagai bangsa, budaya, dan keadaan mau tidak mau mengharuskan adanya penafsiran lebih lanjut

² Satu karya ringkas namun cukup komprehensif tentang ini, lihat C.E. Bosworth, *The Islamic Dynasties: A Chronological and Geneological Handbook* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1980).

terhadap ajaran-ajaran pokok yang ada dalam Alquran dan Hadis Nabawi. Maka seiring waktu, sejarah menyaksikan tumbuhnya berbagai perspektif dan aliran pemikiran tentang aneka aspek ajaran Islam. Ada sejumlah aliran pemikiran dalam ilmu Kalam, Fikih, Tasawuf, Politik, Akhlak, dan sebagainya. Tersedianya Alquran dan Hadis Nabawi yang sudah terstandarisasi menjadi simpul pengikat dari berbagai tafsiran dan pemikiran yang ada. Aplikasi Islam dalam berbagai konteks sosiologis dan zaman juga melahirkan berbagai pranata keagamaan.

Pelaksanaan ibadah haji pada setiap bulan Zulhijjah adalah contoh peristiwa keagamaan yang paling massif dan kolosal dalam Islam. Dari sebuah kegiatan yang melibatkan puluhan orang pada masa awal, haji terus berkembang mengikuti arus islamisasi. Prosesi persiapannya pun menjadi semakin rumit dan panjang seiring semakin luasnya geografi yang menjadi rumah umat Islam. Pada tahun 631 Nabi Muhammad saw. melaksanakan ibadah haji bersama rombongan yang berjumlah 114000 orang. Ada pula yang meriwayatkan bahwa jumlah jamaah adalah 144000 orang. Haji ini kemudian terkenal sebagai Haji Wadâ', atau Haji Perpisahan, yakni yang terakhir sebelum Nabi Muhammad saw. wafat. Dengan latar belakang padang pasir yang membentang antara Madinah dan Makkah, rombongan haji ini pastilah terlihat besar. Dapatlah dibayangkan betapa besar dan kompleksnya prosesi rombongan haji beberapa abad sesudahnya. Pada abad ke-11, jumlah jamaah haji pastilah telah mencapai ratusan ribu dan melibatkan jamaah yang berasal dari seluruh penjuru mata angin: Persia dan India di timur; Yordania, Palestina, Afrika Utara di barat; Yaman dan Mesir di selatan; Syria dan Anatolia di utara.

Perkembangan Sosial-Politik

Di antara karakter pokok agama Islam adalah perhatiannya yang berimbang kepada urusan dunia dan akhirat. Dengan demikian maka Islam memberi perhatian penuh kepada aspek-aspek pengelolaan kehidupan manusia, mulai pada tataran individual hingga pada tataran kehidupan bermasyarakat. Hal ini paling awal diilustrasikan oleh tindakan-tindakan yang diambil oleh Nabi Muhamma saw., khususnya setelah periode Hijrah ke Madinah. Sejak awal beliau memastikan ikatan yang kuat antara umat Islam kelompok Muhâjirîn (mereka yang berasal dari Makkah) dan kelompok Anshâr (mereka yang merupakan Muslim asli Madinah). Kemudian, beliau berhasil membangun aliansi dengan kelompok lain yang mendiami Madinah,

yakni kelompok Arab non-Muslim dan kelompok Yahudi. Aliansi tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis, yang populer sebagai Piagam Madinah (*Shuhuf Madînah*). Isi paling penting dari Piagam Madinah tersebut adalah kesepakatan untuk hidup bersama secara damai di Madinah, kebebasan menjalankan agama masing-masing, dan kerjasama dalam membela dan memajukan kota Madinah.³

Struktur sosial-politik umat Islam untuk pertama kali diletakkan oleh Nabi Muhammad saw. dengan beliau secara langsung menjadi pemimpin tertinggi. Jadi setidaknya setelah Hijrah, Nabi Muhammad saw. adalah pemimpin keagamaan sekaligus pemimpin politik. Inilah bentuk awal pengelolaan sosial-politik umat Islam dan dilaksanakan sepanjang hidup Nabi Muhammad saw.

Setelah Nabi Muhammad saw. wafat, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh para al-Khulafâ' al-Râsyidûn yang empat: Abû Bakr al-Shiddîq, 'Umar ibn al-Khaththâb, 'Utsmân ibn 'Affân, dan 'Alî ibn Abî Thâlib. Masing-masing mereka menjadi khalifah dengan cara yang berbeda. Keempat khalifah ini tentu saja merupakan individu-individu terdekat dengan Nabi Muhammad saw. dan karenanya memiliki kualifikasi yang sangat tinggi untuk melanjutkan kepemimpinan. Namun demikian, masing-masing menghadapi tantangan kepemimpinan yang relatif berbeda satu sama lainnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kepemimpinan di masa *Khilâfah Rasyîdah* jelas masih melanjutkan wibawa kenabian Muhammad saw. dipadukan dengan kepemimpinan kelas wahid yang merupakan hasil tempaan Nabi Muhammad saw. sendiri.

Masa akhir *Khilâfah Rasyîdah* diwarnai perbedaan pendapat yang tajam seputar wafatnya Khalifah 'Utsmân ibn 'Affân. Perbedaan pendapat tersebut sedemikian tajam hingga menimbulkan kemelut sosial yang kemudian pecah menjadi perang saudara antar faksi dalam umat Islam sendiri: Perang Jamal dan Siffin. Ini adalah perang saudara pertama dalam sejarah Islam. Rentetan peristiwa yang biasa disebut sebagai *al-Fithnah al-Kubrâ* tersebut berakhir seiring berakhirnya *Khilâfah Rasyîdah*.

Di antara peristiwa penting mengikuti berakhirnya *Khilâfah Rasyîdah* adalah peralihan sistem pengelolaan kekuasaan umat Islam. Arbitrase

³ Lebih lengkap tentang Piagam Madinah dapat dilihat dalam Shafi' al-Rahmân al-Mubârafûrî, *Al-Rahîq al-Makhtûm (The Sealed Nectar): Biography of the Noble Prophet* (Riyadh: Maktabah Dar al-Salam, 1995), h. 189-190.

(*tahkîm*) antara kubu 'Alî ibn Abî Thâlib dan kubu Mu'âwiyah ibn Abî Sufyân secara politik menguntungkan kubu Mu'âwiyah, yang kemudian mengubah sistem politik Islam menjadi sistem kerajaan atau dinasti. Sejak saat itu kepemimpinan politik menjadi objek pewarisan mengikuti garis darah; padahal hal serupa tidak pernah terjadi sebelumnya. Apa yang dimulai oleh Mu'awiyah kemudian menjadi praktik yang umum dilakukan oleh umat Islam untuk masa yang sangat panjang. Dinasti Umayyah bertahan selama hampir satu abad dengan melibatkan sejumlah 14 orang khalifah. Lalu praktik yang sama dilanjutkan oleh keluarga lain, Dinasti Abbasiyyah yang berkuasa lebih lama lagi, yakni lima abad dan melibatkan sebanyak 37 orang khalifah. Sistem kerajaan inilah yang diterapkan oleh umat Islam hingga akhir masa klasik pada pertengahan abad ke-13, seiring tumbanganya Dinasti Abbasiyyah.

Seperti sudah dikatakan di atas, secara prinsip seluruh Jazirah Arabia telah mengakui kekuasaan Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw., yang berpusat di Madinah. Pada masa *Khilâfah Rasyîdah*, perluasan kekuasaan politik Islam mengalami percepatan dan telah mencakup Syria, Irak, Persia, Mesir. Masa kekuasaan Dinasti Umayyah lebih diwarnai oleh proses konsolidasi kekuasaan dengan kecenderungan Arabisasi yang sangat kuat. Di zaman Abbasiyyah, proses penaklukan dan perluasan wilayah kembali menemukan semangat baru. Pada masa Abbasiyyah kekuasaan politik umat Islam mencakup wilayah yang sangat luas: mulai dari Sind di timur; Ifriqiyya di barat; Armenia di utara; dan Yaman di selatan. Wilayah yang sangat luas itu diorganisir ke dalam provinsi-provinsi untuk memudahkan administrasi pemerintahan. Di antara provinsi yang utama adalah Hijaz, Irak, Khurasan, Isfahan, Khwarizm, Sijistan, Syria, Mosul, Ifriqiyyah, Armenia, Yaman, dan Mesir. Secara alamiah, efektivitas kontrol Baghdad terhadap semua wilayah yang sangat luas tersebut jelas bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu lainnya. Begitu pun, menguasai wilayah yang sedemikian luas untuk waktu sedemikian lama jelas merupakan sebuah prestasi politik yang luar biasa. Tak mengherankan kalau kemudian para pengkaji menjuluki zaman kejayaan Abbasiyyah sebagai Zaman Keemasan Islam (*al-'Ashr al-Dzahabî lil-Islâm, the Golden Age of Islam*).

Wilayah kekuasaan politik yang demikian luas itu jelas mencakup jumlah bangsa dan etnis yang sangat beraneka ragam. Masih pada masa awal wilayah Islam telah meluas sedemikian rupa hingga mencakup bidang kultural yang begitu variatif. Secara garis besar kekuasaan Islam masa

klasik telah mencakup wilayah kultural Arab, Syria, Persia, Turki, Mesir, Afrika Utara, dan Andalusia. Harus pula dicatat bahwa masing-masing wilayah budaya tersebut mengandung di dalamnya berbagai sub-kultur. Kemudian, dalam masing-masing sub-kultur terkandung bahasa, agama, adat istiadat, warna kulit, serta aneka aspek perbedaan lainnya. Secara umum hubungan antara kultur berjalan secara baik, dan masing-masing mendapat peluang untuk berkontribusi terhadap kehidupan bermasyarakat. Islam klasik telah berhasil menganyam semua perbedaan tersebut ke dalam sebuah kesatuan struktur pengelolaan sosial politik yang kuat dan karenanya mampu bertahan berabad-abad.

Perkembangan Intelektual

Sejarah intelektual Islam klasik dilandasi oleh tersedianya semangat ilmiah dalam Alquran dan Hadis Nabawi. Orang hanya perlu mengingat bahwa ayat Alquran yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad saw. mengandung perintah untuk membaca: *Iqra'*. Dari perspektif historis posisi pertama ini jelas sangat signifikan. Lalu di berbagai bagian dari kitab suci Alquran dengan mudah ditemukan perintah untuk mengoptimalkan penggunaan akal-budi manusia untuk memikirkan, merenungkan, mengamati, atau meneliti segala sesuatu yang ada di alam. Kehidupan Nabi Muhammad saw. pun dengan tegas menunjukkan betapa besar apresiasinya terhadap aktivitas keilmuan. Jadi, kedua sumber utama ajaran Islam secara terpadu memberi fondasi yang sangat kokoh bagi pengembangan aktivitas intelektual oleh umat Islam.

Sejarah intelektual umat Islam diawali dengan pemeliharaan yang cermat terhadap setiap penggal ayat Alquran yang diterima oleh Nabi Muhammad saw. Sejak awal, pemeliharaan ini telah melibatkan dua modus sekaligus: penghafalan dan penulisan. Maka sejak periode paling awal di sekeliling Alquran tumbuh komunitas *huffâzh* dan juga kelompok para penulis. Kemudian, pemeliharaan ini meningkat menjadi pembakuan dan pembukuan Alquran pada masa kekuasaan khalifah 'Utsmân ibn 'Affân. Hal yang sama juga dilakukan terhadap Hadis Nabawi, meskipun pada waktu yang sedikit agak belakangan. Lalu di seputar dua sumber utama tersebut (Alquran dan Hadis) muncullah pengkajian akademik yang kemudian menumbuhkan rumpun Ilmu-ilmu Alquran (*'Ulûm al-Qur'ân*) dan rumpun Ilmu-ilmu Hadis (*'Ulûm al-Hadîts*).

Perkembangan masyarakat Islam yang sangat pesat pada masa klasik mengharuskan tersedianya penafsiran dan perumusan ajaran Islam dalam berbagai konteks dan kondisi sosiologis yang sangat dinamis. Hal ini kemudian menumbuhkan berbagai cabang ilmu pengetahuan keagamaan, yang oleh Imam Abû Hâmid al-Ghazâlî disebut sebagai kelompok Ilmu-ilmu Keagamaan (*al-'Ulûm al-Syar'iyah*). Kelompok ilmu keagamaan ini mencakup, misalnya: Ulumul Qur'an, Ulumul Hadis, Kalam, Ushul Fikih, Fikih, Tasawuf, dan Akhlaq. Melalui aplikasi ilmu-ilmu keagamaan tersebut, umat Islam berhasil membangun penafsiran ajaran Islam yang dinamis dalam menyahuti perkembangan sejarah yang ada. Sejumlah nama besar intelektual di bidang ini mewarnai sejarah intelektual Islam Klasik. Sekedar contoh dapat disebutkan: Ibn 'Abbâs dan Ibn Jarîr al-Thabarî ('Ulûm al-Qur'ân); Muhammad ibn Isma'îl al-Bukhârî dan Muslim al-Hajjâj ('Ulûm al-Hadîts); Abû al-Hasan al-Asy'arî dan Muhammad ibn al-Thayyib al-Baqillâni (Kalam); Abû Hanîfah dan Muhammad ibn Idris al-Syâfi'î (Ushûl al-Fiqh, Fiqh); Abû al-Qâsim al-Qusyayrî dan Abû Hâmid al-Ghazâlî (Tasawuf); atau Ibn Miskawayh (Akhlaq).

Semangat intelektual umat Islam zaman klasik tidaklah terbatas pada pengembangan ilmu-ilmu keagamaan semata. Alquran sendiri mengandung banyak sekali perintah untuk melakukan penelitian terhadap berbagai fenomena alam: bumi, gunung, lembah, air, binatang, lautan, langit, dan seterusnya. Perintah teologis ini kemudian berpadu dengan kebutuhan praktis perkembangan umat Islam dalam berbagai bidang, lalu membentuk faktor pendorong pengkajian ilmiah di bidang filsafat dan kealaman. Dalam proses perluasan kekuasaannya, umat Islam memasuki wilayah-wilayah yang kaya akan warisan ilmiah kuno, seperti Syria, Palestina, Mesir, dan Persia. Segera saja umat Islam menyadari potensi yang sangat besar dalam warisan Yunani dan Persia tersebut. Lalu, dengan berbagai cara umat Islam berupaya mengumpulkan warisan ilmiah tersebut.

Strategi besar yang dilakukan oleh umat Islam klasik adalah penerjemahan warisan ilmiah kuno tersebut ke dalam bahasa Arab, sehingga para peneliti Muslim memiliki akses terhadap informasi ilmiah yang ada di dalamnya. Strategi penerjemahan ini lah yang sesungguhnya menjadi faktor utama cepatnya perkembangan sains dan teknologi umat Islam klasik. Di antara sangat banyak tokoh yang mewarnai sejarah intelektual Islam klasik, beberapa yang paling populer dapat disebutkan di sini: Abû Yûsuf al-Kindî, Abû Nashr al-Fârâbî, dan Abû 'Alî al-Husayn ibn Sînâ (Filsafat); Muhammad ibn Musâ al-Khwârizmî, 'Umar al-Khayyâm (Matematika); Muhammad

ibn Zakariyyâ al-Râzî, Abû al-Qâsim al-Zahrawî, Ibn Sahl al-Balkhî (Kedokteran); Muhammad al-Hassân ibn al-Haitsam (Optik); Ibn Jâbir al-Battânî, ‘Abd al-Rahmân al-Shûffî, Ibrâhîm al-Zarqâlî (Astronomi).⁴ Kualitas pengkajian di bidang sains dan teknologi menjadi penyangga keberhasilan umat Islam mengembangkan peradaban dan membangun pengaruh yang tak mungkin diingkari dalam sejarah.

Sebagai sebuah peradaban yang maju, Islam klasik juga mengukir prestasi gemilang di bidang pengembangan ilmu-ilmu kemanusiaan, sastra, dan seni. Di tangan generasi klasik Muslim ini bahasa Arab mengalami berbagai kemajuan penting. Sastra Arab dan Persia juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Begitu juga dengan seni, khususnya di bidang seni kaligrafi, arsitektur, dan berbagai ornamen keramik. Dalam bidang ini dapat dicatatkan sejumlah nama yang paling menonjol: Abû al-Aswad al-Du‘alî dan Sibawayh (bahasa Arab); Abû ‘Utmân al-Jâhizh, Abû Nuwâs, Abû al-A‘lâ’ al-Ma‘arrî dan ‘Umar al-Khayyâm (Sastra); Khâlid ibn Abî al-Hayyâj, Ibrâhîm al-Syajarî, Yâqût al-Musta‘shimî (Kaligrafer).

Begitulah Islam Klasik memberi iklim yang sangat istimewa bagi perkembangan kajian ilmiah; dan mencatatkan berbagai prestasi gemilang di bidang ini. Banyak dari hasil kajian umat Islam masa klasik menjadi inspirasi bagi dunia dan menjadi kontribusi yang bersifat universal dan abadi.⁵ Ini berlaku, misalnya, terhadap karya-karya besar Ibn Sînâ, Ibn Rusyd, Al-Thabarî, Al-Râzî, Al-Thûsî, Al-Ghazâlî, Al-Ma‘arrî, atau ‘Umar al-Khayyâm.

B. Sejarah Islam Periode Pertengahan

Titik awal periode pertengahan (1258) merujuk pada peristiwa serangan tentara Mongol yang berhasil menguasai Bagdad. Runtuhnya Dinasti Abbasiyyah sebagai simbol kesatuan politik umat Islam jelas merupakan pukulan yang sangat keras dan mengubah arah sejarah Islam dalam semua aspeknya. Setelah beberapa abad di puncak kejayaan, kekalahan dari

⁴ Uraian lebih lengkap tentang tema ini dapat dilihat dalam Roshdi Rashed, *Encyclopedia of the History of Arabic Science* (London: Routledge, 1996) dan Ahmad Y. Hassan, dan Donald R. Hill, *Teknologi dalam Sejarah Islam*, terj. Yuliano Liputo (Bandung: Mizan, 1993).

⁵ Seyyed Hossein Nasr, *Science and Civilization in Islam* (Cambridge: The Islamic Texts Society, 1987), h. 41-58.

kekuatan luar seperti Mongol adalah sesuatu yang sulit dipersepsi. Berikut ini beberapa perkembangan mendasar yang menandai periode pertengahan sejarah Islam.

Perkembangan Keagamaan

Pada periode pertengahan Islam terus bertumbuh pada tataran kuantitatif, namun perkembangan kualitatifnya relatif melambat, bahkan mandek. Jumlah umat Islam sedunia jelas terus bertumbuh melalui proses islamisasi wilayah-wilayah yang lebih luas. Contoh paling baik dalam hal ini adalah Indonesia. Meskipun secara sporadis Islam telah mencapai Indonesia jauh sebelumnya, proses islamisasi secara lebih cepat dan massif barulah terjadi sejak abad ke-13. Hal ini didukung terutama oleh tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kerajaan Samudra Pasai (1297-1326) dan Aceh Darussalam (1496-1903). Hal yang lebih kurang sama terjadi di anak benua India. Islamisasi wilayah ini mengalami akselerasi di bawah Dinasti Delhi (1206-1526) yang kemudian dilanjutkan oleh Dinasti Mughal (1526-1857). Faktanya adalah kedua wilayah ini (Indonesia dan anak benua India) menjadi rumah hunian komunitas umat Islam terbesar di muka bumi.

Dari sudut perkembangan penafsiran ajaran, tampaknya pemikiran-pemikiran orisinal tentang berbagai aspek ajaran Islam mengalami kemandekan serius. Kemandekan ini dapat dijelaskan secara sederhana dengan mencermati masa hidup para pemuka ilmu-ilmu keagamaan. Faktanya adalah bahwa mayoritas mutlak ulama terkemuka di bidang Tafsir, Hadis, Kalam, dan Fikih hidup dan berkarya di zaman Abbasiyyah, yakni zaman klasik Islam. Mereka inilah yang menjadi pendiri berbagai aliran pemikiran dalam bidang kajiannya masing-masing. Hanya segelintir kecil saja yang dapat disebut sebagai pemikir orisinal dan pendiri aliran pemikiran dan hidup sesudah zaman klasik.

Melemahnya semangat ijtihad berdampak langsung pada kualitas pemahaman dan praktik keagamaan umat Islam masa pertengahan. Ada kecenderungan yang terus meningkat untuk mengikuti secara tidak kritis pemikiran para ulama terdahulu. Melemahnya daya kritis dalam berpikir kemudian menjelma menjadi pengagungan secara berlebihan terhadap para imam besar dan pendapat mereka. Maka kemudian mazhab-mazhab pemikiran mengalami kristalisasi; dan semakin banyak yang memandangnya sebagai versi final dari tafsir agama yang tak boleh dipertanyakan. Ijtihad

menjadi sesuatu yang ditabukan. Dalam keadaan seperti itu, semakin besar proporsi umat Islam yang beragama berdasarkan taklid buta.

Fenomena yang kerap dilabeli sebagai ‘penutupan pintu ijtihad’ ini meskipun terasa sebagai sikap umum setelah abad ke-11, tidak lah mudah untuk dicarikan landasan peristiwa historisnya. Beberapa upaya merumuskan latar belakangnya dapat disimpulkan ke dalam yang berikut ini: *Pertama*, pada abad ke-11, tampaknya banyak dari para *fuqahâ*’ sesungguhnya tidak memenuhi kualifikasi untuk berijtihad atau menjadi mujtahid. *Kedua*, ada kekhawatiran bahwa sebagian dari *fuqahâ*’ baru tidak lagi menjaga semangat yang asli, tetapi membawa motif-motif duniawi dalam menjalankan fungsinya. *Ketiga*, perkembangan berbagai aliran keagamaan yang menyimpang dari praktik asli generasi paling awal (*al-sâbiqûn al-awwalûn*) dikhawatirkan akan mendapatkan legitimasi dari para *fuqahâ*’ yang semacam itu. *Keempat*, ijtihad oleh mereka yang tidak sesuai kualifikasinya dikhawatirkan akan semakin menyuburkan *bid`ah* di tengah masyarakat Islam.⁶

Perkembangan Sosial-Politik

Runtuhnya Dinasti Abbasiyyah yang menandai akhir masa klasik Islam tidak serta merta berarti akhir dari kekuasaan umat Islam di bidang sosial politik. Hanya saja, umat Islam kehilangan satu elemen yang sangat penting, yakni kesatuan politik yang tadinya berada di tangan Dinasti Abbasiyyah dan berpusat di Baghdad. Dengan tiadanya kekuasaan pemersatu, masing-masing kekuasaan politik di wilayah tertentu kemudian mengambil inisiatif dan menentukan nasibnya masing-masing. Setelah pertengahan abad ke-13, Dunia Islam menjadi hamparan luas bertabur kerajaan-kerajaan besar dan kecil yang tidak terkoodinir satu sama lainnya. Dalam kenyataannya, akan sangat mudah untuk menemukan kasus perselisihan sengit antar dua kerajaan Islam. Perang antara sesama Muslim menjadi hal yang biasa.

Di hamparan wilayah yang tadinya bersatu di bawah Abbasiyyah maupun di luarnya muncul berbagai kerajaan yang menunjukkan supremasinya masing-masing. Di antara yang paling besar dan penting dapat disebutkan Dinasti Timuriyah (1370-1506) di Asia Tengah; Dinasti Safawiyah (1501-1732) di Persia; Dinasti Mariniyah (1196-1428) yang kemudian dilanjutkan oleh Dinasti Waththasiyah (1428-1549) di Al-Maghrib, Afrika; Dinasti

⁶ Ahmed El-Ashker and Rodney Wilson, *Islamic Economics: A Short History* (Leiden: E. J. Brill, 2006), h. 291-292.

Delhi (1206-1526) yang kemudian dilanjutkan oleh Dinasti Mughal (1526-1857) di Anak Benua India; Kerajaan Aceh Darussalam (1496-1903) di Indonesia, dan Dinasti Turki Usmani (1299-1924) di Anatolia. Dari sudut pandang pertambahan wilayah, pengaruh dan penganut, periode pertengahan ini menyumbang sangat besar melalui dinasti-dinasti tersebut. Seperti disebut di atas, pada masa inilah wilayah anak benua India dan Nusantara mengalami islamisasi besar-besaran dan kemudian menjadi rumah bagi kelompok Muslim terbesar hingga sekarang. Pada masa ini jugalah terciptanya kantong-kantong penduduk Muslim di berbagai tempat di Asia Tengah dan Eropa Timur.

Dinasti Turki Usmani jelas merupakan kekuasaan politik Islam yang paling besar selepas masa klasik Islam. Pada puncak kejayaannya, dinasti ini menguasai wilayah yang sangat luas mencakup sebagian besar wilayah Abbasiyyah ditambah dengan wilayah yang sangat luas di Asia Tengah dan Eropa Timur. Dalam kapasitas tersebut Turki Usmani dipersepsi sebagai penyambung tradisi politik khilafah yang sempat terputus pascajatuhnya Abbasiyyah di Baghdad. Tampaknya unsur pembeda yang paling menentukan dalam tragedi akhir Turki Usmani adalah pengabaian berkepanjangan terhadap pengembangan sains dan teknologi. Dalam periode pertengahan Islam, Eropa mengalami akselerasi cepat penelitian di bidang sains dan teknologi.

Tampaknya, dua lini pengembangan teknologi yang paling menentukan nasib sejarah umat Islam di penghujung periode pertengahan adalah teknologi transportasi dan teknologi militer. Penemuan mesin uap dan aplikasinya dalam bidang maritim memberi keunggulan bagi bangsa-bangsa Eropa dalam melaksanakan kegiatan ekonomi maupun militernya. Jurang keunggulan yang terus melebar pada akhirnya membawa bangsa-bangsa Muslim takluk di bawah kekuasaan bangsa-bangsa Barat. Satu demi satu bangsa-bangsa Muslim menjadi wilayah jajahan bangsa-bangsa Barat; dan ini berlangsung untuk waktu yang bervariasi dari satu kasus ke kasus lainnya.

Perkembangan Intelektual

Runtuhnya struktur politik umat Islam berimbas sangat kuat pada semangat dan pencapaian intelektual di masa pertengahan. Terjadi penurunan serius dalam semangat penelitian dan penemuan di kalangan umat Islam. Jika masa klasik ditandai dengan semangat menemukan dan menciptakan,

masa pertengahan lebih diwarnai oleh semangat konservatif, yakni memelihara yang sudah ada. Keberanian menyerap dan kemudian mengembangkan ilmu-ilmu dari luar yang menjadi ciri penting masa klasik tak lagi terlihat di masa sesudahnya. Sebagai akibatnya, masa pertengahan tidak lagi melahirkan temuan dan inovasi orisinal dalam frekuensi dan kualitas yang terjadi di masa klasik. Kebanyakan dari temuan yang ada lebih merupakan kelanjutan semata dari temuan masa sebelumnya.

Ada pula hal lain yang sangat menonjol, yakni meredupnya kajian sains dan teknologi dan semakin dominannya kajian ilmu-ilmu keagamaan. Bagian awal masa pertengahan menyaksikan pertumbuhan kuantitatif lembaga pendidikan yang mengurus ilmu-ilmu keagamaan. Dari sudut wacana keilmuan, masa pertengahan sangat didominasi oleh tradisi *syarh*; yakni kegiatan menjelaskan sebuah kitab terdahulu yang biasanya merupakan karya-karya orisinal dan monumental. Di masa ini juga berkembang tradisi *hâsyiyah*, yaitu menjelaskan lebih lanjut sebuah kitab *syarh*. Meskipun tradisi *syarh* dan *hâsyiyah* tak jarang mengandung elemen intelektual yang tinggi; tetapi dominasinya dalam kurikulum pendidikan jelas merupakan kemandekan intelektual yang serius.⁷

C. Sejarah Islam Sejak Abad ke-19: Modern, Modernitas, dan Modernisasi

Sejak awal abad ke-19, salah satu tema yang paling banyak menyita perhatian dalam kajian keislaman adalah hubungan antara Islam dan modernitas. Populernya tema ini ditunjukkan oleh banyaknya literatur yang ditulis tentangnya oleh penulis Muslim maupun penulis bukan Muslim.⁸ Tema modernisasi Islam ini menjadi objek kajian yang kontroversial

⁷ Survei singkat mengenai kegiatan pendidikan Islam pada masa kemandekan ini dapat dilihat dalam Hasan Asari, *Sejarah Pendidikan Islam: Membangun Relevansi Masa Lalu dengan Masa Kini dan Masa Depan* (Medan: Perdana Publishing, 2018), h. 61-68.

⁸ Beberapa di antaranya: Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1984); H.A.R. Gibb, *Aliran-Aliran Modern Dalam Islam*, terjemahan M. Husein (Jakarta: Rajawali, 1992); Hassan Hanafi, *Islam in the Modern World* (Heliopolis: Dar Kebaa, 2000); John Obert Voll, *Islam: Continuity and Change in the Modern World* (Boulder: Westview Press, 1982); Nurcholish Madjid, *The True Face of Islam: Essays on Islam and Modernity in Indonesia* (Jakarta: Voice Center Indonesia, 2003); dan lain-lain.

melibatkan kubu yang memandangnya sebagai keharusan di satu sisi dan kubu yang melihatnya sebagai sesuatu yang terlarang di sisi lain. Terlepas dari kontroversi yang sangat ramai pada tataran filosofisnya, tak berlebihan bila modernitas disebut sebagai faktor utama dinamika sejarah umat Islam sejak abad ke-19.

Pada bagian awal sudah disebutkan bahwa periode setelah abad ke-19 lumrah disebut sebagai periode modern dalam kajian sejarah Islam. Dalam konteks ini kata 'modern' digunakan sebagai kata sifat yang menunjukkan satu rentangan waktu sebagai kelanjutan dari periode klasik dan periode pertengahan. Maka ketika disebutkan kata 'Islam Modern', yang dimaksudkan adalah fenomena historis Islam yang terjadi sejak tahun 1800 hingga saat ini. Sebuah periode sejarah tentu saja terbentuk karena adanya perubahan yang serius dan substantif. Para pengkaji sejarah Islam pada umumnya menyarankan tiga periode dimaksud sebagai mewakili masa kemajuan pesat (klasik), masa kemandekan (pertengahan), dan kebangkitan kembali (modern). Jika gerak dinamika naik-turunnya sejarah Islam digambarkan dengan sebuah kurva, maka periode modern mewakili garis tanjakan yang kedua.

Zaman modern menjadi relevan bukan semata karena namanya yang menarik, tetapi karena kandungan substantifnya yang disebut modernitas. Dalam wacana pemikiran tentang modernitas ditemukan banyak sekali saran dan pendapat tentang nilai-nilai fundamental dari modernitas tersebut. Dalam kesempatan ini akan dikutipkan pandangan yang diramu oleh Syahrin Harahap. Beliau berpendapat bahwa manusia modern, yaitu manusia yang telah menghayati modernitas, menganut dan menerapkan nilai-nilai fundamental berikut:⁹

1. *Penghormatan terhadap akal*. Manusia modern menghormati akal sebagai anugerah Allah swt. yang membedakannya dari segala jenis ciptaan lainnya. Penghormatan di sini bermakna pemanfaatan yang sebaik-baiknya fungsi akal dalam kehidupan manusia.
2. *Jujur dan memiliki tanggungjawab personal*. Kejujuran adalah salah satu simpul akhlak yang sangat fundamental dan semua lawan dari kejujuran adalah tercela dalam sistem Islam. Kejujuran juga merupakan

⁹ Syahrin Harahap, "Universitas Islam sebagai Pusat Pembaharuan," dalam Hasan Asari (ed.) *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Memperkokoh Eksistensi, Memperluas Kontribusi* (Medan: IAIN Press, 2015), h. 158-193.

awal dari sikap dan perilaku bertanggungjawab. Seorang yang tidak jujur atau curang pada dasarnya adalah mengalihkan tanggungjawab personalnya kepada orang lain dan pada saat yang sama mengalihkan hak orang lain kepadanya.

3. *Kemampuan menunda kesenangan sesaat demi kesenangan abadi.* Kemampuan menunda adalah kompetensi mental manusia modern. Secara sistemik, kemampuan ini memungkinkan orang melihat sesuatu yang kompleks dan mampu mengelola sebuah proses berjangka panjang. Dalam konteks kesalehan, kesenangan sesaat adalah dunia dan segala dimensi material kehidupan; sementara kesenangan abadi adalah kehidupan akhirat yang kekal.
4. *Komitmen waktu dan etos kerja tinggi.* Manusia modern menghargai waktu dan mampu mengelola penghargaan itu menjadi perilaku tepat waktu, efisiensi waktu, dan prioritas waktu. Komitmen waktu yang baik harus pula diimbangi dengan etos kerja yang baik. Maka manusia modern adalah seseorang pekerja keras, pantang menyerah, dan menghargai waktu.
5. *Keyakinan akan keadilan yang merata.* Manusia modern meyakini bahwa keadilan dapat diperjuangkan sehingga merata di tengah masyarakat. Keadilan sosial, dengan demikian, menjadi salah satu cita-cita dari seorang manusia modern. Sebaliknya, manusia modern memusuhi kesenjangan sosial dan mengambil bagian dalam menguranginya.
6. *Penghargaan tinggi terhadap ilmu pengetahuan.* Manusia modern menghargai ilmu pengetahuan: mendorong pengembangannya, memanfaatkannya secara baik dalam kehidupannya. Ia tidak akan tebelenggu oleh mitos, klenik, dan aneka praktik yang tidak berbasis ilmu pengetahuan.
7. *Perencanaan masa depan.* Manusia modern, karena berpikiran jangka panjang, memiliki perencanaan tentang masa depan. Ia memiliki proyeksi masa depan dan bagaimana perannya dalam masa depan itu. Lalu ia berupaya keras dan sistematis untuk merealisasikan rencananya itu. Manusia modern tidak pasif dan menunggu garis nasib menentukan masa depannya.
8. *Penghargaan terhadap bakat dan kemampuan.* Manusia modern menghargai setiap bakat yang kemudian ditransformasikan ke dalam serangkaian kemampuan. Ia menghargai orang lain berdasarkan kompetensi dan profesionalitas.

9. *Penegakan moralitas*. Manusia modern menerapkan dan memperjuangkan penegakan moralitas, baik pada tataran personal maupun pada tataran sosial. Ia percaya bahwa moralitas adalah anasir mutlak dalam eksistensi dan perkembangan masyarakat manusia.

Dalam konteks sejarah Islam, modernitas jelas menjadi tujuan atau cita-cita utama dalam dua abad terakhir. Ini dikatakan dengan tetap mengingat adanya perbedaan-perbedaan yang terkadang sangat tajam tentang apa yang dimaksud dengan modernitas tersebut. Rangkaian pengupayaan yang dilakukan untuk mencapai modernitas itu disebut sebagai modernisasi. Modernisasi dapat diposisikan sebagai tema besar sejarah Islam periode modern. Modernisasi merambah semua aspek kehidupan umat Islam tanpa kecuali. Modernisasi berlangsung di semua wilayah Dunia Islam, meskipun dengan intensitas dan tingkat kemajuan yang saling berbeda.

Ringkas kata, sejarah Islam periode modern adalah sebuah episode sejarah di mana mimpi-mimpi modernitas diupayakan secara kolosal oleh umat Islam, dengan harapan mampu merengkuh nilai-nilai modernitas, sehingga benar-benar menjadi masyarakat Islam yang modern. Ini adalah sebuah episode yang penuh dengan dinamika menarik, mulai dari tataran perumusan pemikirannya, pilihan-pilihan aksi pengupayaannya, proses-proses negosiasi sosiologisnya, hingga variasi tingkat keberhasilannya. Hal tersebut akan dibahas secara lebih rinci pada bab tersendiri dalam buku ini.



BAB II

DUNIA ISLAM DAN PENJAJAHAN BARAT

Kesenjangan antara peradaban Barat dan Islam menjadi semakin lebar karena kemandekan yang parah di sisi Islam dan kebangkitan yang luar biasa di sisi Barat pada penghujung abad pertengahan Islam. Dominasi Barat atas hampir seluruh dunia lalu berkembang menjadi imperialisme dan kolonialisme yang menjadi tema penting sejarah dunia untuk waktu yang cukup lama. Kolonialisme Barat atas Dunia Islam ditakdirkan untuk memberi pengaruh yang sangat besar; sedemikian rupa sehingga pengaruhnya masih menjadi sebuah faktor penting dalam dinamika sejarah umat Islam hingga saat ini.

A. Imperialisme dan Kolonialisme

Istilah imperialisme dan kolonialisme sangat terkait erat. Kamus-kamus memberikan definisi yang hampir sama dan perbedaannya hanyalah pada aksentuasi semata.

Dalam *Collins English Dictionary*¹ dinyatakan, “Imperialism is a system in which a rich and powerful country controls other countries.” Untuk kata kolonialisme dijelaskan, “Colonialism is the practice by which a powerful country directly controls less powerful countries and uses their resources to increase its own power and wealth.”

¹ <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english>, pada entry ‘colonialism’ dan ‘imperialism’, diakses pada 22 Desember 2018.

*Webster's New World College Dictionary*² menjelaskan imperialisme “is the practice of a larger country or government growing stronger by taking over poorer or weaker countries that have important resources.” Sementara itu “Colonialism is the policy or practice of a wealthy or powerful nation’s maintaining or extending its control over other countries, especially in establishing settlements or exploiting resources.”

Kamus lain, *The American Heritage Dictionary of the English Language*³ menjelaskan bahwa imperialisme adalah “the extension of a nation’s authority by territorial acquisition or by the establishment of economic and political dominance over other nations.” Untuk kata kolonialisme, kamus ini memberi definisi persis sama dengan yang ada pada kamus *Webster’s*.

Dalam *The Eyclopaedia Brittanica*,⁴ imperialism adalah “... state policy, practice, or advocacy of extending power and dominion, especially by direct territorial acquisition or by gaining political and economic control of other areas.” Sumber ini juga menurunkan entri yang relevan, yakni “Western Colonialism” yang didefinisikan sebagai “... a political-economic phenomenon whereby various European nations explored, conquered, settled, and exploited large areas of the world.”

Kutipan di atas menunjukkan bahwa pada tataran makna teoretis imperialisme mungkin dapat dibedakan dari kolonialisme. Imperialisme lebih menekankan pada keinginan sebuah negara untuk memperluas kekuasaannya ke wilayah negara lain. Kolonialisme lebih spesifik mengacu pada proses pendudukan (*settlement*) sebuah negara oleh negara lain. Namun demikian sebagai peristiwa sejarah, sesungguhnya imperialisme dan kolonialisme muncul dalam satu fenomena yang sama. Jika diperhatikan, definisi-definisi di atas mengandung unsur substantif sebagai berikut:

1. *Keinginan memperluas kekuasaan*. Imperialism dan kolonialisme lahir dari keinginan kuat untuk memperluas kekuasaan. Sudah merupakan watak dari kekuasaan untuk terus ingin tumbuh dan berkembang. Satu sistem kekuasaan yang sudah sedemikian kuat menguasai satu

² <https://www.yourdictionary.com/about/websters-new-world-college-dictionary.html>, pada entry ‘colonialism’ dan ‘imperialism’, diakses pada 22 Desember 2018.

³ <https://www.ahdictionary.com/word/search.html>, pada entry ‘colonialism’ dan ‘imperialism’, diakses pada 22 Desember 2018.

⁴ <https://www.britannica.com/topic>, pada entry ‘colonialism’ dan ‘imperialism’, diakses pada 22 Desember 2018.

wilayah tertentu sering kali memperluas kekuasaannya ke wilayah yang bertetangga atau juga ke wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan asalnya. Faktor pendorong keinginan memperluas kekuasaan dapat bervariasi, mulai dari perasaan superioritas suatu bangsa atas bangsa lain, hingga faktor-faktor yang lebih praktis seperti ekonomi atau keamanan.

2. *Adanya kesenjangan.* Imperialism dan khususnya kolonialisme melibatkan adanya kesenjangan yang serius antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Tindakan sebuah negara memperluas kekuasaan ke wilayah lain hanya mungkin terjadi apabila terjadi kesenjangan yang signifikan. Kesenjangan dalam hal ini dapat terjadi pada berbagai bidang: militer, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seterusnya.
3. *Adanya eksplorasi dan penaklukan.* Negara-negara yang kuat memiliki kapasitas untuk melakukan eksplorasi atau penjelajahan ke wilayah-wilayah yang jauh. Lalu apabila sebuah wilayah menarik perhatian mereka—biasanya karena alasan sumber daya—maka negara yang kuat akan menaklukkannya. Wilayah yang lebih lemah menjadi tunduk di bawah kendali negara yang kuat.
4. *Pendudukan dan dominasi.* Pendudukan pada prinsipnya adalah kelanjutan semata dari penaklukan; di mana bangsa penakluk kemudian hadir dan menetap di daerah yang dikuasainya. Dengan berkedudukan secara langsung di wilayah taklukan, maka kemudian bangsa penjajah mendominasi segala urusan di negeri jajahannya. Dalam banyak kasus, mereka menjadi minoritas yang menentukan, dan penduduk asli menjadi mayoritas yang sama sekali tidak berpartisipasi dalam menentukan nasib diri dan negerinya sendiri.
5. *Eksplorasi sumber daya.* Sumber daya adalah daya tarik yang telah mengundang penjajahan. Banyak negara yang lemah memiliki sumber daya tertentu dalam jumlah yang sangat besar. Sementara sumber daya tersebut tidak tersedia, atau tersedia dalam jumlah yang sangat terbatas, di negeri asal bangsa penjajah. Jika diperhatikan, sesungguhnya aktivitas paling dominan dalam sejarah kolonialisme adalah eksploitasi sumber daya yang kemudian hasilnya diangkut ke negeri penjajah.

Dapat dikatakan bahwa sejarah imperialisme adalah sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Dalam wacana mengenai tema ini dikenal pembagian imperialisme menjadi imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno berkaitan dengan bangsa-bangsa yang dahulu

berhasil membangun satu sistem kekuasaan yang kuat dan kemudian meluaskan pengaruhnya ke berbagai daerah sekelilingnya, dekat maupun jauh. Di sini bisa dimasukkan imperialisme Babilonia, Romawi, atau Cina. Imperialisme kuno ini tentu saja berada di luar fokus pembahasan di dalam buku ini; yang relevan di sini adalah imperialisme dan kolonialisme Eropa modern, khususnya atas negeri-negeri berpenduduk mayoritas Muslim.

Kolonialisme modern berawal pada awal abad ke-16. Faktor pendorongnya yang paling utama adalah penemuan jalur pelayaran baru oleh bangsa-bangsa Eropa. Dua yang paling penting adalah jalur yang mengelilingi pantai selatan benua Afrika yang ditemukan pada 1488 dan kemudian penemuan Amerika pada 1492. Alur pelayaran baru tersebut kemudian menggeser posisi kekuatan maritim dari Laut Tengah ke Samudera Atlantik. Pada era sebelumnya jalur transportasi laut dari Timur ke Barat adalah melalui Lautan Hindia, lalu ke Laut Merah dan kemudian dilanjutkan dengan jalur darat ke pelabuhan-pelabuhan di pantai timur Laut Tengah (Mediterrania). Barulah dari sana dilanjutkan kembali dengan pelayaran menuju berbagai pelabuhan di Eropa. Faktor penting lain yang juga mesti dipertimbangkan adalah perkembangan teknologi maritim yang sangat pesat di kalangan bangsa-bangsa Eropa.

Kedua faktor tersebut (penemuan jalur maritim baru dan teknologi yang lebih maju) memberi keuntungan kompetitif yang sangat besar bagi bangsa-bangsa Eropa. Dalam realitas baru tersebut muncullah kekuatan-kekuatan maritim baru di Eropa, yang kemudian menjadi negara-negara imperialis dan kolonialis terbesar dalam beberapa abad kemudian. Negara-negara yang paling besar dalam kaitan ini adalah Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, dan Inggris. Sedikit agak belakangan Jerman, Italia, dan Rusia juga menjadi kekuatan yang besar.

B. Penjajahan Barat atas Dunia Islam

Perubahan peta kekuatan maritim yang disebutkan di atas terbukti menjadi sebuah faktor yang sangat penting dan menentukan sejarah dunia pada abad-abad selanjutnya. Eropa tumbuh menjadi kekuatan yang mendominasi dunia di segala penjurunya. Melalui proses yang bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya, Dunia Islam berangsur jatuh ke dalam penjajahan semenjak sekitar awal abad ke-16. Pada awal abad ke-20 hanya beberapa negeri Muslim saja yang masih dapat dikatakan sebagai wilayah yang merdeka, yaitu:

1. Turki, yang mengalami proses transisi dari Kerajaan Usmani menjadi Republik pada tahun 1924.
2. Persia, di bawah kendali Dinasti Qajar dan kemudian Dinasti Pahlavi.
3. Afghanistan, di bawah pemerintahan Raja Amanullah yang sedang melakukan modernisasi.
4. Nadj di Arabia Tengah, yang merupakan gurun yang sangat tandus dan dihuni terutama oleh suku-suku Badui Arab.
5. Hijaz, termasuk kota suci Makkah dan Madinah, yang berada di bawah kekuasaan keluarga Hasyimiyah.⁵

Di luar wilayah tersebut negeri-negeri Muslim berada di bawah cengkeraman penjajah Eropa. Secara kasar peta penjajahan dunia Islam pada sekitar 1920an adalah sebagai berikut:⁶

1. Jajahan Kerajaan Inggris, yang mencakup:
 - a. Gibraltar di Selat Gibraltar sebelah selatan Spanyol;
 - b. Malta di Laut Tengah;
 - c. Siera-Leone di Afrika Barat;
 - d. Pantai Gading di Afrika Barat;
 - e. Nigeria di Afrika Barat;
 - f. Mesir di Afrika Utara;
 - g. Somalia (sebagian) di Afrika Timur;
 - h. Kenya di Afrika Timur;
 - i. Uganda di Afrika Timur;
 - j. Jordan di Timur Tengah;
 - k. Irak di Timur Tengah;
 - l. Kuwait di Timur Tengah;
 - m. Bahrain di Timur Tengah;
 - n. Oman di Timur Tengah;
 - o. Yaman Selatan di Timur Tengah;
 - p. India di Semenanjung India;
 - q. Maladewa di Lautan India;

⁵ Ruthven, *Historical Atlas of Islam*, h. 116.

⁶ Peta kolonialisme ini dapat dilihat dalam Ruthven, *Historical Atlas of Islam*, h. 116-117.

- r. Malaysia di Asia Tenggara; dan
 - s. Brunei Darussalam di Asia Tenggara.
2. Jajahan Prancis, mencakup:
 - a. Maroko di Afrika Utara;
 - b. Algeria di Afrika Utara;
 - c. Tunisia di Afrika Utara;
 - d. Syria di Timur Tengah;
 - e. Djibouti di Afrika Timur;
 3. Jajahan Italia yang mencakup:
 - a. Libya di Afrika Utara;
 - b. Eritria di Afrika Timur;
 - c. Somalia (sebagian) di Afrika Timur;
 4. Jajahan Belanda: yaitu Indonesia di Asia Tenggara.
 5. Jajahan Rusia, bagian utara Persia di Asia.

Jika dicermati, proses terjadinya penjajahan atas negeri-negeri Muslim memiliki pola umum. Dalam kebanyakan kasus, persentuhan dunia Islam dengan bangsa Barat diawali dengan hubungan ekonomi. Pada umumnya, bangsa-bangsa Barat dengan kekuatan ekonomi, didukung oleh keunggulan teknologi kelautan dan perang menjelajah ke wilayah Muslim untuk menemukan kesempatan-kesempatan ekonomi baru. Biasanya bangsa-bangsa Eropa tertarik dengan berbagai bentuk sumber daya yang ada di wilayah Muslim dan dibutuhkan oleh bangsa-bangsa Barat. Ini misalnya terlihat dalam kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh British East India Company (BEIC) di India dan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di Indonesia. Pada mulanya, perdagangan berlangsung dalam cara-cara yang lazim dan fair. Kemudian, kekuatan modal dan teknologi yang dimiliki bangsa Barat memberi mereka kekuatan untuk memonopoli perdagangan. Pada tahapan ini, meskipun modus hubungan masih bersifat ekonomis akan tetapi sudah berjalan dalam kondisi yang tidak adil. Dua pihak yang berhubungan dagang sudah tidak lagi berdiri pada posisi yang setara.

Hubungan dagang kemudian berubah menjadi penjajahan langsung. Transformasi dari perdagangan kepada penjajahan ini dapat melibatkan satu rangkaian proses yang panjang. Biasanya, faktor pendorong utama

adalah persoalan-persoalan perdagangan yang kemudian memuncak menjadi sengketa, krisis, bahkan peperangan. Penjajahan paling tidak melibatkan empat unsur fundamental:

1. *Kehadiran bangsa penjajah secara militer.* Pada fase perdagangan, hubungan antara dua bangsa lebih banyak dalam bentuk tawar-menawar atau negosiasi berwatak sipil. Penjajahan selalu melibatkan kehadiran militer yang kemudian menerapkan pendekatan yang berbeda. Pendekatan militer dengan sendirinya meningkatkan krisis dan konflik, yang kemudian berujung pada peperangan atau sekedar penyerangan oleh bangsa Barat yang lebih kuat.
2. *Upaya menguasai pemerintahan.* Bangsa-bangsa penjajah mengontrol politik tempatan dengan bermacam cara. Adakalanya dengan menghancurkan pemerintahan yang ada dan kemudian menggantikannya dengan pemerintahan baru sesuai sistem Eropa. Cara lain adalah melalui perjanjian yang tetap mempertahankan penguasa tempatan dengan berbagai syarat yang selalu menguntungkan bangsa penjajah.
3. *Eksplorasi sumber daya.* Bangsa penjajah, dengan kemampuan teknologi yang lebih maju, melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang ada di negeri jajahan. Eksploitasi ini dapat mengambil bentuk pembelian hasil sumber daya alam, pembukaan perkebunan dalam skala besar, atau pemaksaan rakyat untuk menanam komoditas yang dibutuhkan bangsa penjajah.
4. *Kehadiran penduduk sipil yang terus bertambah.* Kedatangan penduduk asing ke daerah jajahan adalah hal yang biasa dalam penjajahan. Motif kedatangan mereka dapat bervariasi: karir, ekonomi, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan sebagainya.

C. Akibat Penjajahan

Penjajahan mengandung berbagai unsur keburukan di dalamnya: eksploitasi, pemaksaan, ketidakadilan, pengekangan, dan sebagainya. Penjajahan melahirkan akibat yang sistemik dan juga mencakup hampir semua bidang kehidupan. Berikut ini adalah beberapa akibat penjajahan pada beberapa bidang.

1. *Peperangan yang merusak.* Penjajahan hampir selalu disertai oleh peperangan antarbangsa yang menjajah dengan bangsa yang dijajah. Meskipun kekuatan antara dua bangsa sering kali berbeda sangat jauh, ketidakadilan

selalu saja mendorong bangsa terjajah untuk melawan bangsa penjajah. Perlakuan semena-mena yang berkepanjangan seringkali pada akhirnya memberikan energi yang luar biasa di pihak bangsa yang dizalimi. Dalam kenyataannya, peperangan selalu menimbulkan kerusakan di kedua belah pihak. Namun demikian, bangsa terjajah selalu menanggung kerusakan yang lebih parah; karena peperangan terjadi di tanah mereka dan juga karena ketimpangan kekuatan.

2. *Kesenjangan ekonomi*. Eksploitasi sumber daya alam oleh bangsa penjajah selalu dilaksanakan untuk kepentingan mereka. Semua hasil bumi yang ada dioptimalkan penggunaannya untuk bangsa penjajah. Sebagian dari hasil dimanfaatkan di negeri jajahan, sebagian besar lainnya diangkut menuju kampung halaman atau negeri bangsa penjajah. Itulah yang terjadi, misalnya, dengan sumber daya alam Indonesia selama di bawah penjajahan Belanda. Hal yang sama juga terjadi dengan India di bawah penjajahan Inggris. Kemajuan Eropa pada masa kolonial, sebagian besarnya, dimodali dengan penghasilan yang diangkut dari negeri-negeri jajahan. Maka jurang perbedaan ekonomi antara bangsa penjajah dan bangsa terjajah setiap waktu terus semakin melebar. Bangsa penjajah hidup berfoya-foya, bangsa terjajah hidup melarat di negerinya sendiri.
3. *Kesenjangan sosial*. Kesenjangan juga secara otomatis terjadi secara sosial. Masyarakat bangsa penjajah jelas lebih maju dalam banyak aspek dibandingkan masyarakat bangsa terjajah. Hak-hak tertentu hanya didapat oleh anggota masyarakat bangsa penjajah. Misalnya hak untuk berserikat dan membentuk partai politik; hak untuk mendapatkan pendidikan; hak untuk mendapatkan informasi; hak untuk menyampaikan pandangan; hak untuk mendapatkan layanan kesehatan; hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang patut; dan seterusnya.
4. *Merosotnya budaya lokal*. Penjajah pada umumnya mempromosikan budaya yang dibawanya dari Eropa dan menganggap rendah budaya tempatan. Oleh karenanya, penjajahan selalu melibatkan pertarungan antara budaya asing dan budaya setempat. Akan tetapi budaya tempatan hampir selalu dapat dikalahkan oleh budaya penjajah. Sebab budaya tempatan bukan saja tidak mendapat dukungan, bahkan dengan sengaja ditekan agar tidak dapat berkembang. Tidak mengherankan bahwa di setiap daerah jajahan (terlebih apabila penjajahan berjalan cukup lama) tumbuh sekelompok bangsa terjajah yang tereropakan; yakni mereka yang menerima bahkan mengagungkan budaya luar yang dibawa oleh penjajah.

5. *Penyebaran Agama Kristen*. Tak dapat disangkal bahwa penjajahan Eropa atas negeri-negeri Muslim membawa imbas tersebarnya agama Kristen yang merupakan agama bangsa-bangsa Eropa. Sebagian negeri Muslim sesungguhnya tidak asing dengan agama Kristen. Misalnya, seluruh wilayah pantai Laut Tengah pada masa sebelum Islam adalah merupakan provinsi-provinsi kerajaan Romawi, dan karenanya telah lebih dahulu mengenal agama Kristen. Meskipun mengalami islamisasi untuk waktu yang lama, di banyak tempat penganut Kristen tetap bertahan. Ini, misalnya, terlihat di Mesir, Palestina, Syria, atau Libanon. Di belahan Dunia Islam lainnya, penjajahan bangsa Eropa lah yang memperkenalkan agama Kristen. Ini lah yang terjadi di India dan Indonesia, dan berbagai bagian Afrika. Tak jarang kehadiran agama baru ini di tengah masyarakat mayoritas Muslim melahirkan persoalan-persoalan sosial-keagamaan yang pelik.

Ringkasnya, praktik penjajahan jelas merupakan sebuah tragedi kemanusiaan yang menimbulkan banyak sekali dampak negatif dalam semua bidang kehidupan. Jika disederhanakan, akibat paling serius dari penjajahan adalah perendahan terhadap kemanusiaan melalui perilaku pemerasan, ketidakadilan, dan eksploitasi yang kemudian mematikan kebudayaan bangsa terjajah.

D. Kemerdekaan Bangsa-bangsa Muslim dari Penjajahan

Pada dasarnya tidak ada bangsa yang dengan sukarela dijajah. Penjajahan adalah sesuatu kejahatan dan karenanya penjajahan selalu dipaksakan oleh satu bangsa atas bangsa lainnya. Bangsa-bangsa yang dijajah selalu mengalami kehancuran dalam segala bidang kehidupan, seperti sudah digambarkan di atas. Oleh karenanya, negeri-negeri Muslim yang terjajah mengadakan perlawanan terhadap bangsa penjajah dan mengupayakan agar lepas dari kendali dan eksploitasi yang mereka lakukan. Lama penjajahan bervariasi di berbagai negeri Muslim; mulai dari beberapa tahun, beberapa dekade, hingga berabad lamanya. Lamanya penjajahan ditentukan oleh banyak faktor yang juga bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Kemerdekaan berbagai negeri Muslim kebanyakannya dicapai pada sekitar pertengahan abad ke-20. Namun demikian ada juga sejumlah

negara yang baru merdeka di penghujung abad ke-20, terutama sekali yang merdeka dari Uni Soviet. Dalam kasus yang lebih ekstrim, ada juga kelompok Muslim yang bahkan belum merdeka hingga saat ini, seperti yang terjadi dengan Muslim Palestina dan Rohingya. Hal ini akan terlihat lebih jelas melalui Tabel 1 di bawah. Jika diperhatikan, cara bangsa-bangsa Muslim memperoleh kemerdekaan dari penjajahan melibatkan dua hal, yaitu diplomasi dan peperangan. Masing-masing negara menggunakan keduanya dalam proporsi yang berbeda-beda. Ada yang lebih banyak menggunakan diplomasi dalam proses kemerdekaannya. Ada pula yang jauh lebih banyak melibatkan peperangan.

Hal lain yang juga merupakan peninggalan penjajahan adalah bahwa setelah merdeka, kebanyakan negeri Muslim mengalami pergeseran bentuk kekuasaan. Sebagaimana sudah dijelaskan pada Bab I, pada awalnya umat Islam menerapkan sistem khilafah dalam mengelola politik kekuasaannya. Ini berjalan hingga akhir *khilâfah rasyîdah*. Lalu kemudian beralih menggunakan sistem kerajaan sejak masa Dinasti Umayyah hingga masa penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa. Ketika bangsa-bangsa Eropa menjajah Dunia Islam, proses penjajahan tersebut melahirkan pengelompokan dan batas-batas politik baru yang didasarkan terutama atas kepentingan penjajahan. Umat Islam kemudian dikelompokkan ke dalam sangat banyak satuan politik yang biasa disebut sebagai negara-bangsa (*nation-state*). Batas-batas antarnegara pun digariskan berdasarkan pola-pola penjajahan dan dengan mengakomodir kepentingan bangsa-bangsa penjajah.

Dengan pola baru ini, seorang warga negara terikat pada sebidang wilayah yang dipandang sebagai tanah airnya. Status kewargaan (*citizenship*) berlaku hanya di wilayah tersebut, yang luasnya dapat sangat bervariasi. Sebelumnya, seorang Muslim adalah warga dari *ummat* dan kewargaan berlaku di mana saja, sepanjang wilayah tertentu dikuasai oleh umat Islam. Sekedar contoh, sebelum masa penjajahan bangsa Eropa, seluruh wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina Selatan, hingga Thailand Selatan adalah merupakan wilayah yang disebut sebagai Nusantara atau Dunia Melayu. Wilayah yang luas tersebut bisa saja dikuasai oleh beberapa kerajaan, dan luas wilayahnya masing-masing dapat berubah dari waktu ke waktu lainnya. Akan tetapi semua warga yang mendiami wilayah tersebut adalah bagian dari Umat Islam yang bebas untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya.

Kemudian wilayah Nusantara jatuh ke tangan penjajah luar: Inggris

(Malaysia, Singapura, Brunei); Belanda (Indonesia, Singapura); Portugis (Malaka, Indonesia, khususnya bagian timur); Amerika Serikat (Filipina). Lalu, ketika memperoleh kemerdekaan, umat Islam Nusantara terkotak-kotak secara ketat ke dalam unit-unit negara-bangsa tersebut. Maka mereka yang menetap di wilayah kekuasaan Indonesia, misalnya, adalah warga negara Indonesia dan memerlukan berbagai prosedur untuk dapat menginjakkan kakinya di Malaysia atau Singapura. Hal yang sama berlaku untuk warga negara lain, apabila ingin datang ke Indonesia. Jika dahulu, seluruh wilayah Nusantara dihuni oleh 'Bangsa Melayu' sekarang kita mengenal Bangsa Indonesia, Bangsa Malaysia, Bangsa Singapura, dan seterusnya. Hal yang sama berlaku pula di wilayah-wilayah lain Dunia Islam, seperti di Timur Tengah, Anak Benua India, Anatolia, atau Afrika Utara.

Setelah merdeka, negara-negara Muslim menerapkan beberapa sistem pemerintahan: republik, republik Islam, monarki, dan monarki konstitusional. Republik merupakan sistem pemerintahan yang bersendikan partisipasi rakyat secara luas. Dalam sistem ini rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin politiknya dan memiliki lembaga perwakilan untuk mengambil keputusan-keputusan terkait dengan hajat orang banyak. Sistem pemerintahan republik dibangun atas tiga poros: poros pembuat hukum (legislatif); poros pelaksana pemerintahan (eksekutif); dan poros penegakan hukum (judikatif). Tiga poros ini sering disebut sebagai Trias Politika. Model ini dianut oleh banyak negara Muslim, misalnya Turki, Mesir, Irak, Turkmenistan, Azarbayjan, dan Indonesia. Republik Islam adalah sistem yang menerapkan pemerintahan rakyat dengan memedomani prinsip-prinsip Islam dan menjadikan sejarah Islam sebagai inspirasi dalam pelaksanaannya. Sistem ini misalnya dilaksanakan di Iran, Pakistan, Afghanistan, dan Mauritania. Monarki atau kerajaan jelas merupakan peninggalan sejarah Islam dari zaman klasik dan pertengahan. Dalam sistem ini, kekuasaan dipandang sebagai hak istimewa sebuah keluarga tertentu. Segala sesuatunya dijalankan menurut kemauan dari keluarga kerajaan tersebut. Dalam sistem ini tidak ada lembaga penting yang berfungsi menyalurkan pendapat rakyat awam. Sistem ini dipakai, misalnya, di Saudi Arabia, Jordania, Oman, dan Brunei Darussalam. Monarki-konstitusional menjalankan sistem kerajaan dengan landasan konstitusi yang disepakati oleh rakyat. Dalam sistem ini, kerajaan tetap dihidupkan akan tetapi pemerintahan dilakukan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh rakyat. Sistem ini diterapkan di Malaysia dan Maroko.

Setelah terbentuknya sejumlah negara dengan penduduk mayoritas Muslim di berbagai wilayah, pada 25 September 1969 sejumlah pemimpin Dunia Islam mendirikan Organisasi Kerjasama Islam (Organisation of Islamic Cooperation, *Munazhhamah al-Ta'âwun al-Islâmî*). Organisasi ini didirikan di Rabat, Maroko, bertujuan menghimpun negara-negara Muslim dan bekerjasama untuk kemajuan dan membela hak-haknya. Keanggotaan OKI dapat menggambarkan tentang negara-negara Muslim di seluruh dunia. Saat ini, OKI memiliki sebanyak 57 negara anggota.

Tabel 1
Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI)⁷

No	Nama Negara	Merdeka	Keanggotaan
1.	Kerajaan Jordania	25-05-1946	1969
2.	Republik Islam Afghanistan	19-08-1919	1969
3.	Republik Indonesia	17-08-1945	1969
4.	Republik Islam Iran	01-04-1979	1969
5.	Republik Islam Pakistan	14-08-1947	1969
6.	Republik Turki	19-05-1919	1969
7.	Republik Chad	11-08-1960	1969
8.	Republik Tunisia	20-03-1956	1969
9.	Republik Rakyat Aljazair	05-07-1962	1969
10.	Kerajaan Saudi Arabia	23-09-1932	1969
11.	Republik Senegal	04-04-1960	1969
12.	Republik Sudan	01-01-1956	1969
13.	Republik Somalia	01-07-1960	1969
14.	Republik Guinea	02-10-1958	1969
15.	Palestina (Otoritas)	-	1969
16.	Kerajaan Kuwait	19-06-1961	1969
17.	Republik Lebanon	22-11-1943	1969
18.	Republik Libya	24-12-1951	1969
19.	Republik Mali	22-09-1960	1969
20.	Kerajaan Malaysia	31-08-1957	1969
21.	Republik Arab Mesir	18-06-1953	1969
22.	Kerajaan Maroko	18-11-1955	1969

⁷ Daftar anggota diambil dari <https://www.oic-oci.org/states/?lan=en>, diakses tanggal 03 Januari 2019.

SEJARAH ISLAM MODERN: Agama dalam Negosiasi Historis Sejak Abad XIX

23.	Republik Islam Mauritania	28-11-1960	1969
24.	Republik Mozambik	25-06-1975	1969
25.	Republik Niger	03-08-1960	1969
26.	Republik Yaman	30-11-1967	1969
27.	Uni Emirat Arab	02-12-1971	1972
28.	Kerajaan Bahrain	15-08-1971	1972
29.	Republik Syria	17-04-1946	1972
30.	Republik Sierra Leone	27-04-1961	1972
31.	Kesultanan Oman	18-11-1650	1972
32.	Dawlah Qatar	18-12-1971	1972
33.	Republik Uganda	09-10-1962	1974
34.	Republik Bangladesh	26-03-1971	1974
35.	Republik Burkina-Faso	05-08-1960	1974
36.	Republik Gabon	17-08-1960	1974
37.	Republik Gambia	18-02-1965	1974
38.	Republik Guinea-Bissau	24-09-1973	1974
39.	Republik Kamerun	20-05-1972	1974
40.	Republik Irak	03-10-1932	1975
41.	Republik Persatuan Komoro	06-07-1975	1976
42.	Republik Maladewa	26-07-1965	1976
43.	Republik Jibouti	27-06-1077	1978
44.	Republik Benin	01-08-1960	1983
45.	Kesultanan Brunei Darussalam	01-01-1984	1984
46.	Republik Nigeria	01-10-1960	1986
47.	Republik Azerbaijan	28-05-1918	1992
48.	Republik Albania	29-04-1991	1992
49.	Republik Tajikistan	09-09-1991	1992
50.	Republik Turkmenistan	27-10-1991	1992
51.	Republik Kirgistan	31-08-1991	1992
52.	Republik Kazakhstan	16-12-1991	1995
53.	Republik Uzbekistan	31-08-1991	1996
54.	Republik Suriname	25-11-1975	1996
55.	Republik Togo	27-04-1960	1997
56.	Republik Guyana	26-05-1966	1998
57.	Republik Pantai Gading	07-08-1960	2001

Data mutakhir menyatakan bahwa jumlah umat Islam seluruh dunia telah mencapai sekitar 1,7 miliar jiwa dan itu merupakan hampir seperempat dari total penduduk dunia. Perlu juga dicatat bahwa sejumlah besar umat Islam saat ini hidup di negeri-negeri di luar batas-batas tradisional

pengaruh Islam. Sejumlah negara di Eropa, Amerika, dan Oceania telah menjadi rumah bagi umat Islam dalam jumlah yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Untuk itu pada bab berikutnya akan digambarkan informasi umum tentang perkembangan di berbagai negara berpenduduk Muslim.



BAB III

MAYORITAS MUSLIM

Kemerdekaan dari penjajahan Barat pada abad ke-20 bukanlah sesuatu yang eksklusif menimpa bangsa-bangsa Muslim. Dalam kenyataannya, penjajahan menimpa hampir semua wilayah dan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, Amerika, dan Australia. Penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa mengubah secara radikal struktur pengelolaan sosial dan politik bangsa-bangsa terjajah. Pascakemerdekaan, kebanyakan dari bangsa-bangsa terjajah menemukan dirinya dalam satu struktur sosial-politik baru yang biasa disebut sebagai negara-bangsa (*nation-state*). Berbagai garis batas negara baru ditetapkan dan di atasnya berkembang pula bangsa 'baru'. Umat Islam, sebagaimana juga umat lainnya, mengalami pengelompokan baru dalam batas-batas negara bangsa. Proses ini kemudian melahirkan komposisi-komposisi tertentu yang menempatkan umat Islam sebagai mayoritas (dengan berbagai gradasinya) di berbagai negara. Proses yang sama juga menjadikan umat Islam sebagai minoritas (juga dengan berbagai gradasinya) di negara-negara tertentu.

A. Negara-negara Berpenduduk Mayoritas Muslim: Kecenderungan Demografis

Setidaknya lebih dari 40 negara saat ini berpenduduk mayoritas Muslim. Negara-negara tersebut tersebar di Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Tengah, dan Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Tabel di bawah ini menunjukkan perkiraan jumlah penduduk mayoritas Muslim di berbagai negara, serta kecenderungan pertumbuhannya dalam beberapa dekade

ke depan. Tabel berikut hanya mencantumkan negara yang penduduk Muslimnya terdiri atas > 50% atau mayoritas mutlak, mengacu pada persentase pada tahun 2010. Di sini tidak dimasukkan kelompok muslim yang persentasenya tidak mencapai 50%, meskipun boleh jadi merupakan kelompok agama terbesar di satu negara.

Tabel 2
Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim¹

No	Negara	Penduduk Muslim (1990)	%	Penduduk Muslim (2010)	%	Perkiraan Muslim (2030)	Perkiraan %
1.	Morocco	24.560.000	99,0	32.381.000	99,9	39.259.000	99,9
2.	Afghanistan	12.551.000	99,8	29.047.000	99,8	50.527.000	99,8
3.	Tunisia	8.133.000	99,0	10.349.000	99,8	12.097.000	99,8
4.	Iran	56.506.000	99,6	74.819.000	99,7	89.626.000	99,7
5.	Sahara Barat	221.000	99,9	528.000	99,6	816.000	99,6
6.	Mauritania	1.968.000	99,0	3.338.000	99,2	4.750.000	99,2
7.	Yaman	12.191.000	99,0	24.023.000	99,0	38.973.000	99,0
8.	Tajikistan	4.086.000	77,1	7.006.000	99,0	9.525.000	99,0
9.	Irak	17.356.000	96,0	31.108.000	98,9	48.350.000	98,9
10.	Jordania	3.149.000	96,8	6.397.000	98,8	8.516.000	98,8
11.	Mayotte	90.000	98,0	197.000	98,8	298.000	98,8
12.	Turki	55.121.000	98,3	74.660.000	98,6	89.127.000	98,6
13.	Somalia	6.530.000	99,0	9.231.000	98,6	15.529.000	98,6
14.	Azerbaijan	5.635.000	78,1	8.795.000	98,4	10.162.000	98,4
15.	Maladewa	216.000	99,9	309.000	98,4	396.000	98,4
16.	Niger	7.801.000	98,7	15.627.000	98,3	32.022.000	98,3
17.	Comoros	431.000	98,4	679.000	98,3	959.000	98,3
18.	Algeria	24.860.000	98,3	34.780.000	98,2	43.915.000	98,2
19.	Palestina	2.111.000	98,0	4.298.000	97,5	7.136.000	97,5
20.	Saudi Arabia	16.096.000	99,0	25.493.000	97,1	35.497.000	97,1
21.	Djibouti	504.000	90,0	853.000	97,0	1.157.000	97,0
22.	Libya	4.278.000	98,0	6.325.000	96,6	8.232.000	96,6
23.	Uzbekistan	19.392.000	94,5	26.833.000	96,5	32.760.000	96,5
24.	Pakistan	112.303.000	97,0	178.097.000	96,4	256.117.000	96,4

¹ Sumber: <https://www.pewforum.org/2011/01/27/table-muslim-population-by-country>, diakses 12 April 2019.

SEJARAH ISLAM MODERN: Agama dalam Negosiasi Historis Sejak Abad XIX

25.	Senegal	7.086.000	94,0	12.333.000	95,9	18.739.000	95,9
26.	Gambia	780.000	87,0	1.669.000	95,3	2.607.000	95,3
27.	Mesir	53.884.000	93,2	80.024.000	94,7	105.065.000	94,7
28.	Turkmenistan	2.881.000	78,5	4.830.000	93,3	5.855.000	93,3
29.	Syria	11.067.000	87,0	20.895.000	92,8	28.374.000	92,8
30.	Mali	8.104.000	93,6	12.316.000	92,4	18.840.000	92,1
31.	Kosovo	1.955.000	87,8	2.104.000	91,7	2.100.000	93,5
32.	Bangladesh	102.103.000	88,3	148.607.000	90,4	187.506.000	92,3
33.	Kirgizstan	2.449.000	55,7	4.927.000	88,8	6.140.000	93,8
34.	Indonesia	154.680.000	87,2	204.847.000	88,1	238.833.000	88,0
35.	Oman	1.616.000	87,7	2.547.000	87,7	3.549.000	87,7
36.	Kuwait	1.966.000	91,7	2.636.000	86,4	3.692.000	86,4
37.	Guinea	4.241.000	69,0	8.693.000	84,2	14.227.000	84,2
38.	Albania	2.302.000	70,0	2.601.000	82,1	2.841.000	83,2
39.	Bahrain	403.000	81,8	655.000	81,2	881.000	81,2
40.	Qatar	423.000	90,6	1.168.000	77,5	1.511.000	77,5
41.	Uni Emirat Arab	1.624.000	87,0	3.577.000	76,0	4.981.000	76,0
42.	Sierra-Leone	2.042.000	50,0	4.171.000	71,5	6.527.000	73,0
43.	Sudan	19.506.000	72,0	30.855.000	71,4	43.573.000	71,4
44.	Malaysia	8.870.000	49,0	17.139.000	61,4	22.752.000	64,5
45.	Lebanon	1.784.000	60,0	2.542.000	59,7	2.902.000	59,7
46.	Burkina Faso	4.807.000	54,5	9.600.000	58,9	16.480.000	59,0
47.	Kazakhstan	8.391.000	50,8	8.887.000	56,4	9.728.000	56,4
48.	Chad	3.291.000	53,9	6.404.000	55,7	10.086.000	53,0
49.	Brunei	173.000	67,2	211.000	51,9	284.000	51,9

Tabel di atas menunjukkan bahwa kebanyakan negara mengalami pertumbuhan penduduk yang relatif stabil dari tahun 1990an hingga tahun 2010. Demikian juga dengan perkiraan pertumbuhannya dalam dua dekade ke depan (2030). Di negara-negara ini persentase umat Islam terhadap penduduk lain yang bukan Muslim akan tetap berada pada posisinya saat sekarang, atau dengan pergeseran yang tidak signifikan sama sekali.

Ada pula sejumlah negara di mana persentase penduduk Muslimnya berkembang relatif cepat. Pola seperti ini terjadi di negara-negara Tajikistan, Azarbaijan, Djibouti, Gambia, Turkmenistan, Syria, Kosovo, Bangladesh, Kirgistan, Guinea, Albania, Sierra Leone, Malaysia, Burkina Faso, dan Kazakhstan. Tampaknya alasan utama dari kecenderungan ini adalah

pertumbuhan penduduk yang tinggi. Di Asia Tengah, runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990an telah memungkinkan negara-negara berpenduduk Muslim melakukan konsolidasi dan memperkuat kembali identitas keislamannya.

Namun demikian, ada juga beberapa negara yang dalam dua dekade ke depan diperkirakan akan mengalami penurunan persentase penduduk Muslim. Dalam kelompok ini termasuk negara Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Brunei. Kelihatannya, faktor utama kecenderungan ini adalah kemajuan ekonomi dan diversifikasi kegiatan ekonomi. Semua negara tersebut adalah pemilik modal besar yang sedang melakukan industrialisasi dan pembangunan besar-besaran. Proses ini kemudian membutuhkan hadirnya pekerja dari luar dalam jumlah yang sangat besar. Dalam banyak kasus, bidang-bidang yang membutuhkan penerapan teknologi tinggi memaksa negara-negara berkembang mempekerjakan tenaga ahli tinggi dari negara-negara Barat. Hal ini misalnya terlihat dengan jelas dalam industri perminyakan Timur Tengah dan pembangunan berbagai fasilitas dengan teknologi tinggi di sana.

Komposisi dan persentase yang besar terhadap total penduduk tidak selalu bermakna bahwa di negara tersebut jumlah umat Islam sangat besar. Sering kali terjadi bahwa—karena faktor jumlah penduduk—sebuah negara dengan persentase Muslim yang lebih rendah merupakan rumah bagi umat Islam dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini, misalnya, benar dalam kasus negara India, Nigeria, Ethiopia, Cina, dan Rusia. Konsentrasi terbesar umat Islam ternyata ada di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Lima negara dengan penduduk Muslim terbesar hanya memasukkan Mesir dari negara-negara Arab. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan konsentrasi umat Islam di berbagai negara, terlepas dari persentasenya. Ranking didasarkan pada jumlah penduduk Muslim pada tahun 2010, dan hanya menampilkan negara berpenduduk Muslim 1 juta jiwa atau lebih.

Tabel 3
Negara dengan Penduduk Muslim²

No	Negara	Penduduk Muslim (1990)	%	Penduduk Muslim (2010)	%	Perkiraan Muslim (2030)	Perkiraan %
1.	Indonesia	154.680.000	87,2	204.847.000	88,1	238.833.000	88,0
2.	Pakistan	112.303.000	97,0	178.097.000	96,4	256.117.000	96,4
3.	India	100.873.000	11,7	177.286.000	14,6	236.182.000	15,9
4.	Bangladesh	102.103.000	88,3	148.607.000	90,4	187.506.000	92,3
5.	Mesir	53.884.000	93,2	80.024.000	94,7	105.065.000	94,7
6.	Nigeria	46.302.000	47,6	75.728.000	47,9	116.832.000	51,5
7.	Iran	56.506.000	99,6	74.819.000	99,7	89.626.000	99,7
8.	Turki	55.121.000	98,3	74.660.000	98,6	89.127.000	98,6
9.	Algeria	24.860.000	98,3	34.780.000	98,2	43.915.000	98,2
10.	Morocco	24.560.000	99,0	32.381.000	99,9	39.259.000	99,9
11.	Irak	17.356.000	96,0	31.108.000	98,9	48.350.000	98,9
12.	Sudan	19.506.000	72,0	30.855.000	71,4	43.573.000	71,4
13.	Afghanistan	12.551.000	99,8	29.047.000	99,8	50.527.000	99,8
14.	Ethiopia	15.827.000	32,8	28.721.000	33,8	44.466.000	33,8
15.	Uzbekistan	19.392.000	94,5	26.833.000	96,5	32.760.000	96,5
16.	Saudi Arabia	16.096.000	99,0	25.493.000	97,1	35.497.000	97,1
17.	Yaman	12.191.000	99,0	24.023.000	99,0	38.973.000	99,0
18.	Cina	16.839.000	1,5	23.308.000	1,8	29.949.000	2,1
19.	Syria	11.067.000	87,0	20.895.000	92,8	28.374.000	92,8
20.	Malaysia	8.870.000	49,0	17.139.000	61,4	22.752.000	64,5
21.	Rusia	13.634.000	9,2	16.379.000	11,7	18.556.000	14,4
22.	Niger	7.801.000	98,7	15.627.000	98,3	32.022.000	98,3
23.	Tanzania	7.637.000	30,0	13.450.000	29,9	19.463.000	25,8
24.	Senegal	7.086.000	94,0	12.333.000	95,9	18.739.000	95,9
25.	Mali	8.104.000	93,6	12.316.000	92,4	18.840.000	92,1
26.	Tunisia	8.133.000	99,0	10.349.000	99,8	12.097.000	99,8
27.	Burkina Faso	4.807.000	54,5	9.600.000	58,9	16.480.000	59,0
28.	Somalia	6.530.000	99,0	9.231.000	98,6	15.529.000	98,6
29.	Kazakhstan	8.391.000	50,8	8.887.000	56,4	9.728.000	56,4
30.	Azerbaijan	5.635.000	78,1	8.795.000	98,4	10.162.000	98,4

² Sumber: <https://www.pewforum.org/2011/01/27/table-muslim-population-by-country>, diakses 12 April 2019.

SEJARAH ISLAM MODERN: Agama dalam Negosiasi Historis Sejak Abad XIX

31.	Guinea	4.241.000	69,0	8.693.000	84,2	14.227.000	84,2
32.	Ivory Coast	4.880.000	38,7	7.960.000	36,9	12.977.000	39,9
33.	Tajikistan	4.086.000	77,1	7.006.000	99,0	9.525.000	99,0
34.	Chad	3.291.000	53,9	6.404.000	55,7	10.086.000	53,0
35.	Jordania	3.149.000	96,8	6.397.000	98,8	8.516.000	98,8
36.	Libya	4.278.000	98,0	6.325.000	96,6	8.232.000	96,6
37.	Mozambik	1.761.000	13,0	5.340.000	22,8	7.733.000	22,8
38.	Kyrgyzstan	2.449.000	55,7	4.927.000	88,8	6.140.000	93,8
39.	Turkmenistan	2.881.000	78,5	4.830.000	93,3	5.855.000	93,3
40.	Filipina	2.872.000	4,6	4.737.000	5,1	7.094.000	5,7
41.	Prancis	568.000	1,0	4.704.000	7,5	6.860.000	10,3
42.	Palestina	2.111.000	98,0	4.298.000	97,5	7.136.000	97,5
43.	Sierra-Leone	2.042.000	50,0	4.171.000	71,5	6.527.000	73,0
44.	Jerman	2.506.000	3,2	4.119.000	5,0	5.545.000	7,1
45.	Uganda	1.862.000	10,5	4.060.000	12,0	6.655.000	10,9
46.	Thailand	2.324.000	4,1	3.952.000	5,8	4.261.000	5,8
47.	Ghana	2.245.000	15,0	3.906.000	16,1	6.350.000	18,2
48.	Cameroon	2.691.000	22,0	3.598.000	18,0	5.481.000	19,2
49.	Uni Emirat Arab	1.624.000	87,0	3.577.000	76,0	4.981.000	76,0
50.	Mauritania	1.968.000	99,0	3.338.000	99,2	4.750.000	99,2
51.	Inggris	1.172.000	2,0	2.869.000	4,6	5.567.000	8,2
52.	Kenya	1.406.000	6,0	2.868.000	7,0	5.485.000	8,7
53.	Kuwait	1.966.000	91,7	2.636.000	86,4	3.692.000	86,4
54.	Albania	2.302.000	70,0	2.601.000	82,1	2.841.000	83,2
55.	Amerika Serikat	1.529.000	0,6	2.595.000	0,8	6.216.000	1,7
56.	Oman	1.616.000	87,7	2.547.000	87,7	3.549.000	87,7
57.	Lebanon	1.784.000	60,0	2.542.000	59,7	2.902.000	59,7
58.	Benin	982.000	20,5	2.259.000	24,5	3.777.000	24,5
59.	Kosovo	1.955.000	87,8	2.104.000	91,7	2.100.000	93,5
60.	Malawi	1.512.000	16,0	2.011.000	12,8	3.326.000	12,8
61.	Eriteria	1.219.000	38,6	1.909.000	36,5	2.955.000	36,5
62.	Myanmar	654.000	1,6	1.900.000	3,8	2.233.000	3,8
63.	Sri Lanka	1.383.000	8,0	1.725.000	8,5	1.876.000	8,5
64.	Gambia	780.000	87,0	1.669.000	95,3	2.607.000	95,3
65.	Italy	858.000	1,5	1.583.000	2,6	3.199.000	5,4
66.	Bosnia-Herzegovina	1.843.000	42,8	1.564.000	41,6	1.503.000	42,7
67.	Israel	634.000	14,1	1.287.000	17,7	2.135.000	23,2
68.	Nepal	688.000	3,6	1.253.000	4,2	1.705.000	4,2

69.	Qatar	423.000	90,6	1.168.000	77,5	1.511.000	77,5
70.	Spanyol	271.000	0,7	1.021.000	2,3	1.859.000	3,7
71.	Bulgaria	1.155.000	13,1	1.002.000	13,4	1.016.000	15,7
72.	Argentina	444.000	1,4	1.000.000	2,5	1.233.000	2,6

Setelah mendapatkan kemerdekaan, negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim telah berupaya keras memperbaiki keadaan. Beberapa negara Muslim berhasil meningkatkan kesejahteraan bangsanya berkat sumber daya alam yang sangat melimpah. Sebagian besar dari negara tersebut—sayangnya—masih berada dalam kelompok negara miskin atau negara berkembang, biasanya karena faktor konflik, korupsi akut, dan kesalahan pengelolaan. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan pendapatan negara dan pendapatan per kapita tertinggi dari kalangan negara mayoritas Muslim. Di dalam tabel ini dicantumkan negara dengan pendapatan per kapita di atas USD6.000 mengacu pada data tahun 2016-2017.

Tabel 4
Negara Mayoritas Muslim dengan Pendapatan Tertinggi³

No	Negara	Penduduk (2018)	Luas (km ²)	Kepadatan (orang/km ²)	Pendapatan Negara (USD)	Pendapatan/Kapita (USD)
1.	Qatar	2.716.000	11.627	233,6	159.707.000	60.510
2.	Uni Emirat Arab	10.161.000	83.600	121,5	367.800.000	39.130
3.	Kuwait	4.540.000	17.818	254,8	130.026.000	31.430
4.	Brunei	424.800	5.765	74,2	12.786.000	30.516
5.	Saudi Arabia	32.290.000	2.149.690	15,5	661.495.000	21.750
6.	Bahrain	1.583.000	770	1.981	30.211.000	20.240
7.	Oman	4.683.000	309.980	15,1	66.935.000	14.440
8.	Turki	81.312.000	785.347	103,5	882.853.000	10.930
9.	Malaysia	32.456.000	330.345	254,5	305.051.000	9.650
10.	Maladewa	410.300	298	3.566	4.175.000	9.570
11.	Kazakhstan	18.273.000	2.724.900	6,7	142.275.000	7.890
12.	Turkmenistan	5.851.000	491.210	11,9	38.266.000	6.650

³ Data diambil dan diolah dari <https://www.britannica.com>, pada entri profil negara-negara, diakses 18 April 2019.

Dari sudut kemakmuran ekonominya, negara-negara Timur Tengah tampaknya mengalahkan negara-negara mayoritas Muslim lainnya, berkat pendapatan mereka dari sektor minyak dan gas alam. Yang menonjol adalah bahwa semua negara dalam tabel tersebut adalah negara dengan penduduk yang kecil (dengan pengecualian Turki). Jika dijumlahkan, keseluruhan penduduk dari 12 negara di atas adalah 194,7 juta jiwa, atau sekitar 11% dari perkiraan 1,7 miliar Muslim di dunia saat ini. Ini berarti bahwa kemakmuran ekonomi baru dinikmati oleh sebagian kecil saja dari umat Islam. Negara-negara dengan penduduk Muslim yang paling besar ternyata masih merupakan negara berkembang dengan pendapatan per kapita yang rendah. Berikut adalah kondisi pendapatan per kapita lima negara Muslim dengan penduduk terbesar:

Tabel 5
Pendapatan Per Kapita Lima Negara Muslim Terbesar⁴

No	Negara	Penduduk (2018)	Luas (km ²)	Kepadatan (orang/km ²)	Pendapatan Negara (USD)	Pendapatan/Kapita (USD)
1.	Iran	81.714.000	1.628.771	43,6	438.368.000	5.400
2.	Indonesia	267.162.000	1.910.931	139,4	934.965.000	3.540
3.	Mesir	97.886.000	996.603	96,9	293.380.000	3.010
4.	Pakistan	214.249.000	881.889	242,9	311.667.000	1.580
5.	Bangladesh	164.631.000	147.570	3.074,1	242.754.000	1.470

Total penduduk dari lima negara dalam tabel di atas melebihi 825 juta jiwa; dan itu adalah merupakan 46% dari total umat Islam sedunia. Negara-negara lain dengan penduduk yang lebih kecil juga berada dalam kondisi ekonomi yang lebih kurang sama. Beberapa negara yang terlibat dalam konflik berkepanjangan dapat saja jauh lebih buruk keadaan ekonominya. Dua tabel terakhir menunjukkan bahwa mayoritas mutlak umat Islam masih berada dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Di sisi lain jelas sekali adanya ketimpangan ekonomi yang sangat parah dalam tingkat perkembangan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Jika pendapatan per kapita negara Qatar dibandingkan dengan

⁴ Data diambil dan diolah dari <https://www.britannica.com>, pada entri profil negara-negara, diakses 18 April 2019.

pendapatan per kapita Indonesia, maka Muslim di Qatar memiliki penghasilan 17 kali lebih besar. Jika dibandingkan dengan Bangladesh, perbandingan tersebut menjadi sekitar 41 kali.

B. Mayoritas Muslim: Timur Tengah dan Afrika Utara⁵

Sesuai dengan proses historis lahir dan perkembangan awal Islam, konsentrasi terbesar umat Islam berada di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara (biasa disingkat sebagai MENA: Middle East and North Africa). Maka di bawah ini akan diturunkan gambaran perkembangan beberapa negara dari wilayah tersebut. Diharapkan bahwa beberapa negara tersebut dapat mewakili secara kasar perkembangan Islam modern di wilayah tersebut.

1. Kerajaan Saudi Arabia

Nama resmi dari negara ini adalah Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'ūdiyyah, Kingdom of Saudi Arabia. Sesuai namanya (*mamlakah*) negara ini mengambil bentuk kerajaan. Kepala pemerintahan adalah seorang Raja; saat ini adalah Raja Salmân ibn 'Abd al-'Azîz al-Sa'ūd (sejak 2015-). Ibu kota Saudi Arabia adalah Riyadh yang merupakan kampung halaman Bani Sa'ud. Kota penting lainnya adalah Makkah, Madinah, Jeddah, dan Tha'if. Bahasa resmi Arab Saudi adalah bahasa Arab; sementara agama resmi negara adalah agama Islam.

Secara geografis Saudi Arabia terletak di Timur Tengah, menempati sekitar 80% dari Jazirah Arabia. Negara ini berbatasan dengan Jordania, Irak dan Kuwait di sebelah utara; dengan Teluk Persia, Qatar, Uni Emirat Arab dan Oman di sebelah timur; dengan Yaman di selatan; dan dengan Teluk Aqabah di sebelah barat. Luas wilayah Saudi Arabia adalah 2.149.690 km² yang sebagian besarnya merupakan wilayah gurun dan gersang. Dalam perkiraan tahun 2017 jumlah penduduk Saudi Arabia adalah 32.290.000 jiwa. Secara umum penduduk Saudi Arabia adalah murni orang Arab, keturunan dari bangsa Arab yang sudah menempati Jazirah tersebut sejak zaman dahulu. Begitupun, kedatangan bangsa-bangsa

⁵ Sebagian besar dari deskripsi negara-negara Muslim diadopsi dari berbagai entry dari *Encyclopaedia Britannica*, via <https://www.britannica.com>, diakses sepanjang Oktober 2018 hingga Mei 2019.

luar yang sudah berlangsung sejak lama, khususnya dari Afrika, Persia dan India, terlihat juga dalam ciri-ciri fisik penduduk negeri ini.

Hijaz sebagai tempat dua kota suci umat Islam—Makkah dan Madinah—adalah bagian terpenting dari Saudi Arabia. Sebagai tanah tempat lahirnya Islam, sejarah Islam di Saudi Arabia adalah sama panjangnya dengan sejarah Islam itu sendiri. Secara kasar, wilayah Saudi Arabia yang sekarang tidak lah terlalu jauh berbeda dengan wilayah Islam pada penghujung masa hidup Nabi Muhammad saw. Keberadaan dua kota suci membuat wilayah Hijaz tidak pernah kehilangan relevansi historisnya sepanjang sejarah; sekurang-kurangnya sepanjang berkaitan dengan sejarah keagamaan. Relevansi politik Hijaz, sesungguhnya segera menurun dengan berakhirnya masa *khilâfah rasyîdah* pada tahun 661 atau dengan berakhirnya masa kepemimpinan ‘Alî ibn Abî Thâlib. Segera setelah pemerintahan berada di tangan Dinasti Umayyah, pusat kekhilafahan dipindahkan ke Damaskus; lalu kemudian ke Baghdad oleh Dinasti Abbasiyyah; dan terakhir ke Istanbul oleh Dinasti Usmani. Dengan demikian, secara politik Hijaz menjadi sebuah provinsi; sebuah provinsi yang sangat penting dari sudut keagamaan. Keadaan ini berlaku hingga memasuki masa modern, ketika Bani Sa‘ûd menguasai Jazirah Arab dan mendirikan negara Saudi Arabia.

Saudi Arabia modern berawal pada sekitar pertengahan abad ke-18, ketika Muhammad ibn Sa‘ûd menjalin aliansi dengan seorang tokoh pemurni Islam bernama Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhâb. Saat itu Muhammad ibn Sa‘ûd hanyalah seorang pemimpin lokal yang dihormati sejumlah suku di sekitar Wadi Hanifa, tak jauh dari Riyadh. Di sisi lain, Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhâb adalah pendiri paham Wahabiyyah, yang kemudian menjadi paham resmi Saudi Arabia hingga sekarang. Kampung Dir‘iyyah, yaitu kampung asal Muhammad ibn Sa‘ûd, dipilih sebagai pusat kekuasaan. Aliansi ini berkembang pesat dan mengupayakan untuk menundukkan suku-suku yang hidup di wilayah sekitar Riyadh. Ketika Muhammad ibn Sa‘ûd wafat ia digantikan oleh anaknya ‘Abd al-‘Azîz, yang relatif berhasil dalam memperluas wilayah kekuasaan dan juga stabilitas wilayahnya.

Dengan kekuatan yang semakin mantap di Arabia bagian tengah, ‘Abd al-‘Azîz mulai meluaskan pengaruhnya ke daerah Hijaz, yang secara administratif berada di bawah kendali Dinasti Turki Usmani. Pada Maret 1803 pasukan Saudi-Wahhabi menguasai Makkah dan mengusir Syarif (gubernur) kota tersebut ke Jeddah, meskipun kemudian mereka dikalahkan dan diusir dari Makkah oleh kekuatan Dinasti Usmani. ‘Abd al-‘Azîz wafat

pada 1803 dan digantikan anaknya Sa'ûd ibn 'Abd al-'Azîz. Sa'ûd berhasil membangkitkan kekuasaan dan pada 1807 sempat menguasai Makkah-Madinah.

Setelah sempat meredup, kekuatan Bani Sa'ûd kembali meningkat di bawah kepemimpinan Turkî ibn 'Abdullah, cucu dari Muhammad ibn Sa'ûd. Pada tahun 1824, mereka menaklukkan Riyadh dan menjadikannya sebagai pusat kekuasaan. Dari Riyadh mereka terus mengembangkan kekuasaannya, hingga menjadi kelompok yang dominan di wilayah Najd dan Hijaz. Untuk waktu yang cukup lama kedua wilayah tersebut dikelola secara terpisah. Pada 23 September 1932 diumumkan penyatuan keduanya di bawah nama resmi Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'ûdiyyah dengan raja 'Abd al-'Azîz ibn Sa'ûd. Tanggal tersebut lah yang ditetapkan sebagai hari jadi Kerajaan Saudi Arabia. Kerajaan ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan sangat penting dalam geo-politik Dunia Islam maupun universal.

Keagamaan

Sebagaimana disebutkan di atas, Saudi Arabia memiliki agama resmi negara yaitu Islam. Data-data resmi kerajaan secara umum menyatakan bahwa 100% penduduk Saudi Arabia adalah Muslim. Namun demikian, data-data yang lebih independen mencatat adanya sejumlah kecil (+ 1-3%) penduduk beragama lain: Kristen dan Hindu.⁶ Sekitar 90% penduduk Saudi Arabia adalah Muslim Sunni dan selebihnya merupakan Muslim Syi'ah. Penduduk Syi'ah terkonsentrasi di oasis Al-Ahsa' dan al-Qathif di bagian timur ke arah Teluk Persia. Paham keagamaan Sunni yang dikembangkan dan dilaksanakan di Saudi Arabia disebut sebagai Wahabiyah, mengambil nama dari Muhammad ibn 'Abd al-Wahhâb (w. 1787) yang merupakan peletak dasar paham keagamaan Bani Sa'ûd sejak awalnya.

Wahabiyah menafsirkan ajaran Islam secara ketat dan sederhana; dan secara umum memiliki kemiripan dengan mazhab Ahmad ibn Hanbal dan pemikiran Ibn Taymiyah (w. 1328). Misalnya, Saudi Arabia hanya

⁶ Seringkali perbedaan ini muncul dari persoalan banyaknya pekerja asing di Saudi Arabia, yang sebagiannya tinggal semi-permanen di sana. Di antara penyumbang tenaga kerja besar ke negara ini adalah Filipina, yang penduduknya mayoritas beragama Katolik. Anak benua India juga merupakan penyumbang tenaga kerja yang signifikan yang sebagiannya beragama Hindu.

mengakui dua hari besar Islam, yakni Idul Fitri dan Idul Adhha. Di negeri ini tidak diperingati kelahiran Nabi Muhammad saw. (*mawlid al-Nabi*). Tasawuf tidak dibenarkan untuk dipraktikkan secara publik. Demikian juga dengan bentuk makam: tidak dibenarkan membangun makam yang dekoratif. Makam-makam di Baqi' yang bertetangga dengan Masjid Nabawi di Madinah tidak lebih dari sekedar gundukan tanah dan satu atau dua batu di ujungnya. Penganut agama lain hanya boleh menjalankan ibadah agamanya atau merayakan hari besar keagamaannya secara tertutup.

Dua kota suci (Makkah dan Madinah) menjadikan Saudi Arabia memiliki posisi sangat penting dalam kehidupan beragama seluruh umat Islam. Ka'bah di Masjidil Haram adalah kiblat dalam salat umat Islam. Makkah dan sekitarnya juga menjadi tempat pelaksanaan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Sementara itu di Madinah terdapat Masjid Nabawi, makam Nabi Muhammad saw., makam sejumlah besar sahabat Nabi, dan berbagai situs sejarah Islam awal. Ini membuat Madinah memiliki relevansi yang sangat tinggi secara keagamaan dan sekaligus kebudayaan. Hal ini membuat kerajaan Saudi Arabia memikul tanggung jawab besar memelihara kedua kota suci, sekaligus melayani umat Islam yang datang ke sana untuk beribadah dan berziarah. Fungsi ini membuat Saudi Arabia digelar sebagai Pelayan Dua Kota Suci (*Khâdim al-Haramayn*). Jumlah jamaah haji yang harus dilayani oleh kerajaan ini terus berkembang dari musim haji ke musim berikutnya. Pada tahun 2018, tercatat bahwa jumlah jamaah haji mencapai 2.371.675 orang.⁷ Oleh karenanya, kerajaan Saudi Arabia secara terus menerus melakukan perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan ibadah haji. Ini belum lagi termasuk jamaah umrah yang berlangsung terus menerus sepanjang tahun. Dari Indonesia saja jumlah jamaah umrah tahun 2018 mencapai 1,1 juta jamaah, dengan kecenderungan terus meningkat dari waktu ke waktu.⁸

⁷ <https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/18/08/28/pe69h6366-saudi-rilis-jumlah-jamaah-haji-selama-24-tahun-terakhir>, diakses 29 Januari 2019.

⁸ <https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/18/12/18/pjxy9w320-jamaah-umrah-2018-11-juta-orang-2019-diprediksi-bertambah>, diakses 29 Januari 2019.

Politik

Kerajaan Saudi Arabia modern, sejak 1932 telah dipimpin oleh tujuh orang raja. Raja yang sekarang berkuasa adalah Salmân ibn 'Abd al-Azîz al-Sa'ûd menggantikan raja Abdullah yang wafat pada Januari 2015. Raja Salmân diangkat menjadi raja pada usia yang sudah tua, 79 tahun; karenanya ia segera mengangkat Putra Mahkota yang kelak akan menggantikannya. Semula posisi itu diberikan kepada sepupunya Muhammad ibn Nayef, tetapi pada bulan Maret 2015 dialihkan kepada anaknya sendiri, Muhammad ibn Salmân. Seperti lazimnya sebuah kerajaan, peralihan kekuasaan selalu melibatkan intrikasi, bahkan konflik, internal antara sesama calon penguasa. Sejauh ini penguasa Saudi Arabia masih merupakan anak-anak dari 'Abd al-'Aziz ibn Sa'ud yang wafat pada 1953. Muhammad ibn Salmân adalah yang pertama menjadi Putra Mahkota dari generasi cucu pendiri Saudi Arabia modern.

Politik Saudi Arabia sangat banyak tergantung pada posisinya sebagai penjaga Tanah Suci Islam. Di satu sisi, posisi demikian membuatnya 'istimewa' secara religius; di sisi lain hal tersebut membuat semua negeri Muslim tanpa kecuali berhajat pada hubungan baik dengan Saudi Arabia. Stabilitas politiknya juga sangat tergantung pada kemampuan keluarga Sa'ûd mengendalikan suku-suku Arabia yang jumlahnya cukup banyak. Saudi Arabia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan dunia Barat, khususnya Inggris dan Amerika Serikat. Kedekatan ini dilatarbelakangi terutama oleh modernisasi teknologi militer, ekonomi (khususnya eksplorasi minyak dan gas), serta keamanan regional.

Pada awal kebangkitan Bani Sa'ûd mereka mendapat bantuan dari Inggris dalam menghadapi Dinasti Usmani. Hubungan tersebut terus berlanjut dalam banyak hal, termasuk dalam proses modernisasi angkatan bersenjata. Saat ini, Saudi Arabia memiliki angkatan bersenjata dengan perlengkapan paling mutakhir di wilayah Timur Tengah bersama dengan Israel dan Iran. Sampai era 1970an pemasok utama teknologi dan perlengkapan militer Saudi Arabia adalah Inggris. Belakangan, peranan itu tampaknya digeser oleh Amerika Serikat. Kedekatan militer Saudi Arabia dengan Barat belakang sangat jelas ketika terjadinya Perang Teluk pada 1990-1991. Ketika Amerika melancarkan serangan besar-besaran ke Irak, Saudi Arabia dijadikan sebagai pangkalan operasionalnya.

Ekonomi

Sejarah eksplorasi dan *lifting* minyak di Saudi Arabia juga menjadi jembatan kedekatan negara ini dengan Barat, khususnya Amerika Serikat. Pada awal 1930an Saudi Arabia memutuskan untuk memberikan konsesi pengelolaan minyaknya kepada perusahaan Amerika CASOC (Californian Standard Oil Company). Pada tahun 1944 perusahaan ini berubah menjadi ARAMCO (Arab American Oil Company) dan pada tahun 1988 menjadi milik penuh Saudi Arabia serta menjadi SAUDI ARAMCO. Antara lain karena Perang Dunia I dan II, perkembangan industri minyak di Saudi Arabia barulah berkembang pesat setelah tahun 1950an. Perkiraan menyatakan bahwa negara ini menyimpan sekitar 20% cadangan minyak dunia.

Maka jadilah industri minyak menjadi tulang punggung utama ekonomi Saudi Arabia hingga saat sekarang ini. Di samping minyak negeri ini juga sangat kaya gas cair dan sudah dieksplorasi secara besar-besaran. Belakangan diketahui pula beberapa jenis sumber daya alam lainnya seperti emas, perak, dan besi. Kerajaan Saudi Arabia saat sedang giat-giatnya mengupayakan diversifikasi ekonomi dengan membangun berbagai lini ekonomi baru, termasuk pertanian dan industri. Haji dan ziarah juga merupakan sumber ekonomi yang sangat penting bagi Saudi Arabia. Jumlah jamaah haji dan umrah terus meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana sudah diindikasikan di atas. Sejauh ini Saudi Arabia mencatatkan diri sebagai salah satu negeri yang makmur dengan pendapatan per kapita mencapai US\$21.750 (perhitungan tahun 2016).

Sosial-Kebudayaan

Kehidupan sosial budaya di Saudi Arabia jelas diwarnai secara kental oleh unsur Arab dan Islam. Dengan paham keagamaan Wahabiyah, wajah keislaman di negeri ini cenderung sederhana dan konservatif. Pakaian laki-laki pada umumnya adalah pakaian panjang (*tsawb*, *disydasyah*) yang kemudian dipadu dengan penutup kepala yang diikat dengan *'iqal*. Warna dominan pakaian pria adalah putih. Wanita Muslimah rata-rata menggunakan pakaian panjang (*'abaya*) dan menggunakan penutup kepala-rambut (*hijab*) dan juga penutup wajah (*niqab*, *burka*). Pakaian wanita di luar rumah sangat didominasi oleh warna hitam. Secara umum perempuan tidak terlibat dalam urusan publik. Semula, wanita Saudi dilarang membawa kendaraan sendiri dan di negeri ini tidak dibenarkan teater film. Kedua

aturan tersebut baru dicabut pada tahun 2018, sebagai bagian dari kebijakan reformasi Raja Salman.

Ikatan kekebalan dan kekerabatan sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan sosial masyarakat Saudi Arabia. Hal ini berakar dalam tradisi yang sudah sangat lama di tengah masyarakat Arab. Belakangan dengan peningkatan penghasilan yang sangat tinggi (terutama berkat minyak dan gas) sedang tumbuh kelas menengah baru yang terdidik dan menguasai teknologi tinggi di berbagai bidang. Kelompok ini mulai mengkritisi semakin jauhnya jarak antara keluarga kerajaan dan penguasa dengan rakyat jelata. Meskipun secara prinsip kritik sosial tidak dibenarkan, belakangan ada indikasi kuat bahwa masyarakat sipil di negeri ini sedang mulai tumbuh menguat.

Sistem pendidikan di Saudi Arabia lebih kurang mengikuti pola yang umum berlaku dengan tingkatan Sekolah Dasar Saudi Arabia, Menengah Pertama (3 tahun), Menengah Atas (3 tahun), dan Perguruan Tinggi (Sarjana 4-6 tahun; Magister 2 tahun; Doktoral 3 tahun). Di antara kampus terkenalnya adalah Universitas Madinah, Universitas King Abd 'Aziz, dan Universitas King Sa'ud. Saudi Arabia juga membiayai generasi mudanya untuk sekolah ke luar negeri, khususnya belajar teknologi ke negeri-negeri yang lebih maju.

Saudi Arabia mempekerjakan banyak sekali tenaga kerja asing dalam berbagai sektor. Untuk sektor dengan keahlian tinggi, banyak melibatkan tenaga kerja dari Barat; sementara untuk sektor layanan dan yang kurang formal lebih banyak menggunakan tenaga dari negeri-negeri Asia. Kehadiran pekerja asing tersebut turut memperkaya nuansa kehidupan sosial-budaya di Saudi Arabia.

2. Republik Arab Mesir

Nama resmi negara ini adalah Jumhûriyyat Mishr al-'Arabiyyah, Arab Republic of Egypt. Negara berbentuk republik ini dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Pada saat ini (2019) presiden adalah 'Abd al-Fattâh al-Sîsî dan perdana menteri adalah Mushtafâ Madbulî. Ibu kota Mesir adalah Kairo (Al-Qâhirah), kota kemenangan. Di antara kota-kota penting lainnya adalah Ismailiyah, Iskandariyah, Asyuth, dan Port Said. Bahasa resmi Mesir adalah bahasa Arab dan agama resminya adalah Islam.

Secara geografis, Mesir berada di timur laut benua Afrika, menempati lembah sungai Nil dan Delta. Negara ini berbatasan dengan Laut Tengah di utara; Israel dan Laut Merah di arah timur; Sudan di selatan; dan Lybia di arah barat. Total luas wilayahnya mencapai 996.603 km². Jumlah penduduk Mesir berdasarkan perkiraan 2017 adalah 93.262.000 jiwa. Secara etnis, mayoritas mutlak bangsa Mesir adalah merupakan percampuran dari bangsa asli Afrika dengan etnis Arab. Namun demikian Mesir merupakan wilayah yang sejak lama menjadi panggung sejarah yang melibatkan berbagai macam etnis Eropa, Asia dan Afrika. Dengan demikian pengaruh dari persentuhan tersebut dapat juga terlacak di beberapa bagian Mesir. Agama terbesar penganutnya adalah Islam yakni 90% penduduk; sementara selebihnya adalah penganut agama Kristen Koptik (*Qibthiyah*).

Republik Mesir modern adalah fase terbaru dari bentuk pemerintahan Mesir. Penaklukan Mesir dan islamisasinya bermula pada awal abad ke-7, masih di era kepemimpinan ‘Umar ibn al-Khaththâb. Berbagai dinasti Islam silih berganti menguasai Mesir—Thûlûniyyah, Ikhshîdiyyah, Fâthimiyah, Ayyûbiyyah, Mamâlik—sebelum jatuh ke tangan penjajahan Barat. Prancis menaklukkan Mesir pada tahun 1789-1805; lalu setelah masa kekuasaan Muhammad Ali (hingga 1882), Mesir jatuh ke tangan Inggris dari 1882-1922. Kemudian, masa Kerajaan Mesir (1922-1952) berakhir melalui sebuah revolusi perampasan kekuasaan pada 23 Juli 1952 yang dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser. Mesir baru resmi menjadi sebuah republik satu tahun berikutnya, Juli 1953. Di antara penerus Nasser yang relatif terkenal adalah Anwar Sadat dan Husni Mubarak.

Kegamaan

Sebagaimana disebut di atas, 90% penduduk Mesir adalah Muslim Sunni dan 10% adalah penganut Kristen. Mayoritas mutlak dari penduduk Kristen Mesir adalah dari gereja Kristen Ortodoks Koptik, salah satu sekte tua dalam Kristen yang terbentuk pada sekitar abad ke-5. Dalam tampilan sehari-hari (bahasa, pakaian, dan cara hidup) mereka tak mudah dibedakan dari umat Islam Mesir. Umat Kristen banyak tinggal di Kairo dan wilayah tengah Lembah Nil seperti Asyuth, Minya, dan Qina.

Di Mesir terdapat Jami‘ah al-Azhar (Universitas Al-Azhar) yang merupakan

lembaga pendidikan tinggi paling tua di muka bumi.⁹ Al-Azhar didirikan oleh penguasa Dinasti Fâthimiyah pada awal abad ke-10. Pada masa modern, para Syaikh dari lembaga ini sering sekali dimintai pendapat atau fatwa tentang berbagai masalah keagamaan Islam di seluruh penjuru dunia. Wibawa dan otoritas keagamaan Al-Azhar sangat tinggi, karena lembaga ini memiliki alumni yang berpengaruh di seluruh dunia Islam. Lembaga ini juga mempunyai program pengiriman para guru bidang agama dan bahasa Arab ke berbagai negeri Islam untuk diperbantukan di lembaga-lembaga pendidikan. Meskipun sejak 1960an Al-Azhar telah melakukan pembaruan dan mengajarkan berbagai cabang sains teknologi di dalamnya, wibawanya yang paling tinggi tetap saja di bidang ilmu-ilmu agama Islam.

Mesir dikenal sebagai mata air pembaruan pemahaman agama Islam zaman modern. Di negeri ini kita mengenal sejumlah nama-nama tokoh pembaru yang pemikirannya kemudian turut membentuk wacana dan pergerakan pembaruan Islam di seantero Dunia Islam. Di antara yang paling terkenal dari para pembaru tersebut adalah Jamaluddin al-Afghani (w. 1897), seorang pemikir dan aktivis pembaruan asal Afghanistan, namun menghabiskan kebanyakan karirnya di Mesir. Dapat juga ditambahkan nama Muhammad Abduh (w. 1905) yang sangat terkenal melalui bukunya *Risâlah Tawhîd* dan juga upaya-upaya pembaruannya yang dilaksanakan di Al-Azhar. Rasyid Ridha (w. 1935) yang merupakan murid dari Abduh meninggalkan pengaruh yang sangat luas di kalangan umat Islam modern, khususnya melalui karya besarnya *Tafsîr al-Manâh*.¹⁰

Aspek lain sejarah keagamaan Mesir modern adalah didirikannya Jamâ'at al-Ikhwân al-Muslimîn pada tahun 1928 oleh Hasan al-Bannâ. Ikhwân al-Muslimîn bertujuan memperjuangkan Islam yang didasarkan pada nilai-nilai Alquran dan Hadis Nabawi, sebagai respon terhadap degradasi kehidupan umat Islam di Mesir. Degradasi ini berasal dari kebodohan terhadap ajaran agama Islam dan juga oleh pengaruh Inggris yang sangat dominan. Dalam perkembangannya, Ikhwân al-Muslimîn berkembang pesat hingga menjadi sebuah kelompok transnasional dan berpengaruh

⁹ Untuk sejarah Universitas Al-Azhar dapat dilihat Muhammad 'Abd al-Mun'im Khafaji, *Al-Azhar fi Alf 'Amm* (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1988).

¹⁰ Lebih lengkap tentang pembaruan Islam di Mesir dapat dilihat dalam Hasan Asari, *Modernisasi Islam: Tokoh, Gagasan, dan Gerakan* (Bandung: Citapustaka Media, 2002), bab V.

sangat kuat di sebagian besar dunia Islam, bahkan dunia Barat. Pengaruh Ikhwân al-Muslimîn ini dapat dilihat baik sebagai paham keagamaan maupun sebagai sebuah organisasi.

Politik

Perebutan kekuasaan antara kekuatan baru yang dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser melawan Kerajaan Mesir yang beroperasi di bawah pengaruh Inggris melahirkan Mesir dalam bentuk republik hingga saat sekarang ini. Beberapa partai politik yang sudah ada sebelumnya dibubarkan dan kemudian oleh Nasser diganti dengan Persatuan Nasional pada 1957. Belakangan partai ini berganti nama menjadi Persatuan Sosialis Arab pada tahun 1964. Partai ini mendominasi kehidupan politik Mesir selama lebih dari satu dekade.

Atas dorongan Pan-Arabisme dan nasionalisme, pada tahun 1958 Mesir dan Syria pernah membentuk negara gabungan dengan nama Republik Arab Bersatu (United Arab Republic, Al-Jumhûriyyah al-'Arabiyyah al-Muttahidah). Namun penggabungan ini tidak bertahan lama, karena pada 1961 Syria memutuskan untuk keluar; namun Mesir tetap menggunakan nama tersebut untuk beberapa waktu. Pada tahun 1971 Mesir, Syria dan Lybia sekali lagi mencoba membentuk Negara Federasi Republik Arab, namun tidak pernah terealisasi. Pada tahun 1977 Presiden Mesir Anwar Sadat menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Hal ini membuat Mesir dikucilkan oleh negara-negara Arab dan keanggotaannya di Liga Arab sempat dibekukan.

Presiden Mesir adalah kepala negara yang memegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang juga merupakan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Berdasarkan konstitusi, presiden Mesir mesti merupakan orang asli kelahiran Mesir dan berusia sekurang-kurangnya 40 tahun. Masa jabatan presiden adalah 4 tahun dan seorang presiden dapat menjabat dua kali berturut-turut. Presiden menunjuk seorang Perdana Menteri dan menteri-menteri (kabinet) untuk menjalankan roda pemerintahan. Program pemerintah mesti mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat yang memegang kekuasaan legislatif dipilih oleh rakyat, dan dapat memakzulkan Presiden dengan dukungan dua pertiga suara. Presiden hanya dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat melalui referendum yang melibatkan rakyat.

Pemerintahan daerah Mesir terdiri atas provinsi (*muhâfazhah*), kabupaten (*markaz*), dan kecamatan (*qaryah*). Di setiap level terdapat dua dewan yang dipilih dan pelaksana pemerintahan yang ditunjuk. Hingga tahun 1960an pemerintahan pusat Mesir sangat dominan dan pemerintahan daerah hampir tidak memiliki kebebasan sama sekali. Akan tetapi keadaan tersebut belakangan sudah mulai berubah. Mesir terbagi ke dalam 27 provinsi; lima di antaranya adalah kota dengan status provinsi, yakni Kairo, Al-Iskandariyah, Port Said, Suez, dan Luxor (al-Aqshar).

Ikhwân al-Muslimîn yang sudah disebutkan di atas adalah elemen penting dalam perjalanan sejarah politik Mesir kontemporer. Sebab, dalam perjalanannya organisasi yang semula fokus pada pembaruan bidang agama tersebut terlibat dalam politik praktis. Kelompok ini misalnya dianggap bertanggungjawab terhadap upaya pembunuhan Presiden Gamal Abdel Nasser pada tahun 1964; yang kemudian membuat Ikhwân al-Muslimîn ditekan oleh pemerintah. Ideolog kelompok ini, Sayyid Quthb, menulis beberapa buku terkenal, antara lain *Ma'âlim fi al-Tharîq* dan *Jâhiliyyat al-Qarn al-'Isyrîn*. Setelah beberapa lama dipenjara, Quthb akhirnya dieksekusi pada tahun 1966.

Setelah beberapa lama menjadi gerakan bawah tanah Ikhwân al-Muslimîn mengalami kebangkitan kembali pada 1980an. Kali ini sasaran utama Ikhwân al-Muslimîn adalah reformasi sosial politik; yakni ingin menciptakan pemerintahan yang berbasis nilai-nilai Islam. Gerakan ini menguat sepanjang 1990an baik di Mesir maupun di berbagai negara. Ikhwân al-Muslimîn terlibat intensif dalam protes-protes yang kemudian menjatuhkan Presiden Husni Mubarak pada 2011. Partai yang mereka bentuk, Partai Kebebasan dan Keadilan (*Hurriyyah wa al-'Adâlah*) memenangi pemilihan umum dan berhasil mendudukkan Muhammad Mursî sebagai presiden. Kepemimpinan Mursi tidak bertahan lama, karena ditentang oleh kelompok Militer, kelompok Sekularis, dan juga kelompok Kristen. Pada Juli 2013 ia digulingkan oleh tentara dan kemudian digantikan oleh Jenderal 'Abd al-Fattâh al-Sîsî. Ikhwân al-Muslimîn kemudian kembali mendapatkan perlakuan keras dan bahkan diumumkan sebagai organisasi teroris. Pemimpin dan sejumlah besar anggotanya ditangkap dan sebagian terbunuh dalam prosesnya.

Ekonomi

Perekonomian Mesir secara tradisional sangat berbasis pertanian dengan terutama bergantung pada lembah subur di sisi-sisi sungai Nil. Tanaman yang paling diandalkan adalah kapas dan gandum. Pada tahun 1970 Mesir menyelesaikan pembangunan Bendungan Aswan untuk mendukung irigasi pertaniannya. Bendungan yang sangat besar tersebut berhasil meningkatkan produktivitas dan sekaligus juga memperluas area pertanian yang dapat diairi secara baik. Di samping itu, bendungan yang ada juga membangkitkan efektivitas perikanan penduduk yang ada di sekitarnya. Belakangan, Mesir juga memulai proyek pembangunan permukiman di wilayah-wilayah gurun, guna mengurangi konversi lahan pertanian yang subur menjadi wilayah hunian.

Seiring modernisasi Mesir memulai industrialisasi dan berinvestasi di bidang komunikasi. Pada awalnya, Mesir banyak bergantung pada bantuan dan investasi dari negara-negara Arab yang kaya minyak. Akan tetapi, perjanjian damai dengan Israel (1977) mengakibatkan hubungan buruk dengan negara-negara Arab. Belakangan investasi di Mesir banyak berasal dari negara-negara Barat dan juga Jepang. Meskipun mengalami kemajuan ekonomi pada penghujung abad ke-20, keterbatasan tanah subur berbanding dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk tidak memungkinkan perbaikan tingkat kemakmuran yang signifikan. Belakangan, kekacauan yang menjatuhkan Presiden Husni Mubarak pada tahun 2011 melahirkan ketidakpastian politik. Hal ini sedikit banyaknya memengaruhi kinerja perekonomian Mesir. Perhitungan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa pendapatan per kapita rakyat Mesir adalah US\$3.460.

Sosial-Budaya

Jika menilik sejarah kuno, Mesir telah mengalami pasang surut dan kontak kebudayaan yang sangat bervariasi. Namun demikian dalam kenyataan kontemporer kehidupan sosial budaya Mesir sangat bercorak Arab-Islam. Seperti di kebanyakan wilayah Timur Tengah, masyarakat Mesir memiliki dua kategori kultur: kultur perkotaan dan pedesaan. Kota-kota besar Mesir sangat terbuka dan terpengaruh oleh budaya luar, khususnya Barat dalam banyak dimensinya. Adapun daerah pedesaan, yang kebanyakannya merupakan gurun, lebih mencerminkan nilai-nilai tradisional. Mesir merayakan hari-hari besar keagamaan seperti Id al-Adha' dan Id al-Fitri serta mawlid Nabi saw. secara ekspresif. Umat Kristen

merayakan hari besarnya seperti Natal, mengikuti tradisi Kristen Koptik, jatuh pada tanggal 07 Januari. Secara kultural kerukunan umat beragama sangat kuat.

Di atas sudah dikatakan bahwa Al-Azhar adalah sebuah institusi keagamaan yang sangat penting di Mesir dan memiliki jaringan pengaruh di seluruh dunia Islam. Keberadaan lembaga pendidikan tersebut membuat Mesir menjadi tujuan bagi banyak sekali pencari ilmu pengetahuan dari seluruh penjuru dunia, yang pada gilirannya turut memberi kekayaan kehidupan sosial dan kebudayaan Mesir. Melalui jaringan Al-Azhar Mesir juga mempunyai pengaruh religio-kultural yang sangat luas. Banyak pemimpin sosial keagamaan, bahkan politik, di Dunia Islam yang merupakan alumni dari perguruan tinggi tertua dunia tersebut.

Dengan akar sejarah yang sangat kuat pada bidang pendidikan dan kebudayaan Mesir tidak hanya dikenal sebagai lumbungnya para ulama papan atas; akan tetapi juga merupakan rumah bagi para penulis di bidang sastra. Beberapa penulis dari Mesir terkenal pada tingkat internasional karena karya-karyanya. Di antara nama-nama besar di bidang ini adalah Muhammad Husayn Haikal, Nawal el-Saadawi, dan Najib Mahfuzh. Pada tahun 1988, nama terakhir bahkan memenangi hadiah Nobel bidang sastra. Ia memperoleh kehormatan tersebut berkat karya-karyanya: *Bayn al-Qashrayn (Di Antara Dua Istana)*, *Qashr al-Syawq (Istana Hasrat)*, *Al-Sukkariyyah (Gudang Gula)* yang kemudian kerap dikenal sebagai *Trilogi Kairo*, di tulis pada rentang 1956-1957. Dapat pula ditambahkan di sini, kontribusi kultural dan capaian para penyanyi dari Mesir. Tampaknya, meskipun ada beberapa nama lain, Umm Kultsum adalah yang paling masyhur dalam bidang ini. Lagu-lagunya tak saja terkenal di Dunia Islam akan tetapi juga mendapat apresiasi di belahan Barat.

Mesir menjadi salah satu tujuan wisata sejarah yang sangat terkenal berkat keberadaan piramida. Bangunan piramida merupakan peninggalan arkeologis dari masa sekitar abad ke-3 dan ke-2 sebelum Masehi. Saat itu Mesir dan sekitarnya dikuasai oleh keluarga Firaun. Daya tarik terhadap piramida ini benar-benar kuat tidak saja pada tataran kultural dan rekreasional, akan tetapi juga pada tataran akademik dan ilmiah. Kajian mengenai Mesir, yang lebih banyak berkenaan dengan masa lalunya, biasa disebut sebagai Egyptology.

3. Republik Islam Iran

Nama resmi negara ini adalah Jomhûrî-ye Islâmî-ye Êrân (Islamic Republic of Iran). Sesuai namanya, Iran adalah negara berbentuk Republik Islam. Maknanya, prinsipnya pemerintahan dan kekuasaan berada di tangan rakyat banyak dan dijalankan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Di Iran dikenal sebuah istitusi bernama Pemimpin Tertinggi yang saat ini (sejak 1989) adalah Ayatullah Ali Khamenei yang menggantikan Ayatullah Ruhullah Khumayni (w. 1989). Kepala negara dan pemerintahan ada di tangan seorang presiden, yaitu Hassan Rouhani (2019). Di antara presiden sebelumnya adalah Mahmud Ahmadinejad, Muhammad Khatami, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, dan Ali Khamenei. Ibu kota Iran adalah Tehran, sebuah kota di selatan pegunungan Elburz. Di antara kota-kota penting lainnya adalah Isfahan, Qum, Kirman, dan Yazd. Bahasa resmi Iran adalah bahasa Farsi dan Islam merupakan agama resmi negara.

Secara geografis, Republik Islam Iran terletak di barat daya Asia. Negeri ini lebih banyak terdiri atas dataran gurun dan pegunungan yang gersang, dengan total luas wilayah 1.628.771 km². Iran berbatasan di utara dengan Turkmenistan, Laut Kaspia, dan Azarbayjan; di timur dengan Afghanistan dan Pakistan; di selatan dengan Teluk Persia dan Kuwait; dan di barat dengan Irak, Syria, dan Turki. Berdasarkan data tahun 2017 penduduk Iran mencapai 81.714.000 jiwa. Secara etnis, penduduk Iran sangat heterogen; terdapat sejarah panjang migrasi berbagai bangsa ke Persia sejak masa yang sangat lama. Pada saat sekarang yang paling signifikan adalah etnis-etnis Persia, Azarbaijan, Kurdi, dan Luri. Etnis-etnis minoritas mencakup Gilaki, Baluchi, Turki, Afghan, Arab, dan Armenia. Secara alamiah, bahasa dan budaya minoritas berkembang di samping bahasa resmi Iran yaitu bahasa Persia (Farsi).

Republik Islam Iran yang ada sekarang merupakan hasil dari sebuah evolusi sejarah yang sangat panjang. Persia yang merupakan salah satu pusat peradaban kuno ditaklukkan oleh pasukan Islam pada abad ke-7 dan kemudian mengalami islamisasi. Islam tampaknya merupakan elemen luar yang paling permanen pengaruhnya terhadap Iran. Sepanjang sejarah Islam klasik, berbagai kelompok penguasa memerintah di Persia. Di masa modern Iran jatuh ke bawah dominasi Inggris Raya untuk beberapa waktu. Pada pertengahan 1920an Dinasti Pahlavi berkuasa dengan dukungan dan pengaruh kekuatan Barat. Meskipun ada beberapa upaya pembaruan dan pembangunan, akan tetapi keadaan Iran di bawah

Pahlavi tidak mengalami kemajuan berarti. Ini diperparah lagi dengan kebiasaan keluarga kerajaan yang hidup berfoya-foya di atas penderitaan rakyat banyak.

Meskipun ada beberapa kelompok yang anti terhadap rezim Pahlavi, pada akhirnya di tahun 1979, dukungan massa yang paling besar mengarah kepada kepemimpinan Ayatullah Khomeini. Pemimpin agama yang sangat disegani ini sebelumnya telah diasingkan oleh rezim Pahlavi, semula ke Irak lalu kemudian ke Prancis. Pada Februari 1979 Ayatullah Khomeini kembali ke Iran dari Prancis dan kemudian berhasil menggantikan pemerintahan kerajaan dengan Republik Islam yang mengkombinasikan pemerintahan oleh rakyat dengan teokrasi. Secara prinsip kebijakan tertinggi tentang Iran ditentukan oleh pemimpin agama tertinggi dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat. Tanggal 01 April 1979 ditetapkan sebagai hari nasional Republik Islam Iran.

Keagamaan

Mayoritas penduduk Iran adalah penganut Islam Syi'ah Itsnâ 'Asyariyyah, yakni mencapai lebih kurang 92% dari total penduduk.¹¹ Penganut Syi'ah terutama berasal dari etnis Persia dan sebagian orang Arab. Sekitar 7% dari penduduk Iran adalah penganut Islam Sunni; mereka terutamanya adalah dari etnis Kurdi dan Turki. Di Iran juga terdapat kelompok kecil penganut agama Kristen, Yahudi, dan Zoroaster. Bagian terbesar dari minoritas Kristen di Iran adalah penganut Kristen Ortodoks Armenia. Sebagian lainnya adalah pengikut Kristen Nestorian dan Protestan. Kaum Zoroaster merupakan sisa penganut agama kuno di Iran. Sejumlah kaum Yahudi meninggalkan Iran setelah revolusi 1979, terutama didorong oleh ketidaknyamanan hubungan antara Iran dan Israel.

Perkembangan Syi'ah modern terutama bergantung kepada dua hal. *Pertama*, harapan dan penantian akan kembalinya Imam kedua belas yang *ma'shûm*, yaitu Imam Muhammad al-Mahdi, untuk memimpin umat.

¹¹ Secara umum kaum Syi'ah terbagi dua, yaitu Syi'ah Dua Belas dan Syi'ah Sab'iyyah (biasa juga disebut sebagai Syi'ah Ismâ'iliyah). Perbedaan ini pada pokoknya merujuk pada jumlah Imam yang diakui oleh masing-masing kelompok. Pembahasan mengenai ini dapat dilihat lebih jauh dalam Mojan Momen, *An Introduction to Shi'i Islam: The History and Doctrines of Twelver Shi'ism* (New Haven and London: Yale University Press, 1985).

Kedua, penghormatan yang sangat tinggi terhadap sebelas Imam sebelumnya. Sesungguhnya, ketiadaan imam tersebut secara tidak langsung telah membantu menguatkan posisi ulama di tengah masyarakat Iran. Terlebih lagi setelah Revolusi 1979 yang kemudian melahirkan negara demokrasi-teokratis yang memberi peran sangat sentral kepada para ulama. Para pemuka agama (*ulamâ, mullah*) di Iran memiliki semacam hierarki longgar yang terutama didasarkan pada pengakuan sejawat sesama ulama dan diperkuat oleh pengakuan sosiologis dari umat. Meskipun tidak terlembagakan secara formal dan baku, tingkatan-tingkatan tersebut dapat diidentifikasi pada tataran sosiologis.

Untuk menjadi seorang ulama—mirip dengan di belahan lain Dunia Islam—seseorang harus mendapatkan pendidikan tradisional di *madrasah*. Pendidikan di lembaga ini berporos pada kajian Ilmu Fikih dan Ilmu Kalam beserta ilmu-ilmu pendukungnya. Di Iran, mereka yang mahir dalam dua ilmu ini biasa disebut sebagai *mullah* (Arab, *mawlâ*). Para *mullah* ini mengisi sebagian besar posisi-posisi keagamaan di tengah masyarakat. Seorang ulama yang ilmunya lebih tinggi dan mendapatkan pengakuan luas biasa disebut sebagai *Hujjat al-Islâm* (Pembela Islam), yang kemudian dapat naik pula menjadi seorang *Mujtahid* (ulama yang mampu berijtihad, merumuskan Fikih secara mandiri). Para ulama pada tingkatan yang tertinggi sering kali diberi gelar kehormatan seperti *Âyatullâh*, *Âyatullâh al-Uzhmâ*, *Âyatullâh Rûhullâh*. Pada sisi hubungannya dengan umat Islam, seseorang yang sangat tinggi kualitas keulamaannya dapat mencapai status *Marj'-'e Taqlîd* (Arab, *marja' al-taqlîd*), yaitu seorang Model Panutan.

Belakangan di Iran tumbuh kecenderungan di kalangan umat awam untuk memilih seorang *Marj'-'e Taqlîd* sebagai model yang secara eksklusif diikuti dalam menjalankan agama. Pilihan ini bersifat bebas dan biasanya didasarkan pada keyakinan akan kualitas ilmu agama seorang *Marj'-'e Taqlîd* serta tingkat penerimaan dan reputasinya di tengah masyarakat. Praktik semacam ini tidak ditemukan dalam masyarakat Muslim Sunni, bahkan tidak juga di kalangan Syi'ah yang lebih awal.

Sebagai satu-satunya negara berbasis Islam Syi'ah, Iran secara aktif memberikan dukungan terhadap kelompok-kelompok Muslim Syi'ah yang ada di berbagai belahan dunia lain. Dukungan tersebut dapat dilihat misalnya di Irak, Libanon, Suriah, dan Yaman. Dukungan yang diberikan meliputi banyak hal, mulai dari keagamaan hingga persoalan politik dan ekonomi. Kegiatannya mendukung perkembangan Syi'ah di berbagai negara

membuatnya sering disebut sebagai eksportir ideologi Syi'ah. Dalam konteks ini posisi Iran sering dipersandingkan dan dipertentangkan dengan kegiatan Saudi Arabia mendukung penyebaran paham Wahabiyah melalui berbagai aktivitas di seluruh dunia.

Beberapa ulama Syi'ah kontemporer dikenal sebagai penulis produktif dan karya-karyanya dikenal luas tidak hanya di kalangan pengikut Syi'ah. Muhammad Husayn Thabathabâ'i menulis banyak buku; salah satu yang paling monumental tampaknya adalah *Tafsîr al-Mizân*, yang beredar secara internasional. Penulis lain yang sangat produktif adalah Murtadhâ Mutahharî; karya-karyanya mencakup topik-topik yang sangat bervariasi, termasuk berbagai penafsiran ajaran Islam dalam konteks tantangan kontemporer. Beberapa dari bukunya bahkan telah tersedia dalam terjemahan bahasa Indonesia, seperti *Perspektif Alquran tentang Manusia dan Agama*, *Hal-hak Wanita dalam Islam*, *Gerakan Islam Abad XX*, dan *Pengantar Ilmu-ilmu Islam*. Secara umum para penulis Iran memberi kontribusi besar dalam khazanah kajian keislaman kontemporer.

Politik

Sebagaimana sudah disebut di atas, Republik Islam Iran lahir sebagai koreksi terhadap sistem kerajaan keluarga Pahlevi, pada tahun 1979. Sejak saat itu Iran menerapkan sistem politik yang mengkombinasikan sistem republik dengan teokrasi. Sistem politik ini bertumpu pada sebuah konsep *Velâyat al-Faqîh* (Arab, *Wilâyat al-Faqîh*). Prinsip paling mendasar dari teori ini adalah bahwa dengan tiadanya Imam, maka yang paling patut memimpin adalah *Faqîh* terbaik; atau dengan kata lain ulama yang paling tinggi ilmu dan kewibawaannya. Sebuah Majelis Pakar (*Majles-e Khobregân*)—yang terdiri atas 83 orang ulama paling berpengaruh—bertanggung jawab menentukan *Faqîh* terbaik untuk menjadi Pemimpin Tertinggi Iran. Pascarevolusi 1979, Ayatullah Khomeini adalah orang yang paling memenuhi kriteria tersebut, karena ilmunya yang tinggi dan juga karena perannya sebagai pemimpin revolusi menggulingkan rezim Pahlevi. Ayatullah Khomeini menjadi Pemimpin Tertinggi Iran hingga wafatnya pada Juni 1989. Majelis kemudian menetapkan Ayatullah Ali Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran yang masih menjabat hingga saat ini.

Pemimpin Tertinggi tidak memiliki batas masa jabatan; namun dapat diberhentikan oleh Majelis Pakar apabila dipandang tidak cakap menjalankan

tugas-tugasnya. Pemimpin Tertinggi memiliki kekuasaan yang sangat luas: menentukan haluan umum negara, menyatakan perang dan damai, menjadi Panglima Tertinggi Tentara, mengangkat pimpinan angkatan bersenjata, dan mengangkat pimpinan peradilan.

Pelaksanaan pemerintahan negara sehari-hari merupakan tanggung jawab presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. (Jabatan presiden baru diperkenalkan pada tahun 1989, sebelumnya pemerintahan dilaksanakan oleh Perdana Menteri). Sebagai sayap eksekutif pemerintahan, Presiden menyusun kabinet dan mengusulkan menteri-menteri (untuk dipertimbangkan oleh badan legislatif). Presiden bertanggung jawab untuk melaksanakan segala peraturan yang dihasilkan oleh badan legislatif dan berperan mengawasi berbagai badan dan kantor pemerintahan.

Badan legislatif dalam sistem politik Iran adalah Majelis Permusyawaratan Islam (*Majles-e Syûrâ-ye Eslâmî*), memiliki 290 orang anggota yang dipilih langsung oleh rakyat Iran. Ada pula Dewan Pengawas/Pengawal (*Syûrâ-ye Negahbân*), yang bertugas memastikan bahwa hukum-hukum yang dibuat di Majelis Permusyawaratan Islam sesuai dengan Konstitusi dan Hukum Islam.

Ekonomi

Mengiringi Revolusi 1979, Iran menghadapi persoalan besar di bidang ekonomi karena hubungan buruk dengan Barat, khususnya Amerika Serikat. Di bawah pengaruh Amerika Serikat berbagai sanksi ekonomi dijatuhkan terhadap Iran, sehingga Iran menjadi 'terisolasi' dari kekuatan ekonomi global. Pelarangan total sistem perbankan Barat yang berbasis riba juga menjadi kendala tersendiri dalam hubungan internasional di bidang keuangan. Di bawah berbagai kendala tersebut maka investasi asing tidak memungkinkan untuk masuk ke Iran dan di sisi lain, Iran juga kesulitan untuk memasarkan berbagai produknya. Produk alam andalan Iran adalah minyak dan gas, mirip dengan berbagai negeri di Timur Tengah. Perusahaan negara, National Iran Oil Company (NIOC) menguasai bisnis minyak dan gas untuk penggunaan domestik maupun ekspor melalui Teluk Persia. Menurut perkiraan Iran menyimpan sekitar 10% cadangan gas dunia dan produk gas negeri tersebut sedang meningkat. Di samping itu, Iran juga memiliki cadangan batubara dalam jumlah yang signifikan.

Sejak tahun 1973 Iran melalui Atomic Energy Organization of Iran telah memulai pembangunan reaktor listrik bertenaga nuklir dengan bantuan Rusia. Belakangan, Iran mengembangkan kemampuan untuk melakukan pengayaan uranium yang dapat dijadikan sebagai senjata nuklir. Kebijakan ini melahirkan berbagai kontroversi internasional yang belum menemukan titik terang. Iran bersikukuh bahwa tidak ada yang dapat melarangnya mengembangkan nuklir untuk tujuan damai.

Pada sisi lain, kendala-kendala pada level internasional secara tidak langsung mendorong kemandirian perekonomian Iran. Meskipun tanpa dukungan kapital internasional dari Barat sejumlah industri berbasis sains dan teknologi tumbuh di Iran. Iran misalnya mampu memproduksi mobil nasional, berbagai alat elektronik, mesin-mesin industri, tekstil dan obat-obatan. Iran juga memiliki jaringan infrastruktur yang luas dan berkualitas tinggi. Meskipun harus banyak mengimpor, penghasilan di bidang minyak dan gas merupakan faktor utama penjaga neraca perdagangan Iran. Dengan berbagai sanksi dan embargo, negara-negara yang paling banyak melakukan perdagangan dengan Iran adalah China, Uni Emirat Arab, Jerman, Korea Selatan, Turki, dan Swiss.

Karena isolasi internasional maka perbankan Iran tidak terkoneksi secara baik dengan sistem keuangan internasional. Iran sering disebut sebagai negeri uang kontan (*cash country*), karena kartu kredit dari sistem keuangan internasional tidak dapat digunakan di sana. Orang harus membawa uang kontan yang cukup sebelum memasuki wilayah Iran. Dengan berbagai tantangan yang dihadapinya, berdasarkan data 2015, Republik Islam Iran mencatatkan pendapatan per kapita US\$5.095.

Sosial-Budaya

Sebagai sebuah bangsa dengan akar sejarah yang sangat panjang Iran modern jelas menjadi penerus dari kekayaan budaya Persia kuno, yang kemudian mengalami islamisasi, dan belakangan menjadi representasi terdepan dari Islam Syī'ah. Perkembangan pascarevolusi 1979 dengan sangat jelas menunjukkan kuatnya upaya kalangan *mullah* untuk memastikan kehidupan sosial sehari-hari berjalan sesuai dengan ajaran Islam Syī'ah. Sebab itu perayaan-perayaan yang mengakar pada tradisi Syī'ah menjadi bagian penting dari kehidupan di Iran. Sebagai contoh, peristiwa wafatnya Husayn ibn 'Alī dalam perang Karbala pada 680—yang kemudian diabadikan sebagai Hari 'Āsyûrâ—menjadi sedemikian penting dan diperingati secara

sangat antusias. Persitiwa tersebut antara lain dirayakan dengan memukuli diri sendiri secara tangan kosong dan dengan peralatan di jalan-jalan. Syahidnya Husayn juga menjadi bagian yang sangat penting dalam literatur keagamaan dan aktivitas kebudayaan di Iran.¹² Di samping itu di Iran juga diperingati hari-hari besar: Idul Fitri, Idul Adha, Mawlid Nabi saw., hari lahir Imam Syâh yang ke-12, dan tahun baru Persia.

Iran mewarisi tradisi seni yang sangat kaya dari sejarahnya yang panjang. Di antara kekuatannya adalah pada arsitektur bangunan-bangunan kuno dan modern. Sejumlah bangunan dari berbagai periode sejarahnya telah menjadi warisan dunia yang dilindungi di bawah UNESCO PBB, seperti Persepolis dan Choghâ Zanbil. Bangunan-bangunan dari periode sejarah Islam juga masih banyak yang terpelihara dan menjadi daya tarik tersendiri. Iran juga dikenal dengan produksi karpet berkualitas tinggi baik dari segi material maupun seninya. Berbagai daerah memiliki tradisinya sendiri di bidang ini, seperti Khurâsân, Kermân, Isfahân, atau Tabrîz. Produk-produk seni berbasis logam juga mengalami perkembangan yang baik. Tehran terkenal dengan seni berbasis emas; Syîrâz, dan Zanjân terkenal dengan kerajinan berbasis perak; sementara Isfahân dan Kâsyân kuat dalam seni berbasis perunggu.

Iran memiliki akar yang sangat kuat di bidang sastra. Masa-masa kejayaan Islam meninggalkan sejumlah nama besar seperti Abû al-Qâsim al-Firdawsî atau Farîd al-Dîn al-Attâr. Tradisi sastra di Iran berjalan baik, namun demikian mengambil arah yang berbeda setelah 1979. Para penulis yang lebih liberal kurang mendapatkan kebebasan dan beberapa di antaranya meninggalkan Iran. Banyak dari karya sastra Persia belakangan ditulis dan diterbitkan di luar Iran. Namun demikian, tingkat literasi masyarakat Iran adalah relatif tinggi untuk kawasan Timur Tengah.

4. Republik Turki

Nama resmi negeri ini adalah Tûrkiye Cumhuriyeti (Republic of Turkey). Sesuai namanya, negara ini adalah sebuah negara demokratik

¹² Pada dasarnya semua umat Islam mengenang persitiwa tersebut sebagai sebuah tragedi historis di mana seorang cucu Rasulullah saw. dan keluarganya menjadi korban persengketaan politik antar dua keluarga. Banyak kelompok umat Islam yang juga memperingati 'Âsyûrâ', akan tetapi mengambil bentuk-bentuk yang bervariasi.

multi partai. Turki dipimpin oleh seorang presiden, saat ini adalah Recep Tayyip Erdogan. Ibu kota Turki adalah Ankara. Di antara kota penting lainnya adalah Istanbul, Antalya, Konya, dan Gaziantep. Bahasa resmi negara Turki adalah bahasa Turki. Turki tidak memiliki agama resmi; konstitusinya menyatakan bahwa Turki adalah negara sekuler.

Secara geografis, Turki adalah negara yang unik, karena sebagian wilayahnya masuk benua Asia sementara sebagian lainnya termasuk benua Eropa. Wilayahnya menghubungkan Balkan, Kaukasus, Timur Tengah, dan Mediterania (Laut Tengah). Turki berbatasan dengan Laut Hitam dan Georgia di sebelah utara; dengan Armenia, Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur; dengan Irak, Syria, dan Laut Aegea di sebelah selatan; dan dengan Laut Tengah, Yunani, dan Bulgaria di sebelah barat. Luas wilayah Turki mencapai 785.347 km² dengan jumlah penduduk 81.312.000 jiwa. Etnisitas penduduk Turki sangat heterogen. Kelompok etnis paling besar adalah Turki, Kurdi, Tatar, Azerbaijan, Arab, dan Yoruk. Sekitar 97% dari penduduk beragama Islam dan selebihnya merupakan minoritas Kristen dan Yahudi.

Republik Turki yang sekarang adalah hasil akhir sejarah panjang Dinasti Turki Usmani dari abad pertengahan Islam. Pada puncaknya, sekitar abad ke-16 dan ke-17, dinasti ini menguasai wilayah yang sangat luas, mencakup Anatolia dan Kaukasus, sebagian Timur Tengah dan Afrika Utara. Penguatan kekuatan Eropa dan pemberontakan dari dalam menjelang abad ke-20 pada akhirnya meruntuhkan Dinasti Turki Usmani dan mengakhiri era khilafah dalam sejarah politik Islam. Pada tahun 1924 Mustafa Kemal Attaturk memproklamkan pembubaran khilafah dan mendirikan Republik Turki modern. Dalam sebuah konstitusi yang disahkan pada 1928 Islam secara resmi dihapus sebagai agama negara dan Turki menjadi negara sekuler. Dari perspektif ini, Turki modern adalah sekeping kecil yang tersisa dari kejayaan masa kerajaan dan Kemal Attaturk dipandang sebagai Bapak Bangsa Turki modern.

Keagamaan

Sejarah keagamaan Turki modern tak dapat lepas dari konteks besar dihapuskannya sistem khilafah Turki Usmani dan kemudian digantikan dengan pemerintahan sekuler Republik Turki modern. Peristiwa ini (1924) kemudian diikuti dengan kebijakan Mustafa Kamal Attaturk yang menasionalisasikan seluruh lembaga keagamaan lama dan mengambil alih wakaf pendukungnya.

Berbagai kebijakan Westernisasi—seperti anjuran untuk tidak azan dalam bahasa Arab, larangan menggunakan pakaian Muslim tradisional, pembubaran madrasah, pelarangan tarekat, dan sebagainya—secara sistematis ditujukan untuk mengubah kebudayaan bangsa Turki. Keterlibatan ulama dalam pengelolaan negara dihapus dan kekuasaan mereka dibatasi hanya pada sektor privat. Untuk beberapa dekade, simbol-simbol keislaman dibersihkan dari aktivitas resmi pemerintahan.

Begitupun, sebagai bangsa dengan sejarah Islam yang sangat panjang, adalah mustahil menghapus Islam dari kehidupan bangsa Turki tidaklah mudah. Secara personal dan terkadang secara sembunyi-sembunyi tradisi keagamaan Islam bertahan, bahkan mendapatkan motif yang menguat di tengah penekanan yang ada. Pada tahun 1980an, misalnya, beberapa mahasiswa mulai menggunakan hijab ke kampus. Hal ini bertentangan dengan peraturan tentang pakaian mahasiswa yang melarang pakaian tradisional Islam. Perdebatan mengenai hal ini berlangsung secara nasional dalam berbagai forum dan perspektif. Faktanya, semakin banyak mahasiswa yang mendukung kembalinya cara berpakaian berbasis Syariah Islam. Setelah menjadi kontroversi besar—dan melahirkan berbagai demonstrasi pro dan kontra—larangan menggunakan hijab bagi mahasiswa baru resmi dicabut pada 2010 oleh pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (Adalet ve Kalkinma Partisi) pimpinan sang presiden Recep Tayyip Erdogan.

Ini adalah fenomena yang mudah terlihat dari proses kebangkitan kembali Islam sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat Turki. Dalam kenyataannya banyak umat Islam sekarang menganggap bahwa Turki dapat menjadi lokomotif kebangkitan Islam secara internasional. Keadaan ini antara lain dilatarbelakangi oleh kebijakan-kebijakan Turki yang dipandang pro-Islam dalam berbagai persoalan. Sejumlah lembaga swadaya Turki juga diketahui memiliki jaringan internasional dalam pengembangan Islam. Di antara yang paling terkenal adalah jaringan internasional yang mempelajari dan mengembangkan pemikiran Syekh Badi'uzzaman Said Nursi.

Politik

Sebagaimana disebut di atas, Republik Turki merupakan hasil dari transisi dan westernisasi radikal dari sistem Kerajaan Usmani di bawah Kemal Attaturk (1923-1938). Prinsip-prinsip dasar politik Attaturk mencakup republikanisme (yakni mengganti sistem kerajaan menjadi republik),

nasionalisme, populisme, sekularisme, dan revolusi. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dituangkan ke dalam konstitusi negara dan dilaksanakan secara segera. Keinginan untuk memaksakan perubahan secara cepat (revolusi) pada dasarnya melahirkan inkonsistensi dalam pelaksanaannya. Attaturk memerintah Turki secara otoriter; dan demikian juga di bawah pemimpin berikutnya Ismet Inonu.

Barulah pada tahun 1950 prinsip pemerintahan oleh rakyat dapat dilaksanakan dan sistem demokrasi multi-partai diterapkan. Legislasi dilaksanakan oleh sebuah Majelis Tinggi Nasional (Buyuk Millet Meclisi), beranggotakan 600 orang yang dipilih langsung oleh rakyat. Presiden bertindak sebagai kepala negara dan Perdana Menteri menjalankan pemerintahan sehari-hari. Akan tetapi, pada tahun 2017 dalam sebuah referendum disepakati untuk mengubah konstitusi: memperluas peran Presiden dan menghapuskan jabatan Perdana Menteri. Perubahan ini kemudian diberlakukan pada pemilihan umum tahun 2018, yang dimenangi oleh Erdogan. Dengan perubahan tersebut, Presiden berhak menyusun kabinet, mengumumkan keadaan darurat, dan menyusun anggaran keuangan negara.

Sejak awal berdirinya, konstitusi Turki menyatakan negara tersebut sebagai negara sekuler. Oleh karenanya agama tidak mendapat tempat dalam proses-proses politik praktis. Namun demikian, akar keagamaan bangsa Turki yang demikian panjang kembali bangkit dan menunjukkan ketertarikan terhadap bidang politik. Beberapa partai yang cenderung terhadap penegakan nilai-nilai Islam mulai muncul. Fenomena yang terakhir adalah munculnya partai yang sekarang berkuasa, Partai Keadilan dan Pembangunan (Adalet ve Kalkinma Partisi) yang berhasil mendapatkan kursi Presiden bagi Erdogan. Partai ini tidak pernah memproklamirkan diri sebagai partai Islam, karena hal tersebut bertentangan dengan konstitusi Turki. Begitupun, partai ini menyatakan dukungan terbuka terhadap nilai-nilai tradisional dan sosial Turki. Dalam kenyataannya dengan mudah terlihat bahwa pemerintah Turki yang sekarang memberikan iklim yang relatif baik bagi kebangkitan kembali nilai-nilai dan tradisi Islam. Dalam pada itu, di Dunia Barat Partai Keadilan dan Pembangunan sering disebut sebagai partai Islam.

Dalam sejarah politik Turki senantiasa terlihat adanya dua kubu yang berbeda pendapat. Satu kubu menghendaki pelaksanaan penuh paham Kemalisme, dimana Turki menjadi negara yang sepenuhnya sekuler dan menerapkan nilai-nilai Barat. Kubu lainnya lebih konservatif dan

menginginkan penerapan nilai-nilai dan tradisi Islam-Turki yang sudah mengakar dalam sejarah. Jika sejarah awal Turki, lebih kurang hingga 1980an, didominasi oleh kubu pertama; semenjak 1990an Turki menyaksikan semakin menguatnya dukungan terhadap kubu konservatif Islamis. Penguatan inilah yang menjadi tema pokok perkembangan politik Turki dalam lebih kurang seperempat abad belakangan.

Posisi geografis dan program westernisasi Turki membuatnya memiliki hubungan dekat dengan Barat. Turki adalah anggota NATO (North Atlantic Treaty Organisation) sejak 1952 dan juga menjadi salah satu negara pendiri Perserikatan Bangsa-bangsa. Negara ini juga merupakan anggota dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development) serta Dewan Eropa (European Council). Turki juga sudah cukup lama mengajukan diri untuk menjadi anggota Uni Eropa (European Union), namun belum berhasil sampai saat sekarang. Di jajaran negara-negara Timur Tengah, Turki adalah negara yang memiliki hubungan yang agak baik dengan Israel. Turki memanglah negara Asia dan Eropa; karenanya Turki tidak sepenuhnya Asia tidak pula sepenuhnya Eropa, namun Turki sangat tertarik kepada kedua-duanya.

Ekonomi

Sebagaimana negara lain, ekonomi Turki modern pada mulanya sangat tergantung pada sektor pertanian dan mengandalkan sumber daya alam. Turki tidak dikenal sebagai pemilik sumber daya alam yang sangat besar, seperti Saudi Arabia dengan minyak dan gas bumi. Akan tetapi, Turki memiliki batu bara; dan di kalangan negara-negara Timur Tengah hanya Turki dan Iran yang memilikinya dalam jumlah yang signifikan. Beberapa sumber daya alam yang ada termasuk: minyak, bijih besi, magnesium, tembaga, timah, seng, dan bauksit. Tambang-tambang yang ada telah dieksploitasi dan diproduksi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan domestik dan sebagian ekspor.

Turki memiliki daerah pertanian yang luas dan telah melaksanakan sistem pertanian modern di sebagian besar wilayahnya. Pertanian Turki didominasi oleh biji-bijian, khususnya jagung dan gandum yang mencapai sekitar sepertiga dari produk pertanian. Kebanyakan dari pertanian biji-bijian (sereal) berlokasi di daerah pedalaman yang agak tinggi. Pertanian lain seperti kapas, anggur, tembakau, tebu, bunga matahari lebih banyak

dilaksanakan di daerah yang lebih rendah, khususnya di sepanjang pesisir laut Kaspia dan laut Aegea.

Turki juga mengembangkan industri dalam banyak sektor. Negeri ini membagi pusat industri ke dalam empat wilayah: Istanbul, pesisir laut Aegea, lembah Adana, dan Ankara. Dengan strategi demikian maka terjadi semacam spesialisasi atau fokus perhatian industri. Pada sisi yang lain ini menjamin terjadinya pemerataan atau distribusi perkembangan ekonomi. Industri utama Turki mencakup bahan-bahan kimia, makanan, minuman, tembakau, tekstil dan pakaian. Turki merupakan produsen besi yang besar; memenuhi kebutuhan domestiknya dan menjadi eksportir terbesar bagi wilayah Timur Tengah. Turki juga dikenal maju dalam pengembangan teknologi kelistrikan dan menyediakan layanan di bidang ini kepada berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dengan segala upaya pengembangan ekonomi yang dilaksanakan, ekonomi Turki tampaknya mengalami kemajuan yang relatif baik. Dalam perkembangan terakhir, ekonomi Turki terutama disumbang oleh sektor jasa yang mencapai 50% dari total ekonomi, sektor pertanian 25%, dan sektor industri juga 25%. Pendapatan per kapita per tahun masyarakat Turki adalah US\$11.180, berdasarkan data 2016.

Sosial-Budaya

Posisi geografisnya yang mencakup Asia dan Eropa juga tercermin dalam perkembangan sosial-kebudayaan Turki. Wilayahnya telah mengalami sejumlah pengaruh kebudayaan yang sangat kaya sepanjang sejarahnya. Turki mewarisi pengaruh kultural Eropa zaman klasik seperti halnya juga warisan masa Islam. Maka di wilayahnya terdapat banyak situs arkeologi dengan nilai sejarah dan kebudayaan sangat tinggi. Beberapa di antaranya menjadi situs yang dilindungi oleh UNESCO dan menjadi daya tarik tersendiri. Ini mencakup wilayah historis kota Istanbul, Mesjid Hagia Sophia, Rumah Sakit Divrigi, Safranbolu, Cappadocia, dan Hattusa. Situs-situs tersebut memelihara warisan budaya yang sangat berharga dari berbagai zaman yang telah dilalui oleh Turki.

Posisi sebagai jembatan Asia-Eropa juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Turki. Upaya modernisasi dan Westernisasi yang sangat intens hingga 1950an telah mengubah wajah kultural bangsa Turki. Penggunaan aksara Romawi menggantikan aksara Arab untuk menuliskan bahasa

Turki dan pelarangan penggunaan turban adalah contoh kebijakan yang cukup berpengaruh secara kultural. Sekarang, sebagian masyarakat Turki—khususnya mereka yang tinggal di kota-kota besar—tampil dengan gaya dan pakaian yang hampir sepenuhnya Eropa. Akan tetapi sebagian lainnya tetap mempertahankan kultur berpakaian dan perilaku yang berbasis tradisional Turki-Islam. Ini lebih banyak ditemukan di wilayah pedesaan atau kalangan bawah penduduk perkotaan. Belakangan, semakin banyak bangsa Turki yang mendukung kebangkitan kembali budaya-budaya yang lebih mengakar pada tradisi tempatan.

Kedekatan dengan Eropa berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan dan sastra Turki. Negara ini mengembangkan pendidikan yang pada dasarnya menerapkan pola Eropa. Beberapa perguruan tinggi Turki cukup menonjol dalam bidang sains teknologi. Produksi sastra Turki juga relatif tinggi dan ditulis kebanyakan dalam bahasa nasionalnya maupun dalam bahasa internasional. Orhan Pamuk, seorang penulis Turki, menerima Hadian Nobel bidang sastra pada 2006. Penulis kelahiran Istanbul ini telah menulis banyak karya sastra, di antaranya: *Kar (Kota Kars)*, *Kara Kitap (Buku Hitam)*, *Istanbul: Hatıralar ve Şehir (Istanbul: Kenangan dan Kota)*. Karya-karya Pamuk telah diterjemahkan ke puluhan bahasa asing, Barat maupun Timur. Karya-karya sastra Pamuk tampaknya merefleksikan pergulatan tanpa henti antara tradisi lokal Turki-Islam dan tradisi Barat yang memang pernah dengan sengaja ditanamkan di negeri ini.

C. Mayoritas Muslim: Asia Selatan dan Tenggara

Pada bagian revidu perkembangan Islam klasik telah disebutkan bahwa Islam menyebar melalui darat dari Jazirah Arabia ke arah timur melalui Persia menuju India bagian utara lalu kemudian ke arah selatan. Di sisi lain Islam juga menemukan jalan menuju Nusantara melalui jalur perdagangan laut. Pada perkembangan berikutnya, Asia Selatan dan Asia Tenggara menjadi wilayah dengan jumlah penduduk Muslim yang paling besar. Berikut ini adalah beberapa negara berpenduduk Muslim paling signifikan di wilayah tersebut.

1. Republik Islam Pakistan

Nama resmi negara ini adalah Islâm-î Jamhûrîya-e Pâkistân (Islamic

Republic of Pakistan). Pakistan adalah sebuah negara berbentuk Republik Islam, yakni pemerintahan oleh rakyat banyak berdasarkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Pakistan dipimpin oleh seorang Presiden sebagai kepala negara. Pemerintahan secara operasional dikepalai oleh seorang Perdana Menteri, yang saat ini (2019) adalah Imran Khan. Di antara pemimpin populer lainnya adalah Muhammad Ali Jinnah, Zulfikar Ali Butho, dan Benazir Butho. Ibu kota Pakistan adalah Islamabad; di antara kota besar lainnya adalah Karachi dan Peshawar. Bahasa resmi Pakistan adalah bahasa Inggris dan bahasa Urdu. Pakistan menjadikan Islam sebagai agama resmi negara.

Secara geografis Pakistan berada di wilayah Asia Selatan. Pakistan berbatasan dengan negara Afghanistan di sebelah utara; dengan India di sebelah timur dan tenggara; dengan Laut Arab di sebelah selatan; dan dengan Iran di sebelah barat. Luas negara ini mencapai 881.889 km², dengan jumlah penduduk 214.249.000 jiwa. Etnis-etnis paling penting di Pakistan adalah Punjabi, Pashtun, Sindhi, dan Balochi. Etnis Punjabi merupakan yang terbesar (lebih kurang 50% penduduk). Dari sudut keyakinan agama, 96,5% dari penduduk Pakistan adalah Muslim.

Secara filosofis, kehadiran Pakistan modern sering dikaitkan dengan pemikiran filosof Muhammad Iqbal. Pada tahun 1930, sebagai presiden All India Muslim League, Iqbal menyampaikan sebuah pidato yang menekankan pentingnya bagian barat laut India (British India) menjadi sebuah negara Muslim yang mandiri. Hal ini mengingat bahwa wilayah tersebut berpenduduk mayoritas Muslim, sementara bagian lain India berpenduduk mayoritas penganut agama Hindu. Setelah berjuang dua dekade lebih, pada 14 Agustus 1947, Pakistan mendapat pengakuan kemerdekaan dari Inggris Raya. Choudry Rahmat Ali—seorang mahasiswa Cambridge University—menyusun nama Pakistan sebagai sebuah akronim dari provinsi-provinsi yang membentuk negara tersebut: **P**unjab, **A**fghania, **K**ashmir, **I**ndus-Sind, dan **B**aluch**istan**. Ternyata, kata *Pakistan* dalam bahasa Urdu dapat pula bermakna Tanah Suci. Pada awal berdirinya negara Pakistan terdiri atas dua bagian yang berbeda dan berjauhan: Pakistan bagian barat dan Pakistan bagian timur. Keduanya terpisah oleh wilayah daratan yang menjadi teritori India. Belakangan pada tahun 1971, wilayah bagian timur tersebut menjadi negara tersendiri yakni Bangladesh, sementara wilayah bagian barat adalah Pakistan yang kita kenal sekarang ini.

Muhammad Ali Jinnah—anggota Kongres India dan Presiden All India Muslim League—adalah tokoh sentral dari proses berdirinya negara Pakistan dan karenanya mendapatkan gelar sebagai Pemimpin Besar (Quaid-e Azam). Begitu merdeka, Jinnah diberi posisi sebagai Gubernur Jenderal (semacam perwakilan Inggris Raya) dan Liaquat Ali Khan menjadi Perdana Menteri. Karena berperan sangat besar sebelum maupun sesudah kemerdekaan, Jinnah dipandang sebagai Bapak Pakistan. Negara yang lahir dalam konteks persaingan dengan komunitas Hindu ini sejak awal harus menghadapi persaingan ketat dengan negara tetangganya, India yang dihuni oleh mayoritas penganut Hindu. Persaingan ini menjadi salah satu tema dalam dinamika sejarah Pakistan hingga saat ini.

Keagamaan

Sebagaimana sudah disebutkan di atas, mayoritas mutlak dari penduduk Pakistan adalah Muslim, mencapai 96,5%. Pada saat terjadinya partisi India 1947, sejumlah besar umat Islam yang tinggal di wilayah yang kemudian menjadi India pindah ke wilayah Pakistan. Perpindahan ini disebabkan adanya kekhawatiran bahwa kehidupan umat Islam di India akan termarginalisasi oleh mayoritas Hindu. Sebaliknya, sejumlah besar penganut Hindu juga pindah dari wilayah Pakistan menuju wilayah India.

Bagian paling besar dari penduduk Muslim Pakistan adalah Sunni. Meskipun demikian di negara ini terdapat pula sejumlah pengikut Shi'ah. Para pemuka agama di Pakistan disebut sebagai *mullah*, (Arab, *mawlâ*). Pada umumnya para *mullah* adalah lulusan dari sistem pendidikan *madrasah* tradisional yang mengajarkan berbagai cabang ilmu keagamaan Islam, khususnya Fikih dan Kalam. Tasawuf dan tarekat mendapat tempat yang sangat penting dalam kehidupan beragama masyarakat Pakistan. Seorang guru tarekat memperoleh ilmu khusus melalui satu rangkaian genealogi (*silsilah*) yang jelas dan dapat dirunut hingga kepada Rasulullah saw. Guru tarekat yang demikian biasa disebut sebagai *pîr*. Seorang *pir* biasanya memiliki sejumlah orang yang belajar darinya, lazim disebut *murîd*. Seorang *pîr* yang memiliki *murîd* dalam jumlah besar dengan sendirinya akan menjadi bagian dari sebuah jaringan sosial-keagamaan. Seorang *pir* dengan status demikian dapat memiliki pengaruh yang sangat besar tidak saja dalam urusan keagamaan tapi juga dalam persoalan politik.

Abul A'la al-Mawdudi adalah seorang tokoh kebangkitan Islam yang lahir di era penjajahan Inggris, namun kemudian memilih untuk menjadi warga Pakistan. Al-Mawdudi dikenal antara lain melalui pemikirannya tentang masyarakat dan pemerintahan Islam. Di antara buku-bukunya yang terkenal adalah *Caliphate and Kingship (Khilafah dan Kerajaan)*, *Tafhîm al-Qur'ân (Memahami Alquran)*, *Fisrt Principles of Islamic Economics (Prinsip-Prinsip Utama Ekonomi Islam)*, dan *Al-Jihâd fî al-Islâm (Jihad dalam Islam)*. Pemikiran Al-Mawdudi mendapatkan sambutan yang sangat luas di berbagai belahan dunia. Sejumlah besar karyanya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Barat maupun Timur.

Politik

Pada dasarnya, sistem politik Pakistan adalah sistem Palementer yang merupakan warisan zaman penjajahan Inggris, meskipun mengalami modifikasi dan penyesuaian-penyesuaian tertentu. Penyesuaian ini terutama untuk mempertegas statusnya sebagai sebuah Republik Islam. Perumusan dan pelaksanaan politik Islam dalam kerangka republik dapat dikatakan sebagai tantangan pertama negara Pakistan. Dalam kaitan ini, Pakistan melahirkan seorang pemikir politik yang sangat besar pengaruhnya, yakni Al-Mawdudi, yang mendirikan partai politik bernama Jamaat-i Islami.

Sejak berdirinya, sejarah Pakistan banyak diwarnai pertarungan yang sering pula menjadi konflik terbuka. Tampaknya, meskipun sudah berdiri sendiri untuk waktu yang cukup lama, persoalan integrasi kebangsaan masih menjadi persoalan serius di negeri ini. Konflik regional adalah persoalan besar di Pakistan. Ujud pertama dari persoalan ini adalah konflik antara Pakistan bagian barat dan Pakistan bagian timur yang kemudian berakhir dengan lepasnya bagian timur menjadi negara Bangladesh. Dalam konteks Pakistan sekarang pun tetap saja terjadi konflik antara beberapa wilayahnya. Misalnya, Punjab yang merupakan negara bagian paling penting, sering terlibat pertentangan dengan pemerintah pusat di Islamabad. Konflik yang mengarah kepada pemberontakan pernah pula terjadi di daerah Balochistan. Wilayah Pakhtunistan tidak pernah berhenti menuntut kemandirian dan partisipasi yang lebih luas dalam pengelolaan negara Pakistan.

Pakistan juga menghadapi pertarungan kepentingan antara elit penguasa politik sipil dan kekuatan militer, khususnya angkatan darat. Keadaan ini dapat terlihat dalam sejarah kepemimpinan Pakistan di mana

beberapa kali terjadi angkatan bersenjataanya mengambil alih pemerintahan dari kalangan sipil, misalnya pada rentang waktu 1958-1969, 1977-1988, dan 1999-2008. Tampaknya, kecenderungan militerisme yang kuat ini antara lain disebabkan persaingan yang terus menerus dengan negara raksasa tetangganya, yakni India. Di samping sipil-militer, Pakistan juga menghadapi pertarungan antara kaum aristokrat tradisional yang sudah mapan dengan kalangan elit perkotaan yang terdidik di sisi lain. Politik Pakistan, khususnya setelah abad ke-21, tak mungkin pula dipisahkan dari berbagai persoalan politik-militer kawasan yang melibatkan berbagai faksi—Afghanistan, India, Jammu-Kashmir—lengkap dengan segala kaitan-kaitan internasionalnya.

Sebagai sebuah negara berbentuk republik pemerintahan di Pakistan dipilih oleh rakyat secara umum. Pemilihan umum di Pakistan selalu merefleksikan persaingan antara berbagai faksi sebagaimana dijelaskan di atas. Sistem pengelolaan administrasi terbagi pada pemerintahan pusat dengan sistem federal yang berbagi kekuasaan tertentu dengan pemerintahan provinsi. Provinsi lebih jauh dibagi ke dalam distrik (kabupaten).

Pakistan memainkan peranan penting dalam politik internasional karena statusnya sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar kedua. Akan tetapi aspek lain yang lebih penting adalah bahwa Pakistan merupakan negara yang telah mengembangkan nuklir untuk tujuan sipil maupun militer secara resmi (*declared nuclear power*). Pakistan adalah satu-satunya negara Muslim dengan status tersebut. Meskipun berselisih dalam beberapa persoalan (khususnya terkait Jammu-Kashmir), Pakistan menjalin hubungan dengan India; dan sebagai Negara Persemakmuran memiliki hubungan baik dengan Uni Eropa.

Ekonomi

Pada awal kemerdekaanya ekonomi Pakistan terutama berbasis pertanian, sekitar 25% dari wilayahnya dapat dijadikan sebagai lahan pertanian. Pakistan melaksanakan *land reform* yang menata kepemilikan maksimum dan minimum para petani. Ini kemudian diimbangi dengan modernisasi sistem dan peralatan pertanian yang digunakan. Negeri ini mengalami kejayaan di bidang pertanian pada 1960an dengan produksi andalan antara lain adalah gandum, beras, jagung, dan kapas. Di samping itu, Pakistan juga memodernisasi sektor peternakan dan perikanan, meskipun kontribusinya terhadap ekonomi nasional masih sangat terbatas.

Pakistan tidak memiliki sumber daya alam dalam jumlah yang sangat besar, meskipun di beberapa tempat dapat ditemukan beberapa jenis tambang: besi, perak, minyak, gas bumi, atau batu bara. Perindustrian Pakistan relatif mengalami kemajuan, di mana pusat utamanya ada di sekitar kota Karachi dan Lahore. Industri utamanya mencakup tekstil, semen, minyak samin, rokok, dan sepeda.

Perdagangan luar negeri Pakistan terutama sekali melibatkan barang olahan berbasis kapas atau produk pertanian seperti kulit dan karpet. Negara dengan volume perdagangan yang sangat tinggi dengan Pakistan adalah Cina, Uni Emirat Arab, dan Saudi Arabia. Melalui skema privatisasi berbagai sektor yang semula dikelola oleh pemerintah, perdagangan dan jasa menjadi penyumbang terbesar bagi ekonomi negeri ini, sementara sektor pertanian hanya menyumbang sekitar 20% saja. Ekonomi negeri Pakistan mengalami perkembangan yang relatif stabil dari awal kemerdekaan, meskipun mengalami banyak krisis politik dan militer. Namun demikian, sejauh ini perkembangan ekonomi Pakistan belum membawa tingkat kemakmuran yang tinggi bagi rakyatnya. Menurut laporan tahun 2017, pendapatan per kapita masyarakat Pakistan adalah sebesar US\$1.580.

Sosial-Budaya

Kebudayaan Pakistan berakar pada peradaban Lembah Indus, yang sudah berusia lebih dari lima millenia. Akan tetapi pada era modern, unsur pengaruh Persia dan Arab sangat dominan dalam kebudayaan Pakistan. Tampaknya, hal ini berlaku pada hampir seluruh wilayah Asia Selatan. Pengaruh ini sudah berusia hampir satu milenia, sejak awal perluasan pengaruh Islam ke wilayah tersebut. Masyarakat Pakistan sangat menghargai kekerabatan dan menjadikannya sebagai ikatan sosial yang sangat kuat. Berbeda dengan di India, masyarakat Pakistan tidak menerapkan sistem kasta. Masyarakat bersifat patrilineal, di mana pria yang paling senior merupakan pemimpin dan pengambil keputusan terpenting dalam keluarga. Sebagian keluarga yang lebih tradisional mempraktikkan tradisi *purdah*, yakni pemisahan anggota keluarga wanita dari yang pria. Pada umumnya wanita tradisional Pakistan menggunakan penutup kepala dan wajah ketika di ruang publik. Di kalangan yang lebih modern—yang biasanya sebagai hasil pendidikan dan pengaruh Barat—tradisi tersebut telah jauh berubah. Pakaian tradisional pria Pakistan terdiri atas *kamiz*, baju yang

agak panjang hingga ke lutut, dipadu dengan *shalwar*, celana panjang yang longgar.

Pakistan mewarisi sastra, seni, arsitektur dan berbagai kebiasaan yang merupakan peninggalan kerajaan Mughal (1526-1857). Di atas telah disebutkan bahwa bahasa resmi Pakistan adalah bahasa Urdu, yang merupakan warisan sejarah kejayaan Islam masa Mughal. Bahasa Urdu merupakan perpaduan antara unsur-unsur bahasa Persia dan bahasa Semenanjung India, terutamanya bahasa Punjab. Bahasa tersebut menjadi populer karena diadopsi oleh kerajaan Mughal sebagai bahasa resmi. Dalam perkembangan mutakhir bahasa ini semakin banyak menyerap kosa kata dari bahasa Arab maupun Inggris. Saat sekarang ini bahasa Urdu digunakan oleh masyarakat Pakistan dan juga sebagian masyarakat di India. Bagian masyarakat Pakistan yang terdidik biasanya dapat berbahasa Inggris, yang tadinya merupakan bahasa resmi pemerintahan kolonial Inggris.

Pendidikan di Pakistan merupakan campuran tradisi Islam dari zaman Mughal dalam bentuk *kuttab* dan *madrasah* untuk tingkatan dasar dan menengah dan universitas modern yang mulai dibangun pada masa penjajahan Inggris. Di antara universitas terkenal adalah Universitas Punjab, yang tertua dan dibangun pada tahun 1882. Di samping itu ada pula Universitas Karachi, Universitas Islam Internasional Islamabad, Universitas Agha Khan, dan Universitas Quaid-i-Azam. Bahasa pengantar di universitas adalah Urdu atau Inggris.

Di antara ilmuwan terkenal dari Pakistan adalah Al-Mawdudi yang sudah disebutkan di atas. Ada pula sastrawan-filosof Sir Muhammad Iqbal yang banyak menulis dalam bahasa Urdu, Persia dan Inggris. Di antara bukunya yang paling terkenal adalah *The Reconstruction of Religious Thought in Islam (Rekonstruksi Pemikiran Keagamaan dalam Islam)*, *Javid Namah (Kitab Keabadian)*, *Payam-i-Mashriq (Pesan dari Timur)*, atau *Bal-i-Jibril (Sayap Jibril)*. Ilmuwan lain yang perlu dicatat adalah Fazlur Rahman, seorang ahli keislaman dan pemikir pembaruan. Di antara karyanya yang terkenal adalah *Islam, Major Themes of the Qur'an (Tema-tema Pokok Alquran)*, dan *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition (Islam dan Modernitas: Transformasi Sebuah Tradisi Intelektual)*. Beberapa dari karya Iqbal dan Rahman telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan mendapat sirkulasi yang baik. Capaian Pakistan paling historis di bidang intelektual adalah hadiah Nobel bidang Fisika

yang diperoleh oleh Abdus Salam (melalui penelitian kolaboratif dengan Sheldon Lee Glashow dan Steven Weinberg) pada tahun 1979. Lahir di Lahore pada tahun 1926, Abdus Salam memperoleh gelar doktor bidang Fisika dalam usia 22 tahun dari St. John's College, Cambridge Inggris. Setelah berkarir di Pakistan ia kemudian melanglang buana di berbagai pusat penelitian dan universitas. Ia wafat di Oxford dalam usia 70 tahun dan kemudian dimakamkan di Rabwah Pakistan. Di antara karya ilmiahnya adalah *Unification of Fundamental Forces (Penggabungan Gaya-gaya Fundamental)* dan *Renaissance of Sciences in Islamic Countries (Kebangkitan Sains di Negara-negara Islam)*.

2. Republik Indonesia

Republik Indonesia (Republic of Indonesia) adalah sebuah negara multi-partai. Pada dasarnya Indonesia menganut sistem presidensial dengan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ibu kota negara, Jakarta, terletak di pantai utara pulau Jawa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara dan pemerintahan. Indonesia berdasarkan pada Pancasila yang salah satu silanya adalah monoteisme—Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia tidak menyatakan satu agama sebagai agama resmi, tetapi mengakui sejumlah agama. Presiden Indonesia saat ini adalah Joko Widodo, yang merupakan presiden yang ketujuh. Presiden sebelumnya adalah Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yodhoyono.

Secara geografis Indonesia terletak di antara benua Asia di utara dan benua Australia di selatan. Negara kepulauan ini merupakan rangkaian ribuan pulau besar dan kecil membentang dari dari barat ke timur hingga mencapai sekitar 5.100 km, pada titik terpanjang. Pada dimensi lebarnya yang membentang dari utara ke selatan mencapai 1.800 km pada titik terlebarnya. Luas wilayah Indonesia mencapai 1.910.931 km², dengan jumlah penduduk 276.162.000 jiwa. Penduduk Indonesia terkenal sangat heterogen dengan etnis utamanya adalah Jawa (40%), Sunda (15,5%), Melayu (3,7%), Batak (3,6%), Madura (3%), Betawi (2,9%), Minang (2,7%), Bugis (2,7%), Banten (2%), dan Banjar (1,7%). Keragaman penduduk Indonesia juga terlihat dalam dimensi agama. Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam (87,5%), lalu disusul oleh agama-agama lainnya:

Kristen (10%), Hindu (1,7%), Budha (0,7%), dan Kong Hu Cu (0,05%), serta yang lainnya (0,1%).¹³

Indonesia modern terbentuk melalui sebuah sejarah yang sangat panjang: dari zaman pra sejarah, zaman pengaruh Hindu, zaman pengaruh Budha (masa Sriwijaya), masa pengaruh Islam, hingga masa pengaruh Eropa dan kemudian penjajahan Belanda dan Jepang. Ketertarikan bangsa-bangsa Eropa terhadap berbagai sumber daya alam yang ada di Indonesia melahirkan perdagangan dengan pemain utamanya adalah Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Belakangan, sejak penghujung abad ke-18 Belanda sebagai negara mulai hadir dan menjajah Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang berhasil menggeser peran Belanda dan berusaha menjadikan Indonesia sebagai modal dalam melanjutkan ekspansi dan keterlibatannya dalam Perang Dunia II.

Berbagai penderitaan dan sengketa yang dimunculkan oleh penjajahan Belanda menjadi latar belakang bagi tumbuhnya semangat persatuan dan kebangsaan di kalangan penduduk Indonesia yang sesungguhnya sangat heterogen dan terpisah-pisah dalam sejumlah besar pulau. Sejak awal abad ke-20 nasionalisme Indonesia semakin mengental beriring sejalan dengan semangat yang sama yang menggelora di hampir seluruh wilayah Asia dan Afrika. Perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa merdeka baru tercapai pada 17 Agustus 1945, ketika Soekarno dan Hatta membacakan naskah Proklamasi kemerdekaan.

Bahkan setelah kemerdekaan pun Indonesia masih harus menghadapi berbagai tantangan baik dalam proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun dalam konteks hubungannya dengan Belanda. Secara garis besar, Indonesia merdeka telah mengalami beberapa fase perkembangan yang penting: fase Orde Lama (1945-1965) di bawah kepemimpinan Soekarno, fase Orde Baru (1965-1998) di bawah kepemimpinan Soeharto, dan fase Reformasi (sejak 1998), di mana Indonesia telah dipimpin oleh lima orang presiden.

Keagamaan

Masuknya Islam ke Indonesia diawali dengan aktivitas perdagangan

¹³ Aris Ananta, *et al.*, *Demography of Indonesia's Ethnicity* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2015), h. 257.

seiring dengan kebangkitan perdagangan di Laut India. Catatan sejarah menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya sejak abad ke-13 Islam telah mengakar dan berhasil membangun sistem politik di Indonesia. Beberapa kerajaan muncul di pesisir timur pulau Sumatra dan kemudian menyusul pula di pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya. Islam begitu berhasil memengaruhi Indonesia sehingga menjadi agama yang dominan, menggantikan Hindu dan Budha yang sebelumnya mendominasi. Proses masuknya Islam ke Indonesia berjalan dengan cara yang berbeda jika dibandingkan dengan yang terjadi di wilayah lainnya, khususnya di Timur Tengah dan Afrika Utara. Di Indonesia, proses islamisasi lebih berwatak damai, kultural, dan tidak melibatkan peperangan. Oleh karenanya proses islamisasi di Indonesia berjalan perlahan dan membutuhkan waktu lama.

Dengan masuknya pengaruh Eropa, agama Kristen mulai diperkenalkan dan berkembang di Indonesia. Jadilah Indonesia sebuah negara yang heterogen dari sudut agama. Di negeri ini diakui secara resmi agama-agama: Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Konstitusi Indonesia memberikan jaminan bagi setiap penganut agama untuk menjalankan ajaran agamanya. Indonesia bahkan memiliki Kementerian Agama sebagai wadah formal negara dalam pelayanan keagamaan. Upaya menjamin kerukunan antara umat beragama telah lama dirintis di Indonesia melalui berbagai dialog, baik yang bersifat formal maupun nonformal. Indonesia sering dirujuk sebagai sebuah negeri yang berhasil menjaga kerukunan umat beragama.

Secara umum Muslim Indonesia adalah penganut Sunni dengan mazhab fikih yang paling dominan adalah Syafiiyah dan teologi Asy'ariyah. Di Indonesia berkembang beberapa organisasi sosial-keagamaan, di antaranya adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al Jam'iyatul Washliyah, Ittihadiyah, Al-Irsyad, Perti, Mathlaul Anwar, dan Nahdlatul Wathan. Organisasi-organisasi tersebut secara signifikan turut memberi warna bagi perkembangan keagamaan di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah organisasi yang mewadahi semua kelompok dan pemahaman Islam dalam rangka memberikan panduan tentang berbagai ajaran agama Islam dalam konteks perkembangan sosial yang ada.

Modus masuknya Islam ke Indonesia yang lebih bernuansa kultural turut membentuk kehidupan keagamaan. Di Indonesia dikenal banyak perayaan dan upacara keagamaan: hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, peringatan Mawlid Nabi, peringatan Isra' dan Mi'raj, perayaan

tahun baru Hijriyah, peringatan 10 Muharram, peringatan Nuzul Alquran, kenduri kematian, *walimah* pernikahan, *walimah* keberangkatan haji, aneka *tasyakkuran*, dan sebagainya. Beberapa di antara hari penting keagamaan—juga beberapa hari besar agama selain Islam—dijadikan sebagai hari libur nasional secara resmi. Ini kerap dianggap sebagai salah satu perwujudan toleransi dan kerukunan umat beragama ala Indonesia.

Proses islamisasi Indonesia yang berwatak kultural dan perlahan melahirkan wajah keberagamaan Indonesia yang khas, berbeda dengan apa yang umum terlihat di wilayah Timur Tengah. Sebagian Muslim Indonesia, meskipun sudah memeluk agama Islam, masih mencampur adukkan antara ajaran Islam dengan berbagai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan tempatan sebelum datangnya Islam. Praktik semacam itu disebut sebagai sinkritisme. Kelompok Muslim ini oleh Clifford Geerts dikategorikan sebagai kelompok Muslim Abangan; sementara kelompok yang lebih ketat membedakan tradisi dan ajaran syariat Islam disebut sebagai Muslim Santri. Dalam perkembangan beberapa dekade belakangan Islam Abangan di Indonesia semakin berkurang dan proses santrinisasi mengalami percepatan.

Pada tataran kehidupan sosial sehari-hari, santrinisasi paling mudah diidentifikasi dari model pakaian umat Islam. Hingga dekade 1980an hanya sebagian saja dari umat Islam Indonesia yang sangat serius dalam memilih pakaian penutup aurat. Sebagian tidak menganggapnya sangat penting. Boleh tidaknya menggunakan jilbab, penutup kepala dan rambut wanita muslimah, di sekolah dan di berbagai kantor pemerintahan masih menjadi perdebatan. Akan tetapi setelah 1990an keadaan mulai berubah dan terus mendapat momentum. Pada awal abad ke-21 ini menggunakan jilbab sudah menjadi hal yang natural di hampir semua lini aktivitas. Belakangan bahkan ada pula kecenderungan untuk menggunakan model-model pakaian yang tadinya hanya lazim di negara-negara Arab Timur Tengah, seperti *gamis*, *'abaya*, *kaftan*, *niqab*, dan *burqa*'. Tampaknya kecenderungan ini terus berkembang belakangan ini. Pakaian Muslim/Muslimah juga sudah menjadi bagian penting dari industri *fashion* sehingga membuatnya semakin dikenal dan menjadi bagian dari kehidupan sosial keagamaan Islam Indonesia.

Politik

Republik Indonesia diproklamlirkan pada 17 Agustus 1945, di tengah dinamika sejarah dan tantangan domestik maupun internasional. Tantangan alamiah datang dari realitas geografis maupun demografis Indonesia. Mempersatukan ribuan pulau yang berserakan di wilayah yang sangat luas adalah sebuah tantangan berat. Hambatan transportasi dan komunikasi jelas menjadi sebuah dilema tersendiri. Ini ditambah lagi dengan jumlah etnis dan sub-etnis yang demikian banyak. Lalu masing-masing memiliki bahasa, adat istiadat, dan budayanya sendiri-sendiri, yang terkadang sedemikian berbeda satu sama lainnya. Masalah lain adalah ketimpangan yang mencolok tentang kepadatan penduduk, khususnya antara pulau Jawa dan Madura dibandingkan pulau-pulau lainnya.

Indonesia juga merdeka di tengah gejolak Perang Dunia II. Jepang terlibat dalam PD II dan berupaya menjadikan Indonesia sebagai pemasok sumber daya untuk mendukungnya. Di sisi lain Belanda juga tidak dapat menerima begitu saja kemerdekaan Indonesia. Dalam kenyataannya Belanda masih melakukan serangan militer terhadap Indonesia: Agresi Militer I pada tahun 1947, dan Agresi Militer II pada tahun 1948. Belanda sempat mengusulkan bahwa bentuk yang ideal bagi Indonesia adalah perserikatan/federal (Republik Indonesia Serikat); meskipun pada akhirnya ide tersebut tidak diterima. Indonesia tetap memilih model negara kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Masa awal kemerdekaan diwarnai oleh kerapnya pergantian kabinet sebagai akibat dari penerapan demokrasi liberal. Di sisi lain muncul pula beberapa kasus pemberontakan, di mana kelompok tertentu menentang pemerintahan pusat dan menuntut untuk melepaskan diri dari NKRI. Dengan sendirinya program pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik dan ekonomi nasional tidak berkembang. Maka pada tahun 1959 Presiden Soekarno menerapkan konsep Demokrasi Terpimpin di mana kekuasaan berpusat pada presiden. Soekarno berupaya mencari keseimbangan antara kelompok Nasionalis, kelompok Agama, dan kelompok Komunis melalui satu slogan 'Nasakom'.

Pada tahun-tahun Demokrasi Terpimpin pengaruh komunis semakin menguat. Partai Komunis sering mengalami perbedaan pendapat dengan kelompok militer, dan ada pandangan bahwa Presiden Soekarno semakin kuat dipengaruhi oleh Partai Komunis. Tragedi 30 September 1965 melahirkan satu rangkaian krisis yang melemahkan kekuasaan Soekarno di satu

sisi dan memberi kekuasaan yang lebih besar kepada pihak militer. Akhirnya, Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto, yang menjadi presiden kedua RI pada Maret 1967. Indonesia pun masuk pada era yang biasa disebut sebagai Orde Baru.

Dalam masa Orde Baru di bawah Soeharto, peran militer sangat besar dalam perpolitikan. Banyak dari menteri dalam kabinet Soeharto yang berlatar belakang militer, bahkan untuk mengurus kementerian yang tidak terkait dengan urusan kemiliteran dan keamanan. Soeharto memerintah selama 32 tahun, menjadikannya presiden Indonesia yang paling lama berkuasa. Watak militeristik pemerintahan, maraknya kolusi, korupsi, dan nepotisme pada akhirnya membuat masyarakat menentang pemerintahan Soeharto. Gerakan resistensi masyarakat sipil perlahan menjadi gelombang protes besar-besaran yang memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.

B.J. Habibie—yang saat itu adalah Wakil Presiden—menjadi Presiden Indonesia ketiga dan memimpin negeri ini memasuki sebuah era baru yang disebut sebagai Era Reformasi. Masa Reformasi membawa sejumlah perubahan yang signifikan dari sebuah sistem sentralistik-militeristik menuju sistem yang lebih berwatak sipil dan madani. Perubahan yang paling penting dalam Reformasi ini adalah:

- a. Peningkatan drastis kebebasan pers. Hal ini terlihat dari pertumbuhan pesat jumlah surat kabar, stasiun radio, maupun stasiun televisi. Muatan pers pun terasa menjadi lebih variatif dan lebih bebas menyuarakan pendapat berbagai orang atau kelompok. Hal semacam ini tidak memungkinkan di era sebelumnya, di mana jumlah lembaga pers sangat terbatas dan isinya seingkali dikekang oleh pemerintah.
- b. Peningkatan partisipasi politik dan pelaksanaan demokrasi. Pada masa reformasi, jumlah partai politik meningkat tajam khususnya jika dibandingkan dengan penghujung masa Orde Baru di mana hanya ada tiga partai politik. Pada pemilihan umum pertama masa Reformasi (1999), jumlah partai peserta mencapai 48 partai politik. Ini jelas mengandung unsur euphoria karena terbebas dari kekangan selama 30 tahun Orde Baru. Secara perlahan beberapa partai kemudian tereliminasi karena kurang pendukung; dalam pemilihan umum tahun 2019, yang berpartisipasi tinggal 20 partai politik.
- c. Peningkatan penegakan hukum. Hal ini paling mudah dapat dilihat dari pendirian lembaga hukum baru, khususnya Komisi Yudisial,

Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga terakhir secara khusus dibentuk demi mengikis tradisi korupsi. Sejauh ini, KPK menjadi lembaga yang sangat aktif, menunjukkan betapa persoalan korupsi demikian mengakar dan akut menggerogoti sistem penyelenggaraan pemerintahan. Kinerja Komisi Pemberantas Korupsi mendapat apresiasi yang sangat tinggi dari masyarakat.

- d. Peningkatan partisipasi daerah. Di Era Reformasi partisipasi daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mengalami peningkatan yang sangat signifikan, khususnya bila dibandingkan dengan pemerintahan yang sangat sentralistik Orde Baru. Otonomi daerah dalam beberapa bidang meningkatkan partisipasi dan pada saat yang sama memungkinkan kebutuhan dan ciri khas sebuah daerah mendapat perhatian yang pantas.

Sebagai sebuah republik, perpolitikan Indonesia bersifat multi-partai sejak awal kemerdekaan. Namun demikian, karena berbagai hambatan Pemilihan Umum pertama Indonesia merdeka baru dilaksanakan pada 1955, dengan pemenang 5 besarnya adalah: Partai Nasional Indonesia (PNI, 22,3%), Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi, 20,9%), Partai Nahdlatul Ulama (NU, 18,4%), Partai Komunis Indonesia (PKI, 16,4%), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII, 2,9%).¹⁴ Hasil ini menunjukkan bahwa kekuatan politik utama Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Nasionalis dan kelompok Islam.

Pemerintah Orde Baru mengandalkan dukungan partai Golongan Karya yang didirikan pada tahun 1964. Dengan dalih asas tunggal, pada tahun 1973, pemerintah memaksakan penyederhanaan partai politik dimana kemudian menyisakan hanya ada tiga partai: Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia.¹⁵ Praktis kekuatan politik Islam hanya diwakili oleh satu partai, PPP Dalam pemilihan

¹⁴ <https://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2018/8/PEMILU-1955/10>, diakses 22 Februari 2019.

¹⁵ Partai Persatuan Pembangunan merupakan gabungan dari partai-partai berbasis Islam: Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarekat Islam Indonesia, dan Partai Persatuan Tarbiyah Islamiah. Adapun Partai Demokrasi Indonesia merupakan gabungan dari partai-partai nasionalis dan Kristen: Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katholik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).

umum sepanjang masa Orde Baru, Golongan Karya selalu diuntungkan oleh dukungan penuh pemerintah dan militer. Berikut adalah perolehan suara pada beberapa Pemilihan Umum masa Orde Baru. Pemilihan Umum tahun 1977: Golkar (62,11%), PPP (29,29%), dan PDI (8,6%);¹⁶ Pemilihan Umum tahun 1987: Golkar (73,16%), PPP (15,97%), dan PDI (10,87%);¹⁷ sementara pada Pemilihan Umum tahun 1997: Golkar (74,51%), PPP (22,43%), dan PDI (3,06%).¹⁸

Era Reformasi kembali membuka peluang mendirikan partai politik baru dan membenarkan penggunaan Islam sebagai asas partai. Beberapa partai politik Islam didirikan, baik yang secara resmi mencantumkan Islam sebagai asas maupun yang sebatas mengandalkan umat Islam sebagai basis pendukungnya. Kelompok nasionalis juga mendirikan sejumlah partai baru. Pemilihan Umum pertama Era Reformasi dilaksanakan pada tahun 1999 (dipercepat), dengan perolehan suara 10 besar: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (33,74%), Partai Golkar (22,44%), Partai Kebangkitan Bangsa (12,61%), Partai Persatuan Pembangunan (10,71%), PAN (7,12%), Partai Bulan Bintang (1,94%), Partai Keadilan (1,36%), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (1,01%), Partai Nahdlatul Ummat (0,64%), dan Partai Persatuan (0,62%).¹⁹ Adapun pemuncak perolehan suara dalam pemilihan legislatif pada 2014, adalah sebagai berikut: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (18,95%), Partai Golkar (14,75%), Partai Gerindra (11,81%), Partai Demokrat (10,19%), Partai Kebangkitan Bangsa (9,04%), Partai Amanat Nasional (7,59%), Partai Keadilan Sejahtera (6,79%), Partai Nasdem (6,72%), Partai Persatuan Pembangunan (6,53%), dan Partai Hanura (5,26%).²⁰ Sementara itu dalam pemilihan umum terakhir, pada 2019, perolehan partai politik 10 besar adalah: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (19,33%), Partai Gerindra (12,57%), Partai Golkar (12,31%), Partai Kebangkitan Bangsa (9,69%), Partai Nasdem (9,05%), Partai Keadilan Sejahtera (8,21%),

¹⁶ <https://pemilu.tempo.co/read/545186/pemilu-1977/full&view=ok>, diakses 25 Februari 2019.

¹⁷ <https://pemilu.tempo.co/read/545199/pemilu-1987>, 25 Februari 2019.

¹⁸ <https://pemilu.tempo.co/read/545207/pemilu-1997/full&view=ok>, 25 Februari 2019.

¹⁹ <https://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999>, 25 Februari 2019.

²⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/09/2357075/...> Suara.Pemilu.Legislatif.2014, diakses 25 Februari 2019.

Partai Demokrat (7,77%), Partai Amanat Nasional (6,84%), Partai Persatuan Pembangunan (4,52%), dan Partai Perindo (2,67%).²¹

Ekonomi

Mengingat posisi geografis, luas wilayah, dan jumlah penduduknya, tampaknya signifikansi Indonesia dalam ekonomi global belum lah sebanding. Meskipun iklim tropis memungkinkan kegiatan pertanian sepanjang tahun, akan tetapi pertanian di Indonesia belum berkembang sebaik yang diharapkan. Pengembangan pertanian, khususnya perkebunan, berkembang secara tidak berimbang. Pertanian di pulau Jawa jelas lebih maju daripada pertanian di pulau-pulau besar lainnya, baik dari sisi keluasan wilayah yang dieksploitasi maupun dari sisi aplikasi teknologi pertanian yang lebih maju. Pulau Kalimantan yang merupakan pulau Indonesia yang paling luas relatif tertinggal dibandingkan Jawa dan Sumatera.

Variasi tanaman pertanian di Indonesia sangat kaya dan hampir tak terbatas, merentang mulai dari tanaman keras, biji-bijian, hingga sayur-sayuran. Perkebunan sawit mengalami perluasan yang signifikan belakangan ini, khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Sebagai hasilnya, Indonesia merupakan salah satu eksportir utama minyak kelapa sawit (CPO). Belakangan perkebunan sawit Indonesia mendapat sorotan dari berbagai negara dalam kaitan deforestasi dan kerusakan lingkungan. Perkebunan karet juga sangat penting dan Indonesia juga merupakan salah satu pemain utama eksportir karet. Padi juga merupakan hasil pertanian penting, karena masyarakat Indonesia menjadikannya sebagai bahan makanan pokok. Swasembada beras selalu menjadi wacana pemerintah, dan pernah dicapai di masa lalu, belakangan Indonesia masih mengimpor beras secara terbatas. Produk-produk pertanian lain yang signifikan mencakup tembakau, kakao, kopra, tembakau, kedelai, dan lain-lain.

Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara dengan hutan yang cukup luas, khususnya di pulau Papua, Kalimantan dan Sumatera. Dengan begitu maka hasil hutan baik mentah maupun olahan juga berkontribusi terhadap ekonomi nasional Indonesia. Sebagai negara maritim, Indonesia sangat kaya dengan aneka sumber daya laut. Hanya saja sektor ini tidak mendapat perhatian dan pengembangan yang memadai, hingga beberapa

²¹ <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/22/16141831/infografik-perolehan-suara-partai-politik-dalam-pemilu-2019-versi-kpu>, diakses 13 Juni 2019.

waktu belakangan saja. Perlindungan terhadap laut Indonesia dan pengembangan industri hasil laut secara perlahan telah meningkatkan kontribusi laut terhadap ekonomi. Ekspor ikan, utamanya tuna, mengalami kenaikan signifikan setelah menurunnya tingkat pencurian ikan di perairan Indonesia.

Ekonomi Indonesia juga banyak bersandar pada sektor pertambangan. Indonesia memiliki banyak jenis tambang: minyak, gas alam, batu bara, emas, timah, perak, tembaga, bauksit, besi, dan lain-lain. Minyak, batu bara, dan gas alam adalah bahan tambang yang sudah dieksploitasi secara serius dan karenanya memberikan sumbangan yang cukup besar bagi ekonomi Indonesia. Minyak dan gas Indonesia ditemukan terutama di pulau Sumatera dan Kalimantan. Ada pula tambang minyak yang berada di lepas pantai laut Jawa dan laut Cina Selatan. Tambang batu bara ditemukan di banyak tempat, namun konsentrasi terbesar adalah di pulau Sumatera dan Kalimantan. Tambang timah terutama ada di kepulauan Bangka dan Belitung; bauksit di kepulauan Riau, dan emas di Papua.

Sektor industri Indonesia mengalami perkembangan dan menyumbang besar terhadap ekonomi nasional. Salah satu sektor industri yang besar adalah tekstil, yang sayangnya masih banyak bergantung pada bahan baku impor. Industri batik merupakan keunikan Indonesia dan paling banyak terdapat di Jawa Tengah. Industrialisasi Indonesia cenderung terkonsentrasi di beberapa tempat, seperti Jakarta dan sekitarnya serta Surabaya dan sekitarnya. Industri berat Indonesia mencakup pembangunan galangan kapal di Surabaya dan pabrik pesawat udara di Bandung. Sektor ini masih lebih banyak dikelola langsung oleh pemerintah dan tampaknya cenderung bermotif prestise.

Perdagangan Indonesia secara historis didominasi oleh etnis Cina, meskipun orang-orang dari Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan juga berkontribusi relatif signifikan. Dalam kaitan ini, negara-negara asal impor Indonesia yang terbesar adalah Cina, Singapura, Jepang, Thailand, dan Amerika Serikat. Sementara itu tujuan ekspor komoditas asal Indonesia yang paling utama adalah Cina, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, dan Malaysia. Dengan profil ekonomi dan perdagangan seperti itu, pendapatan per kapita Indonesia adalah USD3.540, berdasarkan data 2017.

Sosial-Budaya

Penduduk Indonesia terdiri atas sangat banyak etnis dan menempati sangat banyak pulau. Keadaan ini turut membentuk variasi budaya yang sangat tinggi. Namun demikian, dalam proses sejarahnya Indonesia terbentuk melalui proses kesepakatan menjadikan keragaman dalam persatuan—Bhinneka Tunggal Ika—sebagai salah satu pilar dan prinsip dalam berbangsa dan bernegara Indonesia. Momentum terpentingnya adalah ketika pada tahun 1928 dicetuskan Sumpah Pemuda yang mengunci seluruh Indonesia menjadi Bangsa Indonesia, mendiami dan membela Tanah Air Indonesia, dan berbahasa satu Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dikembangkan di atas bahasa Melayu yang memang menjadi *lingua franca* dunia Nusantara semenjak kejayaan kerajaan-kerajaan Islam. Maka di Indonesia hidup berbagai macam sistem kebudayaan yang kemudian dianyam ke dalam satu budaya nasional Indonesia.

Dalam proses sejarahnya, Indonesia menerima pengaruh dari luar, yang paling luas dan dalam pengaruhnya adalah kebudayaan Hindu-Budha dan Islam. Hindu-Budha lebih dahulu menanamkan pengaruh di Indonesia sebelum Islam yang mulai mendominasi sejak abad ke-13. Berbagai peninggalan Hindu dan Budha tetap merupakan situs budaya penting Indonesia hingga saat ini, misalnya saja candi Prambanan dan candi Borobudur. Pengaruh Hindu dan Budha juga masih dapat ditemukan dalam berbagai kepercayaan dan praktik di tengah-tengah masyarakat, khususnya di tempat-tempat yang kurang mengalami Islamisasi.

Kedatangan Islam secara perlahan menggeser kekuatan sosio-politik Hindu-Budha hingga akhirnya menjadi agama yang paling besar penganutnya di era modern. Bersama kejayaan kerajaan-kerajaan Islam, pengaruh budaya Islam-Arab terus berkembang. Periode kolonialisme kemudian membawa pengaruh Barat ke Indonesia. Ini, misalnya, terlihat dari penggunaan aksara Latin dalam penulisan bahasa Indonesia, menggantikan aksara Arab yang digunakan dalam menuliskan bahasa Melayu. Demikian juga dalam proses penyerapan bahasa. Bahasa Indonesia modern sangat banyak menyerap kosa kata dari bahasa Barat, khususnya Belanda dan Inggris. Ini adalah sebuah pergeseran. Di masa sebelumnya (masa bahasa Melayu), penyerapan kosa kata yang paling besar adalah berasal dari bahasa Arab.

Menguatnya pengaruh kaum Islam santri sejak 1980an turut memengaruhi watak sosial-budaya Indonesia. Partisipasi umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan mengalami peningkatan signifikan. Aktivitas sosial

dan budaya keislaman semakin populer. Aktivitas keagamaan—seperti haji, umrah, ziarah wali, tabligh akbar, majelis taklim, wiridan, tasyakkuran—berjalan berkelindan dengan pertumbuhan popularitas budaya Islam-Arab. Penggunaan kosa kata Arab semakin meluas di kalangan tertentu baik dalam konteks keagamaan maupun yang lebih bersifat sosial. Demikian juga dengan penggunaan model-model pakaian, sebagaimana sudah disebutkan di atas.

Islam juga mewarnai perkembangan sastra dan seni Indonesia modern. Sejumlah penulis dan penyair Indonesia mendapat apresiasi yang luas. Misalnya Buya Hamka yang menghasilkan karya tulis dalam berbagai bidang, mulai dari tafsir Alquran dan tasawuf hingga sejarah dan sastra. Di antara karya monumentalnya adalah *Tafsir Al-Azhar*, *Tasawuf Modern*, *Sejarah Umat Islam*, *Tenggelamnya Kapal Van der Weijk*, dan *Di Bawah Lindungan Ka'bah*. Di kalangan umat Islam Indonesia berkembang aliran musik dengan warna yang khas dan pengaruh kuat dari dunia Arab dan India. Genre musik ini biasa disebut sebagai irama padang pasir, musik gambus, atau nasyid. Di antara kelompok yang sempat melegenda adalah Nasyida Ria dari Jawa Tengah atau El Surayya dari Medan, atau yang lebih baru group Sabyan Gambus asal Bandung.

3. Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara kerajaan konstitusional berbentuk federal, terdiri atas 13 kerajaan (negara bagian) dan 3 Wilayah Federal. Para sultan/raja memilih dari kalangan mereka seorang untuk menjadi *Yang Dipertuan Agong* (Raja Malaysia pada tingkat federal) dengan masa kerja lima tahun. *Yang Dipertuan Agong* merupakan kepala dan simbol kenegaraan. Pemerintahan secara operasional dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih secara umum oleh seluruh rakyat Malaysia. Raja Malaysia saat ini adalah Al-Sulthan Abdullah Ri'ayatuddin yang berasal dari kerajaan Pahang. Perdana Menteri saat ini adalah Mahathir Muhammad, yang menjabat untuk kali kedua sejak 2018. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur yang berada di Semenanjung Malaysia, sementara pusat administrasi pemerintahannya adalah Putrajaya. Bahasa resmi Kerajaan Malaysia adalah bahasa Melayu dan agama resminya adalah Islam.

Secara geografis Malaysia terletak di Asia Tenggara, sedikit di atas garis khatulistiwa. Malaysia terbagi dua, yakni Malaysia Barat yaitu Semenanjung

Malaysia yang terletak di timur laut selat Malaka dan Malaysia Timur yang merupakan bagian utara pulau Borneo (Kalimantan), berbatasan darat dengan Indonesia. Total luas wilayah kerajaan Malaysia adalah 330.345 km², dengan jumlah penduduk 32.456.000 (perkiraan 2018). Penduduk Malaysia terdiri atas banyak kelompok etnis; namun yang paling dominan adalah etnis Melayu mencapai 50% dari total penduduk, Cina (22%), Orang Asli (12%), dan orang India (7%). Dalam kehidupan sehari-hari dan informal, masing-masing kelompok etnisnya menggunakan bahasanya; dan di dalam masing-masing bahasa tersebut masih terdapat beragam dialek. Dari segi agama, Islam adalah agama yang paling dominan (61%); lalu disusul oleh Budha (20%), Kristen (9%), dan Hindu (6%). Umat Islam Malaysia terdiri atas etnis Melayu dan sebagian Orang Asli, serta pendatang dari India dan Arab. Penganut Budha terutamanya adalah penduduk beretnis Cina dan penganut Hindu adalah para keturunan pendatang dari India. Penduduk Kristen lebih banyak ditemui di Sabah dan Sarawak, Borneo, yang menandakan jejak upaya Kristenisasi sejak masa penjajahan Inggris Raya.

Sejarah Islam di Malaysia modern berakar pada kebangkitan perdagangan Lautan Hindia yang menghubungkan Cina, Timur Tengah, dan Afrika Timur. Kekuatan Islam yang menonjol muncul dalam bentuk Kerajaan Malaka di abad ke-15. Kerajaan ini meluaskan pengaruhnya ke dua arah sehingga menguasai Semenanjung Malaysia dan sebagian pantai timur Sumatera, khususnya wilayah yang saat ini menjadi Kepulauan Riau, serta sebagian Riau dan Jambi. Jatuhnya Malaka kepada Portugis pada awal abad ke-16 menandai awal dominasi kekuatan Eropa di wilayah ini. Dalam perkembangan selanjutnya, Malaysia berada di bawah penjajahan Inggris Raya sejak abad ke-18. Pada awal abad ke-19 Inggris telah menguasai tiga pusat perdagangan terpenting—Pulau Pinang, Singapura, dan Malaka—yang membuatnya menjadi kekuatan paling dominan di Selat Malaka.

Malaysia baru memperoleh kemerdekaan pada tahun 1957. Semula, wilayah Malaysia mencakup Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak di utara Borneo, dan juga pulau Singapura. Belakangan, Singapura memisahkan diri dari Malaysia pada tahun 1965 dan menjadi negara sendiri. Pemerintahan Federal Malaysia pertama kali dipimpin oleh Tuanku Abdul Rahman (1957-1960) sebagai raja dan Tunku Abdul Rahman (1957-1970) sebagai Perdana Menteri. Di antara Perdana Menteri yang terkenal adalah Tun Abdul Razak, Tun Hussein Onn dan Mahathir Muhammad yang sekarang sedang menjabat (untuk kedua kalinya).

Keagamaan

Islam masuk ke Malaysia pada saat yang lebih kurang bersamaan dengan islamisasi Nusantara secara umum. Islam dibawa oleh orang Arab melalui India, mengikuti jalur pelayaran yang umum pada abad-abad lampau. Sejumlah kerajaan tumbuh di berbagai tempat yang kemudian belakangan membentuk negara federal Malaysia sebagaimana terlihat saat ini. Malaysia merupakan negara yang heterogen dari sudut pandang agama, dengan Muslim mencapai 61% dari total penduduk. Sebagian terbesar dari Muslim Malaysia adalah berasal dari etnis Melayu. Selebihnya merupakan pendatang dari wilayah anak benua India dan juga Timur Tengah. Islam merupakan agama resmi Malaysia. Sebagaimana kebanyakan Muslim Asia Tenggara, mazhab Syafi'iyah adalah yang paling dominan dipraktikkan di Malaysia. Negara Malaysia membantu memfasilitasi pelaksanaan Islam, seperti dalam hal pembangunan dan pengelolaan masjid dan surau. Posisi istimewa Islam di Malaysia tampaknya berakar pada kenyataan bahwa negara ini merupakan gabungan dari sejumlah kerajaan Islam yang masih terus ada hingga saat ini. Dalam tampilan sehari-hari umat Islam Malaysia biasa menggunakan pakaian yang berbasis tradisi Melayu; namun belakangan, pengaruh budaya Timur Tengah semakin kentara.

Meskipun Malaysia merupakan himpunan dari kerajaan-kerajaan Islam, konstitusinya memberikan jaminan kebebasan beragama bagi pemeluk agama lainnya, seperti Budha, Hindu, Kristen, maupun keyakinan-keyakinan penduduk asli. Oleh karenanya di Malaysia sejumlah perayaan keagamaan dilaksanakan secara meriah. Idul Fitri, Idul Adhha, Mawlid Nabi, Isra' Mi'raj, Waisak, Deepawali, Thaipusam, Natal, dan sebagainya dirayakan oleh masing-masing penganut agama yang ada.

Politik

Sebagai sebuah kerajaan federal politik Malaysia berada pada dua tingkatan, yakni tingkatan Persekutuan (Federal) dan pada tingkatan kerajaan (negara bagian). Pada tingkat federal, Malaysia dipimpin oleh seorang *Yang Dipertuan Agong* sebagai kepala negara dan oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. *Yang Dipertuan Agong* dipilih dari antara raja-raja yang ada untuk masa jabatan lima tahun. Perdana Menteri Malaysia dipilih secara umum oleh rakyat banyak, setiap lima tahun sekali. Pada tingkat kerajaan simbol kenegaraan adalah sultan/

raja yang bergelar *Yang Dipertuan Besar* atau *Yang Dipertuan Negeri*. Pemerintahan secara operasional dilaksanakan oleh Menteri Besar yang dipilih secara umum setiap lima tahun. Malaysia memiliki 13 kerajaan/negara bagian: Kelantan, Trengganu, Pahang, Kedah, Perak, Perlis, Selangor, Johor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Malaka, Sabah, Sarawak; dan tiga Wilayah Persekutuan: Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya.

Dunia politik Malaysia didominasi oleh puak Melayu pribumi dengan partai politik paling dominan adalah UMNO (United Malays National Organization). Semenjak awal 1970an, UMNO bersama dengan Malaysian Chinese Association (MCA), Malaysian Indian Congress (MIC), membangun sebuah aliansi Barisan Nasional (BN) yang berhasil mendominasi perpolitikan Malaysia sejak awal kemerdekaan. Dominasi Barisan Nasional baru berakhir dalam pemilihan umum bulan Mei 2018. Pemilihan umum tersebut dimenangi oleh Pakatan Harapan, yang merupakan gabungan beberapa partai oposisi. Pakatan Harapan berhasil memenangi pemilihan dan mendudukkan Mahathir Mohammad sebagai Perdana Menteri. Mahathir Mohamad sudah pernah menjadi Perdana Menteri Malaysia (1981-2003) dengan dukungan Barisan Nasional, menjadikannya Perdana Menteri Malaysia yang paling lama berkuasa. Mahathir Mohammad memutuskan untuk keluar dari UMNO, karena tidak setuju dengan dukungan UMNO terhadap Perdana Menteri Mohd Najib yang terlibat kasus korupsi.

Partai-partai politik di Malaysia kebanyakan berbasis pada kelompok etnis. Misalnya United Malays National Organization (UMNO), Malaysian Chinese Association (MCA), Malaysian Indian Congress (MIC), Sarawak United People's Party (SUPP), dan Parti Bersatu Sabah (PBS). Di antara partai politik oposisi (di Malaysia disebut sebagai *Parti Pembangkang*) yang penting adalah: Democratic Action Party (DAP), Parti Islam SeMalaysia (PAS), dan Parti Keadilan Rakyat (PKR). Jabatan-jabatan politik Malaysia kebanyakan diisi oleh puak Melayu pribumi; hanya sebagian kecil saja yang diisi oleh kelompok etnis lainnya, seperti Cina dan India. Dalam jajaran menteri yang saat ini membantu Perdana Menteri Mahathir Mohammad terdapat beberapa yang berasal dari etnis Cina dan India memimpin kementerian Keuangan, Transportasi, Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Air, dan Industri Primer.

Ekonomi

Hingga tahun 1970an pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah

sumber ekonomi utama Malaysia. Pertanian di Malaysia melibatkan berbagai tanaman yang umum di wilayah Asia Tenggara, mulai dari padi dan bijian lain, teh, hingga karet dan kelapa sawit. Negara ini adalah salah satu eksportir terbesar karet dan minyak kepala sawit dunia. Produk hutan Malaysia terutama berasal dari negara bagian Sabah dan Sarawak di pulau Borneo, meskipun juga terdapat hutan dalam skala yang lebih kecil di Malaysia Semenanjung. Di samping itu, Malaysia juga mengandalkan ekonominya pada industri perikanan. Malaysia juga memiliki sumber daya alam yang relatif besar, khususnya minyak dan gas bumi. Negara ini dikenal sebagai salah satu pengeksportir utama minyak dan gas bumi melalui perusahaan Petronas.

Malaysia juga relatif berhasil dalam pengembangan sektor industrinya. Pengembangan industri Malaysia ditujukan terutama untuk menurunkan ketergantungan terhadap produk impor dan mengandalkan produk dalam negeri. Pada awal abad ke-21, sekitar sepertiga dari pendapatan dalam negeri Malaysia berasal dari sektor industri ini dan menjadi penyumbang terbesar bagi perkembangan ekonominya. Industri yang paling menonjol di Malaysia adalah pada bidang mesin dan peralatan elektronik; disusul bidang produk kimia dan tekstil. Keberhasilan industri Malaysia didukung oleh strategi pembangunan Zona Perdagangan Bebas dengan fasilitas perpajakan dan juga membangun kompleks-kompleks industri di berbagai wilayah yang kurang berkembang. Meskipun Malaysia relatif mengutamakan industri kecil dan menengah, industri berat di negeri ini juga berkembang relatif baik. Misalnya, negeri ini merintis kerjasama dengan Jepang (Mitsubishi) dalam memproduksi mobil nasionalnya. Melalui skema alih teknologi yang rapi, belakangan Malaysia telah berhasil mengembangkan mobil nasionalnya dengan ketergantungan yang rendah pada komponen impor. Mobil yang mengusung merek Proton (ringkasan dari Perusahaan Otomobil Nasional) tersebut bahkan telah mulai dipasarkan secara internasional. Partner dagang paling utama negara Malaysia adalah Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Cina, Thailand, dan Korea Selatan.

Dengan perkembangan ekonomi yang stabil sejak beberapa dekade belakangan, Malaysia menjadi tujuan banyak pekerja internasional. Pekerja internasional yang datang ke Malaysia mengisi berbagai sektor mulai dari sektor profesional, pekerja pabrik, hingga tenaga kerja kasar dan non formal. Indonesia adalah penyumbang tenaga kerja terbesar bagi Malaysia; dan persoalan tenaga kerja ini menjadi salah satu tema yang sangat esensial

dalam hubungan kedua negara. Berdasarkan data tahun 2017, pendapatan per kapita bangsa Malaysia mencapai US\$9.650.

Sosial-Budaya

Malaysia merupakan tempat pertemuan banyak kebudayaan, mulai dari India Kuno, Cina, Islam, dan juga Eropa. Semua budaya yang datang dari luar tersebut dapat ditemukan pengaruhnya dalam kehidupan sosial-budaya Malaysia. Namun demikian identitas sosial-budaya Malaysia tetap saja berpijak pada tradisi tempatan, yakni budaya Melayu. Dalam kenyataannya, kata ‘Melayu’ tidak hanya berarti sebuah kelompok etnis akan tetapi juga memiliki konotasi agama. Karenanya, Melayu juga berarti beragama Islam. Jadi menyatakan bahwa seseorang adalah Melayu bermakna bahwa orang tersebut beragama Islam dan menghargai adat istiadat dan cara-cara Melayu. Dalam konteks ini seorang Melayu malah tidak selalu berarti bahwa orang tersebut secara biologis adalah Melayu.

Di samping kebudayaan Melayu, kebudayaan Cina juga cukup menonjol di Malaysia. Ini dengan mudah dilihat dari penggunaan aksara dalam informasi-informasi publik: nama individu, buku, majalah, surat kabar, merek bangunan, merek kendaraan, nama organisasi, dan seterusnya. Berbagai perayaan kultural Cina dirayakan dengan meriah di Malaysia. Seperti halnya kebudayaan Cina, kebudayaan India juga mendapatkan tempat dalam rupa warna kehidupan sosial Malaysia melalui banyak ekspresi. Ketiga kultur—Melayu, Cina, India—tampaknya merupakan sub kultur yang paling mewarnai kehidupan sosial sehari-hari bangsa Malaysia. Bahasa, gaya berpakaian, kuliner, dan aksara dari ketiga budaya tersebut dengan mudah ditemukan di jalan-jalan dan mewarnai secara signifikan kehidupan masyarakat Malaysia.

Sistem dan kelembagaan pendidikan di Malaysia kelihatannya mengikuti sistem Inggris, negara yang menjajah Malaysia sebelum kemerdekaan. Pendidikan di Malaysia mengalami kemajuan yang pesat beberapa dekade belakangan ini. Beberapa kampusnya menjadi kampus yang bereputasi pada level Asia Tenggara dan bahkan dunia. Di Kuala Lumpur terdapat International Islamic University (Universiti Antara Bangsa) yang merepresentasikan partisipasi dan kontribusi negara ini dalam pengembangan epistemologi dan pendidikan tinggi Islam. Sesuai misinya, kampus ini menghadirkan banyak ilmunan dan mahasiswa dari berbagai negara. Di antara tokoh sentralnya adalah Syed Muhammad Naquib al-Attas, seorang pemikir

dan penulis produktif tentang pemikiran dan peradaban Islam. Di antara karyanya adalah *Konsep Pendidikan dalam Islam*, *Islam dan Filsafat Sains*, *Islam dan Sekularisme*, dan *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*. Al-Attas mempelopori pendirian ISTAC (International Institute of Islamic Thought and Civilisation) pada 1987, namun belakangan (2005) telah berganti nama menjadi ISLAH (Ibn Khaldun International Institute of Advanced Research). Lembaga ini merupakan pusat pendidikan tingkat pascasarjana di mana pengajar dan mahasiswanya berasal dari berbagai negara.



BAB IV

MINORITAS MUSLIM

Total penganut Islam di dunia saat ini diperkirakan mencapai 1,7 milyar, tersebar di seluruh penjuru dunia. Tentu saja kebanyakan dari umat Islam hidup di negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, termasuk yang sudah digambarkan di bagian sebelumnya. Namun demikian, sekitar seperempat dari umat Islam hidup di negara-negara dengan penduduk mayoritasnya bukan Muslim. Mereka itulah yang disebut dengan minoritas Muslim. *Collins English Dictionary* mendefinisikan kata *minority* sebagai berikut: “A minority is a group of people of the same race, culture, or religion who live on a place where most of the people around them are of different race, culture, or religion.”¹ Meskipun pada dasarnya status minoritas pertama sekali mengacu pada status kuantitatif, akan tetapi persoalan kaum minoritas biasanya mengemuka karena keterpinggiran dan perlakuan yang tidak semestinya oleh kelompok yang lebih besar, bukan semata karena jumlah.

A. Terbentuknya Minoritas Muslim

Dalam proses sejarahnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terciptanya kelompok minoritas Muslim di berbagai tempat. Faktor-faktor terpentingnya adalah:

¹ <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english>, pada entry “minority”, diakses 14 April 2019.

1. *Pembentukan negara-bangsa*. Sejarah dunia pada abad ke-20 antara lain diwarnai dengan proses pelepasan bangsa-bangsa terjajah di Asia dan Afrika dari bangsa-bangsa penjajah. Proses ini kemudian melahirkan sejumlah besar negara-bangsa. Penetapan batas-batas wilayah sebuah negara-bangsa seringkali didasarkan atas realitas politik setempat pada saat pembentukan negara-bangsa. Penetapan batas-batas tersebut sering kali lebih didominasi oleh kekuatan penjajah atau melalui persetujuan lembaga internasional semacam Persatuan Bangsa-Bangsa. Proses penetapan batas sebuah negara-bangsa tersebut dapat melahirkan sebuah minoritas manakala tidak memperhatikan batas-batas tradisional pengaruh kultural, etnisitas, atau agama. Inilah yang terjadi, misalnya, pada komunitas Muslim di Singapura, Filipina Selatan dan Thailand Selatan. Sebelumnya, pada masa kejayaan pengaruh Islam, ketiga wilayah tersebut termasuk dalam wilayah religio-kultural Dunia Melayu, yang juga mencakup seluruh Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Akan tetapi, batas-batas negara yang baru menjadikan sekelompok Muslim menjadi kelompok minoritas di tiga negara tersebut. Dalam kasus Filipina, umat Islam merupakan 9,5% dari total 10 juta penduduk yang mayoritasnya adalah penganut Katolik. Dalam kasus Thailand, umat Islam merupakan 4,3% dari total 68 juta penduduk yang mayoritasnya adalah penganut Budha. Adapun di Singapura, umat Islam merupakan 14,9% dari total penduduk 5,6 juta yang mayoritasnya menganut Kong Hu Cu.
2. *Konversi*. Minoritas Muslim juga terbentuk apabila sekelompok kecil orang dari bangsa tertentu memutuskan untuk masuk Islam sementara kelompok yang lebih besar tidak masuk Islam. Inilah yang terjadi, misalnya, dengan etnis Hui di Cina. Hui adalah etnis Cina asli yang diakui dan merupakan satu-satunya etnis Cina yang memeluk Islam. Jumlah mereka sekitar 10.000.000 atau sekitar 0,7% dari hampir 1,4 miliar total penduduk Cina. Muslim Hui terutama tinggal di bagian barat laut Cina, seperti Ningxia, Gansu, Qinghai, dan Xinjiang. Proses konversi di satu wilayah dapat mengambil pola yang berbeda dengan di tempat lain. Hal ini menentukan apakah sekelompok minoritas Muslim akan terus menjadi minoritas atau secara perlahan berubah karena pertumbuhan jumlahnya secara komparatif dengan kelompok populasi lain.
3. *Migrasi*. Perpindahan penduduk, atau migrasi, dari satu negara ke negara lain merupakan proses lain terbentuknya minoritas Muslim. Migrasi

penduduk dapat terjadi dengan berbagai faktor penyebab. Kesenjangan perkembangan ekonomi satu negara dengan negara lain dapat menyebabkan migrasi, biasanya dari negara yang ekonominya kurang berkembang ke negara dengan ekonomi yang lebih berkembang. Motivasi utama dalam hal ini adalah upaya memperbaiki tingkat kehidupan. Migrasi juga terjadi karena konflik atau perang yang membuat satu wilayah tidak mungkin lagi dihuni dan penduduknya terpaksa pindah, terkadang hingga melampaui batas negara. Proses migrasi dapat berlangsung secara berangsur-angsur dalam waktu lama, akan tetapi dapat juga terjadi secara cepat. Sejumlah umat Islam telah melakukan migrasi ke berbagai negara Barat sepanjang abad ke-20 dan ke-21 untuk mengejar perbaikan kondisi ekonomi. Konflik di berbagai negara—seperti di Palestina, Irak, Suriah, Afghanistan, Kashmir—juga melahirkan gelombang migrasi ke berbagai negara, termasuk negara-negara Eropa. Dengan berbagai motivasinya, proses migrasi telah membentuk kantong-kantong penduduk Muslim di berbagai negara. Misalnya, saat ini diketahui bahwa 4,3% dari 84 juta total penduduk Jerman adalah Muslim. Di Prancis, 4,3% dari 65 juta total penduduk adalah Muslim; di Inggris, 4,4% dari 66,5 juta total penduduk adalah Muslim; di Belgia, 4% dari 11,5 total penduduk adalah Muslim; dan di Amerika Serikat, 1,3% dari 328,5 juta penduduknya adalah Muslim.

4. *Pengusiran*. Kelompok minoritas Muslim juga terbentuk karena adanya pengusiran besar-besaran umat Islam. Hal seperti ini terjadi di Spanyol, dikenal sebagai Andalusia pada masa penguasaan Islam. Pada abad ke-15, dengan melemahnya kekuasaan Islam, kekuatan Kristen bangkit dan melakukan pengusiran penduduk yang tidak bersedia masuk agama Kristen. Peristiwa yang biasa dikenal sebagai *Reconquista* ini pada prinsipnya mengusir habis umat Islam dari Spanyol, kecuali sejumlah kecil saja yang berupaya bertahan sembari menyembunyikan identitas keagamaannya. Mereka ini kemudian menjadi minoritas yang sangat kecil dan teraniaya di sana. Belakangan, jumlah umat Islam di Spanyol memang sedang bertumbuh, namun lebih banyak melalui proses migrasi. Belakangan ini diketahui bahwa sekitar 4% dari 46,5 juta total penduduk Spanyol adalah Muslim.

Demikianlah beberapa proses sejarah yang mengakibatkan terbentuknya komunitas minoritas Muslim di berbagai tempat di dunia. Kelompok-kelompok minoritas Muslim tersebut mengalami dinamika yang berbeda-

beda, sesuai dengan keadaan tempat mereka menetap. Kelompok minoritas tertentu menemui hambatan yang lebih berat dari kelompok lainnya. Sebab komunitas yang lebih besar kelompok mayoritas tertentu bisa saja lebih menerima terhadap orang Islam dibanding komunitas lainnya. Akan tetapi satu hal cukup jelas, bahwa kecenderungan umat Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia mengalami peningkatan cepat dalam beberapa waktu belakangan ini, sejalan dengan semakin mudahnya perpindahan manusia dan semakin canggihnya modus-modus transportasi.

B. Negara-negara Berpenduduk Minoritas Muslim

Dengan berbagai macam proses sejarah, umat Islam dalam jumlah yang cukup signifikan menjadi kelompok minoritas di berbagai tempat. Pada dasarnya, umat Islam dapat ditemukan di semua negara yang ada saat ini, dengan jumlah yang tentunya bervariasi. Jika di atas telah digambarkan sejumlah negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam, di bawah ini akan digambarkan pula sejumlah negara dengan penduduk Muslim minoritas.

Tabel 6
Minoritas Muslim di Berbagai Negara²

No	Negara	Penduduk Muslim (1990)	%	Penduduk Muslim (2010)	%	Perkiraan Muslim (2030)	Perkiraan %
1.	Nigeria	46.302.000	47,6	75.728.000	47,9	116.832.000	51,5
2.	Guinea-Bissau	388.000	38,0	705.000	42,8	1.085.000	42,8
3.	Bosnia-Herzegovina	1.843.000	42,8	1.564.000	41,6	1.503.000	42,7
4.	Ivory Coast	4.880.000	38,7	7.960.000	36,9	12.977.000	39,9
5.	Eriteria	1.219.000	38,6	1.909.000	36,5	2.955.000	36,5
6.	Republik Macedonia	441.000	23,1	713.000	34,9	812.000	40,3
7.	Ethiopia	15.827.000	32,8	28.721.000	33,8	44.466.000	33,8
8.	Tanzania	7.637.000	30,0	13.450.000	29,9	19.463.000	25,8

² Sumber: <https://www.pewforum.org/2011/01/27/table-muslim-population-by-country>, diakses 15 April 2019.

SEJARAH ISLAM MODERN: Agama dalam Negosiasi Historis Sejak Abad XIX

9.	Benin	982.000	20,5	2.259.000	24,5	3.777.000	24,5
10.	Mozambik	1.761.000	13,0	5.340.000	22,8	7.733.000	22,8
11.	Cyprus	2.000	0,3	200.000	22,7	240.000	22,7
12.	Montenegro	94.000	16,0	116.000	18,5	136.000	21,5
13.	Cameroon	2.691.000	22,0	3.598.000	18,0	5.481.000	19,2
14.	Israel	634.000	14,1	1.287.000	17,7	2.135.000	23,2
15.	Mauritius	172.000	16,3	216.000	16,6	236.000	16,6
16.	Ghana	2.245.000	15,0	3.906.000	16,1	6.350.000	18,2
17.	Suriname	57.000	14,0	84.000	15,9	96.000	15,9
18.	Singapura	464.000	15,4	721.000	14,9	813.000	14,9
19.	India	100.873.000	11,7	177.286.000	14,6	236.182.000	15,9
20.	Bulgaria	1.155.000	13,1	1.002.000	13,4	1.016.000	15,7
21.	Malawi	1.512.000	16,0	2.011.000	12,8	3.326.000	12,8
22.	Liberia	312.000	14,4	523.000	12,8	825.000	12,8
23.	Togo	449.000	11,4	827.000	12,2	1.234.000	12,2
24.	Uganda	1.862.000	10,5	4.060.000	12,0	6.655.000	10,9
25.	Rusia	13.634.000	9,2	16.379.000	11,7	18.556.000	14,4
26.	Georgia	625.000	11,5	442.000	10,5	433.000	11,5
27.	Gabon	31.000	3,3	145.000	9,7	244.000	11,9
28.	Rep. Afrika Tengah	234.000	8,0	403.000	8,9	550.000	8,9
29.	Sri Lanka	1.383.000	8,0	1.725.000	8,5	1.876.000	8,5
30.	Prancis	568.000	1,0	4.704.000	7,5	6.860.000	10,3
31.	Guyana	67.000	9,0	55.000	7,2	51.000	7,2
32.	Kenya	1.406.000	6,0	2.868.000	7,0	5.485.000	8,7
33.	Fiji	58.000	8,0	54.000	6,3	58.000	6,3
34.	Belgia	266.000	2,7	638.000	6,0	1.149.000	10,2
35.	Thailand	2.324.000	4,1	3.952.000	5,8	4.261.000	5,8
36.	Trinidad - Tobago	72.000	5,9	78.000	5,8	80.000	5,8
37.	Austria	161.000	2,1	475.000	5,7	799.000	9,3
38.	Swiss	148.000	2,2	433.000	5,7	663.000	8,1
39.	Belanda	344.000	2,3	914.000	5,5	1.365.000	7,8
40.	Filipina	2.872.000	4,6	4.737.000	5,1	7.094.000	5,7
41.	Jerman	2.506.000	3,2	4.119.000	5,0	5.545.000	7,1
42.	Swedia	147.000	1,7	451.000	4,9	993.000	9,9
43.	Liechtenstein	< 1.000	2,4	2.000	4,8	2.000	4,8
44.	Yunani	254.000	2,5	527.000	4,7	772.000	6,9
45.	Inggris	1.172.000	2,0	2.869.000	4,6	5.567.000	8,2
46.	Mongolia	211.000	9,5	120.000	4,4	144.000	4,4

SEJARAH ISLAM MODERN: Agama dalam Negosiasi Historis Sejak Abad XIX

47.	Nepal	688.000	3,6	1.253.000	4,2	1.705.000	4,2
48.	Reunion	14.000	2,4	35.000	4,2	42.000	4,2
49.	Denmark	109.000	2,1	226.000	4,1	317.000	5,6
50.	Equatorial Guinea	11.000	2,8	28.000	4,1	43.000	4,1
51.	Gibraltar	2.000	6,9	1.000	4,0	1.000	4,0
52.	Myanmar	654.000	1,6	1.900.000	3,8	2.233.000	3,8
53.	Serbia	412.000	5,6	280.000	3,7	377.000	5,1
54.	Norwegia	54.000	1,3	144.000	3,0	359.000	6,5
55.	Kanada	313.000	1,1	940.000	2,8	2.661.000	6,6
56.	New Caledonia	6.000	3,7	7.000	2,8	9.000	2,8
57.	Italia	858.000	1,5	1.583.000	2,6	3.199.000	5,4
58.	Argentina	444.000	1,4	1.000.000	2,5	1.233.000	2,6
59.	Slovenia	29.000	1,5	49.000	2,4	49.000	2,4
60.	Spanyol	271.000	0,7	1.021.000	2,3	1.859.000	3,7
61.	Luxemburg	3.000	0,7	11.000	2,3	14.000	2,3
62.	Burundi	90.000	1,6	184.000	2,2	258.000	2,2
63.	Australia	154.000	0,9	399.000	1,9	714.000	2,8
64.	Cina	16.839.000	1,5	23.308.000	1,8	29.949.000	2,1
65.	Rwanda	170.000	2,4	188.000	1,8	363.000	2,3
66.	St. Vincent and the Grenadines	1.000	1,0	2.000	1,7	2.000	1,7
67.	Cambodia	233.000	2,4	240.000	1,6	320.000	1,6
68.	Republic Kongo	26.000	1,1	60.000	1,6	88.000	1,6
69.	Afrika Selatan	525.000	1,4	737.000	1,5	799.000	1,5
70.	Kongo	473.000	1,3	969.000	1,4	1.552.000	1,4
71.	Hong Kong	57.000	1,0	91.000	1,3	105.000	1,3
72.	Kroasia	52.000	1,1	56.000	1,3	54.000	1,3
73.	Virgin Islands (British)	< 1.000	0,9	< 1.000	1,2	< 1.000	1,2
74.	Madagascar	106.000	0,9	220.000	1,1	309.000	1,0
75.	Andorra	< 1.000	0,5	< 1.000	1,1	1.000	1,1
76.	Seychelles	< 1.000	0,5	< 1.000	1,1	< 1.000	1,1
77.	Angola	40.000	0,4	195.000	1,0	312.000	1,0
78.	Bhutan	6.000	1,0	7.000	1,0	9.000	1,0

SEJARAH ISLAM MODERN: Agama dalam Negosiasi Historis Sejak Abad XIX

79.	Ukraina	103.000	0,2	393.000	0,9	408.000	1,0
80.	Zimbabwe	94.000	0,9	109.000	0,9	155.000	0,9
81.	Irlandia	15.000	0,4	43.000	0,9	125.000	2,2
82.	Selandia Baru	7.000	0,2	41.000	0,9	101.000	2,0
83.	Barbados	< 1.000	< 0,1	2.000	0,9	2.000	0,9
84.	French Guiana	1.000	1,0	2.000	0,9	3.000	0,9
85.	Amerika Serikat	1.529.000	0,6	2.595.000	0,8	6.216.000	1,7
86.	Finlandia	11.000	0,2	42.000	0,8	105.000	1,9
87.	Bermuda	< 1.000	0,8	< 1.000	0,8	< 1.000	0,8
88.	Panama	109.000	4,5	25.000	0,7	32.000	0,7
89.	Mariana Islands	< 1.000	0,5	< 1.000	0,7	< 1.000	0,7
90.	Portugal	10.000	0,1	65.000	0,6	65.000	0,6
91.	Antigua-Barbuda	< 1.000	0,5	< 1.000	0,6	< 1.000	0,6
92.	Monaco	< 1.000	0,3	< 1.000	0,5	< 1.000	0,5
93.	Zambia	33.000	0,4	59.000	0,4	94.000	0,4
94.	Moldova	4.000	0,1	15.000	0,4	13.000	0,4
95.	Namibia	4.000	0,3	9.000	0,4	12.000	0,4
96.	Botswana	3.000	0,2	8.000	0,4	10.000	0,4
97.	Guadeloupe	3.000	0,7	2.000	0,4	2.000	0,4
98.	Aruba	< 1.000	0,2	< 1.000	0,4	< 1.000	0,4
99.	Venezuela	44.000	0,2	95.000	0,3	121.000	0,3
100.	Rumania	46.000	0,2	73.000	0,3	73.000	0,4
101.	Hungaria	17.000	0,2	25.000	0,3	24.000	0,3
102.	Anguilla	< 1.000	0,4	< 1.000	0,3	< 1.000	0,3
103.	Grenada	< 1.000	0,3	< 1.000	0,3	< 1.000	0,3
104.	Malta	< 1.000	0,2	1.000	0,3	1.000	0,3
105.	St. Kitts and Nevis	< 1.000	0,1	< 1.000	0,3	< 1.000	0,3
106.	Vietnam	662.000	1,0	160.000	0,2	190.000	0,2
107.	Korea Selatan	43.000	0,1	75.000	0,2	76.000	0,2
108.	Belarus	10.000	0,1	19.000	0,2	17.000	0,2
109.	Swaziland	4.000	0,5	2.000	0,2	2.000	0,2
110.	Kepulauan Cayman	< 1.000	0,1	< 1.000	0,2	< 1.000	0,2
111.	Dominica	< 1.000	0,1	< 1.000	0,2	< 1.000	0,2

SEJARAH ISLAM MODERN: Agama dalam Negosiasi Historis Sejak Abad XIX

112.	Isle of Man	< 1.000	0,1	< 1.000	0,2	< 1.000	0,2
113.	Martinique	< 1.000	0,2	< 1.000	0,2	< 1.000	0,2
114.	Netherlands Antilles	< 1.000	0,2	< 1.000	0,2	< 1.000	0,2
115.	St. Pierre and Miquelon	< 1.000	0,1	< 1.000	0,2	< 1.000	0,2
116.	Brazil	145.000	0,1	204.000	0,1	227.000	0,1
117.	Jepang	118.000	0,1	185.000	0,1	171.000	0,1
118.	Mexico	60.000	0,1	111.000	0,1	126.000	0,1
119.	Taiwan	97.000	0,5	23.000	0,1	25.000	0,1
120.	Polandia	6.000	< 0,1	20.000	0,1	19.000	0,1
121.	Kolombia	119.000	0,4	14.000	< 0,1	17.000	< 0,1
122.	Honduras	6.000	0,1	11.000	0,1	15.000	0,1
123.	Kuba	6.000	0,1	10.000	0,1	10.000	0,1
124.	Chili	< 1.000	< 0,1	4.000	< 0,1	5.000	< 0,1
125.	Republik Czechnya	< 1.000	< 0,1	4.000	< 0,1	4.000	< 0,1
126.	Slovakia	< 1.000	< 0,1	4.000	0,1	4.000	0,1
127.	Lithuania	7.000	0,2	3.000	0,1	2.000	0,1
128.	Korea Utara	1.000	< 0,1	3.000	< 0,1	3.000	< 0,1
129.	Bolivia	1.000	< 0,1	2.000	< 0,1	3.000	< 0,1
130.	Republik Dominica	1.000	< 0,1	2.000	< 0,1	3.000	< 0,1
131.	Ekuador	< 1.000	< 0,1	2.000	< 0,1	2.000	< 0,1
132.	El Salvador	1.000	< 0,1	2.000	< 0,1	2.000	< 0,1
133.	Estonia	9.000	0,6	2.000	0,1	2.000	0,1
134.	Haiti	2.000	< 0,1	2.000	< 0,1	3.000	< 0,1
135.	Latvia	3.000	0,1	2.000	0,1	2.000	0,1
136.	Papua Nugini	< 1.000	< 0,1	2.000	< 0,1	3.000	< 0,1
137.	American Samoa	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1
138.	Armenia	128.000	3,6	1.000	< 0,1	1.000	< 0,1
139.	Bahamas	< 1.000	< 0,1	< 1.000	0,1	< 1.000	0,1
140.	Belize	< 1.000	0,1	< 1.000	0,1	< 1.000	0,1
141.	Cape Verde	7.000	1,8	< 1.000	0,1	< 1.000	0,1
142.	Kepulauan Channel	< 1.000	0,1	< 1.000	0,1	< 1.000	0,1
143.	Kepulauan Cook	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1

SEJARAH ISLAM MODERN: Agama dalam Negosiasi Historis Sejak Abad XIX

144.	Costa Rica	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1
145.	Kepulauan Faeroe	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1
146.	Malvinas	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1
147.	Mikronesia	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1
148.	French Polynesia	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1
149.	Greenland	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1
150.	Guam	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1
151.	Guatemala	< 1.000	< 0,1	1.000	< 0,1	2.000	< 0,1
152.	Islandia	< 1.000	0,1	< 1.000	0,1	< 1.000	0,1
153.	Jamaika	3.000	0,1	1.000	< 0,1	1.000	< 0,1
154.	Kiribati	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1
155.	Laos	1.000	< 0,1	1.000	< 0,1	2.000	< 0,1
156.	Lesotho	< 1.000	0,1	1.000	< 0,1	1.000	< 0,1
157.	Macau	< 1.000	0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1
158.	Kepulauan Marshall	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1
159.	Montserrat	< 1.000	0,1	< 1.000	0,1	< 1.000	0,1
160.	Nauru	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1
161.	Nikaragua	< 1.000	< 0,1	1.000	< 0,1	1.000	< 0,1
162.	Niue	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1
163.	Palau	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1
164.	Paraguay	< 1.000	< 0,1	1.000	< 0,1	2.000	< 0,1
165.	Peru	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1
166.	Kepulauan Pitcairn	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1
167.	Puerto Rico	< 1.000	< 0,1	1.000	< 0,1	1.000	< 0,1
168.	Samoa	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1
169.	San Marino	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1
170.	Sao Tome-Principe	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1
171.	Solomon Islands	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1
172.	St. Helena	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1
173.	St. Lucia	< 1.000	0,1	< 1.000	0,1	< 1.000	0,1
174.	Timor-Leste	39.000	5,3	1.000	0,1	2.000	0,1
175.	Tokelau	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1
176.	Tonga	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1

177.	Turks and Caicos	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1
178.	Tuvalu	< 1.000	0,1	< 1.000	0,1	< 1.000	0,1
179.	Uruguay	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1
180.	U.S. Virgin Islands	< 1.000	0,1	< 1.000	0,1	< 1.000	0,1
181.	Vanuatu	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1
182.	Vatican City	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1
183.	Wallis-Futuna	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1	< 1.000	< 0,1

Tabel di atas mengaskan satu hal, umat Islam telah hadir di seluruh dunia, umat Islam telah menyebar dan menjadi penghuni semua negara yang ada saat ini, di timur, di barat, di utara, dan di selatan. Beberapa negara diperkirakan akan mengalami lonjakan kenaikan persentase penduduk Muslim pada tahun-tahun mendatang. Jika diperhatikan, beberapa negara akan mengalami kenaikan hingga 5% atau lebih dalam rentang waktu tahun 2010 hingga 2030. Ini mencakup Israel (tingkat pertumbuhan diperkirakan 5,5%), Republik Macedonia (5,2%), dan Swedia (5%). Beberapa yang lain diperkirakan akan mengalami kenaikan dalam rentangan 3%-4%; mencakup Belgia (4,2%), Kanada (3,8%), Prancis (3,7), Austria (3,6%), Nigeria (3,6%), Norwegia (3,5%) dan Montenegro (3%).

Patut pula dicatatkan bahwa beberapa negara lain, meskipun kenaikan persentasenya tidak terlalu tinggi, tetapi karena populasinya besar akan menyumbang signifikan terhadap total Muslim secara universal. Ke dalam kelompok ini dapat dimasukkan negara-negara India, Etiopia, Cina, dan Filipina.

C. Minoritas Muslim di Berbagai Negara

Di bawah ini akan dideskripsikan keadaan minoritas di berbagai negara, baik di dunia Timur maupun Barat. Negara-negara ini dipilih karena dipandang lebih relevan terhadap perkembangan sejarah Islam modern jika dibandingkan negara lainnya. Negara-negara di bawah ini relevan terutama karena jumlah penduduk Muslim yang sangat besar atau posisi strategisnya dalam peradaban dunia saat ini.

1. India

Republik India adalah negara yang menempati sebagian besar anak benua India atau Asia Selatan. India berbatasan dengan Cina, Nepal, Buthan, dan Pakistan di sebelah utara; Bangladesh, dan Myanmar di sebelah timur, dan selebihnya merupakan garis pantai teluk Bengal, Laut India, dan Laut Arab. Luas wilayah India mencapai 3.166.361 km². India memiliki penduduk 1.364.612.000 jiwa menurut perkiraan 2018, terbesar kedua sedunia, setelah Cina. Menurut perhitungan tahun 2017, pendapatan per kapita rakyat India adalah USD1.800.

Data penduduk India pada tahun 2011 menunjukkan bahwa komposisi dari sudut agama adalah Hindu 79,8%, Islam 14,2%, Kristen 2,3%, Sikh 1,7%, agama lainnya 2%. Jadi dapat dikatakan bahwa umat Islam di India hidup di tengah lautan penganut Hindu. Meskipun dari segi persentase (14,2) mungkin tampak tidak terlalu tinggi, mengingat besarnya jumlah penduduk India, total umat Islam di negara tersebut sangat signifikan, yaitu 193.774.904 jiwa. Jumlah ini jelas sangat besar, melampaui jumlah umat Islam di kebanyakan negara berpenduduk mayoritas, dengan perkecualian Indonesia dan Pakistan saja.

Minoritas Muslim di India telah memiliki akar sejarah yang sangat panjang, sejak penaklukan yang dilakukan oleh Muslim dari wilayah Persia. Di India pernah berjaya kerajaan Islam Mughal (1526-1857). Pada masa tersebut lah proses islamisasi sejumlah besar bangsa India terjadi dan bergabung dengan penduduk yang bermigrasi ke sana, utamanya dari wilayah Persia. Ketika merdeka dari Inggris pada tahun 1947 India mencakup negara Pakistan dan Bangladesh. Pakistan (termasuk di dalamnya Bangladesh) memisahkan diri dan membentuk sebuah republik Islam pada 1947; lalu Bangladesh kemudian memisahkan diri pula dari Pakistan menjadi negara sendiri pada tahun 1971. Namun demikian, jika pun penduduk tiga negara tersebut digabungkan, umat Islam tetap saja merupakan minoritas dengan persentase sekitar 30%.

2. Cina

Republik Rakyat Cina adalah negara yang terletak di Asia Timur. Negara ini berbatasan dengan Kirgistan, Kazakhstan, Mongolia dan Rusia di sebelah utara; Korea Utara di timur; Vietnam dan Myanmar di selatan; serta Buthan, Nepal dan India di barat. Cina adalah negara yang sangat

luas, mencapai 9.572.900 km², membuatnya menjadi salah satu negara paling luas di dunia. Luas wilayahnya hampir setara dengan keseluruhan benua Eropa. Cina adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar se dunia, yaitu 1.390.691.000 jiwa, menurut data 2018. Belakangan Cina mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik dan pendapatan per kapitanya mencapai USD8.260, menurut data tahun 2016.

Dari penduduk Cina yang demikian besar, komposisinya berdasarkan agama adalah: tidak menganut agama 52,2%, penganut agama-agama lokal 21,9%, Budha 18,2%, Kristen 5,1%, Islam 1,8% dan agama lainnya 0,8%. Jika dihitung dari jumlah penduduk Cina di atas, maka jumlah umat Islam di negara tersebut mencapai 25.032438 jiwa. Jumlah ini, sesungguhnya, melampaui jumlah umat Islam di berbagai negara mayoritas, baik di Timur Tengah maupun di Afrika. Dengan demikian, maka Cina menjadi rumah umat Islam dalam jumlah yang cukup substantif. Kebanyakan dari minoritas Muslim di Cina adalah dari suku Hui; kelompok lainnya adalah dari etnis Uighur, Kazakhs, Uzbek, Kyrgis, dan Tajik yang merupakan kelompok etnis pendatang.

3. Rusia

Federasi Rusia—hingga tahun 1991 merupakan negara terpenting dari Uni Soviet—adalah negara yang sangat luas; wilayahnya mencakup Eropa Timur dan Asia bagian utara. Secara keseluruhan, luas wilayahnya mencapai 17.125.000 km², menjadikannya sebagai negara yang paling luas di dunia. Rusia berbatasan dengan garis pantai laut Baltik di sebelah utara; lautan Pasifik di sebelah timur; Kazakhstan, Mongolia, dan Cina di sebelah selatan; serta Finlandia, Estonia, Latvia, Lithuania, Belarusia, dan Ukraina di sebelah barat. Berdasarkan data tahun 2018, jumlah penduduk Rusia mencapai 139.599.000. Pendapatan per kapita bangsa Rusia adalah USD9.230, berdasarkan data tahun 2017.

Komposisi penduduk Rusia berdasarkan agama adalah sebagai berikut: Kristen (semua denominasi) 73%, tidak beragama 15%, Islam 10%, agama lainnya 2%.³ Dengan demikian maka jumlah umat Islam di Rusia, mengacu kepada penduduk tahun 2018, mendekati 14 juta jiwa, sebuah jumlah yang cukup besar. Beberapa sumber lain mengatakan bahwa jumlah umat

³ <https://www.worldatlas.com/articles/religious-beliefs-in-modern-russia.html>, diakses 15 April 2019.

Islam di Rusia lebih besar lagi, mencapai 25 juta jiwa.⁴ Jumlah ini cenderung berkembang relatif cepat dan stabil beberapa dekade belakangan karena semakin terbukanya sistem politik di wilayah tersebut. Faktor terbesar perkembangan umat Islam adalah tingkat kelahiran yang tinggi dan migrasi dari wilayah-wilayah Asia Tengah. Penduduk Muslim Rusia terutama menempati kota-kota besar seperti Moskow, St. Petersburg, dan Yekaterinburg. Pengakuan terhadap Muslim terus semakin meningkat dan berbagai institusi keagamaan Islam sedang dalam pertumbuhan pesat.

4. Thailand

Kerajaan Thailand merupakan negara di Asia Tenggara. Negara ini berbatasan dengan Laos dan Myanmar di sebelah utara; dengan Laos dan Kamboja di sebelah timur; dengan Malaysia di sebelah selatan; serta dengan Myanmar di sebelah barat. Luas wilayah Thailand mencapai 513120 km². Berdasarkan data tahun 2018, penduduknya mencapai 68.015.000 jiwa. Data tahun 2017 menyatakan bahwa pendapatan per kapita Thailand adalah USD5.960.

Dari segi keragaman agama, komposisi penduduk Thailand adalah sebagai berikut: Budha 94,6%, Islam 4,3%, serta Kristen dan lainnya 1,1%. Dengan persentase demikian maka jumlah umat Islam di negara ini mendekati 3 juta orang. Di samping kota Bangkok, umat Islam Thailand banyak dijumpai di bagian selatan, di provinsi-provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, dan Songkhla. Wilayah selatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia merupakan bekas kekuasaan kerajaan Pattani, sekurangnya hingga abad ke-13, sebelum dikalahkan oleh kerajaan Budha Sukhotai. Penduduk muslim pada umumnya menggunakan bahasa Melayu, berbeda dengan kebanyakan populasi di utara yang menggunakan bahasa Thai (Siam). Muslim Thailand melakukan perjuangan untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas bagi mereka di selatan.

5. Filipina

Filipina merupakan negara kepulauan (lebih dari 7000 pulau besar dan kecil) di Asia Tenggara, di bagian barat Laut Pasifik. Nama negara tersebut

⁴ <https://www.aljazeera.com/indepth/features/islam-russia-180307094248743.html>, diakses 15 April 2019.

diambil dari nama Raja Philip II dari Spanyol, yang pernah menjajah negara tersebut. Filipina berdekatan dengan Cina, Laos, Vietnam, Thailand, Kamboja, Brunei dan Indonesia; namun sebagai negara kepulauan perbatasannya adalah laut. Luas wilayahnya mencapai 300.000 km². Berdasarkan data tahun 2018, penduduk negara ini adalah 106.126.000 jiwa. Data tahun 2017 menyatakan bahwa pendapatan perkapita Filipina adalah USD3.660.

Penduduk Filipina menganut berbagai agama; yang paling utama adalah Katolik 79,5%, Islam 6%, Iglesia ni Cristo 2,6%, Evangelis 2,4%, lain-lainnya 9,5%. Dengan demikian maka jumlah umat Islam di negara ini mencapai 6,3 juta jiwa. Umat Islam Filipina terutama sekali terkonsentrasi di bagian selatan, khususnya di pulau Mindanao. Islam mulai dikenal di Filipina bersamaan dengan proses islamisasi Nusantara secara umum pada sekitar abad ke-12 dan abad ke-13. Bangsa Filipina pada dasarnya sama dengan etnis Melayu yang ada di daratan Asia Tenggara dan kepulauan Indonesia. Setelah penjajahan Spanyol dan kemudian Amerika Serikat, pengaruh Islam menurun dan digantikan oleh Kristen, sehingga pada akhirnya umat Islam menjadi minoritas. Umat Islam telah lama berupaya memisahkan diri dari Filipina melalui Front Pembebasan Muslim Moro. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pemerintah Filipina akan memberikan otonomi yang cukup luas dan komprehensif bagi umat Islam di pulau Mindanao.

6. Jerman

Jerman adalah negara besar Eropa. Jerman berbatasan dengan Denmark di sebelah utara; dengan Polandia dan Republik Ceko di sebelah timur; dengan Austria dan Swiss di sebelah selatan; serta dengan Prancis, Belgia, dan Belanda di sebelah barat. Luas wilayahnya mencapai 357.104 km². Penduduk Jerman pada tahun 2018 berjumlah 84.156.000 jiwa, menjadikannya sebagai negara berpenduduk paling besar di Eropa Barat. Jerman adalah negara yang sangat cepat berkembang setelah Perang Dunia II. Data tahun 2017 menunjukkan bahwa pendapatan per kapita negeri ini mencapai USD43.490.

Komposisi penduduk Jerman dari segi keagamaan adalah penganut Lutheran sebesar 34%, Katolik 32,5%, Islam 4,3%, Ateis 2%, Kristen Ortodok 1,7%, Kristen Independen 0,5%, tanpa agama 18%, dan lainnya 7%. Berdasarkan persentase tersebut maka jumlah umat Islam di Jerman adalah lebih dari 3,6 juta. Muslim Jerman terutama merupakan imigran

dan keturunan imigran. Asal Muslim Jerman yang paling utama adalah Turki, baru kemudian disusul oleh negara-negara Timur Tengah dan Afrika. Kenyataannya keturunan Turki merupakan 3,4% dari total penduduk Jerman. Umat Islam di Jerman terus mengalami perkembangan. Baru-baru ini Jerman adalah pelopor untuk menerima masuknya sejumlah besar pengungsi dari Timur Tengah sebagai akibat dari krisis ISIS di Syria dan Irak.

7. Inggris

Inggris Raya merupakan jajaran kepulauan di lepas pantai Eropa Barat, yang mencakup Inggris, Skotlandia, dan Wales. Inggris Raya berbatasan dengan Republik Irlandia di sebelah barat. Pada sisi lainnya, Inggris Raya dikelilingi oleh laut: ke arah utara dan memisahkan Inggris Raya dari Irlandia adalah Laut Irlandia; ke sebelah timur ada Laut Utara; dan ke sebelah selatan dan memisahkan Inggris Raya dengan Prancis adalah Selat Inggris. Total luas wilayahnya adalah 242.500 km². Berdasarkan data perkiraan tahun 2018, penduduk Inggris Raya adalah 66.436.000 jiwa. Pendapatan per kapita bangsa Inggris, menurut data tahun 2017, adalah USD40.530.

Kristen (dari semua denominasinya) merupakan kelompok agama dominan di Inggris Raya, yaitu 59,5%, lalu disusul oleh Islam 4,4%, Hindu 1,3%, tidak beragama 25,7%, dan lainnya 9,1%. Dengan persentase demikian maka jumlah umat Islam di negara ini mencapai hampir 3 juta jiwa, dan merupakan kelompok agama terbesar kedua. Kebanyakan umat Islam di negara ini adalah pendatang dari anak benua India (Pakistan, Bangladesh, dan India) dan Malaysia. Kesemuanya memang merupakan bekas jajahan Inggris. Akan tetapi ada juga Muslim pendatang dari wilayah Timur Tengah dan bagian tertentu dari Afrika. Inggris Raya merupakan negara Eropa Barat dengan penduduk Muslim yang besar bersama dengan Prancis dan Jerman.

8. Prancis

Prancis merupakan salah satu negara penting Eropa. Negara ini berbatasan dengan Belgia, Jerman, Swiss, dan Italia di sebelah timur; dengan Laut Tengah di sebelah selatan; serta dengan Samudera Atlantik di sebelah barat dan utara. Luas wilayah Prancis mencapai 543.965 km².

Prancis termasuk negara Eropa dengan penduduk relatif besar. Mengacu pada data tahun 2018 jumlah penduduknya mencapai 65.097.000 jiwa dengan etnisitas yang sangat bervariasi. Prancis dikenal sebagai salah satu negara agraria di Eropa, namun juga sangat maju dalam industri. Data tahun 2017 menyatakan bahwa pendapatan per kapita Prancis adalah USD37.970.

Berdasarkan agama, penduduk Prancis mayoritas menganut Katolik sebesar 64,3%, lalu Ateis 27%, Islam 4,3%, Protestan 1,9%, Budha 1%, Yahudi 0,6%, dan lainnya 0,9%. Dengan jumlah 2,8 juta orang, minoritas Muslim di Prancis adalah kelompok keagamaan nomor dua setelah Katolik. Hanya saja di Prancis terdapat kelompok ateis yang jumlahnya besar. Umat Islam Prancis kebanyakannya adalah imigran, khususnya dari wilayah Afrika Utara. Negara penyumbang terbesar tampaknya adalah Algeria dan Maroko, yang pernah menjadi jajahan Prancis. Umat Islam Prancis—seperti halnya di negara-negara Eropa lainnya—pada umumnya tinggal di wilayah perkotaan. Kota-kota dengan penduduk Muslim terbesar adalah Marseille, Paris, dan Lyon.

Prancis adalah negara yang sangat bangga dengan prinsip sekularisme, melebihi bangsa-bangsa Eropa lainnya. Hal ini seringkali menjadi sumber persoalan bagi minoritas Muslim di sana. Misalnya, pada tahun 2004 Prancis mengeluarkan aturan larangan menggunakan hijab di sekolah-sekolah negeri. Lalu pada tahun 2010 ada pula larangan menggunakan burka (cadar, penutup wajah) di tempat-tempat umum.

9. Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah sebuah negara federasi yang berada di bagian tengah benua Amerika, yang terdiri atas 50 negara bagian (*states*). Amerika Serikat berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, Samudera Atlantik di sebelah timur, Meksiko di sebelah selatan, dan Samudera Pasifik di sebelah barat. Negara ini termasuk negara terluas, wilayahnya mencapai 9.525.067 km². Berdasarkan data tahun 2018 jumlah penduduk Amerika Serikat adalah 328.523.000. Negara ini termasuk negara yang paling maju dan makmur, dengan pendapatan per kapita, berdasarkan data tahun 2017 mencapai USD58.270.

Penduduk Amerika Serikat sangat beragam. Negara ini biasa diibaratkan sebagai sebuah *melting pot*, di mana penduduknya sebagian besar merupakan

imigran dari sejumlah besar negara. Dari sudut agama, penduduk Amerika Serikat sebagian besarnya adalah penganut Kristen Protestan (dan denominasi lainnya) 48,5%, Katolik, 22,7%, Mormon 1,8%, Yahudi 2,1%, Islam 0,8%, agama-agama lainnya 2,9%, tidak beragama 21,2%.⁵ Dengan menggunakan angka-angka di atas, maka jumlah penduduk Muslim di negara ini adalah lebih dari 2,6 juta jiwa. (Beberapa perkiraan malah menyatakan bahwa umat Islam Amerika telah mencapai 5 juta orang). Dari 50 negara bagian, umat Islam paling banyak ditemukan di negara bagian New Jersey, New York, dan Arkansas. Mayoritas Muslim Amerika adalah merupakan imigran dan turunan imigran dari Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Selatan.

10. Australia

Australia adalah sebuah negara benua, yang terletak di sebelah selatan Indonesia dan Papua Nugini. Benua Australia adalah benua yang paling kecil, luas wilayahnya mencapai 7.692.202 km². Negara benua ini dikelilingi oleh Samudera Pasifik ke arah timur, dan oleh Samudera India ke arah selatan, barat dan utara. Meskipun memiliki wilayah yang sangat luas, Australia tidak memiliki penduduk yang besar, yaitu hanya 24.995.000, berdasarkan perkiraan tahun 2018. Australia merupakan sebuah negara industri maju dengan pendapatan per kapita, menurut data tahun 2017, mencapai USD51.360.

Pada awalnya Australia menutup diri terhadap imigran kecuali yang berasal dari kepulauan Inggris. Akan tetapi untuk perkembangan negara tersebut, kebijakan tersebut mulai dilonggarkan, khususnya setelah Perang Dunia II. Belakangan, sejumlah besar imigran dari negara-negara Asia telah menjadi penduduk negara ini. Adapun komposisi agama penduduk Australia adalah sebagai berikut: Kristen 59,8%, Budha 2,5%, Islam 2,2%, Hindu 1,3%, Yahudi 0,5%, tidak beragama 22,3%, dan lainnya 11,4%. Dengan demikian, maka jumlah umat Islam di Australia mencapai sekitar 0,5 juta jiwa dengan kecenderungan meningkat. Kebanyakan dari mereka menetap di dan sekitar kota Sydney, Melbourne, dan Perth.

⁵ <https://news.gallup.com/poll/224642/2017-update-americans-religion.aspx>, diakses 17 April 2019.

D. Minoritas Muslim di Barat: Tantangan dan Peluang

Interaksi umat Islam dan keberadaan mereka di Barat (khususnya Eropa) saat ini dapat dipandang sebagai babak keempat dalam sejarah panjang kontak antara dua peradaban. Sejarah hubungan ini secara penuh jelas bukan tempatnya untuk dibahas di sini. Begitu pun, penjelasan kasar dapat berguna memberi konteks dari minoritas Muslim di Barat kontemporer.

1. Babak paling awal adalah pengalaman masa klasik, yang berlangsung kira-kira dari abad ke-8 hingga pertengahan abad ke-15. Babak ini dibentuk oleh dua peristiwa besar: *pertama*, keberhasilan Muslim menguasai dan membangun peradaban di Andalusia atau semenanjung Iberia—lebih kurang Spanyol saat ini dan sebagian besar Laut Mediterania. Catatan sejarah menunjukkan bahwa masa-masa di bawah kekuasaan Muslim menjadi salah satu masa gemilang Spanyol maupun Sisilia. Peristiwa *kedua* adalah Perang Salib, dengan segala dinamikanya yang memakan waktu dua abad. Perang ini adalah merupakan perang paling lama dan karenanya juga paling berpengaruh dalam hubungan antar Islam dan Barat.
2. Babak kedua adalah ketika kerajaan Turki Usmani kembali membawa Islam ke Eropa melalui jalur berbeda: Anatolia, Asia Tengah, dan Eropa Timur. Diawali dengan penaklukan Konstantinopel pada pertengahan abad ke-15, kerajaan Islam ini berhasil meninggalkan jejak historisnya yang kemudian menciptakan kantong-kantong umat Islam di Eropa, hingga sejauh Kroasia, Hongaria, Ukraina, dan Slovakia. Kerajaan besar ini efektif pengaruhnya di berbagai bagian Eropa sekurang-kurangnya hingga abad ke-18.
3. Babak ketiga adalah ketika berbagai negara Barat menjajah wilayah-wilayah berpenduduk Muslim di Afrika dan Asia. Masa penjajahan ini bervariasi, tetapi puncaknya dapatlah diposisikan pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Dalam pola hubungan yang sepenuhnya berbeda, penjajahan juga membawa kehadiran sejumlah Muslim ke negara-negara Barat, untuk berbagai macam kepentingan, terutama sebagai pekerja kasar. Penjajahan ini turut menentukan pola hunian umat Islam di Barat saat ini.
4. Babak keempat adalah babak baru pascakemerdekaan negara-negara Muslim, setelah pertengahan abad ke-20. Jika pada mulanya umat

Islam masuk ke Barat terutama sekali karena dorongan ekonomi, belakangan muncul pula imigran Muslim dalam jumlah besar yang datang ke Barat sebagai pengungsi perang. Kerap kali ini terjadi karena konflik berdarah yang mendera negara-negara Muslim, seperti yang diakibatkan oleh ISIS sekitar satu dekade belakangan ini.

Minoritas Muslim di negara-negara Barat memiliki kekhasan yang membedakan mereka dari kelompok lainnya. Tantangan yang harus dihadapi sebagai kelompok minoritas jelas sangat besar, terutama karena sejumlah nilai dasar yang dianut masyarakat Barat sedemikian berbeda dengan nilai-nilai Islam. Misalnya sekularisme yang menjadi dasar kehidupan bernegara di hampir semua negara Barat atau individualisme yang cukup mengakar dalam masyarakat Barat. Begitu juga dengan peranan agama dalam kehidupan sosial, pola hubungan kekeluargaan, gaya berpakaian atau berbagai aspek budaya populer lainnya. Faktor-faktor ini semuanya menciptakan satu tantangan tersendiri bagi umat Islam untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan barunya; pada saat yang sama juga merupakan tantangan bagi masyarakat Barat dalam menyerap orang Islam tersebut ke dalam sistem mereka.

Sebagai sebuah elemen pendatang, Islam di Barat kerap kali disalahpahami.⁶ Begitu juga Muslim kerap kali salah memahami orang Barat. Secara alamiah, pada tataran akar rumput, informasi tentang Islam yang diserap oleh Barat lebih banyak berasal dari media populer. Secara alamiah pula bahwa informasi populer tersebut menggambarkan Islam berdasarkan keadaan umatnya; yang sering kali justru tidak mewakili keagungan dan ketinggian ajaran Islam. Ketika Islam dilihat dalam bingkai realitas historis umatnya—yang seringkali merupakan wilayah bekas jajahan Barat—maka Islam kemudian tampak dekat dengan keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, perbudakan wanita, kemalasan, kekumuhan, kekacauan, atau kekerasan. Dalam kerangka perbandingan peradaban, kesalahpahaman semacam ini memang memiliki basis realitas sosio-

⁶ Sesungguhnya, kesalahpahaman tentang Islam tidak terjadi semata-mata di kalangan non-Muslim, tetapi juga di kalangan orang Islam sendiri, sebagai akibat kemunduran pendidikan dan pemahaman tentang ajaran Islam yang sejati sebagaimana ada dalam Alquran dan Hadis Nabawi. Untuk wawasan tentang ini, lihat Muhammad Qutb, *Islam the Misunderstood Religion* (Delhi: The Board of Islamic Publications, 1968).

historis yang memadai. Betapapun juga, keadaan ini—sebagai sebuah realitas historis maupun sebagai sebuah anggapan bahwa itulah Islam yang hakiki—turut mempersulit proses-proses sosiologis umat Islam sebagai minoritas di tengah masyarakat Barat.

Masyarakat Muslim di Barat harus menerima prasangka buruk sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Begitupun, patut dicatat bahwa dengan semakin banyaknya informasi keislaman yang dapat diakses, kesalahpahaman tentang Islam berangsur berkurang. Upaya-upaya menyebarkan informasi keislaman yang lebih objektif terus menerus ditingkatkan, baik oleh umat Islam sendiri maupun oleh kelompok-kelompok yang ingin membangun hubungan yang lebih baik antara minoritas Muslim dengan masyarakat Barat. Akan tetapi mengingat besarnya persoalan kesenjangan pengetahuan tersebut, masalah ini bukanlah sesuatu yang akan mudah diselesaikan dalam waktu singkat. Selalu saja ada kejadian-kejadian yang kemudian menimbulkan persoalan-persoalan baru. Misalnya saja, serangkaian serangan teroris di berbagai tempat melibatkan sejumlah individu yang mengaku sebagai penganut Islam. Di antara yang paling mutakhir terjadi di New York, 31 Oktober 2017; di Barcelona, 17 Agustus 2017, di Paris, 20 April 2017, di Stockholm, 7 April 2017, di London, 22 Maret 2017, di Berlin, 19 Desember 2016, di Ohio, 28 Nopember 2016, di Nice, 14 Juli 2016, di Orlando, 12 Juni 2016, di Brussels, 22 Maret 2016, di Marseille, 11 Januari 2016, atau yang lebih fenomenal, serangan 9/11 pada 2001 di New York.⁷ Daftar ini tentu saja dapat dengan sangat mudah diperpanjang lagi.

Proses pembuktian legal dari berbagai insiden tragis ini bervariasi dari satu kasus ke kasus lainnya. Kaitan hakiki antara Islam dengan tindakan-tindakan tersebut juga merupakan kontroversi. Sejumlah kejadian ini dikutuk bersama oleh semua kelompok, termasuk kelompok Muslim sendiri. Namun demikian, satu hal sangat jelas dan tak terbantahkan: rangkaian tragedi tersebut turut membentuk persepsi tentang Islam di Barat; dan persepsi yang terbangun jelas semakin buruk, semakin jauh dari yang diperlukan oleh kelompok minoritas Muslim. Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa semua kejadian tersebut telah meningkatkan kebencian dan penolakan terhadap Islam dan Muslim ke level yang tak ditemukan

⁷ <https://www.foxnews.com/world/timeline-of-recent-terror-attacks-against-the-west>, diakses 30 Mei 2019.

sebelumnya. Fenomena, yang kemudian dikenal sebagai Islamofobia⁸ ini, menggejala di hampir semua negara Barat, dan berbagai upaya untuk meredakannya sedang dilaksanakan berbagai pihak.

Lepas dari peningkatan kebencian dan marginalisasi yang melekat pada kejadian tertentu—khususnya terorisme—pada tataran yang lebih substantif minoritas Muslim di Barat menghadapi persoalan-persoalan berikut:⁹

1. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan terkait dengan lingkungan (masyarakat dan sistem Barat). Hal ini terutama terkait dengan sejumlah imigran Muslim dengan pendidikan dan pengalaman budaya yang sangat terbatas.
2. Kurangnya kemampuan dalam berurusan dengan sistem pemerintahan di negara-negara Barat. Pada lazimnya persoalan yang paling mendasar adalah bawaan dari sistem pemerintahan di negeri asal yang cenderung dominan (bahkan otoriter), sehingga semua dikendalikan oleh negara; sementara di Barat, tanggungjawab dan inisiatif individual sangat menonjol.
3. Hambatan-hambatan keuangan. Ini terutama relevan terhadap mereka yang datang ke Barat sebagai pengungsi. Hambatan tersebut dapat bersumber dari banyak hal, seperti kompetensi kerja yang rendah, kemampuan bahasa yang tidak memadai, dan sebagainya.
4. Diskriminasi dari masyarakat. Ini juga dapat bersumber dari banyak hal, mulai dari faktor kesejarahan, ketidaktahuan, kesalahan informasi, sampai rasa superioritas ras.
5. Tidak tersedianya kepemimpinan yang efektif. Pada umumnya, masyarakat Muslim di Barat mengorganisasikan dirinya dengan mengacu pada etnis dan negara asal. Dengan demikian maka mereka terpecah ke dalam berbagai kelompok kecil yang sering kali tidak memiliki kaitan apalagi koordinasi satu sama lainnya.

⁸ Fenomena ini dibahas sedikit lebih rinci di bagian yang agak akhir dari buku ini.

⁹ Dilwar Hussain, "The Holy Grail of Muslim in Western Europe: Representation and their Relationship with the State," dalam John L. Esposito & Francois Burgat (ed.) *Modernizing Islam: Religion in Public Sphere in Europe and the Middle East* (London: C. Hurst & Co., 2003), h. 247.

6. Tidak adanya kekuatan politik atau ekonomi sebagai landasan untuk bernegosiasi. Hal ini terutama benar pada generasi awal migran Muslim; namun seiring waktu sedang mengalami perbaikan.

Adanya berbagai persoalan terkait minoritas Muslim di Barat sama sekali tidak mengurangi eksistensi mereka di sana. Dalam kenyataannya kehadiran tersebut mengalami peningkatan, pada tataran kuantitatif (jumlah Muslim) maupun pada tataran kualitatif (partisipasi dan kontribusi Muslim) dalam sistem sosial Barat. Statistik menunjukkan bahwa Islam adalah agama dengan perkembangan penganut paling cepat di Barat. Tingkat dan kualitas kontribusi mereka terhadap masyarakat juga mengalami perbaikan yang sangat berarti.

Dalam konteks negara-negara Eropa, para migran yang kemudian membentuk minoritas Muslim ditangani oleh pemerintah dengan cara-cara yang berbeda-beda. Akan tetapi model-model perlakuan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga model, sebagai berikut:¹⁰

1. Model Pekerja Tamu. Model ini menganggap para migran hanya akan tinggal di negeri mereka untuk sementara waktu, dan pada saatnya akan pulang ke negeri asal masing-masing. Model ini terutama digunakan di Jerman, Austria, dan juga Swiss, meskipun dengan perbedaan-perbedaan kecil.
2. Model Asimilasi. Kaum migran dianggap akan menetap dan karenanya berbagai strategi dilaksanakan untuk melakukan pembauran total orang Islam ke dalam budaya negara berkenaan. Dalam model ini, terbentuknya 'komunitas migran' tidak didukung. Prancis menganut model asimilasi ini.
3. Model Minoritas Etnik. Model ini memberi ruang untuk memelihara identitas budaya kaum migran dan sampai tingkat tertentu pluralisme didukung secara resmi oleh negara. Model ini diberlakukan di Inggris, Belanda, dan negara-negara Skandinavia. Tampaknya apa yang terjadi di Amerika Serikat dan di Australia lebih mendekati kepada model ketiga ini.

Dengan berbagai tantangan yang ada dan variasi keadaan di setiap

¹⁰ Hussain, "The Holy Grail of Muslim in Western Europe," h. 221.

negara, kelihatannya model yang ketiga memberi peluang yang lebih baik bagi minoritas Muslim untuk menjadi warga negara yang baik dan pada saat yang sama mempertahankan aspek-aspek tertentu dari kebudayaannya. Dalam perjalanan sejarahnya, hak-hak dasar umat Islam sebagai penduduk secara perlahan sudah mulai tersedia. Misalnya, generasi yang paling awal tidak memiliki rumah ibadah dan menghadapi berbagai hambatan untuk mendirikan. Mereka juga menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pendidikan agama dan juga makanan halal. Akan tetapi belakangan ini, hal-hal tersebut sudah bukan merupakan persoalan besar lagi. Pada penghujung tahun 1990an umat Islam di Barat telah memperoleh hak-hak berikut ini:

1. Hak untuk menjalankan ajaran dasar agama Islam.
2. Hak untuk memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan.
3. Hak untuk mendirikan organisasi dan perserikatan.
4. Hak untuk membentuk badan-badan untuk mewakili kepentingan mereka.
5. Hak untuk mendapatkan pelayanan dan pembelaan hukum.¹¹

Sejauh mana semua hal tersebut tersedia dan dengan mudah didapatkan, tentu saja, bervariasi dari satu negara ke negara lain. Meskipun selalu saja ada peristiwa-peristiwa tertentu—seperti rangkaian serangan terorisme sepanjang dekade pertama abad ke-21 yang dikaitkan dengan Islam—yang memperlambat asimilasi umat Islam ke dalam masyarakat Barat, pada dasarnya banyak hal yang patut disyukuri. Partisipasi umat Islam di Barat jelas sekali terus meningkat, meskipun tak jarang penolakan terhadap mereka juga meningkat. Dalam skala yang agak dramatis, terpilihnya seorang Muslim keturunan Pakistan—Sadiq Khan—menjadi wali kota London pada 2016 jelas menunjukkan peningkatan partisipasi dan penerimaan terhadap Muslim di dunia politik Inggris. Muslim yang berhasil menjadi wali kota atau di badan-badan perwakilan juga dijumpai di Belanda dan Amerika Serikat. Sejumlah yang lain sejak lama sudah terserap dan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan

Proses historis eksistensi minoritas Muslim di negara-negara Barat akan terus berjalan; dan secara alamiah berbagai tantangan dan peluang

¹¹ Tariq Ramadan, *To Be a European Muslim* (Leicester: Islamic Foundation, 1999), h. 135-137.

akan terus datang silih berganti, sebab memang demikianlah sifat alamiah dari sejarah. Jocelyne Cesari, dengan mendasarkan diri pada realitas Eropa, menyimpulkan bahwa dinamika sejarah minoritas Muslim di Barat masih akan diwarnai oleh konflik, negosiasi, dan kompromi yang berlangsung dalam tiga tataran, yaitu: 1) antara kekuatan ikatan etnisitas dan ikatan keagamaan; 2) antara keterikatan kepada negara asal dan keterikatan pada negara baru (Barat); serta 3) antar berbagai komunitas Muslim yang berbeda etnis dan negara asal.¹² Dalam kerangka inilah daya negosiasi historis umat Islam yang tinggal di Barat sedang diuji oleh lingkungan paling keras untuk ditempati saat ini. Hasil dari ujian sejarah tersebut tidak akan diketahui dalam hitungan tahun, mungkin juga tidak dalam hitungan dekade. Akan tetapi hasil negosiasi historis itu akan memperlihatkan kelayakan mereka mewakili agama yang diturunkan untuk sekalian alam dengan misi mulia menebar rahmat di seluruh permukaannya, termasuk dunia Barat.

¹² Jocelyne Cesari, "Muslim Minorities in Europe," dalam John L. Esposito & Francois Burgat (ed.) *Modernizing Islam: Religion in Public Sphere in Europe and the Middle East* (London: C. Hurst & Co., 2003), h. 256.



BAB V

KEBANGKITAN KEMBALI ISLAM: Modernisasi dan Revivalisasi

Di bagian awal dijelaskan bahwa setelah masa keemasannya, peradaban Islam mengalami kemandekan. Sepanjang periode pertengahan, khususnya setelah abad ke-16, kemandekan ini berbarengan dengan kemajuan pesat peradaban Eropa. Kesenjangan yang terus melebar menjadi latar belakang bagi dominasi yang kemudian mengambil bentuk penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa atas wilayah-wilayah yang dahulunya merupakan kekuasaan umat Islam. Penjajahan memperlebar kesenjangan dan memperburuk keadaan umat Islam dalam semua bidang kehidupan. Eksploitasi sumber daya alam, pengekangan kemerdekaan, pelambatan perkembangan kebudayaan, ketergantungan, dan yang semacamnya menjadi akibat dari penjajahan berkepanjangan.

Dalam konteks seperti inilah, sejak awal abad ke-19, di Dunia Islam muncul gagasan yang kemudian menjadi gerakan kebangkitan kembali Islam. Pada mulanya, pergerakan yang paling dominan mengambil bentuk penguatan kembali identitas umat Islam berhadap-hadapan dengan pihak penjajah asing. Di antara gejalanya adalah munculnya konsep nasionalisme yang dibangun atas realitas baru umat Islam, di mana kolonialisme menjadi satu elemen yang sangat menentukan. Pada gilirannya, nasionalisme melahirkan gerakan perjuangan kemerdekaan dari penjajahan. Gerakan ini mengambil bentuk-bentuk yang bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada umumnya bangsa-bangsa Muslim memperoleh kemerdekaan dari para penjajah sejak awal abad ke-20 ke dalam kerangka negara-bangsa sebagaimana ditemukan saat ini. Di seluruh dunia, umat Islam

berjuang untuk kembali membangun kejayaan peradabannya. Abad ke-15 hijriyah (1 Muharram 1400 adalah bertepatan dengan 21 Nopember 1979) kerap didengungkan sebagai Abad Kebangkitan Islam. Slogan tersebut menggema ke seluruh penjuru dunia Islam, meskipun tingkat kemajuan dan pencapaiannya tentu saja sangatlah variatif dan juga relatif.

A. Faktor Kebangkitan Kembali Islam

Sebuah gelombang perubahan mestilah memiliki latar belakang historis yang mengkondisikannya secara perlahan. Demikian juga di sana selalu ada faktor jamak yang menjadi penyebab lebih langsung dari terjadinya sesuatu perubahan. Kebangkitan kembali Islam yang menggejala secara serius sejak abad ke-19 di berbagai belahan Dunia Islam dilatarbelakangi oleh kemandekan peradaban Islam yang berlangsung berabad-abad. Dalam proses panjang kemandekan itu perlahan tercipta faktor-faktor yang kemudian memicu lahirnya kebangkitan ulang dalam sejarah Islam. Di bawah ini adalah beberapa faktor terpenting dari munculnya kebangkitan Islam tersebut.

1. Faktor Internal

Apabila disederhanakan, maka faktor internal munculnya kebangkitan Islam adalah 'kesenjangan yang parah antara idealisme ajaran Islam dan realitas kehidupan umat Islam'. Idealisme Islam ditemukan dalam nash-nash keagamaan: dalam Alquran dan Hadis Nabawi; atau dengan kata lain, dalam doktrin Islam. Realitas ditemukan dalam gerak kehidupan yang dirasakan umat Islam, dengan kata lain dalam sejarahnya dan kehidupan sosiologisnya. Sepatutnya keduanya adalah sejalan, sejajar, serasi. Artinya bahwa idealisme yang ada dalam kitab suci menjadi kenyataan di lapangan kehidupan, atau sekurang-kurangnya tidak senjang terlalu jauh.

Beberapa ayat dan ajaran Islam yang relevan dapat dicantumkan di sini.

Dalam Alquran surat Ali 'Imran/3: 110, Allah swt. berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ...

Kamu adalah **umat yang terbaik** yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. ...

Dalam surat al-Nur/24: 55, Allah swt. berfirman:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ...

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan **menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi**, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa

Dalam surat Al-Hasyr/59: 18, Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Lalu Allah swt. berfirman pula dalam surat Al-Nisa'/4: 9,

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar.

Di dalam Alquran juga terdapat sejumlah besar ayat yang menyuruh

untuk berbuat kebaikan; yang paling umum adalah melalui konsep *amal shâlih* dan *ihsân*.¹

Ayat-ayat di atas menunjukkan beberapa sisi idealisme yang dikehendaki oleh Islam terhadap umatnya. Alquran jelas menetapkan satu standar mutu yang sangat tinggi bagi penganut Islam. Tidak tanggung-tanggung, Alquran mematok *khayra ummah*, umat terbaik, sebagai target. Mereka juga harus memiliki iman yang kokoh dan pada saat yang sama mentradisikan perbuatan baik; sedemikian rupa sehingga mereka pantas untuk menjadi penguasa bumi (*khalifah fi al-ardh*). Umat Islam juga adalah umat yang memiliki rencana jangka panjang tentang kehidupan, karenanya tidak lalai untuk mempersiapkan generasi penerus lengkap dengan segala piranti pendukung yang mereka butuhkan untuk sukses di masa depan. Mereka juga adalah kelompok manusia yang membudayakan bekerja keras secara benar, menebar kebaikan, dan menjadikan dirinya bermanfaat bagi lingkungan.

Ajaran yang demikian mengharuskan adanya upaya terus menerus umat Islam untuk memastikan status *khayra ummah* tersebut dapat dicapai dan kemudian dipertahankan dari waktu ke waktu. Bagaimana pun juga, adalah sifat manusia untuk lalai, untuk kemudian mengalami kemunduran semangat. Umat Islam tak mampu mempertahankan posisi *khayra ummah* setelah masa kemandekan peradaban Islam. Dalam berbagai aspek kehidupan—politik, militer, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan—umat Islam mengalami penurunan kualitas yang sangat parah. Keadaan menjadi sedemikian buruknya, sehingga umat Islam dikalahkan dan dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Di sinilah titik nadir kesenjangan antara idealisme doktrin Islam (Alquran-Hadis) dan pencapaian sejarah umat Islam.

Kesenjangan yang demikian itu tak dapat tidak merupakan satu faktor yang menegaskan mendesaknya upaya kebangkitan kembali. Hal tersebut pun memiliki landasan doktrinal melalui hadis Rasul saw.: “*Pada setiap awal abad, Allah swt. akan mengirim kepada umat Islam seorang pembaru untuk memperbarui Islam untuk abad tersebut*”.² Hadis Nabi saw. ini mengantisipasi, atau meniscayakan, akan terjadinya dua kemungkinan

¹ Misalnya dapat dirujuk dalam surat Al-Baqarah/2: 25, 82, 195; Ali ‘Imran/3: 57, 134, 148; Al-Nisa’/4: 57, 122, 173; Al-Ma’idah/5: 9, 93; Al-An’am/6: 160; al-Isra’/17: 6.

² Abû Dâwud al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, edisi M. Muhy al-Dîn ‘Abd al-Hâmid (Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1935), vol. IV, h. 109 (Kitab al-Malahim).

dalam perjalanan historis umat Islam: 1) akan terjadinya penyimpangan umat dari ajaran Alquran dan Sunnah baik dengan sengaja, karena kebodohan, atau karena sebab lainnya; dan 2) akan terjadinya perkembangan terus menerus yang mengharuskan umat Islam mencari tafsiran-tafsiran dan bentuk-bentuk baru bagi aplikasi nilai-nilai Islam. Keduanya menuntut munculnya pembaru (*mujaddid*) secara berkala guna mengingatkan dan meluruskan arah perkembangan umat Islam.

Penelitian Azyumardi Azra menunjukkan bahwa gagasan pembaruan dan gerakannya pada dasarnya berasal dari sebuah fenomena internal, yakni kebangkitan kajian Hadis yang bermula di Hijaz, tanah kelahiran Islam. Tesis ini menyatakan bahwa bibit-bibit pemikiran dan gerakan modernisasi telah mulai disemai sejak abad ke-17. Lalu dari sinilah kemudian gagasan tersebut menyebar menjadi gelombang besar yang menyapu seluruh penjuru Dunia Islam. Penyebarluasan tersebut difasilitasi oleh serangkaian jaringan intelektual yang sangat rumit antar berbagai bagian Dunia Islam dengan Hijaz.³

Demikianlah, pada dasarnya secara internal—baik bersifat doktrinal-teologis maupun historis-sosiologis—terdapat faktor-faktor yang sangat kuat untuk mendorong kebangkitan kembali umat Islam. Syafi'i Ma'arif menyimpulkan faktor-faktor internal tersebut ke dalam tiga aspek berikut:

- a. Penafsiran atas satu doktrin transendental (Alquran dan Hadis Nabawi) tidak mungkin mencapai tingkat kebenaran mutlak seperti doktrin itu sendiri. Konsekuensinya adalah bahwa tidak ada penafsiran yang tak dapat dipertanyakan. Bahkan hal ini harus terus menerus dilakukan secara serius untuk menghasilkan penafsiran yang lebih baru, atau setidaknya untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tafsiran tersebut.
- b. Islam bertujuan menciptakan satu tata sosial-politik yang berlandaskan etika moral yang kokoh guna mengaktualisasikan prinsip kebermanfaatan Islam bagi seluruh alam (*rahmatan lil-'âlamîn*). Keseimbangan antara kedua sisi tersebut (sosial-politik dan etika-moral, dunia dan akhirat) jelas membutuhkan pemahaman segar dan dinamis yang dapat mengakomodasi perkembangan. Sebuah prinsip yang sama akan memerlukan

³ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1994).

cara penerapan yang berbeda bila dilakukan di dua kondisi dan tempat yang berbeda.

- c. Para sahabat sebagai generasi pertama yang langsung menerima Islam dari Rasul saw. telah memberi contoh kreatif tentang pelaksanaan pembaruan. Yang paling menonjol dalam hal ini adalah pembaruan 'Umar ibn Kaththab tentang tanah yang ditaklukkan dalam perang serta mengenai distribusi harta rampasan.⁴

Dengan demikian maka kebangkitan kembali Islam pada dasarnya memiliki argumen dan faktor pendorong internal yang sangat kuat. Maknanya, bahwa kebangkitan tersebut adalah sebuah keniscayaan yang dituntut oleh sifat dasar ajaran Islam itu sendiri, serta telah pula dicontohkan dalam berbagai episode sejarah Islam. Syahrin Harahap mengibaratkannya dengan menyebut Alquran sebagai “darah dan daging modernisasi Islam”.⁵ Artinya, Alquran semata sejatinya sudah cukup untuk menjadi pendorong kebangkitan Islam.

2. Faktor Eksternal

Betapa pun juga, sejarah mengajarkan bahwa sebuah peristiwa besar tidak pernah disebabkan oleh faktor yang tunggal. Semua peristiwa penting didorong oleh faktor-faktor yang banyak dan terkadang rumit, serta memerlukan waktu tertentu untuk terwujud. Demikian jugalah dengan kebangkitan kembali Islam. Faktor internal yang dijelaskan di atas tidak berjalan sendiri mendorong munculnya gagasan dan gerakan kebangkitan Islam di zaman modern. Akan tetapi ada faktor eksternal yang telah turut pula menciptakan kondisi yang semakin mendesakkan kebangkitan tersebut.

Faktor eksternal yang paling mudah dilihat dalam kaitan ini adalah kemajuan dan dominasi Barat atas dunia Islam yang telah begitu jelas sekurang-kurangnya semenjak abad ke-16. Sekali lagi dominasi Barat atas umat Islam pun didahului oleh serangkaian proses yang memakan waktu berabad-abad lamanya. Jika disederhanakan, hal ini dimulai dengan

⁴ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Al-Qur'an, Realitas Sosial dan Limbo Sejarah* (Bandung: Pustaka, 1985), h. 97-98.

⁵ Syahrin Harahap, *Islam dan Modernitas: Dari Teori Modernisasi hingga Penegakan Kesalehan Modern* (Jakarta: Prenada Media, 2015), bab 3.

kesadaran baru di Eropa Barat—yang biasa disebut sebagai *Renaissance*—pada abad-abad ke-14 hingga abad ke-17. Gelombang Renaisans ini membuka pintu kebangkitan penelitian di bidang sains dan teknologi di kalangan bangsa-bangsa Eropa dan kemudian berpadu dengan keinginan untuk menjelajahi dan menguasai seluruh dunia. Era penemuan dunia baru (*Age of Discovery*) menjadi awal dan pijakan bagi imperialisme dan kolonialisme yang sudah dijelaskan di bagian awal.

Penjajahan bangsa-bangsa Barat atas Dunia Islam menjadi faktor yang sangat penting bagi tumbuhnya kesadaran umat Islam tentang kemandekan peradabannya yang sudah sedemikian parah. Ketika bangsa-bangsa Barat datang dan mulai menguasai Dunia Islam, kondisi kedua peradaban benar-benar sangat tidak berimbang dalam banyak aspek. Efektivitas organisasi dan pengelolaan politik bangsa-bangsa Barat jelas unggul ketika diperhadapkan dengan kerajaan-kerajaan yang saling berseteru di Dunia Islam. Dukungan pengetahuan dan teknologi transportasi laut (terlebih setelah era mesin uap) yang dimiliki oleh Barat jelas tak sebanding dengan teknologi yang dimiliki umat Islam pada sektor yang sama. Teknologi dan perlengkapan perang yang dipunyai oleh pasukan militer bangsa-bangsa Barat sekian langkah lebih maju dibandingkan dengan apa yang dipunyai oleh pasukan umat Islam. Peralatan industri temuan bangsa-bangsa Barat secara signifikan membantu keunggulan mereka dalam hal produksi dan secara tidak langsung membuat bangsa lain sebagai konsumen semata.

Hakikat terdalam dari penjajahan adalah eksploitasi sekelompok manusia atas kelompok manusia lainnya, yang hanya mungkin karena terjadinya ketimpangan yang terlalu lebar dalam berbagai aspek penyangga peradaban. Ini lah yang dialami oleh bangsa-bangsa Muslim dalam waktu yang sangat lama. Pengalaman penjajahan oleh bangsa-bangsa luar tersebut jelas sekali turut membentuk kesadaran baru di kalangan umat Islam. Kesadaran tersebut mencakup, di satu sisi, kesadaran akan lebarnya kesenjangan bangsa-bangsa Muslim dengan bangsa-bangsa Barat dan, di sisi lain, kesadaran akan mendesaknya upaya untuk memperbaiki diri. Beberapa pakar berpendapat bahwa ekspansi Napoleon Bonaparte ke Mesir (1798) adalah merupakan sebuah momen historis yang menjadi pemicu eksternal munculnya

kesadaran umat Islam tentang mendesaknya kebangkitan kembali atau modernisasi Islam.⁶

Ringkasnya, kebangkitan Islam memiliki faktor internal, yaitu sifat dari Islam itu sendiri yang menghendaki kemajuan dan keunggulan. Di samping itu ada pula faktor eksternal yang tak kalah penting, yakni penjajahan Barat yang dimungkinkan karena keunggulan mereka dalam berbagai aspek peradaban. Kebangkitan Islam masa modern didorong oleh perpaduan antara kedua faktor tersebut.

B. Kebangkitan Kembali Islam: Pola dan Bidang Prioritas

Umat Islam menyadari kemajuan pesat peradaban Eropa untuk pertama kalinya melalui realitas politik-militer, yang terutama melibatkan dinasti-dinasti Muslim yang ada di Andalusia dan Asia Tengah. Setelah berkuasa beberapa abad lamanya, pada abad ke-15 kekuatan umat Islam di Andalusia sudah dapat diimbangi oleh kekuatan Kristen tempatan. Arus balik ini kemudian mencapai kulminasi dalam *Reconquista* yang mengikis habis umat Islam dari semenanjung tersebut. Turki Usmani masih menjadi kekuatan yang sangat dihormati hingga penghujung abad ke-17. Namun demikian, dinasti ini secara signifikan kehilangan daya saingnya berhadapan dengan bangsa-bangsa Eropa, sehingga terkenal sebagai *The Sick Man of Europe*. Di berbagai wilayah lainnya, umat Islam mengalami kontak langsung dengan kekuatan Eropa melalui kegiatan perdagangan yang kemudian berkembang menjadi penjajahan. Secara umum dapat dikatakan bahwa sejak abad ke-18 umat Islam berinteraksi dengan berbagai bangsa Eropa sebagai perwakilan dari peradaban yang lebih maju.

Ekspansi Prancis ke Mesir pada tahun 1798, di bawah komando Napoleon Bonaparte kerap dianggap sebagai momen penting yang telah membuka mata umat Islam tentang kemajuan Barat di satu sisi dan ketertinggalan umat Islam di sisi lainnya. Ekspedisi tersebut tidak hanya melibatkan pasukan tentara, akan tetapi juga membawa satu tim ahli pengetahuan yang bermaksud mempelajari Mesir, baik masyarakatnya maupun alamnya. Pengetahuan dan perangkat-perangkat penelitian yang dibawa oleh Prancis merupakan sesuatu yang benar-benar baru bagi umat

⁶ Misalnya, Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939* (London: Oxford University Press, 1962), h. 49.

Islam Mesir saat itu. Seorang sejarawan Mesir, 'Abd al-Rahman al-Jabartî (w. 1825) mencatat dengan jujur kekagumannya terhadap kemajuan pengetahuan dan cara-cara penelitian yang diperkenalkan oleh para ilmuwan Prancis.⁷

Informasi mengenai kemajuan dan keunggulan Barat terus semakin meluas di kalangan umat Islam, khususnya mereka yang lebih terdidik. Pengetahuan tersebut kemudian mendasari semangat untuk membandingkan keadaan umat Islam dengan bangsa-bangsa Barat. Dengan sendirinya ini menghasilkan pemetaan faktor-faktor keunggulan peradaban Barat yang telah membantu mereka menguasai dunia modern. Pada saat yang sama perbandingan ini juga menghasilkan analisis tentang faktor-faktor tertentu yang telah mengakibatkan umat Islam masuk dalam kondisi kemandekan serius tersebut.

Pemikiran dan gerakan kebangkitan Islam dapat dilihat dengan menggunakan perspektif naik turun peradaban Islam, yang secara garis besar sudah dijelaskan di bagian awal. Pada masa klasik peradaban Islam diletakkan dasar-dasarnya dan kemudian mengalami perkembangan sangat pesat hingga mencapai masa kejayaan luar biasa. Pada masa jayanya Islam adalah penguasa peradaban paling tinggi. Lalu pada masa pertengahan, peradaban ini mengalami kemandekan serius selama berabad-abad. Kemandekan ini kemudian mengantar umat Islam ke dalam palung terdalam dari sejarahnya, yakni penjajahan oleh bangsa-bangsa Barat. Ketika semangat kebangkitan mulai tumbuh, umat Islam menemukan dirinya di antara dua ujung sebuah garis kontinum. Di ujung *pertama*, godaan dan tawaran kemajuan yang ada di depan mata, datang bersama kehadiran bangsa-bangsa Barat. Lalu di ujung yang *kedua*, catatan kegemilangan masa lalu dalam sejarah masa klasik. Rangkaian pemikiran dan gerakan kebangkitan Islam sesudah abad ke-19 dapat diletakkan pada berbagai titik pada garis tersebut. Pemikiran yang cenderung ke arah ujung pertama, dengan segala gradasinya, biasa disebut sebagai modernisme. Lalu, pemikiran yang cenderung pada ujung kedua, dengan segala gradasinya, biasa disebut sebagai revivalisme. Akan tetapi mestilah ditekankan bahwa keduanya hanyalah berupa kecenderungan atau penekanan. Dalam kenyataannya, kedua pola selalu saja mengalami tumpang-tindih dan saling meminjam. Inilah yang kemudian melahirkan pemikiran dan gerakan neo-modernisme dan neo-revivalisme.

⁷ *Ibid.*, h. 49-50.

1. Modernisme

Modernisme merumuskan secara rasional substansi ajaran Islam sebagaimana ada dalam Alquran dan Hadis Nabawi lalu kemudian merefleksikannya ke dalam kondisi zaman modern. Modernisme mengupayakan perbaikan kondisi umat Islam dengan fokus perhatian terutama pada masa sekarang. Modernisme tidak memberi atau memberi hanya sedikit relevansi terhadap format pengalaman sejarah umat Islam. Idealisme (visi dan misi) yang hendak diwujudkan dalam modernisme seluruhnya ada di sini dan saat ini. Modernisme menganalisis keadaan umat Islam saat ini, mencari alasan-alasan kemandekannya, lalu meramu saran solusinya dengan menggunakan apa yang ada sekarang. Sebagai sebuah gerakan peradaban, modernisme terutama melawan tantangan eksternal yang dibawa oleh bangsa-bangsa penjajah. Meskipun demikian, modernisme seringkali menjadikan kemajuan Barat sebagai cita-cita dan dengan terbuka mengadopsi cara-cara Barat dalam mencapai kemajuannya. Sikap para pemikir modernis dapat bervariasi dalam urusan pengadopsian dari Barat. Terdapat wacana yang cukup kaya tentang sejauh mana, dengan cara bagaimana, dan dengan syarat-syarat apa keunggulan-keunggulan Barat dapat diadopsi oleh umat Islam atas nama modernisasi.

Secara umum, formula dasarnya adalah bahwa umat Islam terbuka untuk belajar dan mengadopsi kebaikan dari budaya mana saja, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang ditetapkan Alquran dan Hadis Nabawi. Sejumlah tokoh, serangkaian besar pemikiran, dan berbagai gerakan pengupayaan perbaikan keadaan umat Islam telah muncul menghiasi sejarah Islam sejak abad ke-19. Modernisme mendapat pendukung yang besar di seluruh bagian Dunia Islam. Beberapa tokoh utamanya mencakup Rifa'ah al-Thahthawi, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Thaha Husain, Mohammed Arkoun, 'Abdul Karim Soroush, Bassam Tibi, Ziya Gokalp, Mustafa Kamal Attaturk, Sayyid Ahmad Khan, Sayyid Amir Ali, Abul Kalam Azad, Fazlur Rahman, Ziauddin Sardar, Ahmad Syafi'i Ma'arif, Harun Nasution, Nurcholish Madjid, Amin Abdullah, Azyumardi Azra. Mereka ini secara keseluruhan telah menuangkan gagasan yang sangat banyak dan kemudian di atas gagasan tersebut dibangun pergerakan untuk berkontribusi memperbaiki keadaan umat Islam masa sekarang dan yang akan datang. Masing-masing tokoh dapat saja lebih fokus pada satu aspek tertentu—politik, pendidikan, pemikiran, ekonomi, atau budaya. Totalitas dari semua itu lah yang diharapkan akan membawa kebangkitan Islam sebagai peradaban yang utuh.

2. Revivalisme

Revivalisme, di sisi lain, adalah pemikiran dan gerakan yang terutama merespon kemerosotan sosio-religius umat Islam secara internal. Tantangan penjajahan, dalam konteks ini, dipandang sebagai ikutan semata dari kemerosotan internal tersebut. Revivalisme ingin memperbaiki keadaan umat Islam dengan menekankan pada relevansi pencapaian umat Islam di zaman klasik. Dalam revivalisme ada kerinduan yang sangat kuat terhadap masa keemasan Islam klasik dan ada keyakinan bahwa kejayaan tersebut dapat diulangi di masa depan. Di sini teori besar yang digunakan adalah Renaisans, kebangkitan kembali. Oleh karenanya, dalam revivalisme, gagasan-gagasan dikuatkan dengan referensi dari masa keemasan dan pilihan-pilihan tindakan dilegitimasi dengan contoh-contoh terbaik dalam sejarah masa klasik. Dalam revivalisme, bentuk formal dari pengalaman sejarah mendapat perhatian tinggi dan dianggap sedemikian penting. Referensi masa lalu dalam hal ini dapat saja diambil dari masa Rasulullah saw. hingga masa *khilâfah rasyîdah* atau dari masa-masa terbaik dari Dinasti Abbasiyyah.

Baik modernisme maupun revivalisme ingin membumikan substansi nilai-nilai Islam yang ada dalam Alquran dan Hadis Nabawi. Perbedaan revivalisme adalah bahwa sejarah dan tradisi masa klasik dipandang sebagai perwujudan dan operasionalisasi terbaik dari nilai-nilai tersebut. Dengan demikian maka tidak ada kepentingan untuk mengadopsi cara-cara, bentuk-bentuk, dan jargon-jargon yang berasal dari luar, khususnya dari Barat. Dengan perkecualian yang sangat terbatas, apa pun yang berasal dari Barat dianggap sebagai keburukan. Sebagaimana halnya modernisme, revivalisme pun mendapatkan pendukung yang besar—dan tampaknya sedang terus membesar—di seluruh penjuru Dunia Islam. Sejumlah tokoh, gagasan, dan gerakan kebangkitan Islam memilih pola revivalisme dengan berbagai gradasi dalam operasionalisasinya. Ke dalam kelompok ini dapat dimasukkan nama-nama seperti Muhammad ibn ‘Abdul Wahahab, Muhammad ‘Ali ibn al-Sanusi, Hasan al-Banna, Hasan al-Thurabi, Sayyid Quthb, Sayyid Ahmad Barelwi, Abu al-Hasan ‘Ali al-Nadwi, Abu al-A‘la al-Mawdudi, dan Bediuzzaman Said Nursi.⁸

⁸ Beberapa dari tokoh ini telah dibahas dalam Hasan Asari, *Islam dan Modernitas: Tokoh, Gagasan, dan Gerakan* (Medan: IAIN Medan Press, 1996).

3. Bidang-bidang Prioritas

Masalah yang dihadapi umat Islam pada penghujung periode pertengahan benar-benar meluas, mencakupi semua aspek peradaban: politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, militer, dan kebudayaan. Dalam semua bidang ini, umat Islam dihinggapi oleh persoalan rumit pada tingkatan tertinggi. Dalam semua bidang ini umat menghadapi persoalan yang bersifat penting dan mendesak. Pembusukan internal umat Islam berpadu dengan tantangan eksternal membuat upaya kebangkitan kembali peradaban Islam menjadi sedemikian menantang, rumit, dan sulit. Beberapa penulis mengibaratkan keadaan umat Islam seperti seseorang yang ada dalam kondisi lemah, dengan beban berat di pundaknya, dan kemudian sampai di sebuah persimpangan jalan, dan harus membuat pilihan yang sangat menentukan.⁹ Perbedaan orientasi kelompok modernis dan kelompok revivalis pada tingkat tertentu merefleksikan kondisi persimpangan tersebut.

Konteks historis dari tantangan yang sedang dihadapi dan kemendesakan penemuan solusinya merupakan pengalaman baru bagi umat Islam. Sepanjang abad-abad keemasan, umat Islam terbiasa dengan peran sebagai pemilik peradaban tertinggi. Dalam realitas zaman modern, mereka harus menjadi perwakilan dari peradaban yang sedang mandek dan terbelakang dalam banyak aspeknya. Perubahan peranan tersebut jelas bukanlah perkara yang mudah. Akan tetapi, demikianlah kenyataan historisnya—zaman sudah sedemikian jauh berubah, dan peranan baru menjadi keniscayaan dalam perubahan tersebut. Maka sejumlah pertanyaan lama, dalam realitas baru membutuhkan refleksi dan jawaban yang berbeda dengan yang dikenal sebelumnya dalam sejarah. Mohammed Arkoun adalah salah seorang pemikir yang telah memetakan sejumlah pertanyaan mendasar yang sedang dihadapi umat Islam masa kini serta bagaimana jawaban terhadap pertanyaan tersebut mengalami dinamika yang belum pernah disaksikan dalam sejarah Islam.¹⁰ Meskipun jawaban-jawaban yang ditawarkan oleh Arkoun bisa saja tidak mewakili pendapat semua orang, sekurang-kurangnya ia telah mencoba menawarkan sesuatu ke tengah diskusi yang sedang dan masih akan terus berkembang.

⁹ Lihat misalnya, Muhammad Asad, *Islam at the Crossroads* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1975); Ibrahim Abu Rabi' (ed.) *Islam at the Crossroads: On the Life and Thought of Bediuzzaman Said Nursi* (Albany: SUNY Press, 2003).

¹⁰ Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*, terjemahan Robert D. Lee (Boulder: Westview Press, 1994)

Sekali lagi, persoalan kebangkitan Islam di era sekarang tidak saja terkait dengan pemetaan masalah. Persoalan lain yang juga memerlukan pertimbangan adalah penataan prioritas untuk menentukan di mana harus mulai dan membangun satu peta-jalan yang harus ditempuh selanjutnya. Terkait hal ini Ziauddin Sardar pernah menulis bahwa menurutnya: “Kebangkitan itu harus merupakan suatu usaha yang terencana, sistematis, dan koheren dalam pemikiran dan tindakan yang dapat menuntun pada kekuasaan politik dan intelektual yang nyata dan kemampuan ilmiah, teknologi dan ekonomi yang sejati.”¹¹ Kutipan tersebut menekankan beberapa hal terkait pengupayaan kebangkitan kembali Islam:

- a. Pentingnya rencana yang baik. Rencana yang baik sekurang-kurangnya mengandung unsur pemetaan masalah yang sedang dihadapi, mencakup rincian masalah dan tingkat kepentingan dari masing-masing masalah yang ada. Dari sana akan lahir skala prioritas dan urutan-urutan masalah yang akan dihadapi. Rencana yang baik juga mengandung penjelasan tentang strategi dan cara-cara penyelesaian masalah yang akan ditempuh. Rencana yang baik juga mengandung penjelasan mengenai sumber daya seperti apa yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya secara baik. Langkah yang sistematis dan koheren akan melahirkan efisiensi dalam pencapaian tujuan.
- b. Kepaduan pemikiran dan tindakan. Sepanjang sejarah Islam, persoalan ini selalu merupakan tantangan yang sangat serius. Memikirkan dan mengatakan selalu jauh lebih mudah daripada melaksanakan. Ucapan senantiasa lebih ringan dari amalan. Sardar menekankan bahwa kebangkitan tidak akan terjadi jika hanya diwacanakan pada tataran pemikiran atau dalam pidato-pidato. Kebangkitan memerlukan aksi nyata dari pikiran-pikiran yang ada. Abad ke-15H yang dicanangkan sebagai Abad Kebangkitan Islam sudah berlalu hampir setengahnya namun syarat-syarat yang diperlukan oleh kebangkitan itu tampaknya belumlah menjadi perilaku umum masyarakat Muslim. Kebangkitan Islam masih lebih banyak berada pada tataran wacana intelektual ketimbang gerakan sosial.
- c. Kebangkitan Islam sepatutnya dimulai pada bidang politik, pendidikan, dan ekonomi. Peradaban memang sesuatu yang sistemik dan tidak

¹¹ Ziauddin Sardar, *Masa Depan Islam*, terjemahan Rahmani Astuti (Bandung: Pustaka, 1987), h. 59.

bergerak secara terlepas antara satu aspek dengan aspek lainnya. Namun demikian, dalam konteks prioritas, ketiga aspek ini dipandang memiliki dampak sistemik yang sangat kuat. Artinya, kebangkitan di bidang politik, ilmu pengetahuan dan ekonomi dipercaya akan dengan sendirinya membangkitkan peradaban Islam sebagai sebuah sistem kehidupan yang utuh.

C. Tema-tema Pokok Kebangkitan Islam

Kebangkitan Islam menggejala semenjak awal abad ke-19 di berbagai penjuru Dunia Islam. Pendorongnya merupakan perpaduan antara faktor-faktor internal dan eksternal sebagaimana sudah digambarkan di atas. Di antara kritik yang kerap diungkapkan terhadap pengupayaan kebangkitan Islam adalah lemahnya koordinasi dan kerja sama antara berbagai tokoh dan kelompok yang berpartisipasi di bidang ini. Kritik ini, misalnya, terasa jelas dalam kutipan dari Sardar di atas. Di bawah ini akan diuraikan beberapa tema pokok yang mewarnai gelombang kebangkitan Islam sejak abad ke-19 dengan fokus pada bidang keagamaan, politik, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan budaya populer.

1. Keagamaan

Tampaknya, Islam sebagai ajaran agama belum pernah ditantang oleh sejarah seperti yang dialaminya di zaman modern. Pertanyaan terhadap Islam mencakup kebenaran substantifnya sebagai sebuah agama, relevansinya dengan keadaan modern, dan daya jawabnya terhadap perkembangan dan masa depan. Tantangan ini dijawab melalui tema-tema Kebangkitan Islam dalam bidang keagamaan berikut ini:

a. Kembali kepada Alquran dan Hadis

Di antara tema yang paling lantang disuarakan dan kemudian diupayakan dalam kebangkitan Islam zaman modern adalah kembali kepada Alquran dan Hadis Nabawi. Ajakan untuk kembali kepada Alquran dan Hadis Nabawi ini menjadi penting berdasarkan argumen bahwa kemandekan peradaban Islam dalam segala bidang adalah disebabkan kegagalan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran dan Hadis. Dalam masalah keagamaan—khususnya akidah dan ibadah—sepanjang perjalanan sejarah,

umat Islam telah mengembangkan berbagai tradisi dan pemikiran yang sebagiannya dikritik sebagai tidak sejalan dengan pesan murni Alquran dan Hadis. Pengamalan agama yang tidak murni ini secara historis muncul dalam proses penyebaran Islam ke tengah masyarakat baru dengan berbagai latar belakang keyakinan dan kebudayaan lama. Kasus-kasus penyimpangan tersebut dalam kenyataannya lebih banyak terjadi pada masyarakat yang menerima Islam secara adhesi kultural, semacam Nusantara. Di sini tak jarang praktik keagamaan umat Islam masih mengandung unsur-unsur tertentu dari keyakinan lama yang dominan, yakni Hindu atau agama-agama asli lainnya.

Penyebab-penyebab lainnya adalah rendahnya pendidikan dan pengetahuan mengenai Islam, khususnya mengenai Alquran dan Hadis Nabawi. Dalam konteks Hadis, di samping penguasaan umat Islam yang rendah, ada pula kecenderungan untuk menggunakan Hadis tanpa melakukan pengecekan tentang validitasnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sejumlah Hadis yang beredar luas di tengah masyarakat ternyata adalah Hadis yang tidak sahih. Padahal dalam sejarahnya kajian Hadis telah berhasil memilah dan mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dalam berbagai kitab standar—biasa disebut sebagai *Kutub al-Sittah* atau *Kutub al-Tis'ah*.

Dengan keyakinan bahwa ini—pengetahuan yang rendah tentang Alquran dan Hadis—adalah sumber masalah yang telah membawa kemandekan Islam, maka solusinya yang paling mendesak adalah mengembalikan pemahaman dan pengamalan Islam ke sumbernya yang paling pokok dan murni: Alquran dan Hadis Nabawi.¹² Pada tataran yang lebih operasional, upaya kembali kepada Alquran dan Hadis ini sering disebut sebagai pemurnian (*tanqih*), yakni upaya membersihkan pemahaman dan praktik keislaman dari unsur-unsur luaran yang terlanjur diadopsi dalam proses sejarah islamisasi. Gerakan-gerakan kembali kepada Alquran dan Hadis sesungguhnya bukanlah fenomena Islam periode modern semata. Pikiran dan ajakan serupa telah mulai muncul di masa pertengahan, misalnya dari Ibn Taymiyyah. Gerakan Wahabiyyah di Arabia juga memberi perhatian yang sangat besar terhadap tema ini dalam upaya-upaya kebangkitannya. Sebagaimana sudah disebut lebih awal, paham pembaruan menyebar ke berbagai penjuru

¹² John O. Voll, “Renewal and Reform in Islamic History,” dalam John L. Esposito (ed.) *Voices of Resurgent Islam* (New York: Oxford University Press, 1983), h. 35-37.

Dunia Islam, termasuk ke Nusantara, mengiringi kebangkitan kajian Hadis sepanjang abad ke-17 dan abad ke-18 khususnya di Hijaz.¹³

b. Menghidupkan kembali ijtihad

Kebangkitan Islam juga diwarnai oleh wacana mengembalikan semangat ijtihad.¹⁴ Ijtihad secara generik adalah upaya optimal seseorang menggunakan akal-pikirannya dalam merumuskan satu pandangan keagamaan. Ijtihad memfasilitasi proses penafsiran dan adaptasi nilai-nilai pokok Islam yang dikandung Alquran dan Hadis Nabawi ke dalam berbagai situasi kesejarahan yang dilalui umat Islam. Ijtihad dipraktikkan secara luas dalam masa awal dan masa keemasan Islam, sebagaimana terbukti dengan lahirnya berbagai pemikiran orisinal dalam berbagai bidang. Pandangan-pandangan terbaik dari para pemikir terbaik di masa lalu melahirkan aliran-aliran dan mazhab-mazhab yang sebagiannya masih hidup dan dianut hingga masa sekarang.

Persoalannya adalah bahwa pada masa pertengahan, ijtihad tidak lagi menjadi praktik yang umum. Ada kecenderungan untuk memadakan apa yang sudah dihasilkan oleh ijtihad para pendahulu. Semangat ijtihad berganti menjadi semangat taqlid; tradisi pemikiran kreatif bertukar menjadi pemikiran imitatif. Jika diperiksa, aliran-aliran kalam dan mazhab-mazhab fikih yang dianut oleh umat Islam saat ini adalah produk zaman keemasan, dengan sedikit sekali kreativitas dan modifikasi baru.

Pada tataran historis, kebutuhan akan ijtihad baru menjadi sedemikian mendesak ketika dunia mengalami perubahan yang sangat cepat di zaman modern. Dalam dua abad terakhir, aneka penemuan sains dan teknologi modern telah merubah kehidupan manusia dalam kecepatan yang belum pernah tercatat dalam sejarah kemanusiaan. Perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi secara sangat cepat menyodorkan sejumlah keadaan baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya oleh umat Islam.¹⁵

¹³ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1994).

¹⁴ Voll, "Renewal and Reform in Islamic History," h. 38.

¹⁵ Persoalan-persoalan baru yang harus dihadapi umat Islam dapat dibagi ke dalam dua kategori besar. *Pertama*, tema-tema yang sesungguhnya sudah ada sejak masa klasik; akan tetapi mengharuskan adanya pengembangan penafsiran atau perluasan penerapan karena munculnya keadaan baru. Misalnya adalah objek zakat.

Pertanyaan besarnya adalah: bagaimana harus menjalankan nilai-nilai Alquran di dalam keadaan-keadaan baru tersebut. Jelas sekali bahwa hasil ijtihad klasik—yang merupakan jawaban terhadap keadaan masa lampau—tidak sepenuhnya memadai untuk diterapkan di masa sekarang. Perubahan zaman yang demikian cepat di masa modern menjadi alasan paling kuat akan perlunya ijtihad baru.¹⁶

c. Penegasan Islam Sebagai Sistem yang Lengkap

Tema lain dari kebangkitan Islam adalah penegasan kembali bahwa agama Islam menyediakan sistem yang lengkap, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu faktor yang paling menonjol dalam kemandekan peradaban Islam masa pertengahan adalah kegagalan umat Islam berkompetisi dengan Barat dalam bidang politik, ekonomi, dan teknologi. Sementara itu, faktor keberhasilan peradaban Islam masa klasik adalah keunggulan dalam bidang tersebut. Oleh karenanya, jika Islam diharapkan untuk kembali membangun satu peradaban yang unggul, maka kebangkitan yang diperjuangkan tidak cukup terbatas pada aspek akidah dan ibadah semata. Tujuan gerakan kebangkitan adalah membangun suatu sistem Islam yang lengkap, komprehensif, dan mandiri.

Islam yang hendak dibangun adalah Islam yang menawarkan bimbingan bagi manusia dalam semua bidang kehidupannya. Islam di sini adalah sebuah sistem yang lengkap-mandiri yang memiliki caranya sendiri dalam mengelola dan mencapai keunggulan akidah dan ibadah, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, keamanan, informasi dan seterusnya. Salah satu perkembangan menonjol di kalangan umat Islam setengah abad belakangan ini adalah semakin kuatnya lembaga-lembaga keislaman di bidang-bidang tersebut. Kita sedang menyaksikan pertumbuhan partai-partai politik Islam, berbagai institusi riset dan pendidikan, institusi

Profesionalisasi kehidupan dan penambahan jenis tanaman yang dibudidayakan umat Islam melahirkan ide-ide baru dalam fikih zakat, seperti zakat profesi atau zakat dengan uang tunai. *Kedua*, tema-tema baru yang belum memiliki referensi klasik, seperti transplantasi organ tubuh, berbagai benda teknologi mutakhir, atau status minoritas Muslim di tengah non-Muslim. Terhadap kedua kelompok masalah ini diperlukan dua tingkatan ijtihad yang berbeda, guna memastikan teraplikasikannya ajaran Islam dalam segala masa dan keadaan.

¹⁶ Lihat Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, terjemahan Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1983); Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.) *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1988).

ekonomi, keuangan dan bisnis, hingga lembaga-lembaga kebudayaan dan seni. Esposito dan Voll menyatakan bahwa kebangkitan Islam telah menghasilkan “pengaruh hebat dalam seluruh aspek kehidupan manusia yang tercermin dalam pakaian, perubahan gaya hidup sosial, kesenian, dan, paling jelas terlihat, dalam arena dan kekuasaan politik.”¹⁷ Para pemikir Islam dapat saja berbeda pendapat tentang bentuk operasional dari sistem Islam yang lengkap tersebut. Mereka juga berbeda pendapat tentang cara-cara yang harus ditempuh untuk mewujudkannya. Tetapi mereka semua sepakat bahwa hal tersebut sedemikian penting dan mendesak untuk diperjuangkan. Selain itu, sejarah tak pernah menunggu kesempurnaan teori untuk bergerak.

2. Politik

Sebagaimana telah disebutkan di atas, umat Islam modern pascakolonial menemukan dirinya dalam satu bangunan realitas politik yang berbeda sangat jauh dengan keadaan sebelum masa kolonialisme. Di antara tema besar yang mewarnai proses kebangkitan kembali umat Islam di bidang politik adalah sebagai berikut.

a. Umat Islam dalam bingkai negara-bangsa

Jika menilik sejarah paling awal umat Islam, prinsip kesukuan (*qawm, qabīlah*) adalah salah satu konsep yang ditentang dan kemudian diganti oleh Rasulullah saw. dengan konsep umat (*ummah*). Pergeseran konsep masyarakat ini adalah salah satu fondasi penting sejarah politik Islam berabad-abad sesudahnya. Bila sebelumnya, dalam sistem kesukuan, aspek pengikat satuan masyarakat adalah darah dan keturunan; dalam konsep umat aspek pengikat utama adalah keyakinan agama (keislaman). Dalam paradigma ini seseorang menjadi anggota masyarakat umat terutama sekali karena kesamaan iman. Bahkan ketika umat Islam kemudian mendirikan berbagai kerajaan—khususnya sesudah abad ke-10—masyarakat awam lebih mendefinisikan dirinya berdasarkan status keimanan ketimbang keterikatan pada satu keluarga penguasa tertentu. Itu sebabnya, perpindahan

¹⁷ John L. Esposito & John O. Voll. *Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek*, terjemahan Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1999), h. 17.

kekuasaan dari satu keluarga ke keluarga lainnya lebih merupakan persoalan elit semata dan tak memiliki pengaruh terlalu besar ke akar rumput.

Keadaan ini berubah drastis ketika umat Islam mengalami penjajahan dan kemudian mendapatkan kemerdekaannya. Di atas sudah disebutkan bahwa penjajahan melahirkan garis-garis batas negara-bangsa yang biasanya dibuat berdasarkan pertimbangan bangsa penjajah. Maka umat Islam kemudian menjadi penduduk (*mawthin, muwâthanah*) dari sepenggal tanah air (*wathan*) dalam format negara-bangsa (*nation-state*) yang 'baru'. Perubahan realitas pengelompokan ini adalah bagian dari proses kebangkitan umat Islam dari keterpurukan dalam masa-masa kemandekan dan penjajahan oleh bangsa-bangsa Barat. Proses ini terutama berlangsung sepanjang paruh pertama abad ke-20, meskipun ada yang lebih belakangan di beberapa tempat.

Di atas telah ditunjukkan bahwa umat Islam kini mengelompok ke dalam puluhan negara-bangsa. Maka salah satu persoalan yang dihadapi umat Islam saat ini adalah: bagaimana memaknai dan kemudian melaksanakan persatuan dan persaudaraan (*wahdah* dan *ukhuwwah*) sesama umat beriman dalam realitas baru ini. Sebagaimana diketahui Islam sangat menekankan pentingnya konsep persatuan dan persaudaraan yang kemudian diwujudkan ke dalam gerakan saling membantu (*ta'âwun*). Di antara yang telah ditempuh adalah pembentukan organisasi-organisasi lintas negara yang menghimpun negara-negara berpenduduk Muslim secara bersama-sama memperjuangkan kepentingannya. Misalnya adalah Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang sudah disebutkan di bagian awal buku ini. Begitupun, efektivitas dari organisasi ini dalam berhadapan dengan bangsa-bangsa lain masih merupakan pertanyaan besar.

b. Format pemerintahan

Dalam sejarahnya umat Islam telah menggunakan format pemerintahan monarki semenjak berakhirnya era *khilâfah rasyîdah* yang hanya sebentar. Jadi pengalaman historis umat Islam tentang bentuk pemerintahan jelas sekali didominasi oleh sejarah monarki. Sistem monarki bisa saja menggunakan nomenklatur yang berbeda-beda: kerajaan (*mamlakah*), kesultanan (*salthanah*), atau emirat (*imârah*). Akan tetapi, substansinya adalah sama, bahwa kekuasaan merupakan milik eksklusif sebuah keluarga yang diwariskan berdasarkan garis darah. Pascakemerdekaan dari penjajahan Barat, bangsa-bangsa Muslim dihadapkan pada pilihan format pemerintahan yang akan

dilaksanakan. Sebagaimana tergambar dalam daftar negara anggota Organisasi Kerjasama Islam di atas, mayoritas dari negara Muslim kemudian mengambil bentuk republik. Dari 57 negara, sejumlah 46 negara atau 80,7% secara resmi memilih pemerintahan berbentuk republik dan selebihnya melanjutkan sistem kerajaan.¹⁸ Tentu saja dalam aplikasinya di lapangan masih terdapat variasi-variasi tertentu di berbagai negara sesuai dengan tuntutan historis yang lebih spesifik. Tingkat kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip republik juga bervariasi dari satu negara ke negara lainnya.

Tampaknya, dominasi bentuk pemerintahan republik ini mempunyai tiga alasan utama. *Pertama*, ide mengenai republik adalah bagian dari gagasan baru yang melanda Eropa Barat semenjak Revolusi Prancis (1879). Lalu, gagasan republik tersebut dibawa ke seantero dunia oleh bangsa-bangsa penjajah dan kemudian menjadi bentuk pemerintahan negara-negara baru merdeka pada awal abad ke-20. *Kedua*, bangsa-bangsa Muslim yang baru merdeka disadarkan oleh kenyataan bahwa sistem monarki (kerajaan) yang telah berjalan berabad-abad ternyata tidak mampu bertahan di hadapan gelombang dominasi Barat. Ini jelas merupakan sebuah fakta yang tak terbantah dan sekaligus menyakitkan. Oleh karenanya dalam kebanyakan kasus, bentuk pemerintahan kerajaan bukanlah pilihan yang menarik; hanya sedikit kerajaan Islam yang berlanjut hingga ke masa kemerdekaan. *Ketiga*, di tengah umat berkembang kerinduan akan sistem pemerintahan yang lebih melibatkan rakyat secara terbuka sebagaimana diterapkan oleh Nabi Muhammad saw. dan para Al-Khulafâ' al-Râsyidûn di zaman paling awal. Meskipun secara proses memang berasal dari Barat, republik jelas lebih menjanjikan partisipasi masyarakat luas dari pada monarki.¹⁹

Meskipun jelas menggunakan nomenklatur dan secara historis datang dari Barat, sistem pemerintahan republik menjanjikan keterlibatan rakyat banyak yang kerap kali diperbandingkan dengan praktik masa awal Islam. Dalam perkembangannya terdapat upaya yang sangat serius untuk menjem-

¹⁸ Sumber, <https://www.oic-oci.org/states/?lan=en>, diakses tanggal 03 Januari 2019.

¹⁹ Kerinduan ini turut dipicu oleh kegagalan sistem kerajaan melindungi umat Islam dan kemudian dipertegas oleh kegetiran pengalaman sebagai bangsa terjajah. Pada gilirannya di tengah sebagian umat Islam tumbuh keinginan untuk menghidupkan kembali sistem pemerintahan masa paling awal tersebut, lengkap dengan format dan nomenklturnya. Di antara wujudnya adalah berbagai pemikiran dan gerakan untuk mendirikan Khilâfah Islamiyyah.

batani konsep dan pengalaman umat Islam klasik dengan realitas politik umat Islam modern. Secara umum, para pemikir Muslim modern menganggap bentuk republik dapat diterima sebagai pilihan bentuk pemerintahan umat Islam. Kebanyakan negara menggunakan istilah 'Republik' sembari meyakini bahwa wadah tersebut dapat dimuati gagasan dan praktik pemerintahan yang secara substantif sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beberapa negara memilih secara formal menambahkan kata Islam sehingga menjadi 'Republik Islam' guna menegaskan perbedaannya dari republik sebagaimana dipraktikkan di Barat. Ini misalnya terjadi di Iran, Pakistan, Afghanistan, dan Mauritania.

c. Partisipasi masyarakat: demokrasi dan demokratisasi

Menetapkan bahwa sebuah negara memilih republik sebagai sistem pemerintahan adalah sebuah perkara tersendiri, memastikan bahwa sistem tersebut berjalan sebagaimana mestinya adalah perkara lain yang tampaknya lebih pelik serta lebih memakan waktu. Proses ini kemudian menjadikan 'Islam dan Demokrasi' menjadi salah satu topik yang paling banyak diperdebatkan di dunia Muslim zaman modern. Di sisi lain, dan sebagai ikutannya, 'demokratisasi' menjadi satu aspek dinamika yang paling menarik perhatian dalam sejarah umat Islam sekitar satu abad terakhir. Perlu ditekankan bahwa partisipasi masyarakat luas dalam politik merupakan inti dari negara demokrasi.

Kebangkitan Islam dalam kenyataannya sangat terkait dengan topik ini, mulai pada tataran pemikiran hingga tataran pergerakan. Sebuah sumber menyatakan: "Di berbagai belahan dunia Islam, salah satu isu penting yang menentukan masa depan politik adalah hubungan antara kekuatan kebangkitan Islam dan perkembangan sistem politik yang demokratis."²⁰ Dalam kenyataannya, pemahaman maupun pelaksanaan demokrasi di negara-negara Muslim mempunyai variasi yang sangat luas, hal ini ditentukan oleh sangat banyak faktor keagamaan, sosial, politik, maupun pendidikan.

Secara umum gagasan demokrasi dan demokratisasi ini berjalan di atas dua perspektif. *Pertama*, perspektif yang menempatkannya sebagai sebuah gagasan dan praktik politik negara-negara Barat yang terbukti sangat efektif. Perspektif seperti ini berkembang di kalangan sebagian

²⁰ John L. Esposito & John O. Voll. *Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek*, terjemahan Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1999), h. 1.

kelompok terdidik Muslim, terutama sekali mereka yang terpapar dengan pendidikan Barat. Contoh paling populer dalam kategori ini adalah apa yang dilakukan di Turki pada awal abad ke-20 di bawah Mustafa Kemal Attaturk. Dalam waktu yang singkat terjadi peralihan mendasar dari kerajaan Turki Usmani menjadi Republik Turki modern yang mengadopsi lembaga-lembaga dan prosedur politik Barat. Konstitusi Republik Turki modern (1937) bahkan mencantumkan secara formal statusnya sebagai sebuah negara sekuler, meskipun pelaksanaannya tidak sepenuhnya sama dengan yang berjalan di Eropa.²¹

Kedua, perspektif yang membangun argumen bahwa sistem demokrasi menganut nilai-nilai yang secara substantif sejalan dengan Islam dan bahwa sejarah Islam masa paling awal menunjukkan ciri-ciri masyarakat demokratis. Di antara nilai-nilai dasar tersebut adalah kesetaraan manusia, perlunya kesepakatan orang banyak, perlunya menghargai perbedaan pandangan, dan seterusnya. Juga ditekankan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah pemimpin yang sangat egaliter dan terbuka. Dengan perspektif demikian maka proses demokratisasi dijalankan sebagai ‘penegasan kembali identitas dan warisan Islam’. Perspektif semacam ini menarik bagi lebih banyak segmen masyarakat Muslim, mulai dari yang terdidik hingga awam. Dalam konteks kesejarahan, demokrasi tetap disadari sebagai istilah dan prosedur yang datang dari Barat dan karenanya mengandung sejumlah unsur yang tak sesuai dengan Islam—keberatan yang paling utama adalah wataknya yang sekuler. Akan tetapi berkembang juga keyakinan yang terus semakin kuat bahwa “... demokratisasi yang semakin berorientasi Islam akan kehilangan dimensi sekularnya ketika tampil sebagai suatu gerakan rakyat ...”.²² Artinya, watak sekuler demokrasi dilihat lebih melekat kepada masyarakat yang melaksanakannya ketimbang pada sistemnya sendiri. Kebanyakan negara Muslim jatuh pada kategori kedua ini. Indonesia dapat menjadi contoh yang baik. Tanpa menyatakan diri sebagai negara Islam, filosofi negara Pancasila dan UUD 1945 dengan sangat jelas mengamanatkan pentingnya agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijalankan dalam sistem demokrasi permusyawaratan dan perwakilan.

²¹ Perlu diingat bahwa belakangan, di Turki sedang terjadi perkembangan pesat pengaruh kelompok Islam dalam perpolitikan. Hal ini kemudian menimbulkan penafsiran-penafsiran baru terhadap prinsip dan pelaksanaan sekularisme di sana.

²² Esposito & Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*, h. 18.

Dalam interaksinya dengan pemerintah yang sedang berkuasa, gerakan-gerakan kebangkitan Islam mengalami dinamika yang berbeda-beda di berbagai negara. Secara garis besar ada tiga pola pengalaman relasi gerakan Islam dengan pemerintah yang sedang berkuasa.²³

Pertama, gerakan politik Islam yang benar-benar kuat sehingga sukses mengambil alih kekuasaan secara revolusioner. Hal seperti ini terjadi di Iran pada tahun 1979 melalui Revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini. Revolusi ini adalah puncak dari sebuah proses panjang pergerakan Islam melawan otoritarianisme rezim Reza Syah Pahlevi yang mendapat dukungan kuat dari negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Secara perlahan kekuatan gerakan Islam terus bertambah dan kemudian berhasil menggantikan rezim tersebut dengan sebuah Republik Islam. Di Sudan, Front Islam Nasional juga berhasil mengambil alih pemerintahan negeri tersebut pada tahun 1981. Dalam pengalaman berikutnya, eksperimen politik Islam di kedua negara tersebut mengikuti dinamikanya sendiri-sendiri. Iran tampaknya lebih jelas arah perkembangannya dibandingkan Sudan. Penyebab terbesarnya adalah perbedaan derajat heterogenitas penduduk kedua negara dan kekuatan rumusan ideologisnya.

Kedua, gerakan Islam bekerja sama dengan pemerintah yang berkuasa dan berpartisipasi aktif dalam proses politik. Contoh pola ini dapat dilihat dalam pengalaman Pakistan melalui Jamaat-i Islami yang didirikan oleh Abu al-A'la al-Mawdudi pada 1941. Di Malaysia, Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) yang didirikan pada tahun 1971 juga berpartisipasi aktif dalam politik pemerintahan negeri tersebut. Salah satu mantan ketuanya adalah Anwar Ibrahim yang pernah menjadi Wakil Perdana Menteri Malaysia. Gerakan-gerakan Islam di Indonesia juga telah mengalami aneka dinamika partisipasi politik dengan pemerintah. Partai-partai politik yang tumbuh dari medan pergerakan Islam—Masyumi, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional—dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Semuanya bersedia mengikuti prosedur politik Indonesia. Semuanya telah berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan Indonesia pada berbagai posisi dan tingkatan.

Ketiga, gerakan Islam ditekan oleh pemerintahan yang ada. Tampaknya contoh paling mutakhir untuk kategori ini adalah Mesir. Ikhwân al-Muslimîn dan beberapa kelompok gerakan Islam lainnya (Jamâ'ah al-Jihâd, Jamâ'ah

²³ *Ibid.*, h. 8-10.

Islâmiyyah, Takfir wa-Hijrah) dengan orientasi dan strateginya masing-masing mempromosikan Islam ke tengah masyarakat Mesir. Setelah mengalami penekanan di bawah Gamal Abdel Nasser pada 1960an, Ikhwân al-Muslimîn kembali bangkit dan membangun partisipasi politiknya. Melalui Partai Kebebasan dan Keadilan (Hizb al-Hurriyyah wa al-'Adâlah) Ikhwan memenangi pemilu 2011 dan berhasil mendudukkan Muhammad Mursi sebagai presiden pertama Mesir yang dipilih secara terbuka dan demokratis pada tahun 2012. Akan tetapi kekuasaannya hanya bertahan satu tahun. Ia dipaksa turun oleh gelombang protes dan aksi militer, lalu kemudian dipenjarakan. Rezim militer-sekuler kembali mengambil alih pemerintahan Mesir yang bahkan menyatakan Ikhwân al-Muslimîn sebagai organisasi terlarang.²⁴ Pengalaman Aljazair juga menunjukkan hal yang lebih kurang sama. Meskipun di negeri ini berkembang berbagai kelompok pergerakan Islam, tampaknya yang lebih menonjol dan terorganisir adalah Al-Jabhah al-Islâmiyyah li al-Inqâdz, namun lebih populer dalam nama Prancisnya, Front Islamique Salut (FIS). FIS didirikan pada tahun 1981 dengan pimpinan Syekh Ali Abbasi Madani asal Aljir. Ali Abbasi pada dasarnya mendukung demokrasi dengan keyakinan bahwa demokrasi dapat dimuati dengan nilai-nilai dan warisan Islam. Kemenangan besar FIS dalam pemilihan umum tahun 1990—ini adalah pemilihan umum multi partai pertama di Aljazair yang sebelumnya adalah sosialis partai tunggal—tidak dapat diterima oleh rezim otoriter lama yang sekuler. Rezim ini kemudian mengizinkan intervensi militer untuk menganulir kemenangan tersebut. Ini adalah pangkal dari kerusuhan dan konflik berdarah yang kemudian mengikutinya, sekaligus menandai gagalnya proses demokratisasi di negeri tersebut.

Proses demokratisasi menjadi pengalaman sejarah yang sangat penting bagi umat Islam di negara manapun dalam satu abad terakhir. Berbagai faktor memengaruhi dinamika tersebut dan mengambil bentuk yang berbeda dari satu kasus ke kasus lainnya. Tampaknya, “masalah utama dalam perubahan besar ini adalah bagaimana menerapkan konsep dan struktur Islam ke dalam realitas sosial politik modern yang notabene telah terpengaruh Barat.”²⁵

²⁴ <https://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/18/10/15/pgmgit320-presiden-mesir-tak-saya-biarkan-ikhwanul-muslimin-eksis>, diakses 06 Mei 2019.

²⁵ Esposito & Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*, h. 4.

3. Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan

Pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kebangkitan Islam dapat dilihat pada dua tataran: pengembangan filosofi keilmuan yang islami dan upaya membangun lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berkualitas.

a. Islam dan Sains: Epistemologi Integratif

Dalam Alquran dijumpai banyak sekali isyarat-isyarat ilmiah yang menunjukkan bahwa Islam menganjurkan pengembangan semua cabang ilmu pengetahuan. Prinsip inilah yang dianut di masa klasik, ketika umat Islam menjadi yang terdepan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sepanjang masa kemandekan peradaban Islam, puncak-puncak capaian di bidang ilmu pengetahuan beralih ke Eropa Barat. Berbeda dengan pengalaman Islam, di Eropa gereja menentang ilmu pengetahuan untuk waktu yang cukup lama. Pertentangan tersebut kemudian ikut menyuburkan watak epistemologi Barat yang sekuler, lepas dari nilai-nilai agama. Dari sinilah kemudian muncul dikotomi pendidikan, mulai dari tataran filosofis, kelembagaan, alumni, hingga tataran relevansi sosiologisnya.²⁶

Kebangkitan Islam pada abad ke-19, mau tidak mau harus berhadapan dengan epistemologi yang bersumber dari Barat. Dalam kenyataannya pengadopsian dan pengadaptasian ilmu pengetahuan dari Barat menjadi bagian yang sangat penting dari upaya-upaya kebangkitan pendidikan Islam, sekurang-kurangnya sampai pertengahan abad ke-20. Barulah pada sekitar pertengahan abad ke-20 muncul gagasan epistemologi alternatif yang berwatak islami dan melawan dikotomi. Inti terpenting dari epistemologi yang diperjuangkan ini adalah integrasi agama dan ilmu pengetahuan. Dari sudut pandang konteks historisnya, tawaran ini di satu sisi merupakan koreksi terhadap epistemologi Barat, dan di sisi lain merupakan upaya menghidupkan kembali tradisi ilmiah masa klasik Islam.

Banyak pemikir Islam telah berkontribusi terhadap upaya pengembangan epistemologi ini. Akan tetapi tampaknya yang lebih fenomenal—karena menjadi sebuah gerakan pengupayaan yang terorganisir—adalah proyek

²⁶ Persoalan ini pernah saya bahas dalam Hasan Asari, "Filsafat Pendidikan Islam: Sebuah Refleksi Historis," dalam Asrul Daulay & Ja'far (ed.) *Falsafah Pendidikan Islami: Menguak Nilai-nilai Pendidikan dalam Tradisi Islam* (Medan: Perdana Publishing, 2016), h. 180-193.

Islamisasi Pengetahuan yang digagas oleh ilmuan asal Palestina, Ismail Raji al-Faruqi. Untuk memwadahi upaya Islamisasi Pengetahuan tersebut, pada tahun 1981 Al-Faruqi mendirikan International Institute of Islamic Thought (IIIT) yang bermarkas di Amerika Serikat, dan memiliki cabang di berbagai negara. Lembaga ini telah menerbitkan sejumlah besar buku yang fokus pada realisasi visi-misinya, yakni Islamisasi Pengetahuan.²⁷ Sejumlah publikasi IIIT dapat ditemukan terjemahannya dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

b. Pembaruan Pendidikan Islam

Kebangkitan Islam juga mengambil bentuk pembaruan besar-besaran dalam pendidikan Islam. Pembaruan pendidikan Islam ini mencakup semua jenis lembaga pendidikan dan semua aspek operasionalnya. Kelembagaan, tujuan, kurikulum, metode pendidikan, manajemen, dan seterusnya turut diperbarui untuk merespon keadaan yang berubah cepat. Misalnya, kurikulum madrasah warisan abad pertengahan yang hanya mencakup ilmu-ilmu agama mulai diperluas hingga mencakup bidang sains dan teknologi. Pesantren di Indonesia juga mengalami pembaruan, hingga memasuki bidang kajian yang sama dengan sekolah dan madrasah. Pengelolaan lembaga-lembaga tersebut pun mengalami perbaikan sedemikian rupa, dan menerapkan prinsip-prinsip administrasi yang mutakhir.

Pada awal kemerdekaannya, rata-rata negara Muslim melakukan nasionalisasi terhadap sistem pendidikan tinggi yang didirikan oleh bangsa penjajah. Universitas-universitas warisan penjajahan tersebut secara alamiah menerapkan epistemologi ala Barat dan tidak mempertimbangkan dimensi agama dalam pengembangan ilmu. Belakangan inisiatif-inisiatif baru untuk mendirikan Universitas Islam semakin marak. Universitas Islam diharapkan menjadi wadah eksperimen pengembangan filosofi pendidikan yang berakar pada pandangan asli Islam mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kampus-kampus tersebut juga diharapkan menyerap praktik-praktik terbaik dari tradisi pendidikan Islam sebagaimana terekam dalam sejarah. Jika disederhanakan, Universitas Islam dibebani misi untuk

²⁷ Lihat misalnya, Isma'il Raji al-Faruqi, *Islamization of Knowledge* (Herndon: VA: International Institute of Islamic Thought, 1982); Ismail Raji al-Faruqi dan Abdullah Omar Nassef, *Social and Natural Sciences: The Islamic Perspective* (Jeddah: King Abdulaziz University, 1981); Imam al-Din Khalil, *Islamization of Knowledge: A Methodology* (London: IIIT, 1991).

mengembalikan nilai-nilai agama sebagai pemandu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan melalui itu akan memengaruhi arah masa depan kemanusiaan dan peradaban.

Sejauh ini, proyek di tingkat pendidikan tinggi ini telah menghasilkan sejumlah Universitas Islam Internasional, seperti yang terdapat di Madinah Saudi Arabia, Islamabad Pakistan, Dakha Bangladesh, dan Kuala Lumpur Malaysia. Di kampus-kampus ini dilaksanakan pendidikan yang mengacu kepada filsafat pendidikan sebagaimana dirumuskan oleh IIIT lewat proyek Islamisasi Pengetahuan (Islamization of Knowledge). Di Indonesia sendiri, sejak 1960an pemerintah telah memfasilitasi pendirian sejumlah perguruan tinggi Islam dalam bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Sejak awal abad ke-21, sejumlah 16 kampus IAIN telah bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Transformasi ini ditujukan untuk memungkinkan perluasan bidang kajian sehingga mencakup seluruh rumpun ilmu yang ada. Keberadaan kampus-kampus UIN juga jelas sekali sebagai upaya melaksanakan prinsip integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai agama Islam. Tentu saja diperlukan waktu yang memadai sebelum kita mengetahui tingkat keberhasilan kampus-kampus ini mencapai misinya.²⁸

c. Penelitian dan publikasi

Penelitian dan publikasi ilmiah juga merupakan aspek yang sangat penting dalam gerak kebangkitan Islam di bidang ilmu pengetahuan. Sebagaimana dimaklumi penelitian adalah kunci perkembangan ilmu pengetahuan; tanpa penelitian yang sungguh-sungguh pengetahuan akan berhenti berkembang, lalu kehilangan daya jawabnya terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Ini lah sesungguhnya yang dialami umat Islam pada abad-abad pertengahan. Adagium *'knowledge is power'* mengharuskan umat Islam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian, jika ingin kembali menjadi penguasa peradaban. Selanjutnya, hasil-hasil penelitian dipublikasikan agar dapat diketahui oleh banyak orang sehingga menjadi bermanfaat secara luas. Di sisi lain publikasi hasil penelitian memungkinkannya untuk dibahas dan dikritisi oleh peneliti atau ilmuan lain, sehingga tingkat pengetahuan tentang satu bidang tertentu tidak pernah berhenti berkembang.

²⁸ Hasan Asari, *Sejarah Pendidikan Islam: Membangun Relevansi Masa Lalu dengan Masa Kini dan Masa Depan* (Medan: Perdana Publishing, 2018), h. 69-86.

Oleh karenanya, jika diperhatikan, rata-rata gerakan kebangkitan Islam melibatkan penggiatan kembali upaya publikasi sebagai pendukung penyebarluasan ide-ide baru. Hal ini misalnya saja dapat dilihat dalam gerakan kebangkitan di Mesir pada penghujung abad ke-19, kala itu diterbitkan tiga berkala: *Al-'Urwah al-Wutsqâ*, *Al-Waqâ'i' al-Mishriyyah* dan *Rawdhah al-Madâris*. Di India pada masa yang sama mulai terbit jurnal *Tahdzîb al-Akhlâq*, *Al-Nadwah*, *Tarjumân al-Qur'ân*, dan *Al-Hilâl*. Di Indonesia pada awal abad ke-20 beredar beberapa jurnal: *Al-Munîr*, *Al-Dhâkhirah*, *Pembela Islam*, *Al-Lisân*, dan *Al-Fatâwâ*, yang disponsori oleh berbagai kelompok pembaruan Islam.

Upaya di bidang ini terus berkembang sejalan dengan perbaikan kondisi pendidikan dan ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Di atas telah disebutkan bahwa IIIT yang didirikan oleh Al-Faruqi secara rutin menerbitkan buku-buku keislaman dengan tema sentral Islamisasi Pengetahuan. Lembaga ini juga menerbitkan *Journal of Islamic Social Sciences (JISS)*. Berbagai kampus UIN di Indonesia juga menerbitkan jurnal ilmiah dengan reputasi internasional, seperti *Studia Islamika* (UIN Jakarta); *Al-Jami'ah* (UIN Yogyakarta), dan *Journal of Indonesian Islam* (UIN Surabaya). Semua publikasi ini pada dasarnya menunjukkan satu gerakan kebangkitan di bidang ilmu pengetahuan.

4. Ekonomi

Kebangkitan Islam dalam bidang ekonomi sekurang-kurangnya dapat dijelaskan dalam dua tataran, yakni tataran yang lebih teoretis dalam bentuk pengembangan Ilmu Ekonomi Islam serta pada tataran yang lebih praktis dalam bentuk pengembangan lembaga-lembaga keuangan Islam dan perubahan prilaku ekonomi umat Islam.

a. Ilmu Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi diajarkan di dalam kitab suci Alquran dan kemudian telah dikembangkan dan menjadi dasar aktivitas ekonomi umat Islam sepanjang masa kejayaannya. Namun demikian di masa modern sistem perekonomian dunia didominasi secara mutlak oleh sistem Barat yang dalam banyak aspek tak sejalan dengan prinsip Syariah Islam. Karenanya umat Islam menggagas untuk menghidupkan kembali Ilmu Ekonomi Islam untuk menjadi dasar praktik ekonomi menggantikan sistem Barat.

Pada Februari 1976 dilaksanakanlah First International Conference on Islamic Economics di King Abdulaziz University Jeddah, Saudi Arabia. Di dalam konferensi yang sangat historis tersebut dibentangkan dan dibahas sejumlah makalah yang mencakup tema-tema berikut:²⁹

- 1) Konsep dan metodologi Ekonomi Islam.
- 2) Produksi dan konsumsi dalam Ekonomi Islam.
- 3) Peranan negara dalam Ekonomi Islam: Krisis Modernisasi dan Islamisasi.
- 4) Asuransi dalam kerangka kerja Syariah.
- 5) Bank bebas-bunga.
- 6) Zakat, pajak, dan kebijakan fiskal.
- 7) Perkembangan ekonomi dalam sebuah kerangka kerja Islam.
- 8) Kerja sama ekonomi antara negara-negara Muslim.
- 9) Kepentingan publik dan harga yang adil.
- 10) Dua survei tentang literatur ekonomi Islam kontemporer; satu mengenai “Pemikiran Ekonomi Muslim” dan yang lainnya mengenai “Literatur Turki Kontemporer tentang Ekonomi Islam”.
- 11) Pengajaran Ekonomi Islam dengan tujuan memperkenalkannya ke dalam kurikulum perguruan tinggi.

Konferensi Internasional tentang Ekonomi Islam tersebut merekomendasikan pendirian sebuah pusat penelitian Ekonomi Islam. Maka pada tahun 1977 didirikanlah The International Centre for Research in Islamic Economics (ICRIE) yang berbasis di King Abdulaziz University. Tujuan pokok dari lembaga ini adalah:³⁰

- 1) Mendirikan sebuah perpustakaan khusus yang menghimpun karya ilmiah di bidang Ekonomi Islam.
- 2) Melaksanakan dan mendukung penelitian dalam berbagai aspek Ekonomi Islam, menerbitkan buku-ajar untuk universitas Islam, dan melaksanakan pelatihan yang dibutuhkan oleh lembaga ekonomi Islam.
- 3) Menyediakan fasilitas penelitian dan bantuan biaya bagi ilmuan tamu yang sedang melakukan penelitian.

²⁹ El-Ashker and Wilson, *Islamic Economics*, h. 338-339.

³⁰ *Ibid.*, h. 340-341.

- 4) Mendorong kerja sama penelitian bidang Ekonomi Islam yang melibatkan universitas-universitas Islam.
- 5) Menerbitkan jurnal-jurnal dalam bidang Ekonomi Islam.
- 6) Membantu penyediaan dosen Ekonomi Islam, menyediakan beasiswa, dan memfasilitasi konferensi, kuliah umum, dan simposium dalam bidang Ekonomi Islam.

Semenjak konferensi pertama tersebut ilmu Ekonomi Islam telah berkembang cukup menggembirakan. Sekarang ini, Ekonomi Islam telah dikaji di banyak perguruan tinggi Dunia Islam, tidak saja sebagai sebuah mata kuliah tetapi malah sudah membentuk Jurusan dan bahkan fakultas. Di berbagai perguruan tinggi keislaman di Indonesia dijumpai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sedang berkembang sangat pesat. Di bawah naungan lembaga-lembaga akademik tersebut, berbagai gagasan dan teori mengenai Ekonomi Islam terus dikembangkan dan disempurnakan. Pertemuan-pertemuan ilmiah dalam bidang Ekonomi Islam pun semakin sering digelar, demikian juga dengan berbagai penelitian akademik.

b. Lembaga Keuangan Islam

Pada tataran yang lebih operasional pun Ekonomi Islam menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pendirian Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 adalah sebuah langkah besar. Bank ini didirikan menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan dalam Pertemuan Menteri-menteri Keuangan Negara-negara Muslim dua tahun sebelumnya. Kantor pusat IDB ada di Jeddah, Saudi Arabia; sementara kantor perwakilannya dapat ditemukan di Rabat, Maroko, Kuala Lumpur Malaysia, dan Almaty, Kazakhstan. Tujuan dari IDB adalah untuk mendorong perkembangan ekonomi dan sosial negara-negara anggota maupun komunitas Muslim berdasarkan prinsip Syariah. Negara anggota dalam hal ini adalah 57 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Untuk mencapai tujuan itu IDB menjalankan fungsi:

- 1) Berpartisipasi dalam menyediakan modal dan pinjaman untuk melaksanakan proyek-proyek produktif di lingkungan negara-negara anggota.
- 2) Memberikan bantuan keuangan bagi negara-negara anggota untuk mendorong perkembangan ekonomi dan sosial.

- 3) Menyediakan dan mengelola dana khusus untuk tujuan tertentu, termasuk untuk membantu masyarakat Muslim di negara yang bukan anggota.
- 4) Mendorong dan membantu perdagangan internasional antara negara-negara anggota, menyediakan bantuan teknis, dan fasilitas pelatihan pengembangan masyarakat.³¹

Masa 1970an dan 1980an menyaksikan pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai negara; misalnya, Dubai Islamic Bank pada tahun 1975, Kuwait Finance House pada 1977, Jordan Islamic Bank for Finance and Investment pada 1978, Bahrain Islamic Bank pada 1979, Iran Islamic Bank pada 1979, Islamic Exchange and Investment Corporation di Qatar pada 1979, International Bank for Investment and Development di Mesir pada 1980, International Islamic Bank di Bangladesh pada 1983, Bank Islam Malaysia pada 1983, dan al-Barakah Turkish Finance House pada 1984. Lembaga perbankan Islam tidak hanya tumbuh di dunia Islam tetapi juga di Barat, seperti: Islamic Investment Company, di Bahama pada 1977, Islamic Banking System di Luxembourg pada 1978, al-Rajhi Co. for Islamic Investment, di Inggris Raya pada 1980, Dar-al-Mal al-Islami, di Swiss pada 1981, Islamic Bank International, di Denmark pada 1983, dan Al-Barakah International PLC., Inggris Raya, pada 1983.³²

Secara umum ada dua faktor pendukung berkembangnya lembaga-lembaga keuangan ini. *Pertama*, adanya pasar yang terus berkembang. Pasar bagi lembaga keuangan Islam berkembang karena semakin kuatnya kesadaran masyarakat Muslim untuk menggunakan sistem keuangan berbasis Syariah. Ini diperkuat pula oleh kenyataan bahwa lembaga-lembaga tersebut membidik masyarakat pada level akar rumput yang sering kali tidak memiliki akses kepada sistem perbankan konvensional. *Kedua*, tersedianya modal awal untuk mendirikan bank. Modal ini datang dari tiga sumber: orang-orang kaya Arab yang meyakini bahwa sistem Islam kompetitif terhadap sistem konvensional; modal dari negara; dan modal langsung dari masyarakat luas. Pada gilirannya, lembaga-lembaga keuangan

³¹ *Ibid.*, h. 331-332.

³² *Ibid.*, h. 336-337. Sejumlah contoh lain disebutkan dalam sumber ini.

Islam yang ada menjadi penyangga pertumbuhan usaha-usaha bisnis dalam berbagai sektor.³³

5. Islam dalam Budaya Populer

Kebangkitan Islam zaman modern juga mengambil wujud semakin populernya aneka aspek kebudayaan Islam. Misalnya, beberapa dekade belakangan menjadi saksi perkembangan ‘Musik Islami’ yang sangat pesat, terlepas dari berbagai perbedaan makna yang mungkin melekat pada istilah tersebut.³⁴ Jika awalnya musik Islami kerap dikaitkan dengan tradisi musik Timur Tengah, belakangan telah berkembang berbagai genre yang mengakomodasi aliran-aliran musik lainnya, termasuk yang berasal dari Barat. Beberapa contoh penyanyi populer dapat disebutkan di sini: Umm Kultsum penyanyi legendaris dari Mesir, Cat Stevens, penyanyi Inggris yang masuk Islam pada 1977 dan mengganti nama menjadi Yusuf Islam; Sami Yusuf asal Iran yang hidup di Inggris; atau Maher Zein, penyanyi Swedia asal Lebanon. Untuk konteks Indonesia, beberapa tokoh penting di bidang ini mencakup Ahmad Baqi, Rhoma Irama, Nur Asiah Jamil, dan yang paling baru, Nissa Sabyan. Semua mereka ini dengan gaya dan kekhasannya masing-masing telah turut memperkenalkan Islam pada tataran budaya populer.

Para atlet Muslim yang berkarir di berbagai cabang olah raga turut juga meningkatkan popularitas Islam pada panggung internasional. Olah raga memang dikenal sebagai bidang yang sangat terbuka; artinya siapa saja dapat menekuninya dan diukur hanya melalui kinerja riil yang dapat diberikannya. Lalu, masing-masing cabang olah raga memiliki audiens sendiri yang bisa saja sangat besar dengan jaringan internasional. Sejumlah nama atlet Muslim telah mempopulerkan Islam di seluruh dunia melalui pencapaian olah raga. Di cabang tinju telah melegenda Muhammad Ali, Hasyim Rahman, dan Mike Tyson dari Amerika Serikat serta Amir Khan warga Inggris keturunan Punjab, Pakistan. Di cabang basket ada Kareem Abdul Jabbar, Hakeem Olajuwon, Rasheed Wallace dan Kenneth Faried dari Amerika Serikat. Di cabang rugby ada Imran Khan yang belakangan

³³ *Ibid.*, h. 337-338.

³⁴ Sebenarnya, kalangan tertentu dari masyarakat Muslim beranggapan bahwa musik adalah terlarang, mengacu kepada berbagai teks keagamaan klasik. Namun demikian, anggapan ini tampaknya tidak mempunyai pengaruh signifikan pada tataran praktik.

menjadi Perdana Menteri Pakistan, juga Sony Williams dari Selandia Baru, atau Nizar Carr dan Uzair Cassiem keduanya dari Afrika Selatan.

Sepak bola merupakan cabang yang paling banyak menyimpan atlet Muslim kelas atas: Zinedine Zidan, Franck Ribery, Samir Nasri, dan Kareen Benzema dari Prancis; Mesut Ozil dan Sami Khedira dari Jerman; Hasan Salihamidzik dan Edin Dzeko dari Bosnia; Yaya Toure, Kolo Toure, dan Solomon Kalou dari Pantai Gading; Morouane Fellaini dari Belgia; Marouane Chamakh dari Maroko; Ibrahim Afellay dari Belanda; serta Ahmed Hossam Hussein dan Mohamed Salah dari Mesir. Ketika menerima penghargaan sebagai pencetak gol terbanyak Liga Inggris 2018/2019—biasa dikenal sebagai Golden Boot—Mohamed Salah didampingi istrinya yang berhijab ke tengah lapangan, ke tengah pentas cabang olah raga paling populer di dunia. Ketika anak perempuan Salah menendang dan menggiring bola di bawah sorotan media internasional, secara tidak langsung ia telah turut mengirim pesan tentang wajah Islam yang sangat boleh jadi tidak mirip dengan bayangan banyak orang di Barat. Pada awal 2018, Jawahir Roble, seorang perempuan Muslim kelahiran Somalia, secara resmi mendapatkan lisensi sebagai wasit sepak bola dari Federasi Sepak Bola Inggris. Jawahir, populer sebagai JJ, yang selalu bertugas lengkap dengan hijabnya, mengaku awalnya mendapat perlakuan kurang menyenangkan, tetapi dia tak mau mengalah dan berharap akan ditugaskan dalam pertandingan Premier League atau Champion League.³⁵

Kewajiban menggunakan hijab bagi perempuan Muslim kerap menjadi sumber dilema sosial di negeri-negeri Barat. Di sebagian kalangan, hijab dipersepsi sebagai lambang perbudakan dan pelanggaran hak asasi perempuan. Di sisi lain, belakangan muncul beberapa wanita Muslim yang sangat populer yang tampil dengan hijab dalam konteks-konteks sosial yang sebelumnya tidak lazim. Misalnya, secara umum standar pakaian wanita yang dianut dunia olah raga selama ini sama sekali tidak merespon kewajiban agama perempuan Muslim untuk menutup aurat. Belakangan ini, aturan-aturan tersebut sedang ditantang oleh atlet-atlet perempuan Muslim yang ingin menjalankan kewajibannya. Tampaknya yang paling terkenal belakangan ini adalah Ibtihaj Muhammad, atlet perempuan Amerika Serikat cabang anggar, yang konsisten menggunakan hijab ketika bertanding.

³⁵ <https://www.thesun.co.uk/sport/football/6318029/britains-first-female-muslim-referee/>; <https://www.mend.org.uk/news/weve-got-first-muslim-female-referee>, diakses 3 Juni 2019.

Atlet yang mendapat komentar dukungan dari presiden Amerika Barack Obama ini berhasil memperoleh medali perunggu di Olimpiade 2016 di Rio De Janeiro Brazil, yang membuatnya lebih populer lagi.³⁶ Amaiya Zafar petinju perempuan amatir berhasil meminta perkecualian kepada Badan Tinju Amerika Serikat untuk naik ring dengan hijab.³⁷ Stephanie Kurlow, penari balet Australia, masuk Islam pada 2010. Zahra Lari atlet ski es dari Uni Emirat Arab—dari Ayah Arab dan ibu asal Atlanta—juara nasional yang tampil dengan hijab. Amna al-Haddad, seorang atlet perempuan Uni Emirat Arab dalam cabang angkat berat, juga selalu tampil dengan hijab.

Penampilan mereka dengan hijab dalam even-even besar memang menjadi sangat menonjol dan terkadang kontroversial. Namun kekuatan pendirian mereka secara perlahan membuahkan pengakuan. Belakangan, produsen pakaian olah raga, Nike, mulai memproduksi pakaian khas yang dibutuhkan oleh atlet wanita Muslim. Perusahaan Amerika ini bahkan menjadikan 'Pro Hijab' sebagai sebuah *product line* khusus. Sebagai sebuah langkah baru, kontroversi merebak mengiringi peluncuran produk tersebut; antara mereka yang melihat hijab sebagai bagian dari tuntutan agama namun tidak harus menghalangi partisipasi dalam olah raga dengan mereka yang memandangnya sebagai simbol pengekangan yang merendahkan wanita.³⁸

Penggunaan hijab sebagai ajaran Syariah boleh jadi masih akan terus menjadi kontroversi di negeri-negeri Barat untuk waktu yang cukup lama, terlebih bila berkenaan dengan model yang menutup seluruh wajah, termasuk mata. Di luar *khilafiyah* tentang fikihnya, budaya berpakaian wanita Barat kontemporer menjadikan penerimaan terhadap pakaian wanita Muslim akan memakan waktu yang lebih lama. Namun demikian perlu juga dicatat bahwa belakangan ini, industri *fashion* Barat telah mulai melihat hijab sebagai sebuah model pakaian wanita, sebagaimana juga model-model lainnya. Belakangan telah mulai ada upaya 'memperkenalkan' berbagai jenis pakaian wanita Muslim ke khalayak ramai di kota-kota

³⁶ <https://mvslim.com/5-slaying-hijabi-athletes-you-should-know-about/>, diakses 11 Mei 2019.

³⁷ [https://www.washingtonpost.com/news/early-lead/wp/2017/05/02/she-fought-to-box-in-a-hijab](https://www.washingtonpost.com/news/early-lead/wp/2017/05/02/she-fought-to-box-in-a-hijab-....) diakses 11 Mei 2019.

³⁸ <http://www.bbc.com/culture/story/20180110-the-sports-hijab-dividing-opinions>, diakses 11 Mei 2019.

Barat. Dengan demikian diharapkan pada waktunya pakaian *syariah-friendly* akan dianggap sebagai hal yang biasa dan menjadi pilihan di tengah pilihan lainnya. Pada tahun 2015, *retailer* pakaian H&M mulai mempromosikan pakaian wanita berhijab. Tahun berikutnya perusahaan pakaian raksasa Dolce & Gabbana mulai meluncurkan pakaian untuk wanita Muslim. Jaringan butik dari Jepang, Uniqlo, juga memasarkan pakaian sejenis.³⁹ Tentu saja gerakan yang sama—dengan intensitas yang jauh lebih tinggi—terjadi lebih awal di negeri-negeri berpenduduk mayoritas Muslim.

Kaum selebritas Barat yang masuk Islam juga menjadi pendorong khusus semakin dikenalnya Islam dalam konteks budaya populer. Di antara yang sangat terkenal dalam hal ini adalah perempuan kelahiran Hamburg, Kristiane Backer, seorang presenter MTV Europe. Di puncak karirnya di dunia glamour MTV, Kristiane memutuskan masuk Islam pada tahun 1995. Dia kemudian menulis buku *From MTV to Mecca: How Islam Inspired my Life*, yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

Demikianlah beberapa tema dan bentuk-bentuk kebangkitan Islam yang sudah dan terus mewarnai gerak sejarah umat Islam masa modern. Capaian-capaian yang sudah ada tentu saja masih memerlukan perbaikan terus menerus. Kebangkitan Islam harus merespon satu masa panjang kemandekan, dan karenanya dapat dipastikan akan memerlukan waktu yang panjang juga untuk melihat hasilnya. Sejarah kebangkitan kembali baru menapaki abad kedua; oleh karenanya capaian-capaian awal tersebut sepatutnya dipandang sebagai indikator awal untuk terus memperjuangkan kebangkitan yang lebih luas, lebih lengkap aspeknya, dan lebih tinggi kualitasnya.

³⁹ <https://www.dw.com/en/muslim-fashion-for-women-exhibition-stirs-controversy-in-germany/a-45601007>, diakses 11 Mei 2019.



BIBLIOGRAFI

- Abu Rabi', Ibrahim (ed.) *Islam at the Crossroads: On the Life and Thought of Bediuzzaman Said Nursi*. Albany: SUNY Press, 2003.
- al-Faruqi, Isma'il Raji. *Islamization of Knowledge*. Herndon: VA: International Institute of Islamic Thought, 1982.
- al-Faruqi, Ismail Raji dan Abdullah Omar Nassef, *Social and Natural Sciences: The Islamic Perspective*. Jeddah: King Abdulaziz University, 1981.
- al-Mubârafûrî, Shafi al-Rahmân. *Al-Rahîq al-Makhtûm (The Sealed Nectar): Biography of the Noble Prophet*. Riyadh: Maktabah Dar al-Salam, 1995.
- al-Sijistânî, Abû Dâwud. *Sunan Abî Dâwud*, edisi M. Muhy al-Dîn 'Abd al-Hâmid. Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1935.
- Ananta, Aris, *et al.* *Demography of Indonesia's Ethnicity*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2015.
- Arkoun, Mohammed. *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*, terjemahan Robert D. Lee. Boulder: Westview Press, 1994.
- Asad, Muhammad. *Islam at the Crossroads*. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1975.
- Asari, Hasan. "Filsafat Pendidikan Islam: Sebuah Refleksi Historis," dalam Asrul Daulay & Ja'far (ed.) *Falsafah Pendidikan Islami: Menguak Nilai-nilai Pendidikan dalam Tradisi Islam*. Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Asari, Hasan. *Modernisasi Islam: Tokoh, Gagasan, dan Gerakan*. Bandung: Citapustaka Media, 2002.

- Asari, Hasan. *Sejarah Pendidikan Islam: Membangun Relevansi Masa Lalu dengan Masa Kini dan Masa Depan*. Medan: Perdana Publishing, 2018.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1994.
- Bagir, Haidar & Syafiq Basri (ed.) *Ijtihad Dalam Sorotan*. Bandung: Mizan, 1988.
- Bosworth, C. E. *The Islamic Dynasties: A Chronological and Geneological Handbook*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1980.
- Cesari, Jocelyne. "Muslim Minorities in Europe," dalam John L. Esposito & Francois Burgat (ed.) *Modernizing Islam: Religion in Public Sphere in Erop and the Middle East*. London: C. Hurst & Co., 2003.
- Cherribi, Oussama. "The Growing Islamization of Europe," dalam John L. Esposito & Francois Burgat (ed.) *Modernizing Islam: Religion in Public Sphere in Eruope and the Middle East*. London: C. Hurst & Co., 2003.
- El-Ashker, Ahmed and Rodney Wilson, *Islamic Economics: A Short History*. Leiden: E. J. Brill, 2006.
- Esposito, John L. & John O. Voll. *Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek*, terjemahan Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1999.
- Friedman, Thomas L. *From Beirut to Yerusalem*. New York: Farrar Straus Giroux, 1990.
- Gibb, H.A.R. *Aliran-Aliran Moderen Dalam Islam*, terjemahan M. Husein. Jakarta: Rajawali, 1992.
- Grunebaum, Gustav von. *Classical Islam: A History 600-1258*, terjemahan Katherine Watson. London: George Allen & Unwin, 1970.
- Grunebaum, Gustav von. *Medieval Islam: A Study in Cultural Orientation*. Chicago: The University of Chicago Press, 1966.
- Grunebaum, Gustav von. *Modern Islam: The Search for Cultural Identity*. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1983.
- Hanafi, Hassan. *Islam in the Modern World*. Heliopolis: Dar Kebaa, 2000.
- Harahap, Syahrin. "Universitas Islam sebagai Pusat Pembaharuan," dalam Hasan Asari (ed.) *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Memperkokoh Eksistensi, Memperluas Kontribusi*. Medan: IAIN Press, 2015.

Harahap, Syahrin. *Islam dan Modernitas: Dari Teori Modernisasi hingga Penegakan Kesalehan Modern*. Jakarta: Prenada Media, 2015.

Hassan, Ahmad Y. dan Donald R. Hill, *Teknologi dalam Sejarah Islam*, terj. Yuliano Liputo. Bandung: Mizan, 1993.

Hourani, Albert. *Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939*. London: Oxford University Press, 1962.

http://arabcenterdc.org/policy_analyses/a-timeline-of-the-yemen-crisis-from-the-1990s-to-the-present

<http://sites.middlebury.edu/arabuprisingchronology/chronology>

<http://www.bbc.com/culture/story/20180110-the-sports-hijab-dividing-opinions>

https://guides.library.cornell.edu/arab_spring/Yemen

<https://ikashmir.net/history/chronology.html> SD 1990; <https://www.cnbc.com/2019/03/01/india-pakistan-conflict-timeline.html>

<https://israelipalestinian.procon.org/view.timeline.php?timelineID=000031>

<https://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2018/8/PEMILU-1955/10>

<https://mvslim.com/5-slaying-hijabi-athletes-you-should-know-about>

[https://nasional.kompas.com/read/2014/05/09/2357075/...
Suara.Pemilu.Legislatif.2014](https://nasional.kompas.com/read/2014/05/09/2357075/...Suara.Pemilu.Legislatif.2014)

<https://nasional.kompas.com/read/2019/05/22/16141831/infografik-perolehan-suara-partai-politik-dalam-pemilu-2019-versi-kpu>

<https://news.gallup.com/poll/224642/2017-update-americans-religion.aspx>

<https://pemilu.tempo.co/read/545186/pemilu-1977/full&view=ok>

<https://pemilu.tempo.co/read/545199/pemilu-1987>

<https://pemilu.tempo.co/read/545207/pemilu-1997/full&view=ok>

<https://www.ahdictionary.com/word/search.html>

<https://www.aljazeera.com/indepth/features/islam-russia-180307094248743.html>

<https://www.britannica.com>

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english>

<https://www.dw.com/en/muslim-fashion-for-women-exhibition-stirs-controversy-in-germany/a-45601007>

<https://www.foxnews.com/world/timeline-of-recent-terror-attacks-against-the-west>

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=milestones+of+israel+arab+conflict>

<https://www.history.com/topics/middle-east/arab-spring>

<https://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999>

<https://www.mend.org.uk/news/weve-got-first-muslim-female-referee>

<https://www.middleeastmonitor.com/20190521-countries-fueling-libya-conflict-must-be-stopped>

<https://www.morocoworldnews.com/2011/06/1700/arab-revolt-timeline-for-morocco>

<https://www.nationalgeographic.com/culture/people/reference/rohingya-people>

<https://www.newsnow.co.uk/h/World+News/Africa/Libya>

<https://www.oic-oci.org/states/?lan=en>

<https://www.pewforum.org/2011/01/27/table-muslim-population-by-country>

<https://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/18/10/15/pgmgit320-presiden-mesir-tak-saya-biarkan-ikhwanul-muslimin-eksis>

<https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/18/08/28/pe69h6366-saudi-rilis-jumlah-jamaah-haji-selama-24-tahun-terakhir>

<https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/18/12/18/pjxy9w320-jamaah-umrah-2018-11-juta-orang-2019-diprediksi-bertambah>

<https://www.setav.org/en/islamophobic-statements-of-politicians-in-europe>

<https://www.setav.org/en/european-islamophobia-report-2017>

<https://www.setav.org/en/islamophobia-in-europe-numbers-in-detail>

<https://www.setav.org/en/islamophobia-in-the-media>

<https://www.thesun.co.uk/sport/football/6318029/britains-first-female-muslim-referee>

<https://www.unicef.org/emergencies/rohingya-crisis>

<https://www.usip.org/publications/2019/02/syria-timeline-uprising-against-assad>

<https://www.washingtonpost.com/news/early-lead/wp/2017/05/02/she-fought-to-box-in-a-hijab>

<https://www.worldatlas.com/articles/religious-beliefs-in-modern-russia.html>

<https://www.yourdictionary.com/about/websters-new-world-college-dictionary.html>

Hussain, Dilwar. "The Holy Grail of Muslim in Western Europe: Representation and their Relationship with the State," dalam John L. Esposito & Francois Burgat (ed.) *Modernizing Islam: Religion in Public Sphere in Eroppe and the Middle East*. London: C. Hurst & Co., 2003.

Khafaji, Muhammad 'Abd al-Mun'im. *Al-Azhar fi Alf 'Amm*. Beirut: 'Alam al-Kutub, 1988.

Khalil, Imam al-Din. *Islamization of Knowledge: A Methodology*. London: IIIT, 1991.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Al-Qur'an, Realitas Sosial dan Limbo Sejarah*. Bandung: Pustaka, 1985.

Madjid, Nurcholish. *The True Face of Islam: Essays on Islam and Modernity in Indonesia*. Jakarta: Voice Center Indonesia, 2003.

Masalha, Nur. *Imperial Israel and the Palestinians: The Politics of Expansion*. London: Pluto Press, 2000.

Momen, Mojan. *An Introduction to Shi'i Islam: The History and Doctrines of Twelver Shi'ism*. New Haven and London: Yale University Press, 1985.

Nasr, Seyyed Hossein. *Science and Civilization in Islam*. Cambridge: The Islamic Texts Society, 1987.

Qutb, Muhammad. *Islam the Misunderstood Religion*. Delhi: The Board of Islamic Publications, 1968.

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1984.

Rahman, Fazlur. *Membuka Pintu Ijtihad*, terjemahan Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 1983.

SEJARAH ISLAM MODERN: Agama dalam Negosiasi Historis Sejak Abad XIX

- Ramadan, Tariq. *To Be a European Muslim*. Leicester: Islamic Foundation, 1999.
- Rashed, Roshdi. *Encyclopedia of the History of Arabic Science*. London: Routledge, 1996.
- Sardar, Ziauddin. *Masa Depan Islam*, terjemahan Rahmani Astuti. Bandung: Pustaka, 1987.
- Tucker, Spencer C. *The Encyclopedia of the Arab-Israeli Conflict*. Santa Barbara, CA: ABC CLIO, Inc., 2008.
- Voll, John O. "Renewal and Reform in Islamic History," dalam John L. Esposito (ed.) *Voices of Resurgent Islam*. New York: Oxford University Press, 1983.
- Voll, John Obert. *Islam: Continuity and Change in the Modern World*. Boulder: Westview Press, 1982.



INDEKS

A

- abad pertengahan, 17, 60, 140, 141
abaya, 45, 75
Abd al-Fattâh al-Sîsî, 46, 50
Abd al-Rahmân al-Shûfî, 9
Abdul Aziz al-Rantisi, 155
Abdul Karim Soroush, 124
Abdurrahman Wahid, 72
Abdus Salam, 72
Abû 'Alî al-Husayn ibn Sînâ, 8
Abû 'Utsmân al-Jâhizh, 9
Abu al-A'la al-Mawdudi, 125, 137
Abû al-A'lâ' al-Ma'arrî, 9
Abû al-Aswad al-Du'alî, 9
Abu al-Hasan 'Ali al-Nadwi, 125
Abû al-Hasan al-Asy'arî, 8
Abû al-Husayn Muslim al-Hajjâj, 3
Abû al-Qâsim al-Firdawsî, 59
Abû al-Qâsim al-Qusyayrî, 8
Abû al-Qâsim al-Zahrawî, 9
Abû Bakr al-Shiddîq, 2, 5
Abû Hâmid al-Ghazâlî, 8
Abû Hanîfah, 8
Abû Hanîfah dan Muhammad ibn Idris al-Syâfi'î, 8
Abû Nashr al-Fârâbî, 8
Abû Nuwâs, 9
Abû Yûsuf al-Kindî, 8
Abul A'la al-Mawdudi, 68
Aceh Darussalam, 10, 12
Afghanistan, 2, 21, 27, 28, 32, 35, 48, 53, 66, 69, 92, 135
Afrika, 4, 7, 11, 20, 21, 22, 27, 31, 40, 41, 47, 60, 73, 74, 84, 91, 94, 96, 102, 105, 106, 107, 108, 147
Age of Discovery, 121
Ahmad Baqi, 146
Ahmad ibn Hanbal, 42
Ahmed Hossam Hussein, 147
Akhlaq, 4
Al Jam'iyatul Washliyah, 74
Al-'Urwah al-Wutsqâ, 142
Al-Barakah International PLC, 145
al-Barakah Turkish Finance House, 145
Al-Dhâkhirah, 142
Al-Fatâwâ, 142
Algeria, 22, 32, 35, 106
Al-Hilâl, 142
Ali Abdullah Saleh, 161

- Alî ibn Abî Thâlib, 2, 5, 6, 41
 Al-Irsyad, 74
 Aljazair, 28, 138
Al-Jihâd fî al-Islâm (Mawdudi), 68
 All India Muslim League, 66, 67
 Allah swt., 2, 14, 116, 117, 118, 169, 171
Al-Lisân, 142
 Almaty, 144
Al-Munîr, 142
Al-Nadwah, 142
 Alquran, 2, 3, 4, 7, 8, 48, 56, 68, 71, 75, 83, 109, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 139, 142, 151, 170, 171
 al-Rajhi Co. for Islamic Investment, 145
Al-Waqâ'i' al-Mishriyyah, 142
 Amaiya Zafar, 148
 Amerika Serikat, 27, 36, 44, 45, 57, 81, 87, 92, 97, 104, 106, 107, 112, 113, 137, 140, 146, 147, 148, 153, 154, 155, 156, 161
 Amin Abdullah, 124
 Amir Khan, 146
 Amna al-Haddad, 148
 Anatolia, 4, 12, 27, 60, 108
 Andalusia, 7, 92, 108, 122
 Angkatan Belia Islam Malaysia, 137
 Ankara, 60, 64
 Antalya, 60
 Anwar Ibrahim, 137
 Anwar Sadat, 47, 49
 Arab Spring, 158, 161, 162
 Arabia, 2, 6, 21, 27, 28, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 56, 63, 65, 70, 129, 141, 143, 144, 151, 159, 162
 Arkansas, 107
 Armenia, 6, 53, 54, 60, 98
 Asia, 11, 12, 22, 31, 34, 46, 47, 53, 60, 63, 64, 65, 66, 70, 72, 73, 83, 85, 87, 88, 91, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 122
 Astronomi, 9
 Asyuth, 46, 47
 Atlanta, 148
 Australia, 31, 72, 96, 107, 112, 148
 Austria, 94, 100, 104, 112
Âyatullâh, 55
 Ayatullah Ali Khamenei, 53, 56
 Ayatullah Ruhullah Khumayni, 53
 Azarbayjan, 27, 53
 Azyumardi Azra, 119, 124, 130
- B**
 B.J. Habibie, 72, 77
 Badan Tinju Amerika, 148
 Badi'uzzaman Said Nursi, 61
 Baghdad, 3, 6, 11, 12, 41
 Bahama, 145
 Bahrain, 33, 38, 145, 162
Bal-i-Jibril (Iqbal), 71
 Balochi, 66
 Baluchi, 53
 Bandung, 9, 48, 81, 83, 119, 120, 127, 130, 131, 132, 135
 Bangkok, 103
 Bangladesh, 29, 33, 35, 39, 40, 66, 68, 101, 105, 141, 145, 163, 164
 Banjar, 72
 Banten, 72

- Barack Obama, 148, 155
- Barat, 12, 17, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 34, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 57, 58, 62, 63, 65, 68, 70, 81, 82, 83, 92, 100, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 164, 165, 166, 167, 168, 170
- Barcelona, 110
- Barisan Nasional, 86
- Bashar al-Asad, 159
- Bassam Tibi, 124
- Batak, 72
- batubara, 57
- Bayn al-Qashrayn* (Mahfuzh), 52
- Bediuzzaman Said Nursi, 125, 126
- Belanda, 20, 22, 24, 27, 73, 76, 82, 94, 104, 112, 113, 147, 165
- Belarusia, 102
- Belgia, 92, 94, 100, 104, 105, 147
- Benazir Butho, 66
- Benghazi, 160
- Berlin, 110
- Betawi, 72
- bid'ah*, 11
- Bosnia, 36, 93, 147
- Brazil, 98, 148
- British East India Company (BEIC), 22
- Brunei Darussalam, 22, 26, 27, 29, 91
- Brussels, 110
- budaya, 3, 7, 24, 45, 46, 51, 53, 58, 64, 65, 82, 83, 85, 88, 109, 111, 112, 124, 128, 146, 148, 149
- Budha, 73, 74, 82, 84, 85, 91, 102, 103, 106, 107, 163
- Bugis, 72
- Bulgaria, 38, 60, 94
- Burkina Faso, 33, 35
- burqa'*, 75
- Buya Hamka, 83
- C**
- Caliphate and Kingship* (Mawdudi), 68
- Cambridge University, 66
- Cappadocia, 64
- Casablanca, 160
- Cat Stevens, 146
- Champion League, 147
- Choghâ Zanbil, 59
- Choudry Rahmat Ali, 66
- Cina, 2, 20, 34, 35, 70, 81, 84, 86, 87, 88, 91, 96, 100, 101, 102, 104
- Clifford Geerts, 75
- D**
- Damaskus, 41, 159
- Daraa, 159
- Dar-al-Mal al-Islami, 145
- Dataran Tinggi Golan, 153
- Deepawali, 85
- Deklarasi Balfour, 151
- Democratic Action Party, 86
- Denmark, 96, 104, 145, 165
- Dewan Nasional Palestina, 154
- Di Bawah Lindungan Ka'bah* (Hamka), 83

- Dinasti Abbasiyyah, 3, 6, 9, 11, 41, 125
- Dinasti Delhi, 10, 12
- Dinasti Mariniyah, 11
- Dinasti Mughal, 10, 12
- Dinasti Pahlavi, 21, 53
- Dinasti Safawiyah, 11
- Dinasti Timuriyah, 11
- Dinasti Turki Usmani, 12, 41, 60
- Dinasti Umayyah, 3, 6, 26, 41
- Dinasti Waththasiyah, 11
- Djibouti, 22, 32, 33
- Dolce & Gabbana, 149
- Donlad Trump, 156
- Dubai Islamic Bank, 145
- Dunia Islam, 11, 16, 17, 25, 26, 27, 48, 52, 116, 119, 121, 124, 125, 128, 144, 169
- Dunia Melayu, 26, 91
- E**
- Edin Dzeko, 147
- ekonomi, 2, 12, 19, 22, 23, 24, 34, 39, 44, 45, 51, 55, 57, 63, 64, 69, 70, 76, 80, 81, 87, 92, 102, 109, 112, 118, 124, 126, 127, 128, 131, 132, 142, 143, 144, 154, 159, 170
- Ekonomi Islam, 68, 142, 143, 144
- eksploitasi, 19, 23, 25, 121
- El Surayya, 83
- Era Reformasi, 77, 78, 79
- Eropa, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 47, 60, 63, 64, 65, 69, 73, 74, 84, 88, 92, 102, 104, 105, 106, 108, 112, 114, 115, 118, 121, 122, 134, 136, 139, 151, 161, 165, 166, 167
- Estonia, 98, 102
- Ethiopia, 34, 35, 93
- Etiopia, 100
- European Islamophobia Report 2017*, 166
- Evangelis, 104
- F**
- Farîd al-Dîn al-Attâr, 59
- fashion*, 75, 148, 149
- Fatah, 155, 156
- Fazlur Rahman, 13, 71, 124, 131
- Fikih, 4, 8, 10, 55, 67
- Filipina, 26, 27, 36, 91, 94, 100, 103, 104
- filsafat, 8, 141
- Finlandia, 97, 102
- First International Conference on Islamic Economics, 143
- FIS, 138
- Fisrt Principles of Islamic Economics* (Mawdudi), 68
- Franc Ribery, 147
- From MTV to Mecca* (Backer), 149
- Front Islamique Salut, 138
- Front Pembebasan Muslim Moro, 104
- G**
- Galilee, 152
- Gamal Abdel Nasser, 47, 49, 50, 138, 153
- Gambia, 29, 33, 36
- gamis*, 75

- Gansu, 91
 gas, 39, 44, 45, 46, 57, 58, 63, 70, 81, 87
 Gaza, 152, 154, 155, 156
 Gaziantep, 60
 Georgia, 60, 94
Gerakan Islam Abad XX (Muthahhari), 56
 Gilaki, 53
 Golden Boot, 147
 Golongan Karya, 78, 79
 Gurun Nejed, 152
- H**
- H&M, 149
 Hadian Nobel, 65
 Hadis, 3, 4, 7, 8, 10, 48, 109, 116, 118, 119, 124, 125, 128, 129, 130, 170
 Hagia Sophia, 64
 Haifa, 152
 haji, 3, 4, 43, 45, 75, 83
 Hakeem Olajuwon, 146
Hal-hak Wanita dalam Islam (Muthahhari), 56
 Hamas, 155, 156
 Hamburg, 149
 Harun Nasution, 124
 Hasan al-Banna, 125, 154
 Hasan al-Bannâ, 48
 Hasan al-Thurabi, 125
 Hasan Salihamidzik, 147
 Hassan Rouhani, 53
 Hasyim Rahman, 146
hâsyiyah, 13
 Hattusa, 64
 Hauthi, 161, 162
 hijab, 45, 61, 106, 147, 148, 165
 Hijaz, 6, 21, 41, 42, 119, 130
 Hijrah, 2, 4, 5, 138
 Hindu, 42, 66, 67, 73, 74, 82, 84, 85, 101, 105, 107, 129, 157
 Hizb al-Hurriyyah wa al-'Adâlah, 138
 Homs, 159
 Hongaria, 108
huffâzh, 7
 Hui, 91, 102
 Husayn ibn 'Alî, 58
 Husni Mubarak, 47, 50, 51
- I**
- Iberia, 108
 Ibn 'Abbâs, 8
 Ibn Jâbir al-Battânî, 9
 Ibn Jarîr al-Thabarî, 8
 Ibn Khaldun, 89, 169
 Ibn Khaldun International Institute of Advanced Research, 89
 Ibn Miskawayh, 8
 Ibn Sahl al-Balkhî, 9
 Ibn Taymiyah, 42
 Ibrahim Afellay, 147
 Ibrâhîm al-Syajarî, 9
 Ibrâhîm al-Zarqâlî, 9
 Idul Adha, 59, 74
 Idul Fitri, 43, 59, 74, 85
 Ifriqiyya, 6
 Iglesia ni Cristo, 104
 ijtihad, 10, 11, 130, 131

- Ikhwân al-Muslimîn, 48, 49, 50, 137, 138, 154, 159
- ilmu pengetahuan, 2, 8, 15, 19, 23, 52, 65, 113, 118, 126, 128, 131, 139, 140, 141, 142
- Imam, 3, 8, 54, 55, 56, 59, 140
- imigran, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 151, 165
- imperialisme, 17, 18, 19, 20
- Imran Khan, 66, 146
- India, 4, 10, 12, 21, 22, 24, 25, 27, 34, 35, 41, 42, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 83, 84, 85, 86, 88, 94, 100, 101, 105, 107, 142, 157, 163
- Indonesia, 10, 12, 13, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 39, 40, 43, 56, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 91, 101, 104, 107, 119, 130, 136, 137, 140, 141, 142, 144, 146, 149
- Majelis Ulama Indonesia, 74
- Inggris, 20, 21, 24, 26, 36, 44, 47, 48, 49, 53, 66, 67, 68, 71, 72, 82, 84, 88, 92, 94, 101, 105, 107, 112, 113, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 155, 157, 158, 163, 165
- Institut Agama Islam Negeri, 141
- International Centre for Research in Islamic Economics, 143
- International Institute of Islamic Thought and Civilisation, 89, 140
- International Islamic Bank, 145
- International Islamic University, 88
- Intifâdhah*, 153, 154
- Irak, 6, 21, 27, 29, 32, 35, 40, 44, 53, 54, 55, 60, 92, 105, 151, 152, 154, 161
- Iran, 27, 28, 32, 35, 39, 44, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 66, 135, 137, 145, 146, 162
- Irlandia, 97, 105
- Isfahan, 6, 53
- ishlâh*, 170
- ISIS, 105, 109, 160, 161
- Iskandariyah, 46, 50
- Islam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 158, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
- Islam and Modernity* (Rahman), 13, 71
- Islam dan Filsafat Sains* (al-Attas), 89
- Islam dan Sekularisme* (al-Attas), 89
- Islam Modern, 1, 14

- Islamic Banking System, 145
 Islamic Development Bank, 144
 Islamic Investment Company, 145
 Islamisasi Pengetahuan, 140, 141, 142
 Islamofobia, 111, 164, 165, 166, 167
 Ismail Raji al-Faruqi, 140
 Ismailiyah, 46
 Isra' Mi'raj, 85
 Israel, 37, 44, 47, 49, 51, 54, 63, 94, 100, 150, 152, 153, 154, 155, 156
 Istanbul, 41, 60, 64, 65, 151
 Italia, 20, 22, 96, 105
 Ittihadiyah, 74
- J**
 Jaffa, 152
Jâhiliyyat al-Qarn al-'Isyrîn (Qutb), 50
 Jakarta, 13, 72, 81, 120, 142
 Jamâ'ah al-Jihâd, 137
 Jamâ'ah Islâmiyyah, 137
 Jamaluddin al-Afghani, 48, 124
 Jambi, 84
 Jammu-Kashmir, 69, 157, 158
Javid Namah (Iqbal), 71
 Jawa, 72, 74, 76, 80, 81, 83
 Jawahir Roble, 147
 Jeddah, 40, 41, 140, 143, 144
 Jepang, 51, 73, 76, 81, 87, 98, 149
 Jerman, 20, 36, 58, 92, 94, 104, 105, 112, 147, 151
 jilbab, 75
 Joko Widodo, 72
- Jordan, 21, 27, 28, 32, 36, 40, 145, 152, 153, 154, 162
- K**
kaftan, 75
 Kalam, 4, 8, 10, 55, 67, 124
 Kalimantan, 80, 81, 84
 Kamboja, 103, 104
 Kanada, 96, 100, 106
Kara Kitap (Pamuk), 65
 Karbala, 58
 Kareem Abdul Jabbar, 146
 Kareem Benzema, 147
 Kashmir, 66, 92, 157, 158
 Katolik, 42, 91, 104, 106, 107
 Kazakhs, 102
 Kazakhstan, 29, 33, 35, 38, 101, 102, 144
 kebudayaan, 23, 25, 43, 51, 52, 59, 61, 64, 70, 82, 88, 115, 118, 126, 129, 131, 132, 146, 165
 Kedokteran, 9
 kekuasaan, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 41, 42, 44, 47, 49, 53, 57, 61, 69, 76, 77, 92, 103, 108, 115, 127, 132, 133, 137, 151, 160, 162, 163
 kelapa sawit, 80, 87
 Kemal Attaturk, 60, 61
 kemandekan, 10, 13, 14, 17, 115, 116, 118, 121, 123, 128, 129, 131, 133, 139, 149, 156, 169, 171
 kemiskinan, 109
 Kenneth Faried, 146
 Kerajaan Arakan, 163

- Kerajaan Burma, 163
 khalifah, 5, 6, 7
khilâfah, 26, 41, 125, 133
Khilâfah Rasyîdah, 5, 6, 151
 Khumaini, 54
 Khurasan, 6
 Khwarizm, 6
 King Abdulaziz University, 140, 143
 Kirgistan, 29, 33, 101
 Kirman, 53
 Kolo Toure, 147
 kolonialisme, 17, 18, 19, 20, 21, 82, 115, 121, 132
 Komisi Pemberantasan Korupsi, 78
 Komisi Yudisial, 77
 konflik, 23, 38, 39, 44, 68, 92, 109, 114, 138, 152, 155, 156, 158, 160, 161, 162
 Kong Hu Cu, 73, 74, 91
Konsep Pendidikan dalam Islam (al-Attas), 89
 Konstantinopel, 108
 Konya, 60
 Koptik, 47, 52
 Korea Selatan, 58, 87, 97
 Korea Utara, 98, 101
 Kosovo, 33, 36
 Kristen, 25, 42, 47, 50, 52, 54, 60, 73, 74, 78, 84, 85, 92, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 122
 Kristiane Backer, 149
 Kroasia, 96, 108
 Kuala Lumpur, 83, 86, 88, 141, 144
 Kurdi, 53, 54, 60
kuttab, 71
Kutub al-Sittah, 129
Kutub al-Tis'ah, 129
 Kuwait, 21, 28, 33, 34, 36, 38, 40, 53, 145, 162
 Kyrgis, 102
- L**
- Laos, 99, 103, 104
 Lathvia, 102
 Latin, 82
 Laut Aegea, 60
 Laut Arab, 66, 101
 Laut Fasifik, 103
 Laut Hitam, 60
 Laut India, 101
 Laut Irlandia, 105
 Laut Merah, 20, 47
 Laut Tengah, 20, 21, 25, 47, 60, 105
 Laut Utara, 105
 Lautan Hindia, 20, 84
 Liaquat Ali Khan, 67
 Libanon, 25, 28, 33, 36, 55, 146, 151, 152, 153, 154, 162
 Libyan National Transitional Council, 161
 literatur, 13, 59, 143
 Lithuania, 98, 102
 LNTC, 161
 London, 1, 9, 54, 110, 111, 113, 114, 122, 140, 150
 Luri, 53
 Luxembourg, 145
- M**
- Ma'âlim fi al-Tharîq* (Qutb), 50
 Macedonia, 93, 100

- Madinah, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 40, 41, 42, 43, 46, 141
- madrasah*, 55, 61, 67, 71, 140
- Madura, 72, 76
- Mahathir Mohammad, 86
- Maher Zein, 146
- Mahkamah Konstitusi, 78
- Majlis Tinggi Nasional, 62
- Major Themes of the Qur'an* (Rahman), 71
- Makkah, 2, 3, 4, 21, 40, 41, 42, 43, 169
- Malaka, 27, 84, 86
- Malaysia, 22, 26, 27, 28, 33, 35, 38, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 103, 105, 137, 141, 144, 145
- Malaysian Chinese Association, 86
- Malaysian Indian Congress, 86
- Marj'-'e Taqlid*, 55
- Maroko, 22, 27, 28, 106, 144, 147, 160, 162
- Marouane Chamakh, 147
- Marseille, 106, 110
- Masjid Al-Aqsha, 154
- Masjid Nabawi, 43
- Masjidil Haram, 43
- Masyumi, 78, 137
- Matematika, 8
- Mathloul Anwar, 74
- Mauritania, 27, 29, 32, 36, 135
- Mawlid Nabi, 59, 74, 85
- mayoritas Muslim, 65
- mazhab, 10, 42, 74, 85, 130
- Medan, 83
- Megawati Soekarnoputri, 72
- Meksiko, 106
- Melayu, 27, 72, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 103, 104
- Melbourne, 107
- melting pot*, 106
- Menteri Besar, 86
- Mesir, 2, 4, 6, 7, 8, 21, 25, 27, 28, 33, 34, 35, 39, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 118, 121, 122, 123, 137, 138, 142, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 159, 162
- Mesut Ozil, 147
- Mike Tyson, 146
- Minang, 72
- Mindanao, 104
- minoritas Muslim, 90, 91, 92, 102, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 130
- minyak, 39, 44, 45, 46, 51, 57, 58, 63, 70, 80, 81, 87
- modernisasi, 1, 13, 16, 21, 44, 51, 64, 69, 119, 120, 122, 170
- Mohamed Bouazizi, 158
- Mohamed Salah, 147
- Mohammed Arkoun, 124, 126
- Mohd Najib, 86
- Mongol, 9, 10
- Mongolia, 95, 101, 102
- Montenegro, 94, 100
- Morouane Fellaini, 147
- Moskow, 103
- Mosul, 6
- MTV Europe, 149
- Muammar Kadafi, 160, 161
- Muhammad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 66, 67, 71, 83, 84,

- 88, 109, 124, 125, 126, 134, 136, 138, 146, 147, 150, 159, 160, 169, 171
- Muhammad ‘Ali ibn al-Sanusi, 125
- Muhammad al-Hassân ibn al-Haitsam, 9
- Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhâb, 41
- Muhammad ibn al-Thayyib al-Baqillâni, 8
- Muhammad ibn Ismâ‘îl al-Bukhârî, 3
- Muhammad ibn Sa‘ûd, 41
- Muhammad ibn Zakariyyâ al-Râzî, 9
- Muhammadiyah, 74
- MUI, 74
- mujtahid, 11
- mullah*, 55, 58, 67
- murîd*, 67
- Murtadhâ Mutahharî, 56
- Muslim Abangan, 75
- Muslim Santri, 75
- Mustafa Kemal Attaturk, 60, 136
- Myanmar, 36, 96, 101, 103, 163, 164
- N**
- Nahdlatul Ulama, 74, 78
- Nahdlatul Wathan, 74
- Najib Mahfuzh, 52
- Napoleon Bonaparte, 121, 122
- Naquib al-Attas, 88
- Narathiwat, 103
- nasionalisme, 73
- Nasyida Ria, 83
- Natal, 52, 85
- National Iran Oil Company (NIOC), 57
- NATO, 63, 161
- Nawal el-Saadawi, 52
- negara, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 143, 144, 145, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 170
- neo-modernisme, 123
- neo-revivalisme, 123
- Nepal, 37, 96, 101
- New Jersey, 107
- New York, 107, 110, 129, 150, 167
- Nice, 110
- Nigeria, 21, 29, 34, 35, 93, 100
- Nike, 148
- Nil, 47, 51
- Ningxia, 91
- niqab*, 45, 75
- Nissa Sabyan, 146
- Nizar Carr, 147
- NKRI, 76
- Norwegia, 96, 100
- nuklir, 58, 69
- Nur Asiah Jamil, 146
- Nurcholish Madjid, 13, 124

Nusantara, 129

O

Ohio, 110

OKI, 28, 133, 144

Olimpiade 2016, 148

Oman, 21, 27, 29, 33, 36, 38, 40

Optik, 9

Orde Baru, 73, 77, 78, 79

Orde Lama, 73

Organisasi Kerjasama Islam, 28, 133, 144

Orhan Pamuk, 65

Orlando, 110

Otoritas Palestina, 154, 155

Oxford, 72, 122, 129

P

Pahang, 83, 86

Pakatan Harapan, 86

Pakistan, 27, 28, 32, 35, 39, 53, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 101, 105, 113, 135, 137, 141, 146, 147, 157

Palestina, 2, 4, 8, 25, 26, 28, 32, 36, 92, 140, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156

PAN, 79

Pancasila, 72, 136

Pantai Gading, 21, 29, 147

Papua, 80, 81, 98, 107

Paris, 106, 110, 155

Partai Amanat Nasional, 79, 80, 137

Partai Bulan Bintang, 79

Partai Demokrasi Indonesia, 78, 79

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 79

Partai Demokrat, 79, 80

Partai Gerindra, 79

Partai Golkar, 79

Partai Hanura, 79

partai Islam, 62

Partai Keadilan, 61, 62, 79, 137

Partai Keadilan dan Pembangunan, 61, 62

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, 79

Partai Keadilan Sejahtera, 79

Partai Kebangkitan Bangsa, 79, 137

Partai Kebebasan dan Keadilan, 50, 138, 159

Partai Komunis, 76, 78

Partai Nahdlatul Ummat, 79

Partai Nasdem, 79

Partai Nasional Indonesia, 78

Partai Perindo, 80

Partai Persatuan Pembangunan, 78, 79, 80, 137

partai politik, 68, 77, 79, 86, 131, 137

Parti Keadilan Rakyat, 86

Pashtun, 66

Pattani, 103

Payam-i-Mashriq (Iqbal), 71

PBB, 59, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 161, 162, 164

PDI, 79

Pembela Islam, 55, 142

pemberontakan, 60, 68, 76, 151, 161, 162

- pendidikan, 13, 24, 46, 48, 52, 55, 65, 67, 70, 88, 89, 109, 111, 113, 124, 127, 129, 131, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 154, 167, 170
- pendudukan, 18
- penelitian, 8, 12, 72, 110, 121, 122, 123, 129, 141, 143, 144, 150
- penjajahan, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 47, 68, 71, 73, 84, 104, 108, 115, 121, 122, 123, 125, 133, 140, 156, 157, 163, 169
- peradaban, 1, 9, 17, 53, 70, 89, 100, 108, 109, 115, 116, 118, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 131, 139, 141, 156, 169, 170, 171, 172
- Perang Dunia, 45, 73, 76, 104, 107, 151, 163
- Perang Enam Hari, 153
- Perang Salib, 108
- perang saudara, 5, 160, 161
- perdagangan, 22, 23, 58, 65, 70, 73, 74, 81, 84, 122, 145
- Perdana Menteri, 27, 49, 57, 62, 66, 67, 83, 84, 85, 86, 137, 147, 155, 160
- periode klasik, 1, 14
- periode pertengahan, 1, 9, 10, 12, 14, 115, 126, 151
- Perjanjian Oslo, 154
- Persepolis, 59
- Persia, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 21, 22, 40, 41, 42, 53, 54, 57, 58, 59, 65, 70, 71, 101
- Perth, 107
- Perti, 74
- Petronas, 87
- Piagam Madinah, 5
- pîr*, 67
- PLO, 153, 154, 155
- Polandia, 98, 104, 165
- politik, 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 23, 24, 26, 31, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 74, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 91, 103, 112, 113, 118, 119, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 151, 152, 154, 155, 160, 164, 166, 170
- Port Said, 46, 50
- Portugis, 20, 27, 84
- PPP, 78, 79
- Prancis, 20, 22, 36, 47, 54, 92, 94, 100, 104, 105, 106, 112, 122, 123, 134, 147, 151, 153, 155
- Premier League, 147
- Presiden, 49, 50, 51, 57, 62, 66, 67, 72, 76, 77
- Proton, 87
- Pulau Pinang, 84, 86
- Punjab, 66, 68, 71, 146
- Q**
- Qashr al-Syawq* (Mahfuzh), 52
- Qatar, 29, 33, 38, 39, 40, 145
- Qinghai, 91
- Qum, 53
- R**
- Rabat, 28, 144, 160

- Raqqa, 160
 Rasheed Wallace, 146
 Rasyid Ridha, 48
Rawdhah al-Madâris, 142
 Recep Tayyip Erdogan, 60, 61
Reconquista, 92, 122
Renaissance of Sciences in Islamic Countries (Abdus Salam), 72
 Republik Cheko, 104
 Republik Islam, 27, 54, 135
 Resolusi, 154, 155, 166
 revivalisme, 123, 125
 Reza Syah Pahlevi, 137
 Rhoma Irama, 146
 Riau, 81, 84
 Rifa'ah al-Thahthawi, 124
 Rio De Janeiro, 148
 Riyadh, 5, 40, 41, 42
 Rohingya, 26, 163, 164
 Romawi, 25, 64
 Rusia, 20, 22, 34, 35, 58, 94, 101, 102, 103
- S**
- Sabah, 84, 86, 87
 Sabyan Gambus, 83
 Sadiq Khan, 113
 Safranbolu, 64
 Sami Khedira, 147
 Sami Yusuf, 146
 Samir Nasri, 147
 Samudera Atlantik, 20, 105, 106
 Samudera Pasifik, 106, 107
 Samudra Pasai, 10
 Sarawak, 84, 86, 87
 Sastra, 9
 Saudi Arabia, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
 Sayyid Ahmad Barelwi, 125
 Sayyid Ahmad Khan, 124
 Sayyid Amir Ali, 124
 Sayyid Quthb, 50, 125
 Selandia Baru, 97, 147
 Selat Gibraltar, 21
 Selat Inggris, 105
 Semenanjung Sinai, 153
 Sibawayh, 9
Sick Man of Europe, 122, 151
 Sijistan, 6
silsilah, 67
 Sind, 6, 66
 Sindhi, 66
 Singapura, 26, 27, 81, 84, 87, 91, 94
 Sisilia, 108
 Skandinavia, 112
 Skotlandia, 105
 Slovakia, 98, 108
 Soeharto, 72, 73, 77
 Soekarno, 72, 73, 76, 77
 Solomon Kalou, 147
 Somalia, 21, 22, 28, 32, 35, 147
 Songkhla, 103
 Sony Williams, 147
 Spanyol, 20, 21, 38, 92, 96, 104, 108, 165, 166
 St. Petersburg, 103
 Stephanie Kurlow, 148
 Stockholm, 110
 Sudan, 28, 33, 35, 47, 137, 162

- Suez, 50, 153
 Sumatra, 74
 Sunda, 72
 Sunni, 42, 47, 54, 55, 67, 74
 Surabaya, 81
 Susilo Bambang Yodhoyono, 72
 Swedia, 94, 100, 146, 165
 Swiss, 58, 94, 104, 105, 112, 145
 Syafi'i Ma'arif, 119, 120, 124
syarh, 13
 Sydney, 107
 Syekh Ahmad Yassin, 155
 Syī'ah, 54, 58, 59
 Syria, 2, 4, 6, 7, 8, 22, 25, 29, 33, 35, 49, 53, 60, 105, 151, 152, 153, 154, 159, 160, 161, 162
- T**
- Tabrîz, 59
Tafhîm al-Qur'ân (Mawdudi), 68
Tafsir Al-Azhar (Hamka), 83
Tafsîr al-Manâr (Ridha), 48
Tafsîr al-Mîzân (al-Thabatba'i), 56
Tahdzîb al-Akhlâq, 142
Tajdîd, 170
 Tajik, 102
 Tajikistan, 29, 32, 33, 36
tanqîh, 170
Tarjumân al-Qur'ân, 142
 Tasawuf, 4, 8, 43, 67, 83
 Tatar, 60
 teknologi, 2, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 22, 34, 44, 46, 48, 58, 64, 65, 80, 87, 118, 121, 126, 127, 130, 131, 139, 140, 141, 170
 Tel Afif, 152
 teluk Bengal, 101
Tenggelamnya Kapal Van der Weijk (Hamka), 83
 Tepi Barat, 154
 teroris, 50, 110, 156, 167
 terorisme, 111, 113, 165
 Thaha Husain, 124
 Thailand, 26, 36, 81, 87, 91, 94, 103
 Thaipusam, 85
 Timur Tengah, 21, 22, 27, 31, 34, 39, 40, 44, 51, 57, 59, 60, 63, 64, 74, 75, 84, 85, 102, 105, 107, 119, 130, 146, 151, 154
 Transjordan, 151
Trilogi Kairo (Mahfuzh), 52
 Tun Abdur Razak, 84
 Tun Hussein Onn, 84
 Tunisia, 22, 28, 32, 35, 158, 159, 162
 Tunku Abdul Rahman, 84
 Turki, 7, 12, 21, 27, 28, 32, 35, 38, 39, 41, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 105, 108, 122, 136, 143, 151
 Turki Usmani, 12, 60, 108, 122, 136, 151
 Turkmenistan, 27, 29, 33, 36, 38, 53
- U**
- Uighur, 102
 Ukraina, 97, 102, 108
 ulama, 10, 52, 55, 56, 61
 Ulûm al-Qur'ân, 7, 8
 Umar al-Khayyâm, 8, 9
 Umar ibn al-Khaththâb, 2, 5, 47

- umat Islam, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 29, 30, 31, 34, 39, 40, 43, 48, 55, 59, 61, 67, 75, 79, 82, 83, 85, 90, 91, 92, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 139, 141, 142, 149, 150, 152, 158, 164, 165, 170
- Umm Kultsum, 146
- UMNO, 86
- UNESCO, 59, 64, 155
- Uni Emirat Arab, 29, 33, 34, 36, 38, 40, 58, 70, 148, 162
- Uni Soviet, 26, 34, 102, 154
- UNICEF, 164
- Unification of Fundamental Forces* (Abdus Salam), 72
- Uniqlo, 149
- Universitas Agha Khan, 71
- Universitas Al-Azhar, 47, 48
- Universitas Islam, 14, 71, 140, 141
- Universitas Islam Internasional, 71, 141
- Universitas Karachi, 71
- Universitas Punjab, 71
- Universitas Quaid-i-Azam, 71
- Urdu, 66, 71
- Utsmân ibn 'Affân, 2, 3, 5, 7
- Uzair Cassiem, 147
- Uzbek, 102
- V**
- Velâyat al-Faqîh*, 56
- Vereenidge Oostindische Compagnie (VOC), 22
- Vereenigde Oostindische Compagnie, 73
- Vietnam, 97, 101, 104
- VOC, 22, 73
- W**
- Wahabiyyah, 41, 42, 45, 56, 129
- wahyu, 1, 2, 3
- Waisak, 85
- Wales, 105
- World Trade Center, 167
- X**
- Xinjiang, 91
- Y**
- Yahudi, 5, 54, 60, 106, 107, 151, 152, 155, 156
- Yala, 103
- Yaman, 4, 6, 21, 29, 32, 35, 40, 55, 161, 162
- Yâqût al-Musta'shimî, 9
- Yasser Arafat, 153, 154, 155
- Yatsrib, 2
- Yaya Toure, 147
- Yekaterinburg, 103
- Yerusalem, 150, 152, 154, 156
- Yordania, 2, 4
- Yoruk, 60
- Yunani, 8, 60, 94
- Yusuf Islam, 146
- Z**

SEJARAH ISLAM MODERN: Agama dalam Negosiasi Historis Sejak Abad XIX

Zahra Lari, 148

Ziauddin Sardar, 124, 127

Zinedine Zidane, 147

Zulfikar Ali Butho, 66

